

PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023

PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

rembangkab.go.id

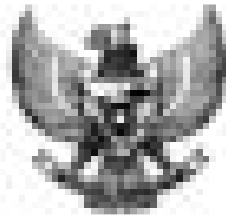




**PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023**



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan perkembangan keadaan yang meliputi kondisi keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022 harus digunakan untuk tahun 2023;
 - b. bahwa dengan adanya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang penyesuaian RKPD Tahun 2023.
 - (2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - b. rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.
 - (3) Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan perubahan RKPD Tahun 2023.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. perubahan narasi RKPD Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. perubahan rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan narasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB I PENDAHULUAN**
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen perubahan RKPD dengan dokumen rencana pembangunan Daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.
- b. **BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2023**
memuat evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan triwulan kedua, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD 2023 sebagai bahan acuan.
- c. **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**
memuat arah kebijakan ekonomi Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- d. **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023.
- e. **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
memuat rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2023 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- f. **BAB VI PENUTUP**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 21



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Dasar Hukum Perencanaan.....	I.2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I.4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I.5
1.5 Sistematika Dokumen Perencanaan RPJPD.....	I.8
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II.1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.17
2.1.3 Aspek Pelaksanaan Urusan.....	II.29
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II.103
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja RPJPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II.105
2.2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Mako Daerah Tahun 2018-2022.....	II.105
2.2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Daerah sampai dengan Trensilasi II Tahun 2021.....	II.107
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II.187
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II.187
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III.1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022.....	III.1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III.7
3.2.1 Prinsip Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III.7
3.2.2 Arah Kebijakan Pengendalian Keuangan.....	III.9
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV.1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV.4
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV.4
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	IV.6
4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023.....	IV.10
4.2.4 Peta-Peta Peta RPMD Kabupaten Rembang.....	IV.54
4.2.5 Inisiasi Kebijakan Daerah.....	IV.56
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V.1
5.1 Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional.....	V.1
5.2 Program Berdikarkan Urusan Pemerintahan.....	V.21

5.2.1	Urutan Kerja Pelayanan Dasar	V.21
5.2.2	Urutan Kerja Mutasi Pelayanan Dasar	V.23
5.2.3	Urutan Pribasi	V.26
5.2.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	V.32
5.3	Struktur Organisasi Perolehan RUPD Tahun 2023	V.38

BAB VI. PENUTUP	VI.1
------------------------------	-------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyelidikan Hidrografi Sungai Persekitaran Daerah	1.4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bontolungga	2.1
Gambar 2.2	Peta Jenis Tanah Kabupaten Bontolungga	2.4
Gambar 2.3	Peta Struktur Geologi Kabupaten Bontolungga	2.5
Gambar 2.4	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bontolungga	2.5
Gambar 2.5	Peta Hidrogeologi Kabupaten Bontolungga	2.6
Gambar 2.6	Peta Cebangan Air Tanah Kabupaten Bontolungga	2.7
Gambar 2.7	Peta Curah Hujan Kabupaten Bontolungga	2.7
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bontolungga	2.8
Gambar 2.9	Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bontolungga	2.9
Gambar 2.10	Peta Daerah Basah Bangir Kabupaten Bontolungga	2.11
Gambar 2.11	Peta Daerah Basah Longsor Kabupaten Bontolungga	2.12
Gambar 2.12	Peta Basah Abadi Kabupaten Bontolungga	2.12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2022	0.2
Tabel 2.2	Lima Tahun Menurut Ketinggian dari Persebaran Laut di Kabupaten Rembang	0.3
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022	0.13
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Rembang Tahun 2022	0.14
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	0.16
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kab. Rembang Tahun 2022	0.16
Tabel 2.7	PIHKB Atas Dasar Harga Ekoran (ADHE) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rembang (Jawa Tengah) Tahun 2018-2022	0.19
Tabel 2.8	PIHKB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022	0.20
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan PIHKB Atas Dasar Harga Ekoran (ADHE) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rembang Tahun 2018 - 2022 (%)	0.22
Tabel 2.10	PIHKB Atas Dasar Harga Ekoran Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022	0.24
Tabel 2.11	PIHKB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022	0.24
Tabel 2.12	PIHKB per kapita Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022	0.27
Tabel 2.13	Perbandingan Indikator PIHKB Perkapita Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2022	0.27
Tabel 2.14	Perbandingan Produk Domestik Bruto Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018- 2022	0.30
Tabel 2.15	Data IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	0.31
Tabel 2.16	Indikator Pembentakan IPM Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022	0.32
Tabel 2.17	Perbandingan Indikator Pembentakan IPM Nasional, Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Pati Tahun 2022	0.34
Tabel 2.18	Indikator Makro Urusan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022	0.35
Tabel 2.19	Indikator Makro Urusan Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022	0.36
Tabel 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022	0.37
Tabel 2.21	Jumlah Angkatan Kerja Kab Rembang Tahun 2018-2022	0.38
Tabel 2.22	Data Kelompok Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun	

	2017-2022	11.39
Tabel 2.23	Jumlah modal dan lapangan usaha di Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022	11.39
Tabel 2.24	Capaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2019-2022	11.41
Tabel 2.25	Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022	11.42
Tabel 2.26	Capaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2021	11.43
Tabel 2.27	Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022	11.43
Tabel 2.28	Perkembangan Panjang Saluran Drainase di Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022	11.46
Tabel 2.29	Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Air Baku di Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022	11.46
Tabel 2.30	Data Embung di Kabupaten Bengkang 2018-2022	11.47
Tabel 2.31	Capaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022	11.49
Tabel 2.32	Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang di Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022	11.49
Tabel 2.33	Capaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	11.49
Tabel 2.34	Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Tahun 2018-2022	11.49
Tabel 2.35	Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022	11.50
Tabel 2.36	Luas Kawasan Kumuh dan Pengurangannya di Kabupaten Bengkang Tahun 2017-2020 (Berdasarkan SK Kumuh no 056/1309/2017)	11.50
Tabel 2.37	Luas Kawasan Kumuh dan Pengurangannya di Kabupaten Bengkang Tahun 2021 (Berdasarkan SK Kumuh No 056/2802/2020)	11.51
Tabel 2.38	Realisasi Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertibatan dan Perkembangan Masyarakat Tahun 2018-2022	11.52
Tabel 2.39	Realisasi Kinerja (SPM) Urusan Ketenteraman dan Ketertibatan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkang	11.52
Tabel 2.40	Realisasi Kinerja Pejabat Gubernur, Bupati dan Plab, dan Pejabat Bupati Kabupaten Bengkang	11.53
Tabel 2.41	Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2018-2022	11.54
Tabel 2.42	Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022	11.54
Tabel 2.43	Perkembangan Urusan Ketrampilan di Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022	11.55
Tabel 2.44	UMK dan KHL Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022	11.55
Tabel 2.45	Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perkembangan Anak Tahun 2018-2022	11.55
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Kabupaten Lintas Anak Kabupaten	

	Berhang	0.57
Tabel 2.47	Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.57
Tabel 2.48	Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022—	0.58
Tabel 2.49	Jumlah Penanganan Penenghahan Tanah Tahun 2018- 2022.....	0.58
Tabel 2.50	Data Tindakan Sampah di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.58
Tabel 2.51	Perbandingan Volume Sampah Terangkut dengan Total Tindakan Sampah di Kabupaten Berhang 2022.....	0.59
Tabel 2.52	Perkembangan Penyediaan Sarana Pengumpulan Sampah di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.60
Tabel 2.53	Pengukuran Kualitas Udara di Kabupaten Berhang Tahun 2022	0.60
Tabel 2.54	Pengukuran Kualitas Air di Kabupaten Berhang Tahun 2022.....	0.61
Tabel 2.55	Kontrol Tutupan Lahan di Kabupaten Berhang Tahun 2021.....	0.62
Tabel 2.56	Perkembangan Urusan Kesehatan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.64
Tabel 2.57	Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.65
Tabel 2.58	Indeks Desa Membangun Kab. Berhang Tahun 2018-2022.....	0.65
Tabel 2.59	Perkembangan UKM Kabupaten Berhang Tahun 2018 dan 2022.....	0.66
Tabel 2.60	Kinerja Daerah Urusan Pengabdian Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022.....	0.67
Tabel 2.61	Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.69
Tabel 2.62	Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.69
Tabel 2.63	Edukasi Perlingkungan Jalan di Kabupaten Berhang—	0.70
Tabel 2.64	Data Angkutan Penumpang Urusan Kabupaten Berhang s/d Bln. Juli 2018.....	0.71
Tabel 2.65	Lokasi dan Titik Lahan garbe Topi Jalan Urusan di Kabupaten Berhang Tahun 2021.....	0.72
Tabel 2.66	Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.78
Tabel 2.67	Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.80
Tabel 2.68	Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.82
Tabel 2.69	Perkembangan Pelayanan Keperawatan dan UMMK di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.83
Tabel 2.70	Perkembangan Penanganan Metal di Kabupaten Berhang Tahun 2018-2022.....	0.84

Tabel 2.71	Perkembangan Data Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.88
Tabel 2.72	Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.88
Tabel 2.73	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Peronda dan Olah Raga di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.88
Tabel 2.74	Data Stabilitas Tahun 2018-2022	11.87
Tabel 2.75	Data Kelompok Kreasi Kabupaten Rongkop Tahun 2017-2022	11.87
Tabel 2.76	Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.88
Tabel 2.77	Sampainya Pedepokan/Grup Tani di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.88
Tabel 2.78	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perhubungan di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.88
Tabel 2.79	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kesehatan di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.88
Tabel 2.80	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kesehatan dan Perlindungan di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.88
Tabel 2.81	Perkembangan Usaha Darum Rakyat di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.91
Tabel 2.82	Perkembangan Urusan Perikanan Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.92
Tabel 2.83	Perkembangan Konsultasi Pertanian di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.94
Tabel 2.84	Perkembangan Prosesi Produk dan Pembinaan Pertanian di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.95
Tabel 2.85	Perkembangan Sektor Perdagangan di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.96
Tabel 2.86	Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.96
Tabel 2.87	Perkembangan Urusan Represidan di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.97
Tabel 2.88	Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.98
Tabel 2.89	Realisasi Kinerja Pangei Peningkat Anggaran Tahun 2018-2022	11.98
Tabel 2.90	Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektori di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.100
Tabel 2.91	Nilai SAMK Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.100
Tabel 2.92	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.101
Tabel 2.93	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.102
Tabel 2.94	Profilisasi Peringkat Desa/Desa di Kabupaten Rongkop Tahun 2018-2022	11.102
Tabel 2.95	Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum Bersih	

	dan Penerimaan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	B.103
Tabel 2.96	Jenis Uji dan Lama Proses Pengawasan	B.104
Tabel 2.97	Capaian Indikator Makro Tahun 2018-2022	B.105
Tabel 2.98	Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Treasuri II Tahun 2022	B.106
Tabel 2.99	Capaian Indikator Kinerja Utama Peringkat Daerah Treasuri II Tahun 2022	B.109
Tabel 2.100	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	B.121
Tabel 2.101	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	B.124
Tabel 2.102	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B.126
Tabel 2.103	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemukiman Rakyat dan Kawasan Perkotaan	B.131
Tabel 2.104	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Ketenagakerjaan dan Perlindungan Masyarakat	B.132
Tabel 2.105	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	B.134
Tabel 2.106	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	B.135
Tabel 2.107	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B.137
Tabel 2.108	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	B.138
Tabel 2.109	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan	B.140
Tabel 2.110	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	B.142
Tabel 2.111	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B.144
Tabel 2.112	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B.146
Tabel 2.113	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Produk dan Harga Beras—	B.148
Tabel 2.114	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	B.150
Tabel 2.115	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	B.152
Tabel 2.116	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisata, Usaha Kecil, dan Menengah	B.154
Tabel 2.117	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Modal	B.156
Tabel 2.118	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Keluarga	B.158
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	

	Bidang Statistik	II.159
Tabel 3.120	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	II.160
Tabel 3.121	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelukapan	II.161
Tabel 3.122	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	II.162
Tabel 3.123	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II.163
Tabel 3.124	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kekerifatan dan Periklanan	II.164
Tabel 3.125	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	II.165
Tabel 3.126	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan	II.166
Tabel 3.127	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	II.168
Tabel 3.128	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	II.170
Tabel 3.129	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat Daerah	II.171
Tabel 3.130	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat DPRD	II.173
Tabel 3.131	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	II.175
Tabel 3.132	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keuangan	II.177
Tabel 3.133	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kepegawaian	II.180
Tabel 3.134	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Peradilan dan Inisiatif	II.181
Tabel 3.135	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Peradilan dan Pengembangan	II.182
Tabel 3.136	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan	II.183
Tabel 3.137	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Komunikasi	II.184
Tabel 3.138	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kesehatan Bangsa dan Rakyat	II.188
Tabel 3.1	PODB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Layanan Usaha Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 -	III.3
Tabel 3.2	PODB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III.4
Tabel 3.3	PODB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III.4
Tabel 3.4	Keadaan Perdagangan, Belanja dan Produksi Daerah Kabupaten Bontang Tahun 2018 - 2022	III.11
Tabel 3.5	Proyeksi Perdagangan, Belanja dan Produksi Daerah Perubahan APBD Kabupaten Bontang Tahun 2023	III.18
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bontang Tahun 2023	IV.3
Tabel 4.2	Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV.3

Table 4.3	Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kerdul - Brebes - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purwokerto - Wonorejo - Magelang - Tembung, Dan Kawasan Batus - Tegal - Pemalang	iv.6
Table 4.4	Perencanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Rembang Tahun 2023	iv.18
Table 4.5	Perencanaan Target Makro Sasaran Pembangunan Nasional 2023 dengan Target Makro RKPD Kabupaten Rembang 2023	iv.28
Table 4.6	Target Kinerja Utama (SKU) Kabupaten Rembang Tahun 2023	iv.30
Table 4.7	Penetapan Indikator Kinerja Daerah termasuk Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2023	iv.31
Table 4.8	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023	iv.38
Table 4.9	Isu dan Kebijakan Pembangunan	iv.56
Table 5.1	Matrik Perencanaan Program RKPD 2023 yang mendukung Prioritas Nasional	v.1
Table 5.2	Kerangka Pelaksanaan, Rencana dan Penjelasan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023	v.15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Banyuwangi Realisasi dan Target Tahun 2018 - 2022	0.23
Grafik 2.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022	0.28
Grafik 2.3	Perbandingan PDRB Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Menurut Penghasilan, Tahun 2018 - 2022 (Miliar Rupiah)	0.25
Grafik 2.4	Laju Inflasi (%) Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022	0.36
Grafik 2.5	Perbandingan Produksi Meubel Kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022	0.38
Grafik 2.6	Perbandingan Produksi Meubel Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2018 - 2022	0.39
Grafik 2.7	Indeks Kestabilan Kemiskinan (PI) (Indeks) Kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022	0.41
Grafik 2.8	Profil Sosial Indeks Keparahan Kemiskinan (PI) (Indeks) Kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	0.42
Grafik 2.9	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Banyuwangi	0.48
Grafik 2.10	Persentase Produksi Menurut Tingkat Produksi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022	0.108
Grafik 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2022	01.2
Grafik 2.2	Laju Inflasi (%) Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	01.5
Grafik 2.3	Rasio Ruang Fisikal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018- 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024 (%)	01.6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN
2021
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan sebagai upaya memajukan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKPD Nasional serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam hal tersebut diharapkan perencanaan tahunan, suatu dokumen dapat dilakukan revisi atau perubahan salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Perundang-undangan Nomor 88 Tahun 2017 Pasal 343, RKPD dapat diteliti jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendapatan, produksi dan sumber pembangunan, rencana program dan kegiatan pemerintah daerah;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; serta
- 4) Perubahan page kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif;
- 5) penambahan atau pengurangan target dan page kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok kerja.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja PD), kelanjutan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Fokus Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, RKPD disusun berdasarkan pertimbangan partisipatif, tripartit, politis serta top-down dan bottom-up. Tujuannya adalah Perubahan RKPD Kabupaten Bandung 2023 diharapkan dapat mewujudkan ketepatan antara perencanaan dan penganggaran. Dengan pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, koheren dan mengikat untuk mencapai tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemetaan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistemisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penggabungan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kredit - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Pariwisata - Wonorejo - Magelang - Tembung, dan Kawasan Ekowisata - Tegal - Pektel;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2018;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 - 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2001-2006;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditandatangani terakhir dengan

Kepreskripsi Nomor 000-0000 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Penyelidikan Klasifikasi, Kualifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

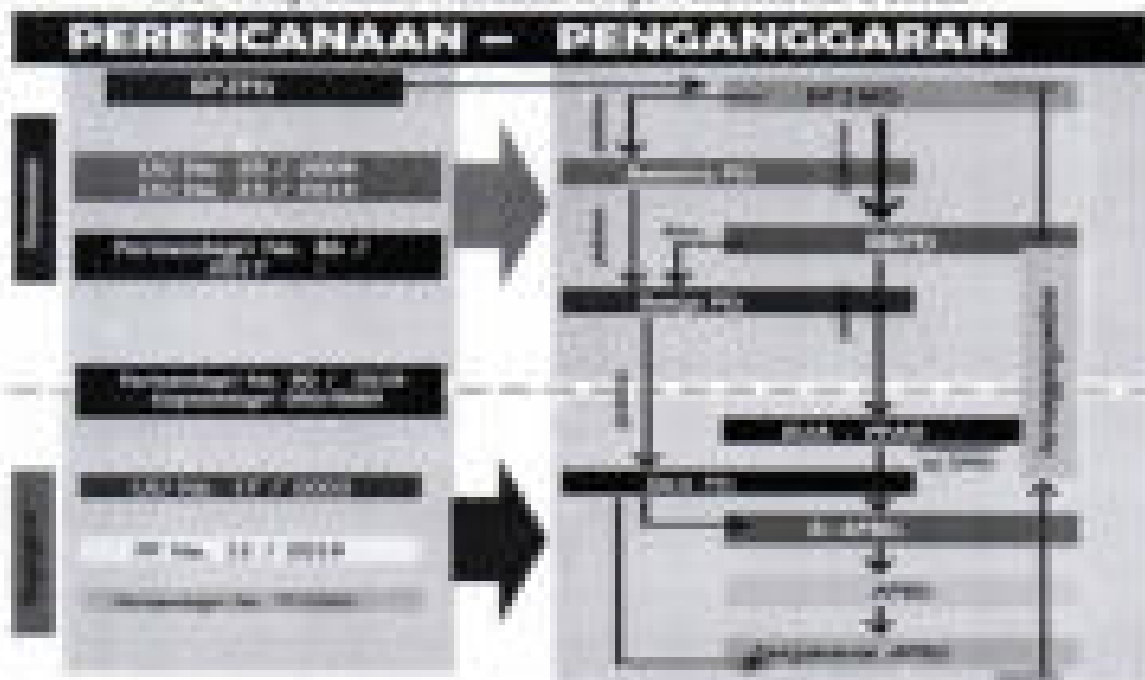
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengalihan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penganggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Bontang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bontang Tahun 2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Perencanaan RPMD merupakan salah satu sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPN) yang berarti bahwa dokumen Perencanaan RPMD Kabupaten merupakan integral dengan dokumen perencanaan lain seperti RPMD Kabupaten, RPMD Provinsi dan RKP. Dokumen Perencanaan RPMD Kabupaten Bontang Tahun 2023 disusun dengan mengacu RPMD Kabupaten Bontang Tahun 2021-2026 Perencanaan RPMD Kabupaten Bontang Tahun 2023 juga memperhatikan RPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023. Proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi untuk tahun 2023 dapat dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal RPMD melalui evaluasi Kebijakan Awal RKP dan RPMD Provinsi Jawa Tengah. Proses ini merupakan prasyarat terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang merupakan arahan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga perlu dipertimbangkan.

Gambar 1.1

Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(Sumber : 1. UU Nomor 23 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Anggaran Negara)

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akar Perubahan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2023 adalah sebagai upaya memantapkan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Brebes di tahun 2023, penyusunan kebijakan dan target pembangunan serta kerangka perencanaan strategis kerangka pendanaan berdasarkan matriks semester I, serta mengajukakan keterkaitan dalam keseluruhan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan prinsip-prinsip umum pembangunan Kabupaten Brebes;
- b. Menjadikan integrasi, sinkronisasi dan strategi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. Menjadikan keterkaitan dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Menerbitkan Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2023 disusun dengan menerbitkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD, agar mudah dipahami. Meliputi antara lain: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan menerbitkan dokumen Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI RABIL TRIPULAN TAHUN 2022

Menganalisis pelaksanaan RKPD 2022 sesuai dengan titrulan belian, untuk itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan Dokumen RKPD 2022 sebagai bahan acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menganalisis tentang kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes yang diperhatikan dalam pembangunan perekonomian daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Mengemukakan secara ringkas permasalahan prioritas dan sumber pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan tujuan kinerja yang dimasukkan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan strategis daerah dan nasional,

pendukung kotamadya kecamatan daerah tertentu terangnya pendataan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PERTANJANG DAERAH

Membuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang diamanatkan berdasarkan realisasi pembangunan tahunan, berdasarkan tahun anggaran (RKTG) dan capaian yang ditargetkan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

BAB II LANDASAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang berada pada jalur Pantai Utara (Pantura) bagian paling ujung timur Jawa Tengah. Letak wilayah yang jauh dari ibu kota Jawa Tengah akan sangat mempengaruhi perkembangannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Rembang mulai berkembang baik dari sisi pembangunan prasarana maupun dari infrastrukturnya. Akan tetapi perkembangannya masih perlu upaya lebih lanjut lagi, agar bisa mencapai hasil yang optimal. Adapun karakteristik wilayah sangat bervariasi yaitu meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Kondisi umum daerah Kabupaten Rembang dapat dilihat dari beberapa aspek mulai dari aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, hingga aspek daya saing daerah. Berikut merupakan gambaran dari beberapa aspek tersebut.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Uraian tentang aspek geografis dan demografi Kabupaten Rembang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik penduduk, proses pembangunan wilayah dan kawasan sesuai konteks. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup pembagian penduduk, komposisi dan populasi masyarakat sesuai karakteristik atau kelompok dalam wilayah tertentu di Kabupaten Rembang.

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi



Sumber: BPPK Kabupaten Rembang Tahun 2011-2012

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Rembang

Secara administratif kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut:

- Selatan Utara : Laut Jawa
- Selatan Selatan : Kabupaten Blora
- Selatan Barat : Kabupaten Pati
- Selatan Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Kecamatan/Desa	Luas Wilayah	
			km ²	(% dari total)
1	Banaran	14	24,24	1,46%
2	Batu	14	104,10	6,17%
3	Bawen	14	44,70	2,77%
4	Bela	12	100,01	6,02%
5	Biring	21	32,86	2,00%
6	Bulan	21	27,27	1,68%
7	Pagaragan	14	30,94	1,92%
8	Biring	21	44,81	2,78%
9	Bulan	21	24,74	1,53%
10	Pondong	24	41,71	2,58%
11	Purwan	22	40,00	2,47%
12	Wingsi	27	27,08	1,67%
13	Bela	14	28,28	1,75%
14	Layan	20	35,24	2,19%
Jumlah		244	1.036,70	100,00%

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2022

Dari data tabel diatas dapat dilihat luas wilayah Kabupaten Rembang 1.036,70 Km², secara administratif terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Bela (104,10 Km²) dan yang terkecil adalah Kecamatan Bulan (27,27 Km²).

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat 110° 00'-110° 20' Bujur Timur dan 6° 30'-7° 0' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 1.036,70 Km² yang dilatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pagaragan Kendang Utara di sebelah selatan. Sebagian besar (24,81%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah yang terletak dibagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan dibagian selatan relatif tinggi.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Bangkir (Kawasan Rembang-Bora). Area pengembangan wilayah Bangkir dibedakan sebagai PWA dengan kawasan perbatasan Cepu sebagai wilayah utama. Sedangkan wilayah PWA Bangkir meliputi kawasan perbatasan Rembang,

Laut dan Bera. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, pariwisata, perkebunan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perikanan dan perikanan. Mempertahankan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah kedepan, maka diperlukan suatu kebijakan pembangunan untuk wilayah Bantul adalah "Pengembangan wilayah Bantul berbasis perindustrian dan agribisnis yang didukung pariwisata terpadu dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan". Potensi wilayah ini sangat strategis untuk mendukung pengembangan wilayah barat Jawa Tengah.

a. Topografi

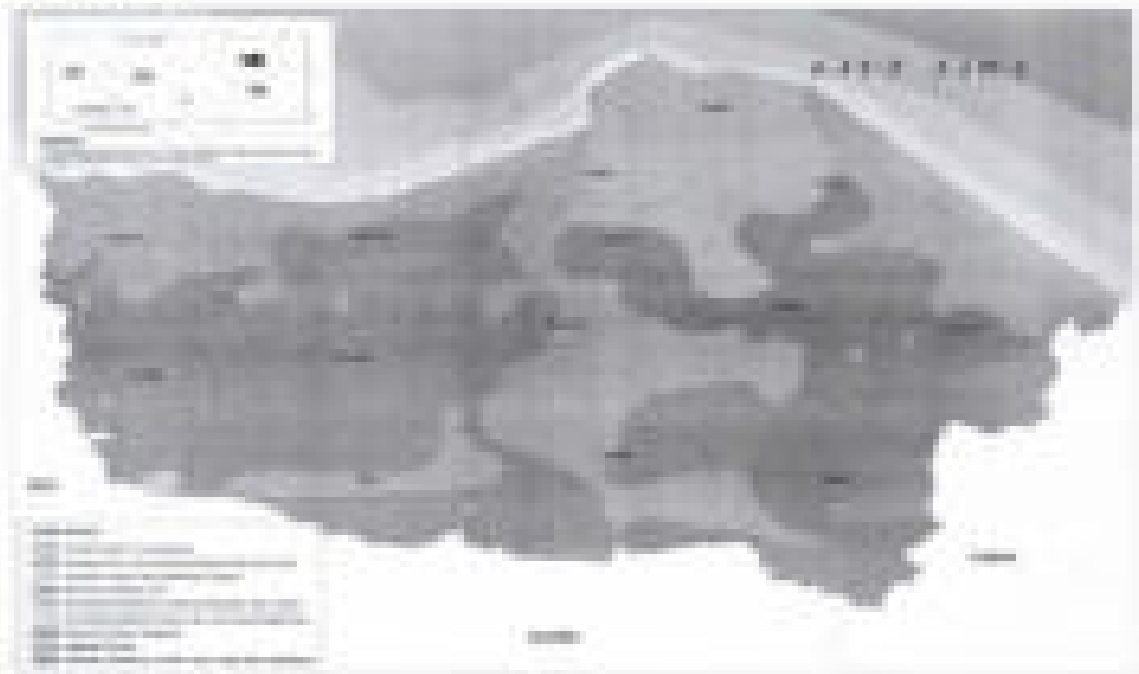
Tabel 2.2
Luar Tanah Menurut Ketinggian dari Perumahan Laut di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah	Jumlah Luas Wilayah Kabupaten	Luar Wilayah
1	Bantul	0-200	18	16,80
2	Budi	0-200	18	18,10
3	Pontas	0-200	20	19,70
4	Sari	0-200	41	104,20
5	Pring	0-200	41	42,80
6	Selatan	0-200	11	47,37
7	Panaran	0-200	22	60,60
8	Widang	0-200	13	64,61
9	Widati	0-20	11	61,71
10	Perbang	0-20	9	61,71
11	Panas	0-200	18	47,80
12	Widang	0-200	18	47,80
13	Selatan	0-20	11	47,80
14	Lautan	0-200	13	47,80
Jumlah				1.006,78

Sumber: Bantul Bantul Tahun 2012

Berupa topografi, Kabupaten Bantul memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Di Kabupaten Bantul terdapat tiga kecamatan dengan ketinggian lebih dari 700 mdpl, yaitu kecamatan Selatan, Panas dan Krugan. Sedangkan untuk kecamatan dengan wilayah rendah adalah Kecamatan Bantul 0-20 mdpl.

d. Jenis Tanah



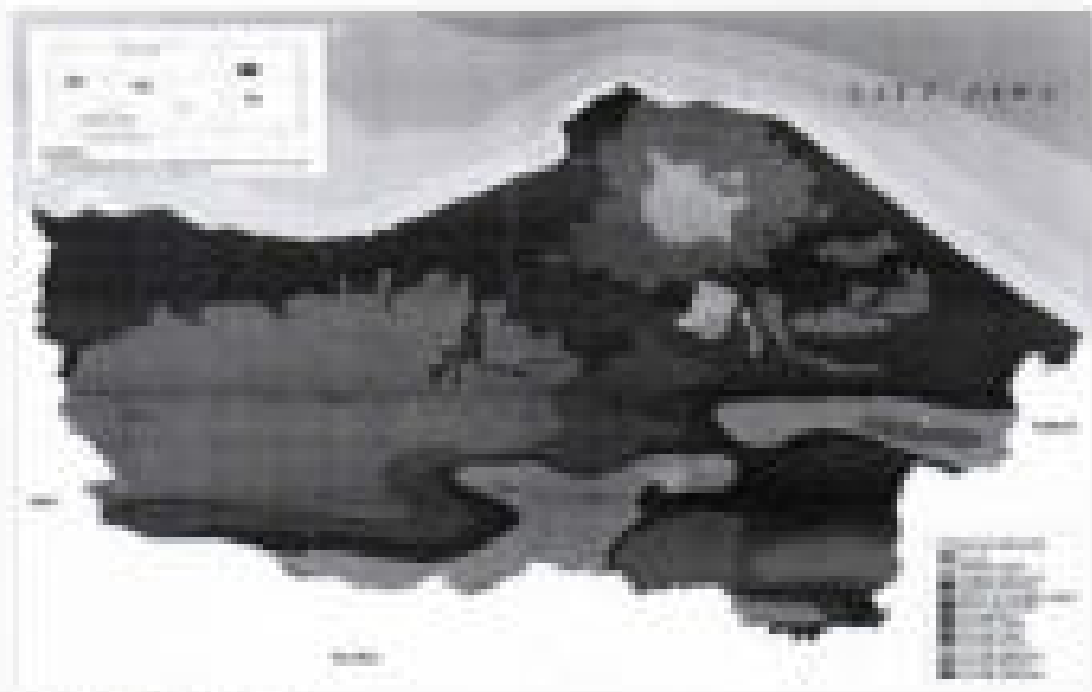
Sumber: Supriadi, 2009

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang

Apabila dilihat dari peta diatas, secara keseluruhan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, karena di daerah pengunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dibuktikan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang antara lain: Alfisol, Regsol, Oxisol, Melitran Merah Kuning, dan Andisol.

e. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Rembang (Kadar dan Skala: 1:25000), secara regional Kabupaten Rembang mempunyai urutan stratigrafi meliputi Formasi Tawun (Ttw), Formasi Ngroyong (Nro), Formasi Bulo (Tbu), Formasi Wawoko (Twa), Formasi Ladoh (Tld), Formasi Monda (Tmo), Anggana Selwojo Formasi Ladoh (QTL), Formasi Ladoh (QTL) dan Formasi Pawan (QTP). Sebaran struktur geologi Kabupaten Rembang sebagaimana peta di bawah ini.

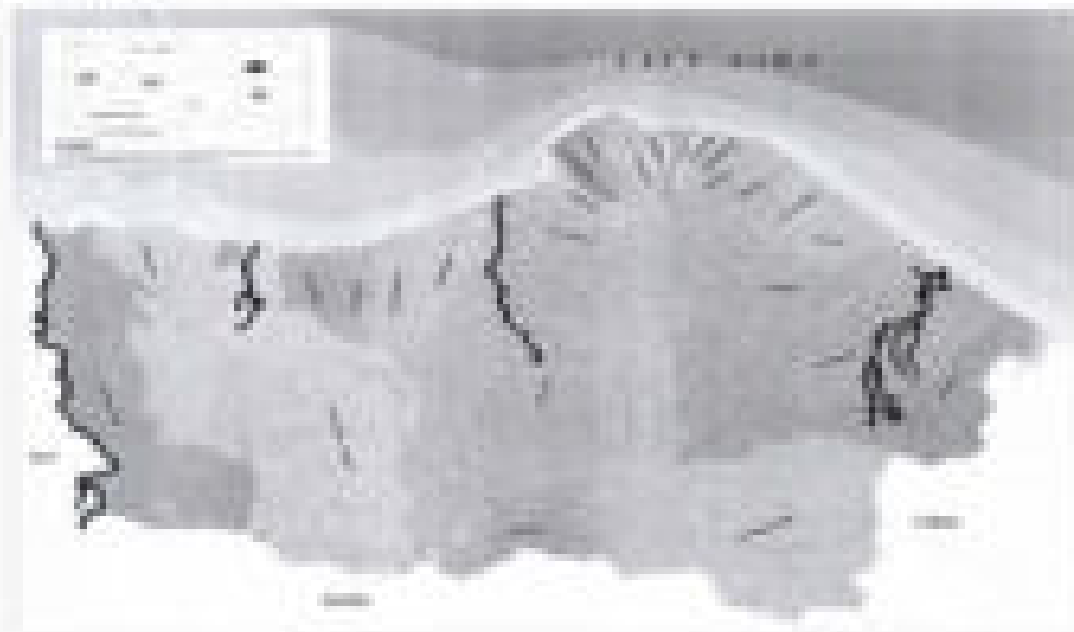


Sumber: Supriadi, 2008

Gambar 2.3
Peta Struktur Geologi Kabupaten Rongga

Melihat komposisi struktur geologinya, Kabupaten Rongga memiliki endapan seperti bahan rambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Felsit dan sebagainya yang jumlahnya mencapai 8% dari luas wilayah Kabupaten Rongga yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian.

I. Hidrologi

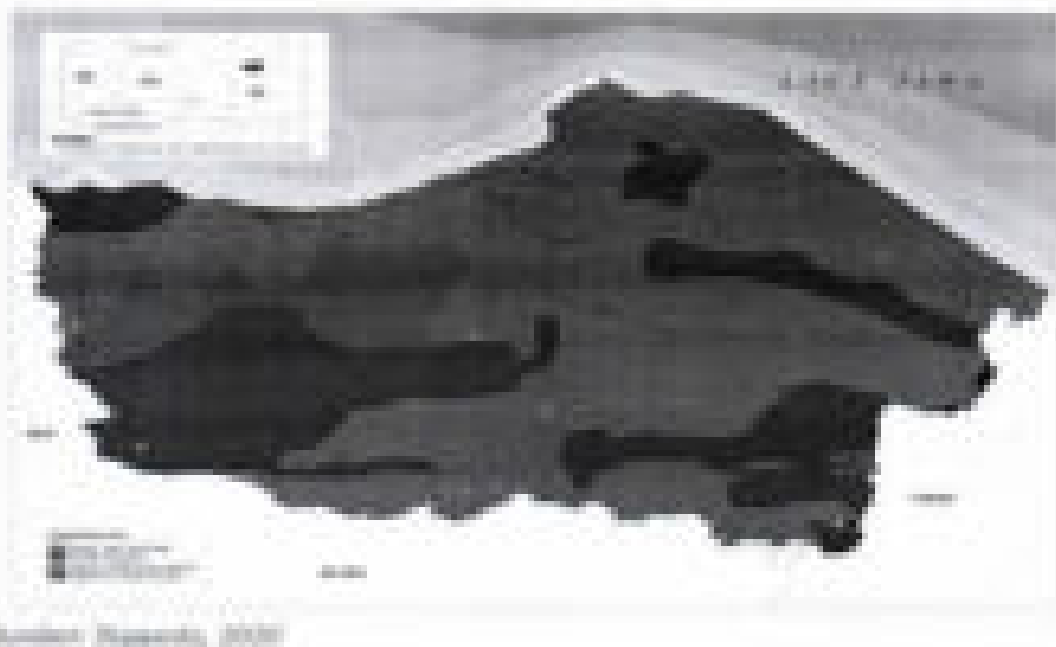


Sumber: Supriadi, 2008

Gambar 2.4
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Rongga

Keadaan hidrologi pada Kabupaten Brebes dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari permukaan perairan bawah dan air tanah. Air permukaan di Kabupaten Brebes sangat tergantung pada kondisi hujan yang ditampung dalam sungai dan selang-selang buatan. Dalam upaya meningkatkan volume air permukaan maka dengan mengoreksi run off air dari hulu ke hilir, Kabupaten Brebes termasuk dalam dua wilayah sungai yaitu Bengawan Solo dan Drates Belawa. Wilayah sungai Bengawan Solo hanya mencakup sebagian kecil wilayah di Kabupaten Brebes di sekitar Kecamatan Solo. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Brebes termasuk dalam wilayah sungai Drates Belawa.

Selanjutnya sumber hujan menjadi tanah yang mempengaruhi air dan mampu mengalirkan air tanah yang ada di Kabupaten Brebes meliputi sumber dangkal, sumber produktifitas tinggi, sumber produktifitas sedang, sumber produktifitas kecil, sumber produktifitas sangat dan daerah air tanah layak.



Gambar 2.5
Peta Hidrogeologi Kabupaten Brebes

Berdasarkan kondisi hidrogeologi tersebut, Kabupaten Brebes mempunyai tiga Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Lirisan, CAT Puri-Brebes dan CAT Wanureti. Cekungan air tanah tersebut mencakup sebagian air tanah di Kabupaten Brebes namun penggunaan air tanah harus dibedakan secara bijak dengan memperhatikan keberlanjutan sumber air tanah. Adapun lokasi cekungan air tanah di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada peta berikut.



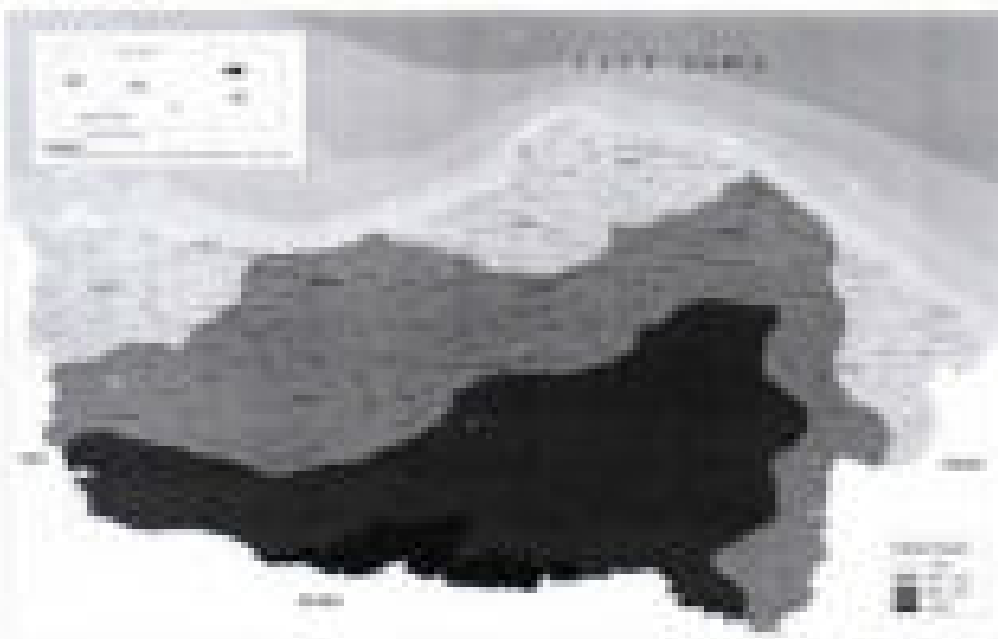
Sumber: Supriadi, 2007

Gambar 2.6

Peta Cebungan Air Tanah Kabupaten Rembang

Apabila dilihat dari peta cebungan air tanah (CAT) Kabupaten Rembang dalam Cebungan Air Tanah paling luas yakni Cebungan Air Tanah Wana Putih dimana cebungan air tanah tersebut sangat mempengaruhi seluruh wilayah di Kabupaten Rembang.

g. Klimatologi



Sumber: BPPW Kabupaten Rembang Tahun 2011/2012

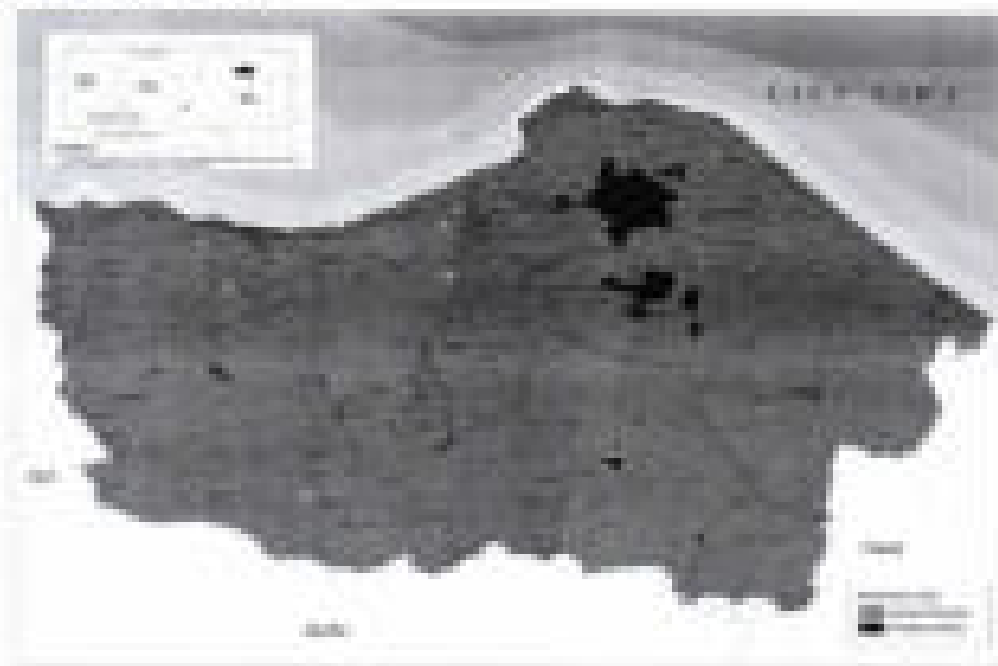
Gambar 2.7

Peta Curah Hujan Kabupaten Rembang

Wilayah Kabupaten Bontang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 33°C dan suhu rata-rata 27°C. Bulan basah di Kabupaten Bontang terjadi selama 4 sampai 5 bulan setiap tahunnya, sedangkan wilayahnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering.

Sementara itu, untuk curah hujan pada tahun 2021 paling tinggi terjadi pada bulan Januari 2021 dengan rata-rata mencapai 278 mm. Sedangkan wilayah dengan curah hujan paling tinggi selama tahun 2021 adalah Kecamatan Sali, mencapai 1.679 mm. Tingginya curah hujan yang terjadi di Kecamatan Sali ini dikarenakan selama tahun 2021, Kecamatan Sali mengalami jumlah hari hujan paling tinggi, sebanyak 112 hari.

b. Penggunaan Lahan



Sumber: BPPD Kabupaten Bontang Tahun 2019/2020

Gambar 3.8

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bontang

Dilihat dari peta di atas penggunaan lahan di Kabupaten Bontang di dominasi kawasan budidaya sebesar 96,73% dan 3,27% kawasan lindung. Kawasan lindung di Kabupaten Bontang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan lindung terpadat dan kawasan rawan alam.

3.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berupa dengan Kabupaten Bontang terbagi menjadi 3 karakteristik yaitu wilayah pesisir di sebelah Utara, wilayah pegunungan di sebelah Selatan dan dataran rendah di bagian tengah. Pengembangan lahan di Kabupaten Bontang diarahkan sesuai dengan karakteristik wilayah dengan fokus sebagai berikut:

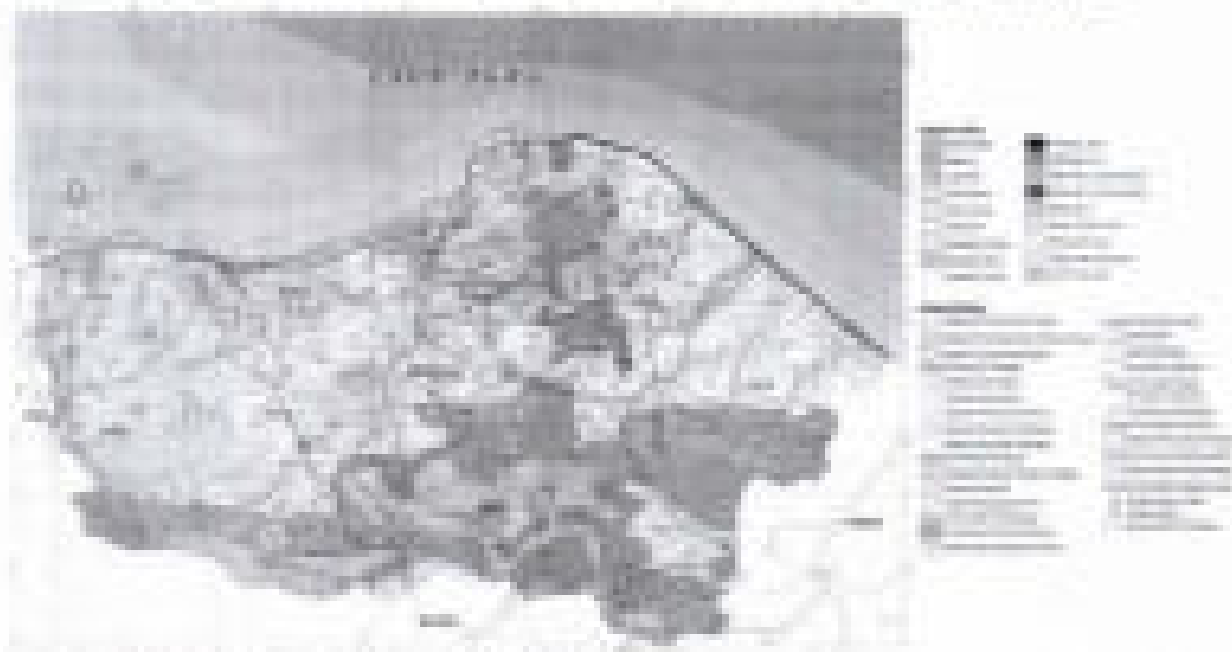
- Hujan akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan perikanan, peternakan, industri dan sebagian sosial pertanian.

- Ruang tetap dibandingkan kawasan pertanian, industri berbasis pertanian, permukiman dan perikanan;
- Ruang selain tetap seperti kawasan hutan, pertanian, kawasan perikanan dan industri berbasis pertanian dan perikanan.

Sejalan dengan pengembangan wilayah tersebut, ruang pemukiman ruang Kabupaten Rembang pada Tahun 2011-2011 untuk merupakan kawasan pusat kegiatan yang didukung pengembangan sektor kesehatan dan perikanan, pertanian, perkebunan dan industri dalam kerangka pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berkesinambungan.

a. Kawasan Budaya

Menyusutkan pasal 21 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2011 terbagi menjadi kawasan pertanahan hutan produksi, kawasan pemukiman hutan rakyat, kawasan perikanan pertanian, kawasan pemukiman perikanan, kawasan pemukiman perkebunan, kawasan pemukiman industri, kawasan pemukiman permukiman, kawasan pantai dan pulau-pulau kecil, dan kawasan pemukiman budidaya lainnya. Berikutnya pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Rembang sebagai berikut:



Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2011

Gambar 2.8

Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang

• Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.801 Ha dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 19.600 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Geyer dan Kecamatan Sain. Sementara itu kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Kalen, Kecamatan Rembang, Kecamatan Loran, Kecamatan Sander, Kecamatan Selang, Kecamatan Dabo, Kecamatan Selan,

Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Serang. Pengalihan kawasan hutan produksi ini terbagi dalam dua KPH yaitu KPH Mantingan dan KPH Selambaro.

- **Kawasan peruntukan hutan rakyat**

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Brebeng seluas kurang lebih 6.817 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sumpang, Kecamatan Dahu, Kecamatan Gurem, Kecamatan Bahu, Kecamatan Sedau, Kecamatan Serang, Kecamatan Krapan, Kecamatan Lasea, Kecamatan Paniai, Kecamatan Bahu dan Kecamatan Pamotan.

- **Kawasan peruntukan pertanian**

Kawasan pertanian terbagi menjadi dua yaitu lahan basah seluas kurang lebih 29.702 Ha dan lahan kering seluas kurang lebih 29.814 Ha yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Brebeng.

- **Kawasan peruntukan perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan terbagi menjadi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengalihan dan penataan hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap berada di Perairan Kecamatan Sauri, Perairan Kecamatan Sumpang, Perairan Kecamatan Lasea, Perairan Kecamatan Bahu, Perairan Kecamatan Krapan dan Perairan Kecamatan Serang.

- **Kawasan peruntukan pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan terbagi menjadi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara seluas 27.828 Ha dengan potensi tambang berupa pasir kuarsa, pemat, ball clay, dolomite, gypsum, taluk, batu gamping, besi, tanah liat, andesit, katubara dan lignit yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Brebeng. Sementara itu kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi juga tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Brebeng.

- **Kawasan peruntukan industri**

Kawasan peruntukan industri terbagi menjadi peruntukan industri besar, peruntukan industri menengah dan peruntukan industri kecil dan mikro. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 800 Ha berada di Desa Patahluangi Kecamatan Sumpang, di Desa Lutan dan Trukan Kecamatan Bahu, Desa Sengkengrejo Kecamatan Bahu dan Kecamatan Gurem. Peruntukan industri menengah meliputi industri pengolahan perikanan selektas di wilayah pantai, kawasan peruntukan agribudaya dan kawasan peruntukan industri pertambangan. Sementara itu industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebeng.

- **Kawasan peruntukan permukiman**

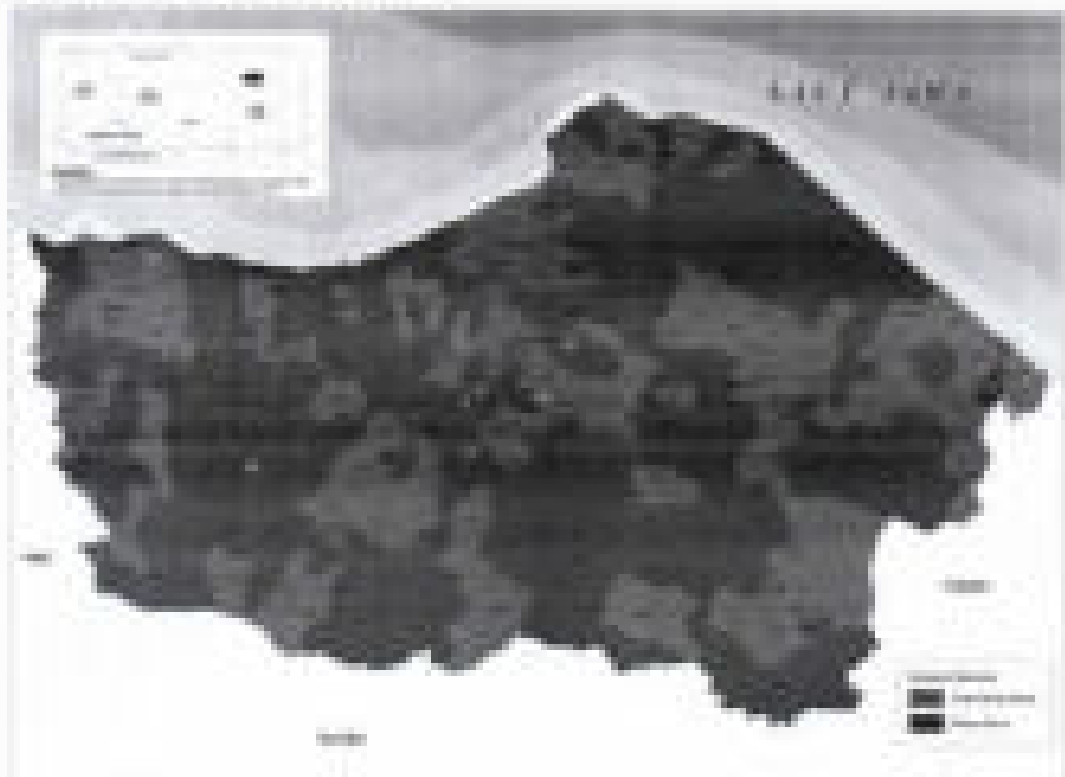
Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan. Sedangkan kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha

terdapat di perkotaan Kabupaten dan perkotaan Kecamatan di Kabupaten Bontang.

5. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bontang meliputi : kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor/gendakan tanah, kawasan rawan gempa/longsor dangkal, dan kawasan rawan bencana kebakaran.

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir



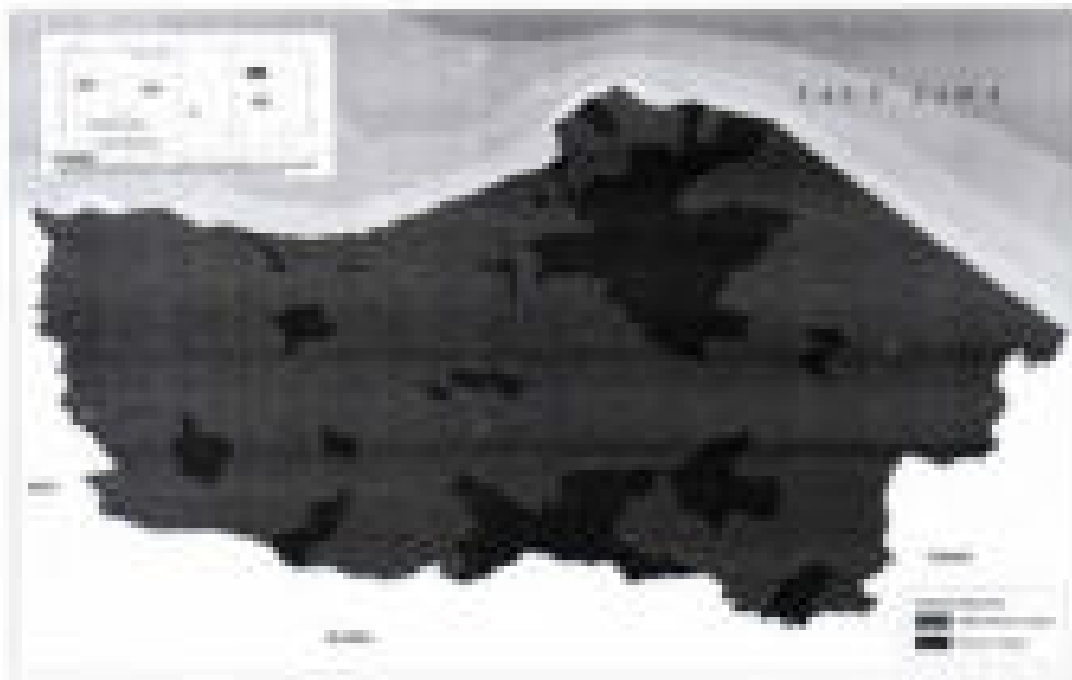
Sumber: BPPD, 2010

Gambar 2.10
Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Bontang

Ditilik dari peta diatas lokasi rawan banjir di Kabupaten Bontang tersebar di seluruh Kecamatan yang terjadi secara periodik ketika musim penghujan.

a. Kawasan Rawan Bencana Gendakan Tanah/Tanah Longsor

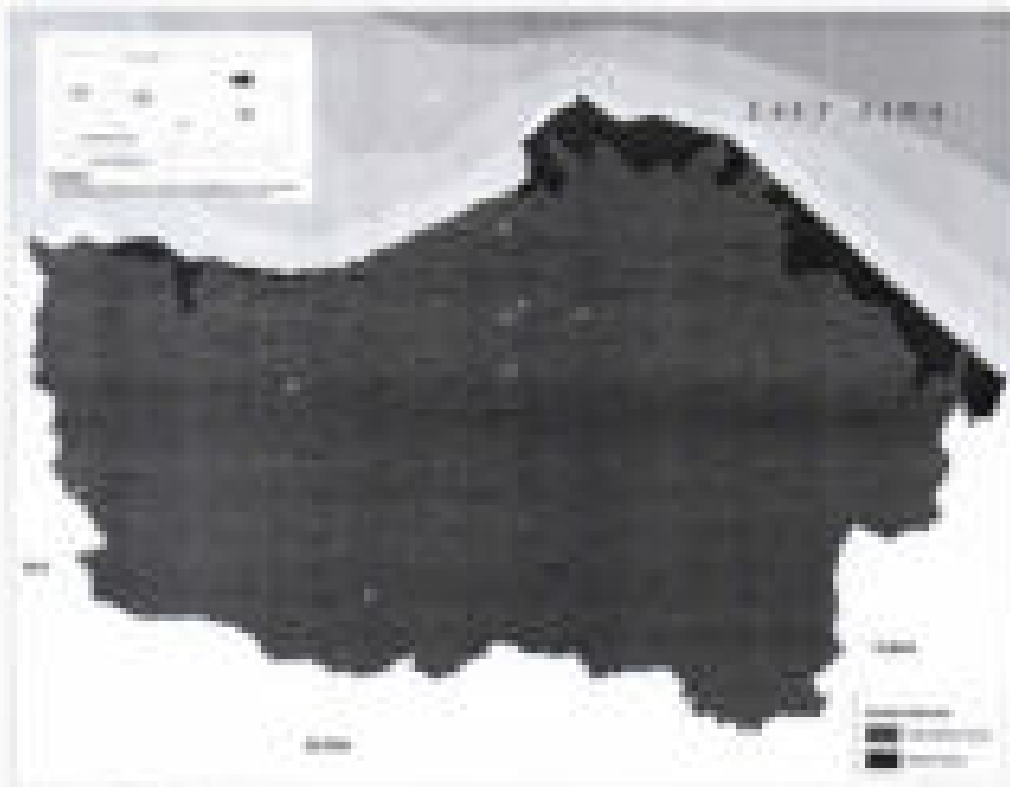
Lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Bontang tersebar di bagian selatan dan timur wilayah Kabupaten Bontang. Berikutnya daerah rawan bencana longsor sebagaimana peta di bawah ini.



Survei 2010, 2020

Gambar 2.11
Peta Daerah Desa Longor Kabupaten Karangasem

- **Empus Desa Kecamatan Celombing Pasing dan Hawan Aorasi**



Survei 2010, 2020

Gambar 2.12
Peta Desa Aorasi Kabupaten Karangasem

Akresi menjadi permasalahan utama di kawasan pantai Rombung di bagian timur meliputi Kecamatan Maba, Kecamatan Kragean dan Kecamatan Sarung, yang mempunyai risiko akresi dalam kategori sangat tinggi. Selain di wilayah pantai timur, akresi pantai juga terjadi di wilayah barat pada Kecamatan Kaloni, terutama di Desa Matulan, Wawa dan Palah.

3.1.1.3. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Rombung pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rombung, sebanyak 650.770 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 327.096 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 323.674 jiwa. Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2021 (647.766 jiwa), jumlah penduduk Kabupaten Rombung mengalami pertambahan sebesar 0,46 %.

Wilayah yang sebagian penduduknya paling banyak adalah di kecamatan Rombung, yang diikuti secara berturut turut kecamatan Kragean, dan kecamatan Sarung. Sedangkan wilayah penduduk yang paling kecil di kecamatan Gunung. Kecamatan yang mempunyai penduduk perempuan lebih banyak adalah di kecamatan Kaloni, kecamatan Sumber dan kecamatan Rombung, sebaliknya jumlah penduduknya lebih banyak laki laki. Berikut rinci, wilayah penduduk di tiap kecamatan terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Penduduk			%	Rasio (lg)
		Laki laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)		
1	I	II	III	IV = II + III	V = (I / Jml. Pend.	VI = (IV / n x 100
1.	Sumber	18.418	18.724	37.142	5,71	98,37
2.	Maba	14.252	14.107	28.359	4,34	101,75
3.	Gunung	12.248	12.124	24.372	3,74	101,15
4.	Kala	19.756	19.883	39.639	6,03	101,36
5.	Sarung	31.892	31.514	63.406	9,73	102,84
6.	Wawa	26.478	27.138	53.616	8,25	104,80
7.	Panatan	25.653	25.882	51.535	7,92	101,18
8.	Rabung	18.558	18.520	37.078	5,63	99,88
9.	Kaloni	31.897	31.873	63.770	9,80	98,38
10.	Rombung	96.120	96.612	192.732	29,62	99,84
11.	Manat	13.819	13.438	27.257	4,19	100,48
12.	Kragean	33.484	32.801	66.285	10,19	101,82
13.	Maba	14.824	14.898	29.722	4,57	100,58
14.	Gunung	25.420	25.228	50.648	7,78	100,75
	Total 2022	327.096	323.674	650.770	100,00	101,12
	Total 2021	325.753	322.013	647.766	-	101,14
	Total 2020	324.280	323.780	648.060	-	101,20

No	Berkas	Penduduk			%	Rasio (Rata-rata)
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)		
1	2	a	b	a + b + c	a + b + c (Jumlah Pend)	(a + b) / c
	Tahun 2019	322.293	317.889	640.182		101,49
	Tahun 2022	328.514	323.763	652.277		101,27

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2022 sebanyak 650.770 jiwa terdiri atas 327.196 jiwa (50,28 persen) penduduk laki-laki dan 323.574 jiwa (49,72 persen) penduduk perempuan. Perbedaan jumlah penduduk di tiap kecamatan dipengaruhi lingkungan sosial dan fasilitas yang tersedia. Adanya perbedaan fasilitas di tiap Kecamatan menyebabkan pemerataan penduduk yang berbeda. Banyaknya fasilitas yang tersedia akan menarik lebih banyak penduduk karena memiliki peluang usaha yang lebih luas daripada di area pedesaan. Sementara itu, besarnya rasio rata-rata tahun 2022 adalah 101,12 persen, artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan mendapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Kabupaten Rembang pada kelompok umur produktif usia 15 – 64 tahun sejumlah 459.743 jiwa (70,65 %) dan penduduk tidak produktif 0 – 14 dan 65 tahun ke atas sejumlah 191.027 jiwa (29,35 %). Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif diketahui dengan 200, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan (dependensi ratio) Rasio beban ketergantungan Kabupaten Rembang di tahun 2022 adalah sebesar 41,55 %. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Rembang menurut kelompok umur di tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rembang
Tahun 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,28%	0,83%	1,22%	0,47%	0,48%
Komposisi Penduduk					
0-4	44.630	43.909	47.207	46.960	46.711
5-9	47.623	47.342	44.291	44.020	43.799
10-14	46.321	47.614	43.860	43.164	44.707
15-19	41.852	43.296	40.101	40.524	40.000
20-24	33.860	34.284	44.323	40.442	47.760
25-29	44.540	44.381	48.812	44.360	44.224
30-34	43.340	44.000	51.000	51.307	51.000
35-39	47.471	45.607	48.000	49.100	48.100

	2018	2019	2020	2021	2022
40-44	42.834	46.241	45.704	43.833	45.960
45-49	45.229	45.665	45.503	44.924	47.427
50-54	42.842	42.897	42.441	41.989	44.476
55-59	32.771	37.408	37.246	36.266	39.476
60-64	26.448	27.727	27.264	26.311	27.142
65+	49.849	51.371	50.392	49.224	50.762
Jumlah	228.766	238.709	238.310	236.766	246.773
+ Jumlah Lulus	76.044	79.259	81.476	85.040	88.524
+ Nilai Lulus	12,07%	12,42%	12,68%	13,14%	13,64%
Nilai Rata-rata	42,87%	42,52%	42,47%	42,38%	42,37%

Sumber | BPS Jawa Tengah 2022

Adanya bursa tenaga kerja ini dapat memberikan manfaat bagi daerah, karena dengan lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif berarti lebih banyak tenaga kerja yang tersedia, dan jika terdapat masalah di dunia kerja, akan meningkatkan pendapatan suatu daerah. Manfaat lain yang perlu diperhatikan adalah penyediaan lapangan kerja yang harus memadai bagi banyaknya penduduk usia produktif tersebut. Sehingga dalam rangka meningkatkan potensi dari banyaknya jumlah penduduk usia produktif maka, peningkatan kualitas angkatan kerja dan pembukaan lapangan kerja baru di Kabupaten Kendang harus bisa berjalan beriringan.

Selain itu, dapat dilihat bahwa populasi lanjut usia semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Pemerintah harus memfasilitasi pelayanan kesehatan usia lanjut untuk meningkatkan mutu kehidupan demi mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai keberadaannya. Program lansia dirangsang oleh pemerintah sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan kelompok usia lanjut.

e. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kabupaten Kendang dengan persentase terbesar adalah Tamat SD/Sederajat sebesar 21,08%, diikuti dengan penduduk yang tidak/ belum sekolah sebesar 20,67%, dan penduduk yang SLTP/ Sederajat sebesar 18,51%. Sedangkan penduduk yang memusatkan pendidikan jenjang SLTA/Sederajat sebesar 11,25% dan jumlah penduduk yang memiliki strata pendidikan Akademi hingga Strata I ke atas, tidak lebih dari 4% dari total penduduk Kabupaten Kendang sehingga kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kendang jika dilihat dari tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Adapun komposisi penduduk Kabupaten Kendang berdasar tingkat pendidikan dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK/AL, SD/PAJALAN	122.726	20,37
2	SD/PAJALAN (100% BERKUALITAS)	74.362	11,81
3	TK/AL (100% BERKUALITAS)	202.040	31,29
4	SD/PAJALAN	122.281	18,81
5	SLTP (BERKUALITAS)	42.344	6,49
6	SLTP/SLTA	1.482	0,23
7	SLTA/SLTP (100% BERKUALITAS)	2.676	0,41
8	SLTP (BERKUALITAS)	28.827	4,45
9	SMK/SLB	794	0,12
10	SMK/SLB	14	0,002
	Jumlah	604.566	100

Sumber: BPS/Kab. Bojonegara, 2022

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Berdasarkan mata pencarian, penduduk Kabupaten Bojonegara sebagian besar wiraswasta (22,68%), down an gura (18,99%) petani/peternak (16,43%). Sementara itu, penduduk yang bekerja atau tidak bekerja sebesar 20,20% dan pelajar/mahasiswa sebesar 15,68%. Selengkapnya jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian
Kab. Bojonegara Tahun 2022

No	Mata Pencarian	Jumlah (Jwb)	Persentase (%)
1	Bekerja Tidak Bekerja	120.204	20,05
2	Bekerja Tidak Bekerja		
3	Bekerja Bekerja	101.440	16,78
4	Petani	2.202	0,36
5	PKWT (100% PKWT)	11.042	1,83
6	PKWT		
7	PKWT, Peternak, Peternak	108.114	17,88
8	Wiraswasta/Peternak	14.867	2,46
9	Wiraswasta		
10	Wiraswasta		
11	Wiraswasta		
12	Wiraswasta Wiraswasta		
13	Wiraswasta Wiraswasta		
14	Wiraswasta Wiraswasta		
15	Wiraswasta Wiraswasta		
16	Wiraswasta		
17	Wiraswasta		
18	Wiraswasta	4.767	0,79
19	Wiraswasta		
20	Wiraswasta		
21	Wiraswasta	674	0,11
22	Wiraswasta		

No.	Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
11	Perumahan		
12	Asuransi		
13	Pendidikan		
14	Kesehatan		
15	Perdagangan		
16	Perdagangan Jasa		
17	Manufaktur	100.700	11,44
18	Lain-lain	111.700	12,60
Jumlah		212.400	24,04

Sumber: (Statistikopd Kab. Bombang, 2022)

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana daerah salah satunya untuk menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk mengetahui gambaran kondisi atau kesejahteraan masyarakat kabupaten Bombang dapat dilihat dari : Pertama, Aspek Kesejahteraan dengan Nilai Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang meliputi Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Desa, Kesejahteraan, dan Angka Kematian. Kedua Fokus Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesempatan Kerja. Ketiga Fokus Sesi Budaya dan Olahraga, yang meliputi Urusan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Selain itu aspek kesejahteraan juga mempertimbangkan pengaruh dari adanya pandemi Corona Virus 19 terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan pengangguran. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bombang selengkapnya dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini.

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Menciptakan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi sangat akan mempengaruhi kondisi yang ada di Kabupaten Bombang yang meliputi kondisi pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin di Kabupaten Bombang. Selengkapnya Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Bombang dapat dilihat dari penjelasan berikut ini.

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dengan PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama dibandingkan dengan kemampuan wilayah di dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, begitu juga dapat

digunakan untuk mengetahui nilai produksi yang dihasilkan, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada periode tertentu.

• **PCRB Berdasarkan Lapangan Usaha**

Berdasarkan data GPK, PCRB dihitung menggunakan metode dan lapangan usaha baru, yang meliputi 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, perhitungan PCRB menggunakan tahun dasar perhitungan harga konstan tahun 2010. PCRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 3.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Ponorogo (Data Realistik) Tahun 2015-2023

No	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.130.428,29	26,93	1.204.240,00	29,20	1.353.211,00	30	1.274.840,00	29,20	1.131.140,00	27,34
B.	Perdagangan dan Jasa	441.500,00	10,50	491.700,00	11,21	533.000,00	12,00	590.200,00	13,40	661.000,00	16,20
C.	Industri Pengolahan	2.993.120,43	70,70	3.211.200,00	73,10	3.400.200,00	76,70	3.206.100,00	72,70	2.744.900,00	66,70
D.	Pengelolaan limbah dan SDA	11.000,00	0,26	12.400,00	0,28	12.100,00	0,27	12.400,00	0,28	14.000,00	0,34
E.	Pengadilan dan Pengadilan Negeri, Institut, dan Ilmu Ilmiah	6.100,00	0,15	6.000,00	0,14	6.000,00	0,14	6.000,00	0,14	7.000,00	0,17
F.	Keuangan	1.214.200,00	29,00	1.280.000,00	29,10	1.301.000,00	29,20	1.334.000,00	29,70	1.333.000,00	32,10
G.	Keperawatan Rawat dan Rawat Gawat Darurat, Rawat dan Rawat Gawat Darurat	1.740.000,00	41,00	1.811.100,00	41,00	1.833.000,00	41,00	1.899.000,00	42,80	2.000.000,00	48,00
H.	Transportasi dan Pengangkutan	501.000,00	11,90	500.000,00	11,30	500.000,00	11,30	499.000,00	11,30	500.000,00	12,00
I.	Pengelolaan sampah dan Limbah Baku	400.000,00	9,30	400.000,00	9,10	400.000,00	9,10	400.000,00	9,10	400.000,00	9,70
J.	Informasi dan Komunikasi	200.000,00	4,70	200.000,00	4,50	200.000,00	4,50	200.000,00	4,50	200.000,00	4,80
K.	Rawat Gawat Darurat	400.000,00	9,30	400.000,00	9,10	400.000,00	9,10	400.000,00	9,10	400.000,00	9,70
L.	Rawat Gawat	100.000,00	2,30	100.000,00	2,30	100.000,00	2,30	100.000,00	2,30	100.000,00	2,40
M.N.	Jasa Kesehatan	300.000,00	7,10	300.000,00	6,80	300.000,00	6,80	300.000,00	6,80	300.000,00	7,30
O.	Keperawatan Perawatan, Perawatan dan Rawat Gawat Darurat	400.000,00	9,40	400.000,00	9,10	400.000,00	9,10	400.000,00	9,10	400.000,00	9,70
P.	Jasa Kesehatan	300.000,00	7,10	300.000,00	6,80	300.000,00	6,80	300.000,00	6,80	300.000,00	7,30
Q.	Jasa Kesehatan dan Rawat Gawat Darurat	100.000,00	2,30	100.000,00	2,30	100.000,00	2,30	100.000,00	2,30	100.000,00	2,40
R.S.T.U.	Jasa Lainnya	100.000,00	2,30	100.000,00	2,30	100.000,00	2,30	100.000,00	2,30	100.000,00	2,40
PDRB ADHK		4.190.000,00	100	4.310.000,00	100	4.400.000,00	100	4.190.000,00	100	3.600.000,00	100

Sumber: BPS, 2023

No	Language Grade	2005		2006		2007		2008		2009	
		Days	%	Days	%	Days	%	Days	%	Days	%
1	Basic Mathematics (and Algebra)	220-225.21	1.20	221.877.24	1.20	220.561.28	1.20	220.562.28	1.20	220.220.28	1.20
2,3,4	Basic Grammar	211.220.28	1.20	210.221.28	1.20	210.220.28	1.20	210.220.28	1.20	210.220.28	1.20
Total		431.220.28	100	432.098.52	100	430.822.56	100	430.782.56	100	430.440.56	100

Source: ICF, 2009

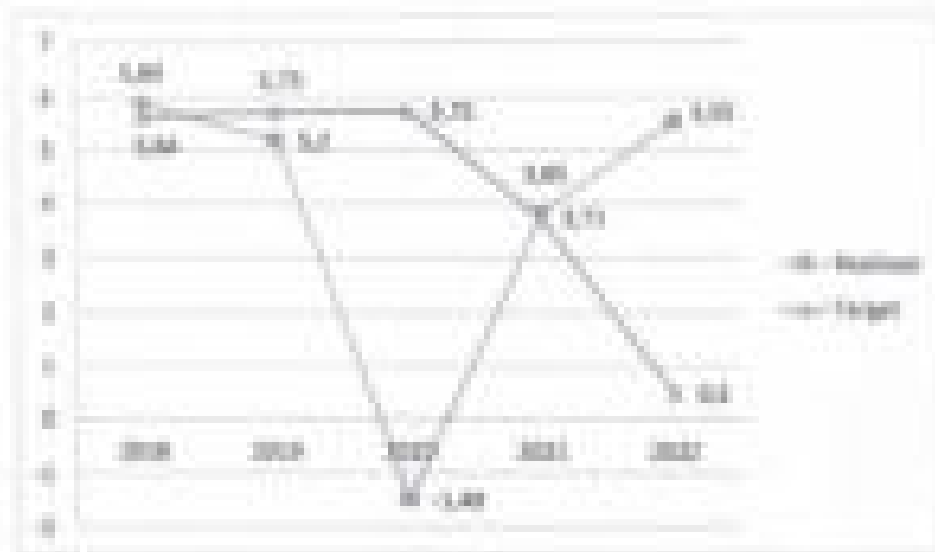
Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Biringene Tahun 2018 - 2022 (%)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Manufaktur, pertambangan dan pertambangan	1,8	-0,09	1,71	0,49	1,87
B	Pertambangan dan pertambangan	5,4	11,49	9,81	1,81	-11,19
C	Industri pengolahan	0,14	0,09	-1,49	4,21	0,11
D	Pengolahan logam dan logam	1,39	0,1	0,17	0,09	0,01
E	Pengolahan tekstil, pengalihan logam, kimia, dan logam lainnya	-0,1	0,11	1,01	0,01	0,11
F	Konstruksi	4,04	0,04	-4,01	1,01	1,11
G	Konstruksi bangunan dan konstruksi lainnya	1,19	0,04	-4,01	0,11	0,01
H	Konstruksi dan pertambangan	1,04	0,09	22,01	1,01	0,11
I	Perdagangan, akomodasi dan kesehatan lainnya	1,11	0,11	-0,11	0,11	10,11
J	Informasi dan komunikasi	12,01	14,01	10,01	10,01	0,11
K	Keuangan dan asuransi	1,11	0,1	-0,11	0,11	1,01
L	Real estate	0,11	0,11	-0,1	0,11	1,11
M,N	Lain-lain	0,01	10,11	-1,11	1,01	0,11
O	Aktivitas pemerintahan, pertambangan dan lainnya	0,11	0,11	-0,11	-0,1	1,01
P	Lain-lain	0,11	0,01	-1,11	0,01	0,11
Q	Lain-lain dan lapangan lain	0,11	0,01	10,11	0,11	0,11
R,S,T,U	Lain-lain	0,01	0,01	-0,01	1,01	10,11
	PDB	0,01	0,01	-1,01	0,01	0,01

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel data pengembang tersebut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biringene pada tahun 2022 adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 60,51%. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian yaitu sebesar -11,19 %.

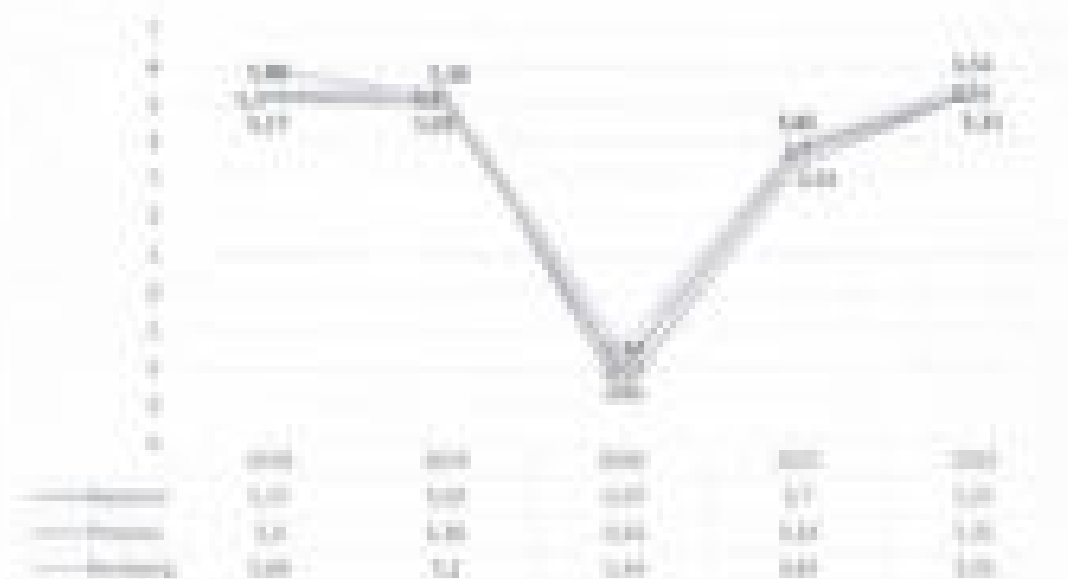
Secara ekonomi maka selama lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan kinerja yang fluktuatif jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Biringene tumbuh secara fluktuatif pertumbuhannya pada tahun 2018 sebesar 5,99%, akan tetapi mengalami angka turun dari pada tahun 2020 turun menjadi -1,89% akibat adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada semua sektor, meskipun begitu tahun 2022 sudah pertumbuhannya pertumbuhan di Kabupaten Biringene sudah menunjukkan adanya pengurangan ke arah positif yakni sebesar 5,55. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biringene, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 3.1

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Bengkulu Selatan dan Target Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS, 2023

Gambar 3.2

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Bengkulu Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat pada tahun 2018 akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak sangat pada semua subsektor pertumbuhan ekonomi, kecuali subsektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh positif ditengah-tengah pandemi. Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu

nilai lebih tinggi daripada laba perusahaan domestik nasional serta Jawa Tengah.

• FCR Berdasarkan Pengeluaran

FCR pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa yang diproduklai tersebut. Melalui FCR Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan pendapatan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari asing. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan antara sisi produksi (supply side) dan sisi permintaan (demand side) barang dan jasa. Dengan demikian FCR Pengeluaran menunjukkan besarnya nilai barang dan jasa (mupun yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat secara spesifik, yang dimaknai dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaknai untuk keperluan lebih lanjut (dimanfaatkan lebih).

Tabel 2.10
FCR Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

No	Jenis Pengeluaran	FCR Sub. Menurut Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Domestik Kurang Peng. Asing	10.002.000,0	10.011.000,00	9.999.000,00	10.002.000,00	10.000.000,00
2	Pengeluaran Domestik Lain	178.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Pengeluaran Domestik Perseorangan	1.000.000,0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pengeluaran Masyarakat Rural	2.000.000,0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	Pengeluaran Gubernur	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	Net Export	-977.000,00	-977.000,00	-977.000,00	-977.000,00	-977.000,00
Jumlah Pengeluaran		10.000.000,00	10.010.000,00	9.998.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Sumber: BPS, 2023

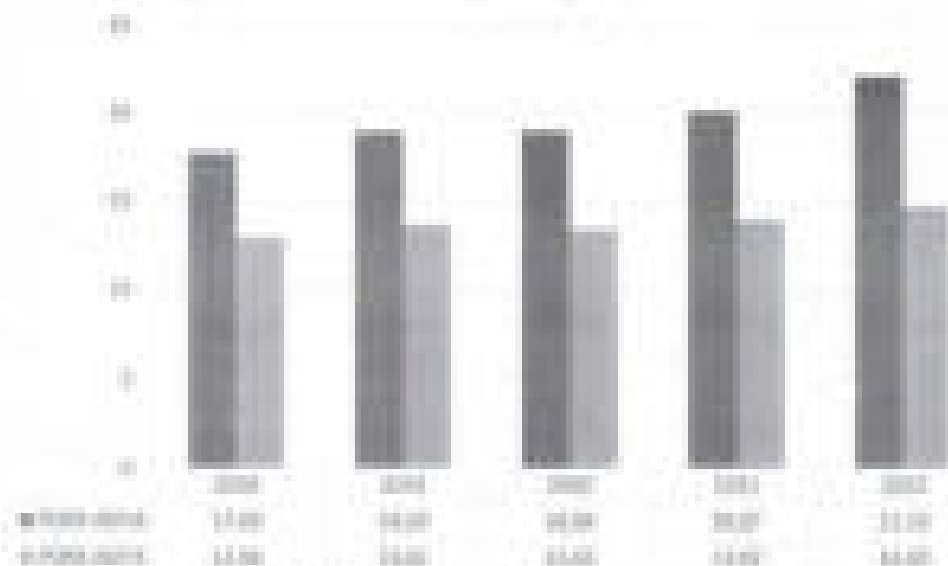
Tabel 2.11
FCR Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

No	Jenis Pengeluaran	FCR Sub. Menurut Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Domestik Kurang Peng. Asing	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Pengeluaran Domestik Lain	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

No.	Jenis Pengeluaran	PADB Kab. Bombang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsentrasi Persewaan	1.000.794,00	1.001.300,00	1.000.000,00	1.017.000,00	1.001.794,00
2	Pengeluaran Modal Tetap Baru	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Pendapatan Konsentrasi	420.000,00	400.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00
4	Netto Konsentrasi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
PADB Konsentrasi		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00

Sumber: BPS, 2023

Perbandingan perkembangan Kabupaten Bombang juga dapat dilihat dari pertumbuhan PADB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Komponen-komponen pengeluaran pada PADB ADHK menunjukkan perubahan secara riil, terutama berkaitan dengan perubahan volume konsumsi akhir. Selama rentang tahun 2018-2022, PADB Kabupaten Bombang atas dasar harga konstan terus bertambah dari Rp 13,04 triliun menjadi Rp 14,69 triliun.



Sumber: BPS Kabupaten Bombang, 2023

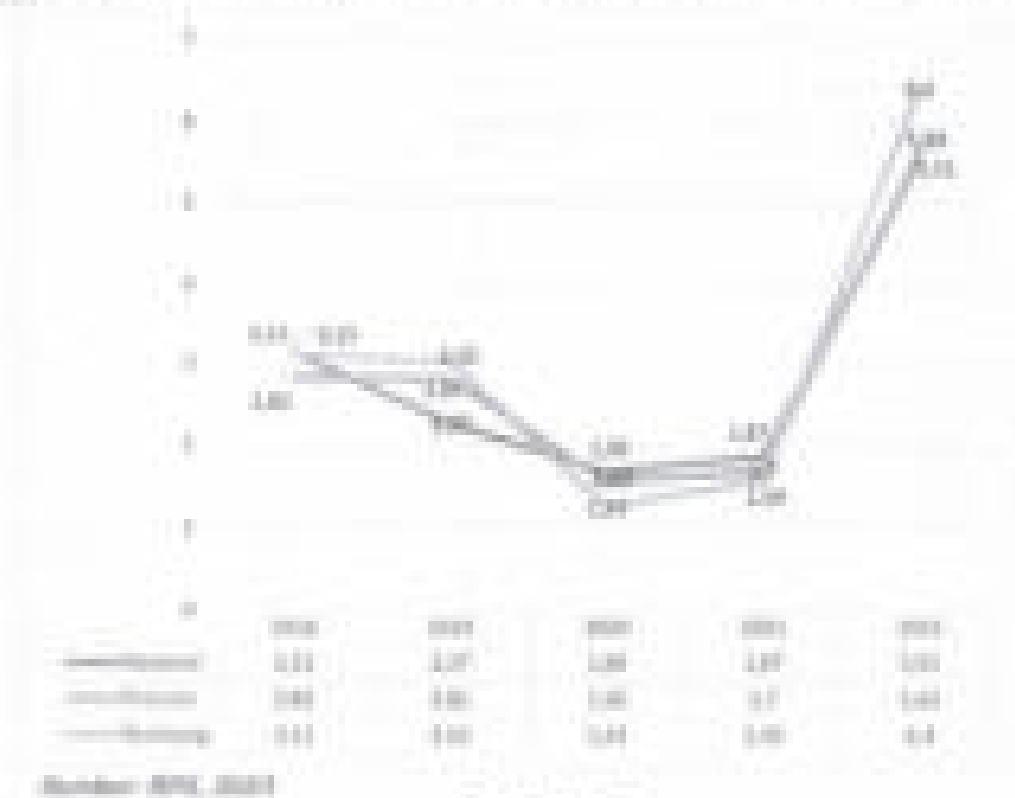
Grafik 3.3

Perbandingan PADB Kabupaten Bombang Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Menurut Pengeluaran, Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Dari Grafik di atas, tampak bahwa baik nilai PADB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PADB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) secara konsisten menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun pada tahun 2020 terdapat penurunan PADB ADHK. Pertumbuhan PADB ADHK disebabkan karena peningkatan volume produksi, sementara peningkatan PADB ADHB, selain karena volume produksi, juga dipengaruhi oleh faktor harga pasar setiap tahun.

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator utama ekonomi yang sangat penting karena menggambarkan nilai uang sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Tingkat inflasi Kabupaten Brebes mulai tahun 2020 sudah tidak dibatasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, melainkan mengikuti tingkat inflasi Kabupaten Klaten. Pada tahun 2022 tingkat inflasi Kabupaten Brebes mengalami perubahan sebesar 4,41 menjadi 5,0%. Inflasi Kabupaten Brebes tahun 2022 cenderung naik dari inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,63 %. Adapun grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut.



Grafik 2.4
Laju Inflasi (%) Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan sering kali tingkat inflasi di Kabupaten Brebes dibawah tingkat inflasi Jawa Tengah maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Brebes masih di bawah Jawa Tengah dan nasional. Satu hal yang baik adalah Kabupaten Brebes mampu menurunkan inflasi dengan baik, dan stabilisasi inflasi juga terkendali di tahun 2018-2020, meskipun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan.

c. PDRB per Kapita

PDRB per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan tingkat pembangunan sebuah daerah, dimana semakin besar perkapitanya per kapitanya, semakin Majma daerah tersebut. Dari PDRB atas dasar harga

berlaku yang dituangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Bontang pada tingkat tahun, diperoleh pendapatan perkapita nominal tahun 2022 sebesar Rp 23,97 juta per jiwa. Tren PDRB per kapita yang terus mengalami peningkatan mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, meskipun jika dilihat dari pertumbuhan Pendapatan per kapita cenderung fluktuatif. PDRB per kapita Kabupaten Bontang selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3.12
PDRB per kapita Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022

Tahun	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Nominal	Juta Rp	17.989.122,52	24.999.248,79	19.541.248,20	26.097.198,77	22.097.208,24
PDRB Riil	Juta Rp	13.889.582,89	19.612.324,21	13.889.582,89	13.889.582,89	14.889.582,89
PDRB per kapita	Juta	27,94	39,68	29,37	40,98	33,97

Sumber: BPS (2022)

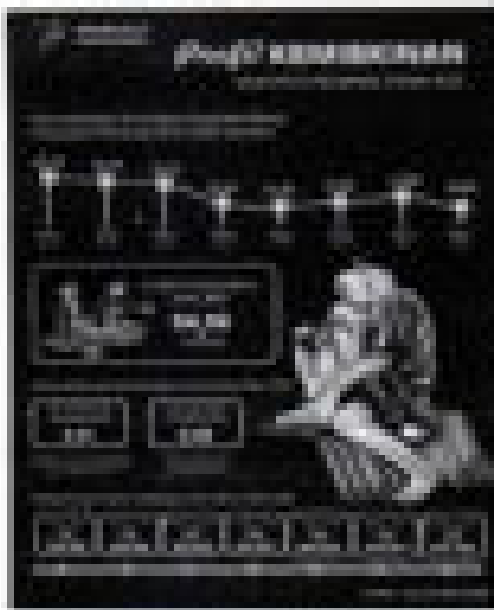
Jika dibandingkan dengan daerah Eka Karadimian Pali, PDRB Perkapita Kabupaten Bontang masih cenderung masih relatif rendah pada urutan ke empat, setelah Kabupaten Kutai, Pali, dan Berau. Meskipun begitu PDRB perkapita Kabupaten Bontang sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Jayapura. Begitu ini tren pertumbuhan positif ditunjukkan pada pertumbuhan PDRB Perkapita serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bontang. Dimana selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Indikator PDRB Perkapita Wilayah Eka Karadimian Pali Tahun 2022

Kabupaten	PDRB 2022 (juta rupiah)	Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (juta rupiah/penduduk)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Berau	20.528.892,11	898.724	22,82	1,28
Bontang	22.097.208,24	928.770	23,79	1,11
Pali	22.119.887,35	1.189.374	18,61	1,86
Kutai	114.944.921,49	892.478	128,89	1,22
Jayapura	28.922.271,26	1.192.411	24,25	1,84

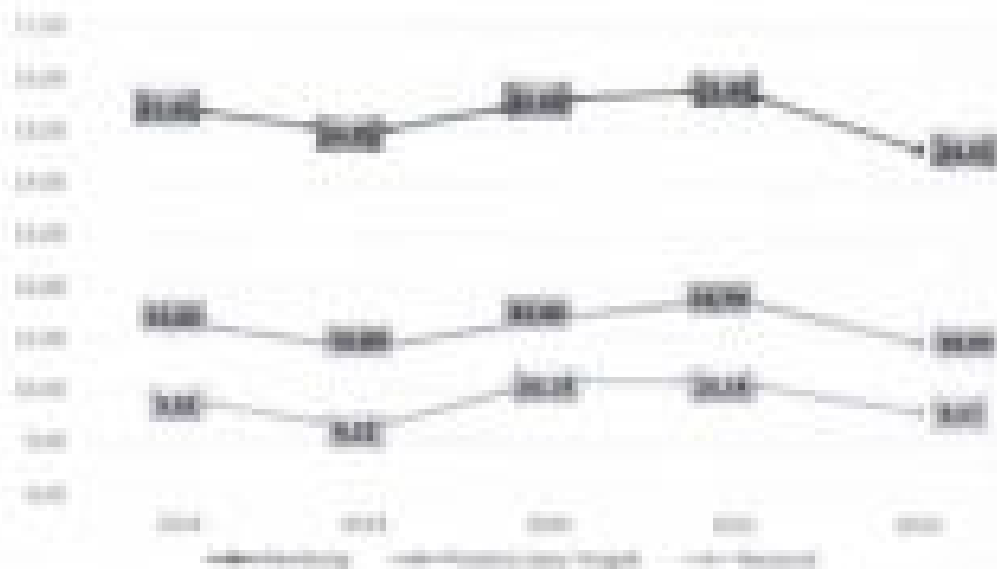
Sumber: BPS (2022) data mentah

d. Kesehatan



Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan, gizi, dan standar pendidikan. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia dilakukan dengan menggunakan standar dan indikator dari DPB. Berdasarkan

data kemiskinan dari BPS, perkembangan kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018-2022, yaitu dari 15,41 menjadi 14,95. Namun pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 0,45 pada tahun 2020 menjadi 15,40 dan 0,55 pada tahun 2021 menjadi 15,95. Hal ini akibat adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Namun demikian pada tahun 2022 kemiskinan di Kabupaten Bantul turun menjadi 14,45. Dimana persentase penduduk miskin Kabupaten Bantul tersebut masih di atas persentase Provinsi DIY dan di Peringkat Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

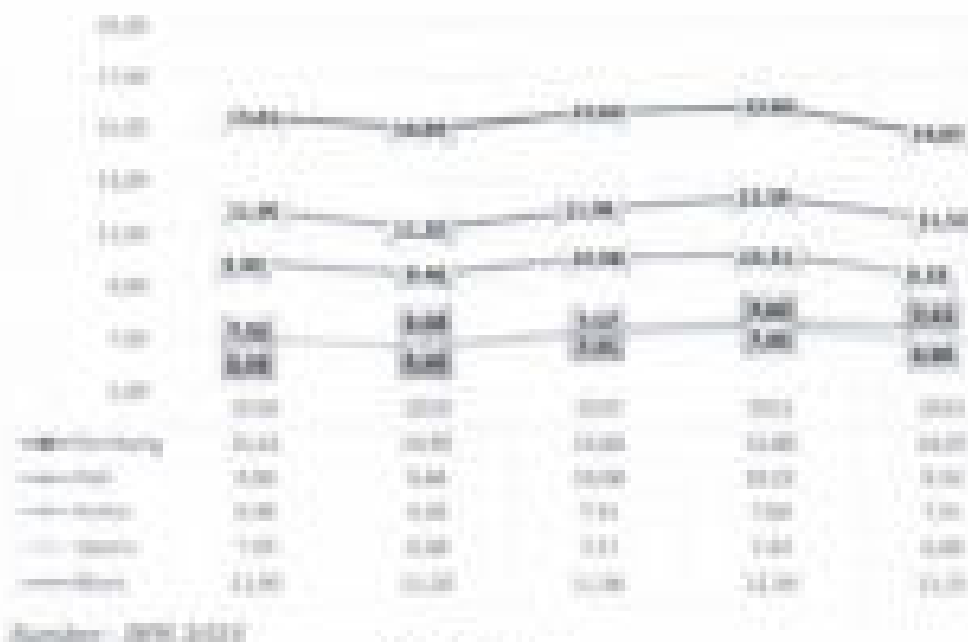


Sumber : BPS 2022

Grafik 3.8

Perbandingan Penduduk Miskin Kabupaten Bantul dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Tabel juga berbeda dengan perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Brebes dengan Provinsi dan Nasional, angka kemiskinan tersebut juga masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan wilayah sekitar Eks-Karesidenan Pati. Namun demikian pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes turun menjadi 14,52%. Adapun perbandingan persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes dengan Kabupaten sekitar pada tahun dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.4
Perbandingan Penduduk Miskin Kabupaten Brebes
dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2018 - 2022

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam rangka akselerasi dan peningkatan efisiensi upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya Bupati Brebes mengeluarkan Peraturan Pemerintah Desa Kecamatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Brebes melalui Peraturan Bupati Brebes Nomor 28 Tahun 2018. Prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes dalam 1 tahun tahun terakhir ini, dibuktikan melalui pendekatan wilayah awal yang disampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Pemanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah. Kabupaten Brebes menentukan secara dua yang tepat sebagai lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 855/1008/2017 tentang Prioritas Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Organisasi Perangkat Daerah Pendamping 25 Kabupaten Brebes Tahun 2018-2019.

Data perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Bantul/BOT Kemensos dan Data Peta Statistik sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Perbandingan Penduduk Miskin Kabupaten Bantul dengan Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

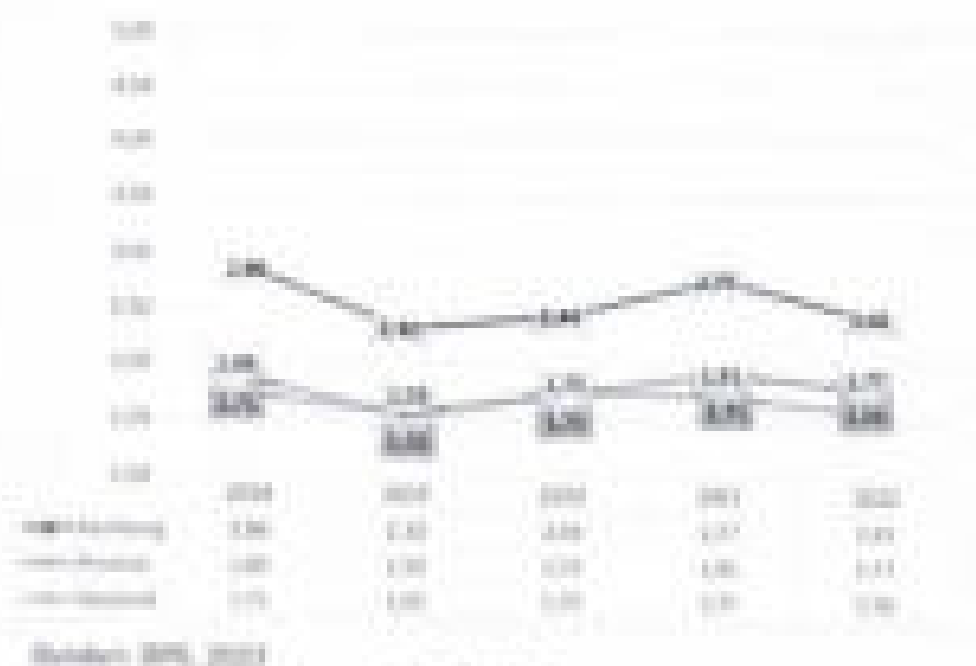
No	Tahun	Kabupaten Bantul				Batas Kemampuan (Rp/bulan/orang)
		Jawa NTB	Nasional	Jawa SP	%	
1	2018	145.300	14,30	107.400	14,30	107.443
2	2019	139.700	13,30	105.200	14,30	107.443
3	2020	140.300	13,30	105.000	14,30	107.443
4	2021	470.000	14,30	105.000	14,30	107.443
5	2022	472.400	14,30	104.500	14,30	107.443
Provinsi Jawa Tengah						
1	2018	1.130.000	14,30	1.000.000	14,30	107.443
2	2019	1.040.000	14,30	1.100.000	14,30	107.443
3	2020	1.040.000	14,30	1.000.000	14,30	107.443
4	2021	1.100.000	14,30	1.100.000	14,30	107.443
5	2022	1.100.000	14,30	1.100.000	14,30	107.443

Sumber: DPT Kabupaten Bantul, 2022
(DPT 2022)

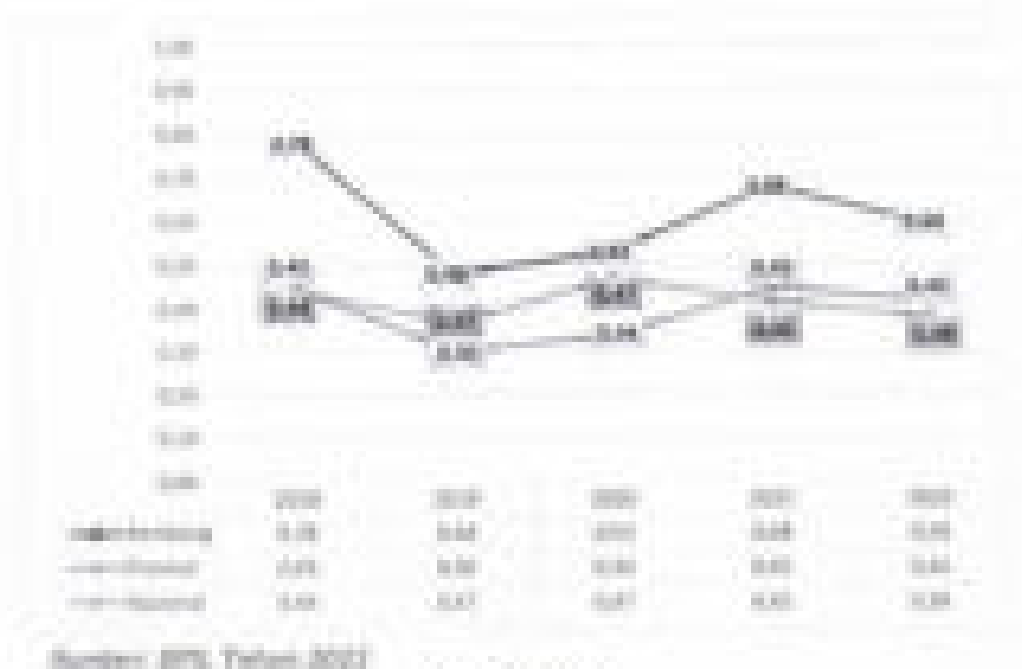
Penduduk miskin Kabupaten Bantul menurut DTKS 2022 adalah 472.400 jiwa (72,81), berbeda dengan jumlah penduduk miskin Tahun 2022 yang ditela DTS Kabupaten yaitu berjumlah 54.500 jiwa (14,50%). Ada beberapa yang signifikan pada DTKS 2022 karena semua program jaminan sosial dari pemerintah pusat dimasukkan DTKS. Berdasarkan data data pemerintah penduduk miskin masih diatas Provinsi jawa tengah berbeda dengan gate kemiskinan diatas provinsi jawa tengah. Data penduduk miskin diatas adalah data yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terakhir adalah bulan Februari tahun 2022. DTKS diperoleh dari RDT 2018 yang telah direvisi dan validasi mandiri melalui kegiatan Sistem Layanan Bantuan Terpadu & Monitoring Pemutakhiran Mandiri (SLMT & MPM) tingkat desa di Kabupaten Bantul kemudian dimasukkan melalui program Rata-Rata Kesejahteraan Sosial. Data tersebut menjadi acuan utama pengungkap seluruh program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah. Program skala nasional diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sosial Miskin (BSM), Program Indonesia Padat (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Indonesia Sehat (PIS), Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH). Selain Program skala daerah diantaranya adalah dengan memberikan Disampingnya bantuan bagi masyarakat miskin terpadu, Bantuan Lanjut Terpadu Miskin (Bantuan Merakyat), Bantuan Bantuan Disabilitas serta pemenuhan teknologi melalui pemanfaatan sistem informasi kemiskinan.

Selain berdasarkan data jumlah penduduk miskin, perkembangan kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Konsumsi dan Indeks Kapasitas Konsumsi. Dalam rentang waktu tahun 2018-2022,

Indeks Ketahanan Kesehatan (IK) mengalami fluktuasi yang cenderung turun dari 3,46 menjadi 2,41, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan penyelenggaraan kesehatan telah cukup efektif untuk menurunkan morbiditas. Sementara Indeks Kapasitas Kesehatan (IK) Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi yang cenderung turun, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,78. Pada tahun 2022 IK mengalami penurunan menjadi 0,59. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengetahuan serta perubahan risiko di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketimpangannya perbandingan Indeks Ketahanan Kesehatan (IK) dan Indeks Kapasitas Kesehatan (IK) Kabupaten Bantul dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.7
Indeks Ketahanan Kesehatan (IK) (Indeks) Kabupaten Bantul dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



Grafik 3.6

**Perolehan Nilai Indeks Represiasi Kemiskinan (IR) (Indeks) Kabupaten
Kaligaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

Masalah kemiskinan selalu merupakan perhatian utama di berbagai daerah. Hal ini terjadi karena selaku lembaga pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan masalah-masalah persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat-tingkat masyarakat. Oleh karena itu, isu kemiskinan menjadi isu krusial yang perlu diatasi pemerintahnya. Sebagaimana kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) guna memajukan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

3.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah status yang terwujud dari pelayanan-pelayanan sosial dan berbagai-bagai yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kehidupan yang memuaskan dan nilai-nilai pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya seperti mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Fokus pembangunan pada aspek kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan sosial masyarakat antara lain Pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2019 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, selama kurun waktu 5 tahun 2018-2022, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kaligaten terus mengalami peningkatan mencapai 1,54%. Setiap tahunnya terjadi kenaikan IPM dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,30% meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan

sebesar 0,13%. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, Jawa Tengah dan wilayah Eks Karisidenan Pati, Indeks IPM Kabupaten Rembang masih tergolong rendah, namun terus meningkat IPM yang akan dapat diarahkan meningkatkan perubahan yang positif. Oleh karena itu data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang, Kabupaten Ekskarisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Data IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Eks
Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Rembang	68,46	69,18	70,55	70,83	71,38
Blora	67,98	68,55	69,34	69,37	69,59
Pati	70,71	71,35	71,77	72,28	72,74
Jawa	71,38	71,84	71,98	72,24	72,73
Nasional	72,34	72,80	73,06	73,28	73,54
Jawa Tengah	71,13	70,78	71,87	72,38	72,78
Nasional	71,88	72,88	73,04	73,38	73,81

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Konsep pembangunan manusia awalnya merupakan konsep yang mengabdikan peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Hal ini secara signifikan dibutuhkan bahwa pembangunan yang dilakukan secara bertahap pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dimana IPM merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia tersebut.

Kemudian pemerintah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang melalui meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per kapita. Perkembangan komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)
2018	74,34	12,88	6,88	18.788
2019	74,51	13,08	7,18	19.188
2020	74,55	13,11	7,14	19.188
2021	74,61	13,13	7,28	19.188
2022	74,68	13,13	7,41	19.488

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tren pemerintah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai dari Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per kapita, terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Dengan rata-rata pertumbuhan tinggi-

rating indikator: Angka Harapan Hidup (AHH) tumbuh sebesar 0,07% per tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RALS) tumbuh sebesar 0,02% per tahun dimana pada tahun 2022 RALS telah mencapai 12,13 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan mereka hingga kelas SMA atau DI, dan Rata-Rata Lama Sekolah (RALS) tumbuh 0,11% per tahun dengan waktu tempuh Pendidikan hingga kelas VII (SDP kelas 3). Sedangkan perbandingan Regional Jawa Tengah dan Eks-Karesidenan Pati terkait Indikator Pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.17
Perbandingan Indikator Pembentukan IPM Nasional, Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Pati Tahun 2022

Kategori/Periode	Tahun 2022			
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-Rata Lama Sekolah (RALS)	Rata-rata Lama Sekolah (RALS)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)
Nasional	74,48	12,13	7,42	12.407
Jawa	74,42	12,14	7,31	12.207
Jawa Tengah	74,31	12,20	7,32	12.548
Jawa Timur	74,36	12,15	8,22	12.200
Jawa Barat	74,42	12,11	8,28	12.411
Jawa Tengah	74,31	12,20	7,32	12.548
Nasional	74,48	12,13	8,22	12.478

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan daerah Eks Karesidenan Pati cenderung rendah, sehingga jika dilihat sejak rapian per tahunnya terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk tidak tinggal diam dan terus melakukan upaya perbaikan serta peningkatan. Berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di bidang Pendidikan maupun kesehatan. Pada bidang Pendidikan kebijakan dilakukan dengan pemberian Disertifikasi atau beasiswa bagi penduduk miskin sehingga mampu melanjutkan pendidikannya, selain itu juga melakukan kerjasama dengan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dengan membangun Pusat Studi di Luar Kampus Utama (PSKCU) melalui rumah tanah dan bangunan. Sedangkan bidang kesehatan dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik melalui pelayanan sarana dan prasarana maupun penyelesaian teknologi daring (online). Melalui berbagai kebijakan tersebut diharapkan kedepannya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Semarang.

b. Pendidikan

Pendidikan memiliki dalam pembangunan sebuah bangsa berlandaskan di dalamnya pembangunan pada lingkup kabupaten/kota adalah suatu kerangka, dimana pendidikan memiliki dapat diartikan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya tanggap sebagai salah satu aset yang

proses pembelajaran. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkelanjutan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prestiginya pendidikan yang berkualitas semakin standar, salah satunya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri hanya dapat diraih jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan.

Tabel 3.18
Indikator Makro Urusan Pendidikan Kabupaten Bontang
Tahun 2018-2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Harapan Lama Sekolah	12,00	12,10	12,11	12,11	12,11
2	Rata-rata Lama Sekolah	8,91	9,10	9,18	9,20	9,21
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	PAIS	87,74	87,43	88,54	88,71	88,88
	SLR/SL	88,71	88,48	88,58	88,62	88,78
	APK/APS	87,38	87,82	87,70	100,00	114,50
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	PAIS	87,74	87,43	88,54	88,71	88,88
	SLR/SL	81,38	81,26	81,24	81,98	81,81
	APK/APS	78,81	78,81	78,73	77,31	80,27
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	PAIS	88,71	88,58	88,54	88,81	88,95
	SLR/SL	87,38	87,08	87,28	87,34	87,81
	APK/APS	88,71	88,48	88,80	87,71	88,78

Sumber: Ditadiklat, Ditjenpro Kab. Bontang, 2022

Indikator kinerja urusan Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur dalam tingkat partisipasi bidang pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bontang.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator makro urusan pendidikan Kabupaten Bontang cenderung meningkat. Meskipun pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami penurunan capaian setiap tahunnya, namun peningkatan capaian pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung bersifat fluktuatif setiap tahunnya.

c. Kesehatan

Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Bontang dilihat melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Jumlah Kematian Bayi/AMB, Angka Kematian Balita/AKABA (per 1.000 kelahiran hidup), Angka Kematian Ibu (AKI), Jumlah Kasus Gigitan Gigitan, Prevalensi Stunting, Selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Indikator Makro Urusan Kesehatan Kabupaten Bontang
Tahun 2018-2022

No	Urusan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,38	74,33	74,33	74,31	74,34
2	Angka Kematian Bayi/AMB (per 1.000 kelahiran hidup)	100	100	100	97	95
3	Angka Kematian Balita/AKABA (per 1.000 kelahiran hidup)	170	169	167	169	168
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	8	8	11	14	8
5	Jumlah Kasus Gigitan Gigitan	44	58	58	44	44
6	Prevalensi Stunting (per 1000 penduduk)	28,71	28,68	-	28,7	28,7
7	Prevalensi Stunting (per 1000 penduduk)	28,68	28,68	28,76	28,67	28,67

Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bontang, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator makro urusan kesehatan Kabupaten Bontang cenderung bervariasi, dimana terdapat beberapa indikator yang mengalami kenaikan, penurunan, maupun fluktuatif. Adapun indikator urusan kesehatan yang mengalami kenaikan adalah Angka Harapan Hidup dimana pada tahun 2018 sebesar 74,38 naik menjadi 74,34 pada tahun 2022 dan Angka Kematian Balita (AKABA) (jumlah) dan tahun 2018 sebanyak 170 menurun di tahun 2022 menjadi 168.

d. Kemampuan Kerja

Kemampuan kerja merupakan hal yang akan Angkutan kerja dengan kemampuan prapengetahuan tenaga kerja. Pertumbuhan Angkatan kerja terus meningkat dengan meningkat yang dapat meningkatkan kemampuan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertumbuhan Angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memengaruhi kemampuan kerja dari sisi pemenuhan (meningkatkan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Kemampuan kerja sendiri dapat dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi Angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kemampuan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kemampuan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Berkaitan Tingkat Partisipasi Anggaran Kerja (TPAK) merupakan gambaran tentang perilaku yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari mereka pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi anggaran kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kemampuan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran kerja maka mengindikasikan semakin luas kemampuan kerja.

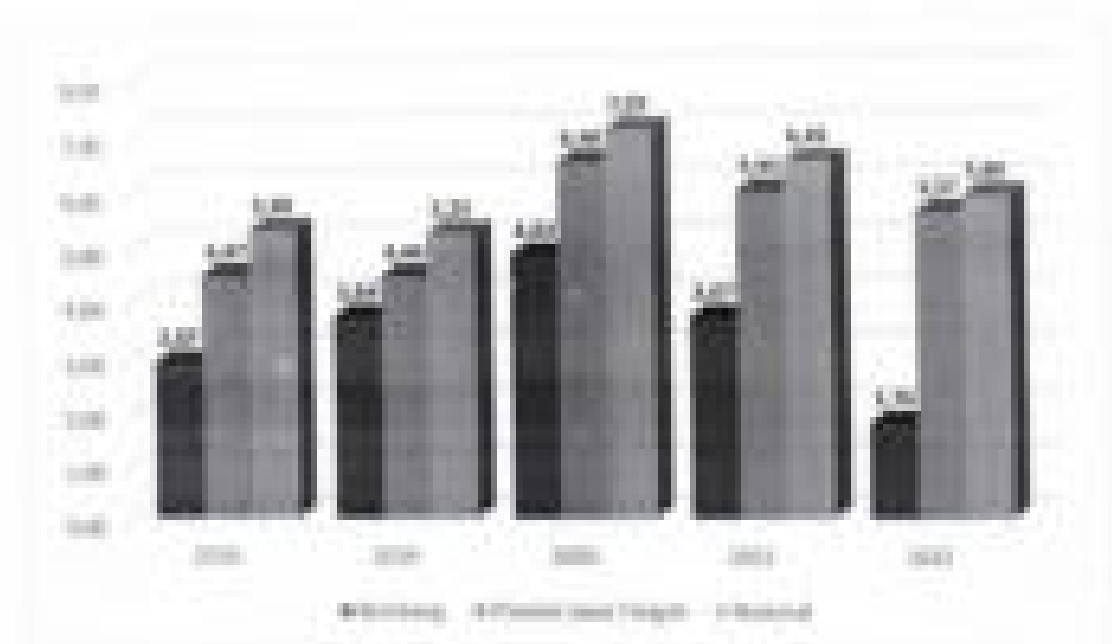
Beberapa detail perkembangan TPT dan TPAA Kabupaten Bengkang dari tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.30
Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Anggaran Kerja
Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2023

Tahun	TPT (%)		TPAA (%)	
	Prov. Jateng	Kab. Bengkang	Prov. Jateng	Kab. Bengkang
2018	4,31	1,85	67,34	67,40
2019	4,34	1,86	68,30	67,36
2020	4,38	4,83	70,30	64,17
2021	4,38	1,87	69,34	73,67
2022	4,37	1,78	70,34	73,68

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa dalam tingkat Kabupaten Bengkang, Tingkat Partisipasi Anggaran Kerja (TPAA) selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan angka dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022. Dimana pada tahun 2018 sebesar 67,40% menjadi 65,17% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 naik menjadi 73,67% sehingga pada tahun 2022 naik menjadi 73,68%. Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkang sejak tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan, dari 2,87 % pada tahun 2018 menjadi 4,83 % pada tahun 2020, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,96% pada angka 4,83% akibat adanya pandemi covid-19. Peningkatan pada tahun 2023 tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Bengkang, tetapi di tingkat Provinsi dan nasional dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga menyebabkan permasalahan pengangguran diberbagai sektor pemerintahan. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:



Sumber: BPS, 2023

Grafik 3.9

Perbandingan Tingkat Penganggaran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Bontol

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat Tingkat Penganggaran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bontol pada kurun waktu 2018 hingga 2022. Dapat terlihat Tingkat Penganggaran Terbuka (TPT) Kabupaten Bontol lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Penganggaran Terbuka Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun perlu diperhatikan, pada kurun waktu 2018 hingga 2020 TPT Kabupaten Bontol mengalami peningkatan dari 3,87%, menjadi 4,88%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah Penganggaran terbuka di Kabupaten Bontol semakin bertambah, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 angka penganggaran terbuka di Kabupaten Bontol mengalami penurunan dari 3,87% pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,78% pada tahun 2022, itu artinya penganggaran terbuka di Kabupaten Bontol mengalami penurunan selama dua tahun terakhir.

Tabel 3.31

Jumlah Anggaran Kerja Kab Bontol Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Anggaran Kerja					
Batas	324.118	312.284	314.787	348.797	375.814
Penganggaran Terbuka	1.248	12.135	13.084	13.797	4.721
Total Anggaran Kerja	325.366	324.419	327.871	362.594	380.535

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari data diatas dapat terlihat bahwa jumlah Anggaran Kerja yang berstatus Belanja di Kabupaten Bontol mengalami penurunan dari tahun 2018-2020 dimana pada tahun 2018 mencapai 324.118 uang yang belanja sehingga pada tahun 2020 menjadi 314.787 Anggaran Kerja yang Belanja. Pada tahun 2021 dan 2022 jumlah Anggaran Kerja yang belanja di Kabupaten

Berabung mengalami kenaikan mengingat nilai kepemilikan beberapa pabrik di Kabupaten Berabung, sehingga dapat menyerap Angkatan Kerja. Sementara itu, jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Berabung cenderung stabil, dimana pada tahun 2018 sebesar sebanyak 9.889, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 13.988 akibat adanya dampak dari adanya pandemi covid-19. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan sebanyak 1.693 menjadi 12.295 pengangguran terbuka pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 6.570 menjadi 6.723.

3.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kelompok kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Berabung antara lain Kesenian Mado Tradisional dan Kesenian/Teater Tradisional. Kesenian Mado Tradisional terdiri dari Kerawitan, Suktawati, Gedes, Cakelan, Theng Theng Leb, Kerawong. Sedangkan kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari Wawang Kuli, Wawang Crang, Wawang Kruki, Kethoprak, Empuk, Gandara, Ande - Ande Lumat, Laluan, Orok Orok, Pethel Sanyang, Batangan/ Bang. Kesenian tersebut merupakan aset budaya dan kekayaan Kabupaten Berabung. Kelompok kesenian di Kabupaten Berabung pada Tahun 2022 sebanyak 271 kelompok. Data kelompok kesenian di Kabupaten Berabung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22
Data Kelompok Kesenian Kabupaten Berabung Tahun 2017-2022

No	KELompok Kesenian	JUMLAH KELOMPOK					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelompok Kerapan Sam Sali	1	1	1	1	1	1
2	Mado Tradisional	1	1	1	1	1	1
3	Kerapan Sam Sali	1	1	1	1	1	1
4	Teater Tradisional	1	1	1	1	1	1
5	Teater Tradisional	1	1	1	1	1	1
6	Mado Mado	1	1	1	1	1	1
7	Teater	1	1	1	1	1	1
8	Wawang Kuli	1	1	1	1	1	1

Sumber: Kabupaten Berabung, 2022

Berbagai olahraga olahraga dapat dipromosikan melalui prosedur jumlah medal dari jumlah lapangan olahraga. Adapun jumlah medal dan lapangan olahraga sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.23
Jumlah medal dan lapangan olahraga di Kabupaten Berabung Tahun 2018-2022

No	Jenis	Medal	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Medal yang diperoleh dalam berbagai jenis olahraga meliputi Pan, dan Badminton	Medal	10	21	1	1	10
2	Jumlah lapangan olahraga	Medal	104	104	104	104	104

Sumber: Kabupaten Berabung, 2022

3.1.3. Aspek Pelayanan Urus

Pemerintah Kabupaten Berabung dalam rangka memudahkan pelayanan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat agar dapat terlibat pada kinerja pembangunan yang dilaksanakan pada masing-masing urusan dan kewenangan Daerah yang terdiri dari fungsi layanan urusan wajib dan fungsi

layanan urusan pilihan. Aspek pelayanan urusan Kabupaten Beraung sendiri terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dan pemukiman ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketertarikan, ketertarikan umum dan pertambangan masyarakat serta sosial. Aspek pelayanan urusan digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, analitisa integrasi dan koordinasi 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), selain itu juga indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018. Gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup indikator tersebut antara lain:

a. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam urusan wajib pelayanan dasar. Pendidikan sendiri adalah usaha untuk menumbuh dan mengembangkan kepekaan masyarakat baik secara jasmani maupun rohani. Seperti yang tertera dalam UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mempersiapkan manusia belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara. Pendidikan juga merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi masa ke depannya kualitas masyarakat akan sangat sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Secara umum urusan Pendidikan pada Aspek Pelayanan Urusan Dasar Kabupaten Beraung dapat dilihat dari pengelompokan berikut ini:

• Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Anak merupakan aset negara. Pada tingkat tertentu memiliki tanggung jawab dan keberuntungan ketidaktergantungan negara dan bangsa. Jika sejak usia dini, anak dibekali dengan pendidikan dan nilai-nilai yang baik maka kelak anak akan mampu mengabdikan potensi-potensi yang ada pada dirinya sehingga mereka dapat mengembangkan potensi tersebut dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara ini agar mampu bersaing di era globalisasi. Salah satu upaya untuk dapat menghadapi tantangan globalisasi adalah dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang sanggup menghadapi tantangan tersebut. Sumber Daya Manusia ini harus sudah dipersiapkan jauh-jauh hari yaitu dengan memberikan perhatian yang besar pada pendidikan sejak usia dini.

Di Kabupaten Beraung APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2021 untuk kelompok umur 1-6 tahun mencapai 96,11 persen. Angka tersebut

lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 83,63 persen. Persentase angka APK PAUD tahun 2017-2020 yang berkisar antara 82,60- 87,74 persen, masih terbelakang dibanding kemajuan masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini.

• **Pendidikan Dasar**

Pada tahun 2022, jumlah Sekolah Dasar sebanyak 426 unit. Jumlah tersebut meliputi SD Diknas sebanyak 376 unit dan SD Non Diknas sebanyak 50 unit. Jumlah murid SD mengalami penurunan yaitu dari 57.645 murid pada tahun 2021 menjadi 56.217 murid pada tahun 2022, terdiri dari murid SD sebanyak 46.638 murid dan murid MI sebanyak 7.579 murid. Sedangkan jumlah SMP/MTs Diknas dan Non Diknas pada tahun 2022 sebanyak 108 unit mengalami peningkatan dari 107 unit pada tahun 2021. Jumlah murid SMP/MTs mengalami kenaikan yaitu dari 29.251 pada Tahun 2021 menjadi 32.814 pada Tahun 2022. Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pendidikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.24
Capaian Indikator SPN pada Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022

No.	Indikator SPN	Indikator Pencapaian	2018	2019	2021	2022
1	Pendidikan Dasar	Persentase warga negara usia 7-14 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	82,60%	82,60%	82,60%	83,63%
2	Pendidikan Menengah	Persentase warga negara usia 7-14 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	100%	82,10%	100%
3	Pendidikan Non-Teknik Tinggi	Persentase warga negara usia 14 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan non-tekni yang dini	100%	88,74%	88,74%	88,49%

Sumber: *Statistik Kota Bengkulu, 2021*

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi ketahanan dan pembangunan sebuah kota, serta faktor yang paling berharga yang tidak pernah bisa diukur dengan apapun. Oleh karena itu setiap orang tentu mendambakan tercapainya sebuah kota yang tidak hanya tercapai sehat, tetapi tercapai dapat dipertahankan dengan berbagai upaya, salah satunya adalah pengalangan pelayanan kesehatan. Kesehatan dengan giat, itu nasional yang nasional adalah pembangunan kesehatan. Kabupaten Bengkulu sebagaimana daerah lain saat ini dalam tahapan program Aksi Konvergensi Strategis dan Koordinasi Kesehatan, yang pelaksanaannya diteruskan dengan pembentukan Dana Desa/Kelurahan. Adapun kinerja dalam urusan Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.20
Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian					Kondisi Awal
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Rasio Pemenuhan pelayanan kesehatan per desa/kecamatan > 100%	100%	100	100%	100%	100%	
2	Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk	0,07%	10	0,07%	0,07%	0,07%	
3	Rasio dokter per desa/kecamatan	14,24%	10	14,24%	14,24%	14,24%	
4	Cakupan pelayanan kesehatan yang terintegrasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan layanan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan IKT	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan akses perantara kesehatan per desa/kecamatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Rasio pelayanan kesehatan TB +	100%	100	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan primer kesehatan jiwa (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan layanan rujukan (%)	100%	100	100%	100	100%	100%
11	Persentase tercapainya indikator kesehatan jiwa per desa/kecamatan dan per kecamatan (rata-rata tahun 2018-2022 target > 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	Kelembagaan kesehatan jiwa per desa/kecamatan (rata-rata tahun 2018-2022 target > 100%)	100%	100	100%	100%	100%	100
13	Persentase tercapainya indikator kesehatan jiwa per kecamatan (rata-rata tahun 2018-2022 target > 100%)	100%	100	100%	100%	100%	100

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian					Kendala Utama
		2019	2020	2021	2022	2023	
14	Kelembagaan dan sumber daya manusia (Tahun 2 Target 2.3.20)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Kelembagaan dan sumber daya manusia yang mendukung nilai-nilai organisasi (Tahun 3 Target 3.3.20)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Tahun 3 Target 3.27)	2.000	2.000	18.000	14.000	9.000	9.000
17	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Tahun 3 Target 3.27)	19	18	18	18	18	9.000
18	Angka kematian neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup (Tahun 3 Target 3.28)	18	18	18	18	18	9.000
19	Kelembagaan dan sumber daya manusia (Tahun 3 Target 3.3.20)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Produksi produk kesehatan per 1000 penduduk (Tahun 3 Target 3.27)	0,000	0,01	0,000	0,000	0,000	0,0

Sumber: BPS, Ditjen Binafarma Kementerian Kesehatan, 2021

Tabel 3.30
Capaian Indikator SPN pada Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kelembagaan dan sumber daya manusia yang mendukung layanan kesehatan ibu hamil	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kelembagaan dan sumber daya manusia yang mendukung layanan kesehatan ibu bersalin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Kelembagaan dan sumber daya manusia yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Kelembagaan dan sumber daya manusia yang mendukung pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Pelayanan kesehatan jiwa yang terjangkau (SPN)	Kelembagaan dan sumber daya manusia yang mendukung pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	2008	2009	2009	2009	2009
1	Pelayanan kesehatan pada rawat inpatient	Tindakan yang sesuai 100% tahun yang menunjukkan pelayanan kesehatan yang standar	99,2%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
2	Pelayanan kesehatan pada rawat jalan	Tindakan yang sesuai 100% tahun yang menunjukkan pelayanan kesehatan yang standar	100,0%	99,5%	97,0%	99,0%	100,0%
3	Pelayanan kesehatan Ambulans Spesial	Tindakan yang sesuai yang menunjukkan pelayanan kesehatan yang standar	99,0%	99,0%	97,0%	99,0%	97,0%
4	Pelayanan kesehatan Ambulans Spesial Motor	Tindakan yang sesuai yang menunjukkan pelayanan kesehatan yang standar	99,0%	97,0%	99,0%	99,0%	100,0%
5	Pelayanan kesehatan yang berupa tindakan rawat jalan	Tindakan yang sesuai dengan prosedur yang menunjukkan pelayanan kesehatan yang standar	99,0%	99,0%	97,0%	99,0%	100,0%
6	Pelayanan kesehatan yang berupa tindakan rawat jalan	Tindakan yang sesuai yang menunjukkan pelayanan kesehatan yang standar	99,0%	99,0%	97,0%	99,0%	99,0%
7	Pelayanan kesehatan yang berupa tindakan rawat jalan	Tindakan yang sesuai yang menunjukkan pelayanan kesehatan yang standar	99,0%	97,0%	100%	100,0%	100,0%

Sumber: Tahun 2009

Berdasarkan data diatas terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang masih kurang optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu ratio tenaga kesehatan yang bekerja mencapai standar, kesadaran masyarakat dalam menatahi standar pemeriksaan kesehatan masih rendah, hingga pemerataan pelayanan kesehatan yang belum dapat terjangkau semua semua fasilitas kesehatan milik non pemerintah.

a. Penerimaan Umum Dan Fasilitas Ruang

Terdapat tingkat pembangunan pada urusan penerimaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur, serta penanganan air baku dan air minum. Untuk peningkatan infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten Bontang telah mengizinkan SK Bupati sebagai tindakan khusus bagi peningkatan jalan yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bontang Belakangan dalam rangka penanganan air baku dan air minum dilakukan Pembangunan Berkeadilan, Program Penghinaan Sungai Terpadu (PPT), dan Program

Konstruksi Sumber Daya Air. Selengkapnya perkembangan urusan pekerjaan umum dan pemertaan ruang dapat dilihat berikut ini.

• **Kebencanaan**

Pada tahun 2022 Kabupaten Bontang mempunyai panjang jalan 578,85 Km dengan kondisi jalan baik 87,83%. Kondisi jalan baik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Bontang terdiri dari jalan kabupaten sepanjang 578,85 Km, jalan provinsi sepanjang 33,34 Km dan jalan nasional sepanjang 88,04 km. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Bontang sebanyak 136 unit dengan panjang 1.238,9 m sampai tahun 2022 yang dalam kondisi baik sebanyak 92%. Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.27
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022

No	Jenis	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan kabupaten (Km)	578,85	578,85	578,79	578,79	578,85
	- Jalan baik	507,2	507,2	507,1	507,1	507,2
	- Jalan rusak	71,65	71,65	71,69	71,69	71,65
	- Jalan rusak parah	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
	- Jalan rusak berat	66,45	66,45	66,49	66,49	66,45
	- Jalan rusak ringan	61,25	61,25	61,29	61,29	61,25
2	Panjang jalan provinsi (Km)	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
	Panjang jalan Nasional (Km)	88,04	88,04	88,04	88,04	88,04
3	Jumlah jembatan kabupaten Kabupaten	136	136	136	136	136
	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	92	92	92	92	92

Sumber: DPMPTSP, 2022

Saluran drainase di Kabupaten Bontang sepanjang 24,76 km. Pada tahun 2022 saluran drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 19,28 km, sedangkan kondisi rusak sepanjang 5,48 km. Kondisi drainase dalam kondisi baik baik dibenahi/tanpa saluran sebelumnya karena adanya perbaikan saluran drainase. Hal tersebut dilakukan mengingat volume air dari hulu semakin meningkat diperlukan saluran yang mampu menampung luarnya rekana air dan strukturnya agar tidak tergenas. Saluran drainase tersebut berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan limbah, limbah dan pemukiman penduduk. Hal ini mengoptimalkan masih perlu pemertaan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten, terutama drainase yang berada pada kawasan pemukiman yang berbatasan langsung dengan pemukiman. Adapun pengembangan jaringan drainase harus dilakukan dengan mengadopsi bentuk teras dan tanggul sebagai unsur akhir agar jaringan drainase dapat berfungsi secara sempurna untuk kawasan pembuangan. Ditela lain drainase jalan juga perlu pembanguaan dalam rangka pemertaan tepaknya tanggul. Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.28
Perkembangan Panjang Saluran Drainase di Kabupaten Rembang
Tahun 2018-2022

No	Kelas	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Drainase Beton	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36
2	Panjang Drainase Saluran Kersala Pondok Beton	25,17	18,94	18,94	18,94	18,94
3	Panjang Drainase Saluran Kersala Beton Beton	4,79	5,02	4,47	4,47	5,02

Sumber: DPL TMRG, 2022

c. Sumber Daya Air

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan dalam rangka menyediakan pemenuhan air baku untuk air minum, irigasi maupun industri. Luas kawasan areal irigasi sebesar 21.192,43 ha mencakup dalam 283 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 3 DI kewenangan pusat, 1 DI kewenangan provinsi, 229 DI kewenangan kabupaten dan 147 DI kewenangan desa. Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku
di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022

No	Kelas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kewenangan Kewenangan Daerah Irigasi Luas Irigasi Kabupaten dan Kendali pada dan luas 21.192,43 ha	21.192,43	21.192,43	21.192,43	21.192,43	21.192,43
2	Pemenuhan Ketersediaan Air Baku Irigasi dan Industri	21.192,43	21.192,43	21.192,43	21.192,43	21.192,43

Sumber: DPL TMRG, 2022

Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embung, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air. Kondisi tersebut dilakukan mengingat cakupan ketersediaan air baku untuk irigasi maupun untuk industri masih relatif kurang.

Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih adalah dengan adanya rencana pembangunan retang-cabung dan bendung-bendung baru di wilayah Kabupaten Rembang, dan penyelidikan air tanah yang lebih detail khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan air sehingga rencana pembangunan tersebut dapat meningkatkan jumlah ketersediaan air khususnya pada wilayah-wilayah tertentu yang mengalami kekurangan akan ketersediaannya.

Tabel 2.30
Data Runding di Kabupaten Rembang 2018-2022

Tahun	Runding			Jumlah
	Ruang	Runding	Ruang	
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				

Sumber: Kabupaten Rembang, 2022 (data)

• **Peraturan ruang**

- **Netaratan Terhadap RTM**

Saat ini Kabupaten Rembang telah memiliki payung hukum terkait dengan tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTM) Kabupaten Rembang. Sejak terbitnya Perda RTM maka seluruh perijinan pemanfaatan ruang harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Peraturan Ruang Daerah (BKPRD), namun demikian sampai saat ini belum tersedia data terkait perijinan pemanfaatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

- **Luas Wilayah Industri**

Luas kawasan industri di Kabupaten Rembang diregulasi dalam pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang. Kawasan peruntukan industri dalam RTM terbagi menjadi tiga yaitu kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar adalah 500 hektar ke atas direhabilitasi untuk dikelola menjadi kawasan industri. Adapun rencana peruntukan kawasan industri besar tersebut terdapat di Kecamatan Rembang, Salar dan Ganyu. Sementara itu kawasan peruntukan industri menengah terdapat di sepanjang koridor pantai yaitu Kalori, Rembang, Lasem, Salar, Kragean dan Sarang.

- **Luas Wilayah Kehutanan**

Kondisi Kabupaten Rembang yang berada di kawasan dataran rendah dan merupakan hulu dari aliran air maka banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Rembang. Secara data data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir dengan tahun tertentu. Berdasarkan Pasal 18 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Kragean, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Purwas, Kecamatan Selayu, Kecamatan Salar, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kalori dan Kecamatan Sumber.

- **Luas Wilayah Kehutanan**

Selain kehutanan, Kabupaten Rembang juga berpotensi terancam bencana kebakaran. Kawasan yang terancam terkena dampak kebakaran adalah daerah tengah meliputi Ganyu, Purwas, Kalori, Rembang, Sarang, Kragean, Lasem. Meskipun telah memiliki kemampuan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kebakaran.

– Luas Wilayah Perkebunan

Kabupaten Kembang melaksanakan program pemukiman Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, serta kawasan pemukiman perkebunan seluas 5.214 hektar yang terdapat di 14 lokasi kabupaten maupun kota/kabupaten. Dalam penyusunan pelaksanaan dasar di Bidang Pelayanan Umum dan Perataan Ruang, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Capaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Indikator SPM	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pemukiman Perda (Perumahan) per desa/kelurahan di tingkat kabupaten/kota <small>Luas Perumahan Perda (Perumahan) 4.000 ha</small> <small>Luas Perumahan Perda (Perumahan) 4.000 ha</small>	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemukiman Perda (Perumahan) per desa/kelurahan di tingkat kabupaten/kota <small>Luas Perumahan Perda (Perumahan) 4.000 ha</small> <small>Luas Perumahan Perda (Perumahan) 4.000 ha</small>	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPT/DAK, 2022

Pembangunan urusan pekerjaan umum dan perataan ruang dijabarkan berdasarkan beberapa variabel yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang di Kabupaten Kembang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A. Pekerjaan Umum						
1	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan per desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
2	Luas pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
4	Luas pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
7	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
8	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
9	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
10	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
B. Perataan Ruang						
11	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
12	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
13	Persentase pemukiman perdesa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: DPT/DAK, 2022

d. Perubahan Biaya dan Pengawasan Persekitaran

Peningkatan Pertumbuhan produksi Kabupaten Bandung tentunya diikuti dengan peningkatan kebutuhan rumah dan pengawasan listrik, mengingat biaya itu sendiri merupakan salah satu kebutuhan utama. Pada tahun 2022 tercatat 335-513 pelanggan listrik dengan daya pasang 284.000.000 KVA. Dimana volume tahun 2022 jumlah listrik yang dikawatirkan sebesar 66.726.017 KVA. Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkotaan, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33

Capaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Indikator SPM	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	Jumlah Warga Negara miskin menengah yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara yang menerima subsidi dalam program Perumahan Rakyat Kabupaten/kota yang memperoleh bantuan pembiayaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber: DPMK 2022

Pertumbuhan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34

Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkotaan Tahun 2018-2022

No	Urusan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah layak huni program rumah terjangkau	102.181	174.004	174.004	177.000	182.000
2	luas lingkungan pemukiman layak huni	2.27%	2,87%	2,27%	2,87%	2,27%
		Indikator 08 Kasubid No. 004.147/2017/pt.11 Sept 2017		Indikator 08 Kasubid No. 004.200.2000/pt.11 Desember 2020		
3	Ruas pemukiman layak huni	87.000	94.111	84.276	87.000	84.276
		Indikator 08 Kasubid No. 004.147/2017/pt.11 Sept 2017		Indikator 08 Kasubid No. 004.200.2000/pt.11 Desember 2020		

Sumber: DPMK Kab. Bandung, 2022 dan DPMK Kab. Bandung, 2022

Rendahnya pemukiman rumah baru bisa mengakibatkan pemukiman kumuh yang ada diperkotaan. Untuk diantisipasi tersebut dilakukan identifikasi pemukiman kumuh di perkotaan sehingga pemukiman lingkungan kumuh dapat terfokus pada pemukiman perbaikan.

Perumahan di Kabupaten Bandung sebagian besar diperoleh secara swadaya oleh masyarakat. Pada saat ini sebagian besar kebutuhan rumah diperoleh oleh pihak swasta. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022, RTLH tersebut telah dilakukan peningkatan kualitas rumah sebanyak 11.000 unit. Sebaiknya data Rumah Tidak Layak Huni serta realisasi pengembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.27

Loan Koneksi Rumah dan Pengerangannya di Kabupaten Bandung Tahun 2021 (Berdasarkan BK Rumah no. 050/2000/2000)

No	Kategori	Jenis / Subkategori	Jumlah Rumah		Jumlah Loan Koneksi Rumah		Kategori / Subkategori	
			2020	2021	2020	2021		
A	Kategori	Rumah	15.000	15.000	15.000	15.000		
		Pengerangan	2.277	2.277	2.277	2.277		
		Pengerangan	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225	
		Pengerangan	5.500	5.500	5.500	5.500		
		Pengerangan	6.125	6.125	6.125	6.125		
		Pengerangan	4.950	4.950	4.950	4.950		
		Pengerangan	6.075	6.075	6.075	6.075		
		Pengerangan	6.100	6.100	6.100	6.100		
		Pengerangan	6.000	6.000	6.000	6.000		
		Pengerangan	4.100	4.100	4.100	4.100		
		Pengerangan	10.000	10.000	10.000	10.000		
		Pengerangan	10.000	10.000	10.000	10.000		
		Pengerangan	7.000	7.000	7.000	7.000		
		B	Kategori	Pengerangan	17.750	17.750	17.750	17.750
Pengerangan	11.250			11.250	11.250	11.250		
Pengerangan	4.250			4.250	4.250	4.250		
Pengerangan	21.750			21.750	21.750	21.750		
Pengerangan	11.250			11.250	11.250	11.250	11.250	
Pengerangan	4.250			4.250	4.250	4.250	4.250	
Pengerangan	4.250			4.250	4.250	4.250		
Pengerangan	10.250			10.250	10.250	10.250	10.250	
Pengerangan	4.250			4.250	4.250	4.250	4.250	
Pengerangan	11.250			11.250	11.250	11.250	11.250	
C	Kategori	Pengerangan	14.000	14.000	14.000	14.000		
		Pengerangan	21.200	21.200	21.200	21.200		
		Pengerangan	17.000	17.000	17.000	17.000		
D	Kategori	Pengerangan	20.750	20.750	20.750	20.750		
		Pengerangan	20.750	20.750	20.750	20.750		
		Pengerangan	14.000	14.000	14.000	14.000		
Jumlah Loan Koneksi Rumah			247.250	247.250	275.000	275.000	247.250	247.250
Adanya Pengerangan Koneksi Rumah				0%	20,71%	0%	20,00%	20,00%
				Tidak ada pengerangan pada tahun 2020				

Sumber: BPRP, 2022

a. Ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Upaya mewujudkan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terlaksananya tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertarikan dan ketertarikan masyarakat masih menjadi prioritas seperti pemertua ketertarikan atau gangguan ketertarikan. Untuk itu perlu ditingkatkan peran masyarakat dalam upaya peningkatan dan pengujian ketertarikan lingkungan, termasuk pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang menjadi fokus. Hasilnya kinerja dalam urusan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertibn Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022

Aspek/ Tolak Ukur/ Sasaran/ Indikator Kinerja/ Pengukuran Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio terdapat per kecamatan (KABUPATEN) Peristiwa	%	99	97,91	99	99	99
Capaian persentase penanganan kasus dan penanganan tingkat daerah	%	100	100	100	99	99
Rasio Tim Penanganan per kecamatan (KABUPATEN) Jumlah Tim/ Kelurahan	%	100	100	100	100	100
Jumlah Timanganan Perda yang ditangan	org	99	99	99	99	99
Jumlah Timanganan Perda yang ditangan	org	99	99	99	99	99
Target konflik terungkap secara nasional	ribuan	113,15	113,15	113,15	113,15	113,15
Jumlah Timanganan Ketertibn dan Ketertibn	org	99	99	99	99	99
Jumlah Timanganan Ketertibn	org	1000	1000	1000	1000	1000
Jumlah Tim Penangan dan	ribuan	10	10	10	10	10

Sumber: Laporan IPM 2022

Perkembangan urusan ketenteraman, ketertibn umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bontang juga dapat dilihat dari indikator kinerja standar persiapan minimum (SPM). Dimana nilai capaian kinerja yang sudah dilaksanakan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan publik dari pelayanan publik gratis dan terjangkau dari tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki trend yang meningkat, namun perlu ditingkatkan. Target capaian kinerja (SPM) urusan ketenteraman dan ketertibn umum dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.29
Realisasi Kinerja (SPM) Urusan Ketenteraman dan Ketertibn Umum Satuan
Polisi Pasang Praja Kabupaten Bontang

No	Indikator SPM	Kategori	Realisasi Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan publik dari pelayanan publik gratis dan terjangkau	1.000%		100.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000
			100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000
			100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000
			100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000
			100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000	100.000.000.000.000

Sumber: Laporan IPM 2022

Salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, Pemerintah Kabupaten Bontang telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat dalam kurun waktu tahun 2018-2022, sebagai salah satu upaya peningkatan pendidikan hak-hak politik masyarakat Kabupaten Bontang

untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada dan Piling maupun Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.

Pemerintah sendiri dalam menggunakan hak pilih melalui Pemilu merupakan perlindungan program hak pilih di DPR dan pemilu yang terdaftar di DPR. Tingkat partisipasi pemilu masyarakat Kabupaten Rembang dalam Pilkada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar 60% yang merupakan tingkat partisipasi pemilu lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Selanjutnya tingkat partisipasi pemilu dalam Piling dan Pilpres yang pelaksanaannya bersamaan sebesar 87,43% pada tahun 2018, 100% tinggi dibandingkan tahun 2014, serta tingkat partisipasi pemilu dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada tahun 2020 sebesar 87,54% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015.

Tabel 3.40

Analisis Kinerja Pilkada Gubernur, Pilpres dan Piling, dan Pilkada Bupati Kabupaten Rembang

Aspek/Polusi, Bidang/Program/Indikator Pembangunan Daerah	Satuan	Analisis Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Program Pemilu, menggunakan hak pilih melalui Pemilu						
Pilkada Gubernur	%	60	-	-	-	-
Pilpres dan Piling		87,43	-	-	-	-
Pilkada Bupati		-	-	87,54	-	-

Sumber: Laporan dan website, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk pilgub, piling dan pilpres serta pilkada bupati, partisipasi masyarakat telah melebihi target. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilu masyarakat adalah melalui peningkatan ruang dan kesempatan untuk tingkat pemerintahan dan luas akses dalam kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya perempuan dan pemilu pemilu.

E. Sosial

Pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang adalah pada kelompok lansia terlantar dan disabilitas berat karena kelompok tersebut termasuk kelompok miskin absolut (ultra). Sedangkan permasalahan PMKS yang lain sudah ditangani oleh pemerintah daerah terkait. Agar upaya lain menangani permasalahan PMKS kategori tersebut maka dilakukan pemberian bantuan jasanya biaya hidup dasar serta kesehatan, sehingga diharapkan biaya hidup tiap bulan bisa terpenuhi dan terangan dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, dunia usaha melalui Forum CSR, Rumah maupun personal responsibility. Perencanaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang pada kuartal waktu tahun 2018-2022. Berikut indikator kinerja dasar pada urusan sosial tahun 2018-2022.

Tabel 3.41
Rincian Jumlah Urban Sosial Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPKB	32.053	32.053	32.053	32.053	32.792
2	Perumahan Perkotaan Perumahan Sesuai/semirata Dasar Rakyat	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211
3	Perumahan (1) PKK2 yang diperuntukkan untuk Rakyat	27.842	27.842	27.842	27.842	28.581
4	Perumahan (2) Jumlah rumah sosial yang sudah/ yang diperuntukkan untuk Rakyat	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5	Jumlah perumahan (1) (PKK2)	34.033	34.033	34.033	34.033	34.762

Sumber: Dinas PPKB, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah PPKB di Kabupaten Bontang memiliki trend yang menurun. Pada Tahun 2018 jumlah PPKB sebanyak 32.053 jiwa terus terus menjadi 32.053 jiwa di Tahun 2020. Namun, mengalami peningkatan di Tahun 2021 menjadi 40.642 jiwa dan Tahun 2022 menjadi 41.792. Rata-rata jumlah PPKB yang terdapat setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Pemerintah tertinggi jumlah PPKB yang terdapat terdapat di tahun 2021 yakni sebanyak 4.657 jiwa, atau sebesar 13,20 persen.

Tekun Urban Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Perkembangan Indikator Ketangguhan di Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.42

Realisasi Indikator Kinerja pada Urban Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Angkatan Kerja	499.971	500.219	501.008	511.001	510.004
2	Angkatan Kerja Jumlah tenaga Kerja	101.114	112.000	111.797	109.727	110.014
	Perkotaan	8.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	Total Angkatan Kerja	109.114	124.000	122.797	120.727	121.014
3	Rata-rata Angkatan Kerja Perkotaan	14.000	12.000	14.000	14	14.000
	Angkatan Kerja Perkotaan	101.114	112.000	111.797	109.727	110.014
	Jumlah	10.000	12.000	11.000	11	11.000

Sumber: BPS, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Biringbang selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan angka yang stabil. Pada tahun 2021 angka TPAK yakni sebesar 73,87% dan mengalami peningkatan sebesar 73,98% pada tahun 2022. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Biringbang sejak tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan kinerja yang baik yaitu mengalami penurunan, dari 2,83% menjadi 1,70%. Dengan total lapangan pekerja kerja tahun 2022 sebanyak 15.490 orang. Sementara itu, Perkembangan Usaha Ketenagakerjaan di Kabupaten Biringbang Tahun 2018-2022 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Perkembangan Usaha Ketenagakerjaan di Kabupaten Biringbang Tahun 2018-2022

No	Indikator Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka kerja yang melaksanakan perjanjian dan ketentuan ketenagakerjaan	orang	111	100	100	100	100
2	Prosentase perjanjian yang ditandatangani	%	60	60	60	100	100%
3	Prosentase angka kerja yang ditandatangani	%	60	66,71	71,38	84,71	84,71
4	Nilai perjanjian yang ditandatangani	%	66,31	67,38	66,37	66,38	66,38
5	Nilai ketenagakerjaan	%	41,38	60,3	66,67	66,67	61,38
6	% usaha ketenagakerjaan yg ditandatangani secara keseluruhan	%	60	66,71	66,38	10	67
7	% penandatanganan perjanjian ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	100
8	Prosentase angka kerja yang ditandatangani	%	70	64,62	67	66,7	66

Sumber: BPS/BIRINGBANG, 2022

Tabel 2.44
UMK dan KIL Kabupaten Biringbang Tahun 2018-2022

UMK dan KIL	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
UMK Kabupaten Biringbang	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000

Sumber: BPS/BIRINGBANG, 2022

b. Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Pembedayaan Perempuan

Perkembangan kinerja dalam urusan pembedayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.45
Kinerja Daerah Urusan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

No	INDIKATOR KINERJA (KPI)	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indikator Pembedayaan Perempuan (KPI)	65,00	66,00	67	67,00	68,00

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Kabupaten Lapak Anak Kabupaten Bone

TARGET	PENCAPAIAN
2017	TINGKAT MUDA
2018	TINGKAT MUDA
2019	TINGKAT MUDA
2020	TANGGA
2021	TINGKAT MUDA
2022	TINGKAT MUDA

Sumber: Dinas PPH, 2022

a. Pangan

Salah PPH & ketersediaan energi per kapita di Kabupaten Bone sedang meningkat baik dari tahun 2018 hingga tahun 2020, sedang dari tahun 2021-2022 cenderung meningkat. Tingkat konsumsi energi Kabupaten Bone pada Tahun 2017 mencapai 1.883,3 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi mendekati standar konsumsi energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein sesuai dengan standar. Secara rinci Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47

Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Salah PPH Pangan Tanaman Padi	88,8	87,8	87,8	87,8	87,8
2	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita/hari)	2.044	2.044	2.071	2.071	2.041
3	Ketersediaan konsumsi protein (gram/kg & hari)	100	100	100	100	100
4	Kelembagaan pangan dan pertanian pangan (%)	100	100	100	100	100
5	Pergerakan dan ketersediaan komoditas pangan (%)	100	100	100	100	100
6	Keunggulan daerah dalam pangan (%)	100	100	100	100	100
7	% perolehan nilai produksi/nilai (%)	12,74	1,3	2,04	2,04	24,74
8	Salah PPH Ketersediaan Teknologi dalam perikanan (%)	14	14	1	1	1
9	Salah PPH Ketersediaan Alat Pk. Perikanan	88	88	88	88	88
10	% perolehan nilai ekspor/nilai (%)	18	11,74	2,14	2,04	4,14

Sumber: Bonegas, 2022

d. Pertanian

Keberhasilan pada urusan pertanian diartikan pada upaya peningkatan serta administrasi pertanian dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanian. Kemudahan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pertanian adalah dalam permasalahan seperti tanah garapan, penyelesaian masalah garap kerugian dan sustanan tanah untuk pengembangan, penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin lokasi, perolehan tanah ulayat, serta mempermudah kemudahan dalam Perencanaan penggunaan tanah. Dalam rangka peningkatan serta administrasi pertanian di tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Data Pertanian di 14 Kecamatan.

Tabel 2.48

Realisasi Kinerja Green Pertanahan Tahun 2018-2022

Aspek Kinerja (Kategori/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah)	Sasaran	Realisasi Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penerapan Sistem Informasi Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPMPT, 2022

Tabel 2.49

Jumlah Penanganan Pengaduan Tanah Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Pengaduan/Pemohonan Tanah	Terselesaikan	Sisa Pengaduan
1	2018	12	1	11
2	2019	16	16	0
3	2020	16	16	0
4	2021	100	100	0
5	2022	100	100	0

Sumber: DPMPT, 2022

a. Lingkungan Hidup

Pengelolaan masalah sampah di Kabupaten Brebes masih belum optimal. Keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang ada belum memiliki aparat kelengkapan yaitu sistem operasional TPA masih dengan sistem manual kerukil, fasilitas TPA untuk area pemukiman belum dilengkapi dengan bangunan belap air, pengendalian gas tidak ada, serta metode pengolahan tanah yang kemahayuan rusak sehingga ini menimbulkan permasalahan terakumulasi di lingkungan masyarakat.

Terdapat sampah di Kabupaten Brebes dari tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Meskipun begitu berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi permasalahan pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Brebes dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Keproses Sampah Rumah Tangga, melalui peraturan bupati tersebut Kabupaten Brebes menargetkan pada tahun 2025 pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Di sisi lain masyarakat Kabupaten Brebes juga mulai sadar bahwa sampah bisa menjadi ancaman tetapi juga bisa menjadi peluang untuk bisa mengurangi dari permasalahan sampah yang ada di Desa. Untuk mendukung gerakan pengurangan sampah rumah tangga tersebut maka diterbitkan "Brebes Bersah" pada akhir tahun 2019 yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes sehingga target pengurangan dan penanganan sampah dapat tercapai dan menjadikan Brebes menjadi kota bersih dan sehat. Sehingga upaya data permasalahan penanganan dan masalah sampah di Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun 2018-2022 terus dalam tabel berikut.

Tabel 2.50

Data Timbunan Sampah di Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Total Timbunan Sampah (kg/ hari)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Bontang	28	12.250	12.250	12.250	12.250.00	12.250.00
2	Bulu	26	6.250	6.250	6.250	6.250.00	6.250.00
3	Bontol	26	6.250	6.250	6.250	6.250.00	6.250.00
4	Batu	12	12.250	12.250	12.250	12.250.00	12.250.00
5	Berang	22	22.250	22.250	22.250	22.250.00	22.250.00
6	Belan	11	22.250	22.250	22.250	22.250.00	22.250.00
7	Bontol	12	12.250	12.250	12.250	12.250.00	12.250.00
8	Bulang	11	11.250	11.250	11.250	11.250.00	11.250.00
9	Bulan	11	11.250	11.250	11.250	11.250.00	11.250.00
10	Bontol	14	11.250	11.250	11.250	11.250.00	11.250.00
11	Bontol	11	11.250	11.250	11.250	11.250.00	11.250.00
12	Bontol	17	11.250	11.250	11.250	11.250.00	11.250.00
13	Batu	12	12.250	12.250	12.250	12.250.00	12.250.00
14	Batu	26	11.250	11.250	11.250	11.250.00	11.250.00
	Jumlah	294	227.250	227.250	227.250	227.250	227.250.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Data timbunan di atas merupakan perhitungan dari timbunan sampah per kapita dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bontang. Pengumpulan sampah di Kabupaten Bontang terbagi menjadi empat yaitu pengumpulan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat, pengumpulan melalui bank sampah, pengumpulan melalui TPA IR dan sampah yang diangkat menjadi TPA. Jumlah sampah yang dikelola dengan IR di Kabupaten Bontang hanya sebesar 0,5 ml/ton atau sekitar 0,22% dari total timbunan sampah Kabupaten Bontang dan sampah yang dikelola dengan IR hanya di Kecamatan Bontang. Sedangkan sebagian sampah yang masuk ke TPA setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.51

Perbandingan Volume Sampah Diangkut dengan Total Timbunan Sampah di Kabupaten Bontang 2022

No	Kecamatan	IR	Volume sampah yg diangkat ke TPA		Total volume sampah yang diangkat		Total Timbunan Sampah di Kabupaten
			%	ml/ton	%	ml/ton	
1	Bontang						12.250
2	Bulu						6.250
3	Bontol						6.250
4	Batu						12.250
5	Berang		0,00	0,12	0,00	0,12	22.250
6	Belan						22.250
7	Bontol						12.250
8	Bulang		1,00	1,00	1,00	1,00	11.250
9	Bulan		0,12	1,42	0,12	1,42	11.250
10	Bontol	0,01	0,00	0,00	0,01	1,00	11.250
11	Bontol						11.250
12	Bontol		0,00	1,00	0,00	1,00	11.250
13	Batu		0,00	0,00	0,00	0,00	12.250
14	Batu		0,00	24,30	0,00	24,30	12.250
	Jumlah	0,01	0,00	14,79	14,79	118,10	227.250

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Volume sampah yang diangkat ke TPA berasal dari sampah perkotaan maupun sampah non perkotaan. Pada tahun 2022, volume sampah yang

tersebut sebesar 113,136 mg/hari dan sebagian besar berasal dari Kecamatan Bending yaitu 72,03 mg/hari. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bending merupakan pusat dari Kabupaten Bending. Selain di Kecamatan Bending, Kecamatan Loran juga mempunyai volume sampah terangkut yang besar, yaitu 24,342 mg/hari. Volume sampah yang terangkut ke TPA juga menyempatkan tingkat persiapan dan/atau selang seling ini. Secara pengumpulan sampah Kabupaten Bending tahun 2018-2022 yaitu meliputi truk sampah, truk container, container produk sampah, Tempat Pemrosesan Sementara, dan Tempat Pemrosahan Akhir. Namun truk temp, container depak, dan instalasi pengolahan limbah juga sudah belum ada unit yang dimiliki oleh Kabupaten Bending. Secara lebih jelasnya, perkembangan banyaknya sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Bending tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Perkembangan Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah di Kabupaten Bending Tahun 2018-2022

No.	Jenis Sarana	2018	2019	2020	2021	2022
1	Truk sampah temp	0	1	1	1	0
2	Truk Container temp	0	0	0	0	0
3	Container temp	00	00	11	10	00
4	Container dan Bunk Sampah temp	110	110	110	110	110
5	Tempat Pemrosesan Sementara (TPS)	00	00	00	00	00
6	Tempat Pemrosahan Akhir (TPA)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Indeks kualitas udara diikat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara untuk kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tempo secara menggunakan satuan-satuan yang tak mudah dimengerti masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bending mempunyai Layanan/Unit pengendalian untuk mewakili aktivitas Transportasi darat di tempat di perumahan jalan, industri di PLTU Bida, Perumahan di desa Sidoreyah, Komersial Perkantoran di jalan Pemuda km 2, dalam hal ini pengujian kualitas udara di lakukan oleh DPH Provinsi Jawa Tengah yang sudah terakreditasi oleh KAN. Hasil pengujian udara tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.83
Pengukuran Kualitas Udara di Kabupaten Bending Tahun 2022

No.	Jenis Lokasi	Alamat	Lama pengamatan Membaca Pasang Sampla	Tipe Sampla	SO ₂ (µg/m ³)		PM ₁₀ (µg/m ³)	
					Takap 1	Takap 2	Takap 1	Takap 2
1.	Perumahan	Rawa-008 Sub Bending, Jl. Pemuda KM 01 Bending	14 Hari	0 + 0,120011 1 + 111,240012	0,01	0,01	0,01	0,13
2.	Perumahan	Jl. Rawa Rawa Perumahan Menteng Bending	14 Hari	0 + 0,120001 1 + 111,240002	0,01	0,01	0,01	0,14
3.	Perumahan	Jl. W.	14 Hari	0 + 0,120001 1 + 111,240002	0,01	0,01	0,01	0,14

No.	Jenis Air	Materi	Jenis pengujian Metode Standar Nasional	Tahun Penelitian	BOD ₅ (mg/liter)		COD (mg/liter)	
					Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
		Samudra, Laut, Perikanan, Perikanan						
4.	Perikanan	Perikanan Perikanan, Laut, Perikanan, Perikanan	14 hari	2- 2000000 3- 11,200000	1,100	2,100	1,100	1,100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Berdasarkan untuk pengukuran kualitas air perikanan air sungai menggunakan komposisi parameter kimia fisik, antara lain: jumlah zat padat terlarut, kekeruhan, rasio kimia organik anorganik: besi, seng, aluminium, kadmium, klorida, mangan, pH, sulfat, serta terbagi dan bakteriologi (jumlah kuman dan total $\times 100$). Kabupaten Romang menggunakan sampel pengujian kualitas di tiga sungai yaitu sungai Kalipang Kecamatan Barung, sungai Buhagan Kecamatan Lemo, sungai Karangmang Romang. Analisis pengujian sampel dilakukan di laboratorium BIRPPF yang telah terakreditasi oleh BSN. Dimana hasil pengujianya sebagai berikut:

Tabel 3.54
Pengukuran Kualitas Air di Kabupaten Romang Tahun 2022

No.	Nama Sungai	Tipe Sungai	Jenis	Berkas	Tinggi air (m)	Tinggi air (m)	pH	DO (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Klorida (mg/l)	Sulfat (mg/l)	Mangan (mg/l)	Alumunium (mg/l)	Besi (mg/l)
Data Sampel Air II						0	0	7,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
BIRPPF	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	0	0	7,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	0	0	7,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	0	0	7,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	0	0	7,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

				2022																
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup (RLH)

Kemungkinan

Tingkat Risiko yang ditimbulkan untuk pemerintahan (RA adalah (Rata-Rata Nilai RI)

*Tingkat Risiko Nilai (RI) adalah minimal 1 mg/l

Indikator terendah untuk mengetahui kualitas lingkungan adalah tutupan lahan. Tutupan lahan adalah keseluruhan material baik permukaan bumi. Tutupan lahan menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan proses sosial. Informasi tutupan lahan yang akurat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dari model-model ekosistem, hidrologi, dan atmosfer sehingga kualitas lingkungan dapat diukur dengan lebih akurat. Tutupan lahan di Kabupaten Bontang dapat dilihat dari base lahan dengan menggunakan fotoan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Bontang Tahun 2021

No.	Nama DAK	Kawasan	Kondisi Lahan (mg)					Total
			Tanah Kering	Pertanian Kering	Agrar Kering	Rawa	Salang Rawa	
1	Badan	Area Programasi Lahan	17.879,26	97,26	92,41	11,22	18,26	18.098,41
2		Rawa Perikanan	2.074,22	162,24	204,25	2,42	-	2.443,13
3	Perunggan	Area Programasi Lahan	2.879,66	-	-	-	-	2.879,66
4	Larangan	Area Programasi Lahan	1.000,26	-	-	-	-	1.000,26
5	Kawasan	Area Programasi Lahan	1.265,25	-	-	-	-	1.265,25
6	Lahan	Area Programasi Lahan	14.264,18	1.261,26	166,24	426,24	201,26	17.285,14
		Rawa Perikanan	-	1,22	-	-	-	1,22
		Rawa Lahan	66,41	27,22	124,26	126,24	-	344,13
		Rawa Perikanan	1.201,21	1.262,26	262,22	26,21	6,21	2.758,11
		Rawa Perikanan	111,26	1.262,26	262,22	12,22	4,21	1.652,11
		Terdapat	-	-	-	-	-	-
7	Kawasan	Area Programasi Lahan	1.264,22	162,24	262,22	12,22	16,24	1.717,14
		Rawa Lahan	-	-	66,26	22,26	24,22	112,14
8	Ruang	Area Programasi Lahan	277,21	121,26	124,26	4,22	1,21	528,16
		Rawa Lahan	2,22	4,24	64,24	27,21	-	100,11
		Rawa Perikanan	-	-	-	-	-	-
9	Lahan	Area Programasi Lahan	166,26	62,26	124,26	26,24	-	379,12
		Rawa Perikanan	22,21	22,22	26,22	22,22	-	92,17
10	Ruang	Area Programasi Lahan	662,21	66,21	124,22	16,22	-	868,16
		Rawa Perikanan	1,22	1,22	42,21	1,22	-	45,17
11	Badan	Area Programasi Lahan	166,26	6,22	124,22	16,22	-	312,12
		Rawa Lahan	12,22	-	122,21	24,22	-	158,15
		Rawa Perikanan	-	-	6,21	-	-	6,21
12	Badan	Area Programasi Lahan	66,26	66,21	122,21	26,26	-	281,14
		Rawa Lahan	-	-	6,22	-	-	6,22
13	Kawasan	Area Programasi Lahan	122,21	-	112,22	22,22	-	256,15
14	Ruang	Area Programasi Lahan	201,26	-	224,24	211,22	-	637,12
		Rawa Lahan	11,22	-	126,26	6,22	-	143,16
15	Badan	Area Programasi Lahan	622,22	62,22	124,24	6,21	11,26	825,15
		Rawa Lahan	4,24	-	122,22	1,24	-	127,16

No.	Nama DSD	Kategori	Kebijakan Tahun (Rp)					Total
			Tahun Mula	Perkiraan Mula	Agal Mula	Mula	Angka Mula	
16	Agal	Agal Pengawasan Lulu	752.94	88.17	28.87	11.76	8.42	900.26
17	Kesejahteraan	Agal Pengawasan Lulu	11.411.49	1.414.36	871.19	288.19	88.88	14.267.76
		Mula-Lingkup	42.98	258.89	887.31	47.42	-	1.037.11
		Mula-Praktis	1.466.41	963.44	18.19	87.96	-	2.536.01
		Mula-Praktis Tindakan	19.76	287.48	42.58	8.38	-	178.28
18	Kesejahteraan	Agal Pengawasan Lulu	1.487.46	1.94	8.98	8.31	-	1.498.69
		Mula-Praktis	887.36	228.87	42.72	14.88	-	887.36
19	Kesejahteraan	Agal Pengawasan Lulu	889.48	158.98	8.98	-	8.71	1.057.75
		Mula-Praktis	1.215.18	258.82	2.82	-	-	1.476.78
		Mula-Praktis Tindakan	288.34	117.27	8.27	-	8.28	398.98
20	Kesejahteraan	Agal Pengawasan Lulu	4.487.46	11.31	-	-	-	4.498.77
		Mula-Praktis	887.36	887.36	11.88	-	-	1.786.60
21	Kesejahteraan	Agal Pengawasan Lulu	118.11	244.31	1.217.29	414.98	-	4.094.69
		Mula-Praktis	8.87	-	11.88	-	-	18.75
		Mula-Praktis	88.84	1.217.29	4.287.72	88.44	-	1.284.88
		Mula-Praktis Tindakan	1.84	14.88	8.2884	88.44	-	88.18
Jumlah			78.764.87	13.888.81	14.481.87	1.418.87	848.14	108.888.76

Sumber: BPS, 2022

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kependudukan KTP per penduduk Tahun 2018-2022 memiliki trend yang terus meningkat. Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 98,34 % pada Tahun 2018 menjadi 98,36 % pada Tahun 2021. Namun, tergelincir penurunan pada Tahun 2022, menjadi 98,34 %. Indikator tersebut pertumbuhannya masih dibawah target yang tercantum dalam RPMD. Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.56
Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	98,34	98,35	98,31	98,36	98,34
2	Persentase kelahiran SDH tahun ber-KTP penduduk (%)	98,34	98,37	97,98	97,98	97
3	Persentase kelahiran baru penduduk (%)	98	94,38	94,7	94,48	97,33
4	Informasi administrasi kependudukan (%)	98,34	98,36	98,36	98,36	-
5	Kelembagaan Data Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	1
6	Kelembagaan Data kependudukan (orang)	-	-	-	-	11

Sumber: BPS, 2022

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak. Jumlah Paryandhi aktif pada tahun 2018 sd. 2022 yaitu sebanyak 1.231 unit, dan tahun 2018-2022 PKK aktif pendaharaya cenderung tetap yaitu sebesar 309 unit. Hasil lain Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Indikator Pemertanian Rukun yang telah mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami trend yang fluktuatif, yakni dari 100% pada tahun 2018 menjadi 17,43% pada tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2022 sebesar 33,45 %. Kondisi tersebut terjadi karena banyaknya calon kepala desa acuan yang terpilih kembali pada pemilihan kepala desa, sehingga pada tahun 2022 hanya terdapat 11,45% saja kepala desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selengkapanya Data Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022

No	Indikator	Kuantitas dan %					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Unit unit Desa	100	100	100	100	100	100
2	Paryandhi aktif unit	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
3	Perwakilan Nasional, Provinsi dan Mandiri (%)	66,2	66,7	66,66	66	66	66
4	% Lembaga Akademi/Universitas, Lembaga Nirlab yang telah akreditasi (%)	100	100	100	100	100	100
5	% Lembaga Akademi/Universitas (S1, S2, S3) (%)	100	100	100	100	100	100
6	% Instansi yang telah program pemberdayaan desa (%)	6,8	1,1	1,39	1,11	6,4	6,4
7	Pembinaan desa program pemberdayaan desa (%)	66	66	66	64	64	64
8	% Kepala yg telah mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa	100	100	17,43	33,44	33,45	33,44
9	Jumlah kepala program	1	2	2	2	2	2
10	Jumlah Balai Desa/Desa yang ada	11	12	12	12	12	12
	Jumlah desa yang mempunyai BMD/Desa	66	101	101	106	101	106
	MD	1	1	2	1	1	1
	MD/MDK	1	2	2	2	1	1
	MD/MDK/MDK	1	2	2	2	1	1
11	Program BMD/Desa yang dilaksanakan	66	10,91	11,66	10,9	11	11

Sumber: Depdiknas, 2023

Perkembangan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak. Perkembangan pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dilihat melalui

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Realisasi	99	99	99	100	99
	Perencanaan	98,99	99,28	99,28	99,28	99

Sumber: BPS/SPPIK, 2022

Peserta KB aktif di Kabupaten Bimbang pada bulan maret tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 memiliki trend yang menurun, dimana jumlah peserta KB aktif tertinggi berada pada tahun 2018 yakni sebesar 80,02%. Kemudian terus turun menjadi 77,89 % di Tahun 2020, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 78,13% dan pada tahun 2022 menjadi 79,04%. Kualitas kelompok Usia Keluarga Balita (UKB) tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 memiliki trend faktual yang pada tahun 2018 sebesar 93,54% tahun menjadi 98,92% pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 100%. Kualitas kelompok Usia Keluarga Remaja (UKR) tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 memiliki trend faktual yang pada tahun 2018 sebesar 91,24% tahun menjadi 98,27% pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2020-2021 kualitas kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 88,09%. Sedangkan, kualitas Usia Kelompok Lanjut (UKL) lima tahun terakhir cenderung mengalami trend faktual yang pada tahun 2018 sebesar 98,49, meningkat di tahun 2019 dan 2020 menjadi 99,26 dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 89%. Jumlah kelompok UPPKA yang aktif dari tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki nilai persentase yang faktual. Persentase kelompok UPPKA aktif pada tahun 2018 sebesar 95,17 %, namun menurun hingga 81,12 % pada Tahun 2019. Kemudian, meningkat pada Tahun 2020 menjadi 96,12% dan kembali menurun di Tahun 2021-2022 menjadi 87,91% dan 83,52%.

I. Perubahan

• Lala Lintas

Kabupaten Bimbang merupakan wilayah sempitnya atau lala lintas yang cukup padat, dilalui jalan arteri primer antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur perkembangan yang sudah baik angkutan barang maupun penumpang. Kondisi jalur lala lintas sering mengakibatkan kemacetan khususnya di kawasan-kawasan yang dilwati secara langsung oleh jalan utama utama. Adapun kendaraan yang melalul jalur lala lintas tersebut diklasifikasi oleh

- Sepeda motor, motor dan kendaraan roda 2 sebanyak 14.730
- Truk 2 sumbu 4 roda sebanyak 3.032
- Truk 3 sumbu sebanyak 4.520
- Oplet, Pick Up, Candi dan Mobil sebanyak 2.450 unit.

• Uji Lala Kendaraan

Prerelaksanaan pembangunan bidang perubahan dalam rangka maki tahun 2018-2022 mengakibatkan keterbatasan perubahan, yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perubahan, meningkatnya akreditasi pelayanan angkutan umum, meningkatnya angka pelanggaran serta meningkatnya peran utama dalam rangka peningkatan

pelayanan jasa perhubungan. Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022 terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 3-51
Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Keterangan
1	perencanaan dan pemberdayaan	1	2	179	144	0	
2	perencanaan dan pemberdayaan	1	10	130	130	0	
3	perencanaan dan pemberdayaan	1	0	40	0	0	Terdapat Operasi di Kabupaten Rembang
4	kegiatan pelayanan	2.000	2.200	4.100	10.000	1.000	
5	kegiatan pelayanan	2.000	2.200	7.000	7.000	1.000	Kegiatan yang merupakan kegiatan
6	jumlah pelayanan	100.00	75.000	100.00	100.00	75.00	yang terdapat
7	kegiatan dan kegiatan	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data, 2022

Relevansi untuk status Kesehatan Bermotor Wajib Uji (KBPWU) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3-52
Kondansi Bermotor Wajib Uji (KBPWU) di Kabupaten Rembang
Tahun 2018-2022

No	Jenis Kendaraan	Tahun			Tahun		
		2018	2019	2020	2021	2022	2022
1	Mobil Persewaan						
2	Mobil Bus	1	1	1	1	1	1
3	Pick Up		4	5		170	170
4	Mobil Mopar					4	4
5	Truk	1.010	1.070	1.000	1.000	1.700	1.000
6	Mobil di Rembang		50	50		50	50
7	Mobil di Rembang		0	0		0	0
8	Truk		0	0		0	0
9	Mobil Bus	10	40	40	1	0	0
10	Mobil					0	0
11	Mobil Mopar					0	0
12	Mobil Persewaan					0	0
13	Mobil Bus					0	0
14	Mobil Mopar		0	0		0	0
15	Persewaan	100	100	100	0	0	0
16	Persewaan	0	0	0	100	0	0
	Jumlah	1.021	1.115	1.100	1.101	1.700	1.100

Sumber: Data Perhubungan 2022

Mulai 2021 sudah menggunakan smartcard sehingga dataanya lengkap.

Kondansi Bermotor Wajib Uji (KBPWU) di Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2022

No	Jenis Kendaraan	Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1	Mobil, bus dan mobil lain	100	100	1.000	1.000
2	Mobil, bus dan mobil	100	110	100	100

	2019	2020	2021	2022
1. Jalan Perkeretaapian	0	0	0	0
2. Jalan Tol	0	0	0	0
3. Jalan, kecuali yang termasuk kategori jalan tol	104	104	104	104
a. Jalan nasional	18	18	18	18
b. Jalan provinsi	18	18	18	18
c. Jalan kabupaten/kota	71	71	71	71
d. Jalan desa	0	0	0	0
e. Jalan perkeretaapian	0	0	0	0
f. Jalan tol	0	0	0	0
g. Jalan rel kereta api	0	0	0	0
TOTAL	104	104	104	104

Berikut data dari Dinas Perhubungan dapat terlihat bahwa pada terjadi penurunan jumlah KRW di Kabupaten Bontang tahun 2021 berjumlah 1.022 sedangkan tahun 2022 berjumlah 1.299.

• **Kebutuhan Kelengkapan Jalan**

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memantapkan kualitas produksi dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Bontang saat ini jika dilihat dari panjang jalan terdiri dari 3 klasifikasi jalan yaitu :

1. Panjang jalan Kabupaten sepanjang 642,75 Km
2. Panjang jalan Provinsi sepanjang 31,64 Km
3. Panjang jalan Nasional sepanjang 66,50 Km

Panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Bontang mencapai 667,28 km dengan rataan kondisi jalan baik 40,58 km, sedang 113,46 km, rusak ringan 8,50 km dan rusak berat 43,72 km. Adapun kebutuhan kelengkapan jalan di Kabupaten Bontang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63

Kebutuhan Perengkapan Jalan di Kabupaten Bontang

No	Kategori	Milease					Kondisi Jalan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	100 km						
	- Jalan Kabupaten	104	111	0	11	631	5.171
	- Jalan Provinsi	0	0	0	0	0	0,0
	- Jalan Nasional	18	18	18	18	107	111
2	50 km	0	0	0	0	0	0
3	20 km	0	0	0	0	0	0
4	10 km	20.762	1.700	800	1.000	1.000	20.762
5	5 km	10.381	0	0	0	0	10.381
6	2 km	10.381	144	0	144	0	10.381
7	1 km	10.381	0	0	0	0	10.381
8	0,5 km	10.381	0	0	0	0	10.381

Sumber : Dinas Perhubungan 2023

• **Angkutan Umum**

Adapun data angkutan perumpang umum di Kabupaten Bontang hingga tahun Juli Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

• **Pengelolaan Parkir**

Berikut ini data lokasi dan titik lahan parkir parkir tepi jalan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-65

Lokasi dan Titik Lahan parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2021

No.	NAMA JALAN	LOKASI	JAM	Berkas Data/Keang 4007	Jumlah Titik Koordinasi
A. JIS MANOR					
1	WISANGGA	WISAT ALIR KAWASAN PERKOTA ITING	18.00-21.00	ada	
2	WISANGGA	WISAT ALIR KAWASAN PERKOTA MELATI	18.00-21.00	ada	
3	WISANGGA	WISAT ALIR KAWASAN PERKOTA PONDOK	18.00-21.00	ada	
4	WISANGGA	WISAT ALIR KAWASAN PERKOTA PONDOK	18.00-21.00	ada	
5	WISANGGA	WISAT ALIR ALIR/ PERKOTA MELATI	18.00-21.00	ada	
6	WISANGGA	MELATI MELATI KAWASAN PERKOTA MELATI/ITING	18.00-21.00	ada	
7	WISANGGA	WISAT ALIR/ MELATI	17.00-17.00	ada	
8	WISANGGA	MELATI MELATI KAWASAN PERKOTA MELATI	18.00-21.00	ada	
9	WISANGGA	MELATI MELATI KAWASAN PERKOTA MELATI/ITING	18.00-21.00	ada	
10	WISANGGA	MELATI MELATI KAWASAN PERKOTA PONDOK	18.00-21.00	ada	
11	WISANGGA	ITING ALIR ALIR	18.00-21.00		
12	WISANGGA	MELATI MELATI KAWASAN PERKOTA	18.00-21.00	ada	
13	WISANGGA	ITING ALIR ALIR	18.00-21.00	ada	
14	WISANGGA	ITING ALIR ALIR	18.00-21.00	ada	
15	WISANGGA	ITING ALIR ALIR	18.00-21.00	ada	
16	WISANGGA	WISAT ALIR ALIR	18.00-21.00	ada	
17	WISANGGA	ITING ALIR KAWASAN PERKOTA MELATI	18.00-21.00	ada	14
B. JIS MANOR					
18	WISANGGA	ITING ALIR	18.00-21.00	ada	
19	WISANGGA	ITING ALIR	18.00-21.00	ada	
20	WISANGGA	ITING ALIR	18.00-21.00	ada	1
C. JIS MANOR AWANG					
21	WISANGGA	ITING ALIR	18.00-21.00	ada	
22	WISANGGA	ITING ALIR	18.00-21.00	ada	2
D. JIS MANOR MANOR					

Tabel 2.64
Data Angkutan Penumpang Umum
Kabupaten Bandung s/d Bn. Juli 2018

No	JENIS KENDARAAN	PO/TAHAP	JANUARI		JULI 2018		KETERANGAN
			A	B	C	D	
1	MOBIL	1. PT. Multi Karya Trans	104.000	10	100	10	
		2. PT. Multi Karya Mandiri Bandung	0	100	1		13 Kolong
	Jumlah I			10	101	10	
2	OTOP	1. Mandiri		17	100	17	13 Kolong
	Jumlah II			17	100		
3	PASADARA	1. Garuda Indonesia		4	100	4	
		2. PT. Garuda Indonesia		7	100	7	
		3. Garuda		70	100	69	
					100	100	
		4. PT. Garuda Indonesia Bandung		70	100	71	
					100	1	
		5. Garuda Indonesia		70	100	70	
					100	10	
					100	4	
		6. PT. Garuda Indonesia Bandung		100	100	100	
					100	10	
					100	17	
		7. Garuda Indonesia		0	100	0	
					100	1	
		8. Garuda Indonesia		1	100	1	
		9. PT. Multi Karya Trans		10	100	10	
					100	10	
		10. Garuda Indonesia		4	100	5	
		11. Garuda Indonesia		1	100	1	
		12. PT. Wings		4	100	4	
		13. PT. Garuda Indonesia		10	100		
		14. PT. Garuda Indonesia Bandung		20	100		
	Jumlah III			100	100	100	
4	PERSEKUTUAN	1. Bandung Trans (Jalan PT Jalan = 10 kend., Bus Kendaraan = 1 kend.)	100.000	10	100	10	
		2. Bandung - Bandung PT (Jalan = 10 kend.)	10.000	10	100	10	
	Jumlah IV			110		110	
5	PERSEKUTUAN	1. Bandung - Trans (Jalan = Bandung - Bandung Kendaraan = 10 kend. PT dan Bandung - Bandung PT dan Mandi = 1 kend. PT dan 10 kend. Bus, Bus)	11.000	100	100	100	10

tingkat kemendataran desa yang tidak dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Penguatan Indeks Desa Membangun (IDM) dilakukan sebagai upaya pemertepatan pembangunan ketekadapan tingkat desa dimana IDM merupakan alat ukur untuk menentukan status perkembangan desa.

Tabel 2.58

Indeks Desa Membangun Kab. Berau Tahun 2018-2022

Indeks Desa Membangun	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	0,64	0,67	0,77	0,80	0,76

Sumber: Dispermas, 2022

Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Berau pada tahun 2022 mempunyai nilai 0,764 dengan klasifikasi Kabupaten/Nota "Membangun", terjadi peningkatan nilai IDM pada tahun 2022 apabila dibandingkan pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya status desa mandiri dari tahun 2021 sebanyak 7 desa meningkat menjadi 14 desa di tahun 2022. Perbandingan hasil IDM Kabupaten tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.59

Perbandingan IDM Kabupaten Berau Tahun 2021 dan 2022

Klasifikasi	2021	2022	2020	2021	2022
Mandiri	1	14	4	7	14
Maju	17	36	12	15	36
Membangun	188	178	128	200	174
Tertinggal	22	4	2	0	0
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber: Dispermas (data sendiri) 2022

Salah Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Berau salah satunya dalam upaya memperkuat pembangunan desa. Mula-mula pengalihan status desa yang dilaksanakan atas nama pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga tegera agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi utamanya.

IDM Desa bersama (BUMDesma) di Kabupaten Berau merupakan kerjasama antara BKAD dan Ka-PPM. Hal ini baru ada BUMDesma di Kecamatan Bala. Keberadaan BUMDesma ini melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas pemerintahan, dan personel Desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pelayanan barang dan/atau jasa, pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lembaga pangan Desa, dan kerentanan yang diperoleh dari BUMDesma hasil transformasi tersebut digunakan sebagai sumbernya untuk penanggulangan kemiskinan.

B. Pengendalian Penduduk dan Kelangkaan Berencana

Tabel 2.60

Kontribusi Daerah Uraan Pengendalian Penduduk dan Kelangkaan Berencana Tahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Total keluarga baru (TKB)	2.07	2.07	2.1	2.1	2.11
2	Waktu persiapan KB (TKB) (TKB)	60.00	70.00	77.00	70.00	67.00
3	Pelayanan kesehatan KB (TKB) (TKB)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah peserta KB aktif					
	Jumlah PKA	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Peserta KB aktif	100.000	100.000	99.000	99.000	99.000
	Peserta PKA	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
4	Tindakan Pengawasan (TKP) (TKP) (TKP)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Tindakan PKA yg tepat (TKP) (TKP)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
6	Angka kelahiran (TKP) (TKP) (TKP)	00	00	00	00	00
7	Angka kelahiran (TKP) (TKP) (TKP)	60.00	70.00	77.00	70.00	70.00
8	Angka TKP (TKP) (TKP)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
9	Tindakan pengendalian kelahiran (TKP) (TKP) (TKP)	100	100	100	100	100
10	Kelangkaan (TKP) (TKP) (TKP)	00.00	00.00	00	00	00
11	Kontribusi (TKP) (TKP) (TKP)	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00
12	Kontribusi (TKP)	100	100	100	100	100
13	Kelangkaan (TKP) (TKP) (TKP)	100	100	100	100	100
14	Tindakan (TKP) (TKP) (TKP)	00.00	00	00.00	00.00	00.00
	Jumlah	000	000	000	00	00
	Jumlah	000	000	000	00	00
	Peserta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
15	Tindakan (TKP) (TKP) (TKP)	100	00.00	00.00	00.00	00.00
16	Tindakan (TKP) (TKP) (TKP)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
17	Tindakan (TKP) (TKP) (TKP)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
18	Tindakan (TKP)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
19	Jumlah (TKP) (TKP) (TKP)					
	Jumlah	000	000	000	000	000
	Jumlah	000	000	000	000	000
	Peserta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	Jumlah	000	000	000	000	000
	Peserta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	Jumlah	000	000	000	000	000

No	NAMA JURAH	LOKASI	JAM	Berkas Abit/Meninggalkan	Jumlah Jenis / Sasaran
19	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
20	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
21	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
22	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
23	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
24	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	1
AL. DOKTER (Dokter)					
25	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
26	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
27	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
28	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
29	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
30	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
31	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
32	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	1
WALANG					
33	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	1
A. MANAJEMEN					
34	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	1
A. MANAJEMEN					
35	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
36	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
37	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
38	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
39	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
40	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
41	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
42	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
43	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
44	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
45	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
46	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
47	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
48	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
49	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
50	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
51	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
52	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
53	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
54	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
55	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
56	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
57	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
58	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
59	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
60	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
61	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
62	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
63	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
64	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
65	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
66	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
67	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
68	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
69	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
70	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
71	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
72	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
73	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
74	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
75	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
76	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
77	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
78	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
79	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
80	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
81	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
82	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
83	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
84	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
85	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
86	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
87	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
88	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
89	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
90	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
91	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
92	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
93	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
94	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
95	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
96	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	
97	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	08.00-10.00	----	
98	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	10.00-11.00	----	
99	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	11.00-12.00	----	
100	WALIKOTA	DP BANGUNG CENDRA	12.00-13.00	----	

No.	NAMA JENJIR	LOKASI	JAM	Kelembaban Relat. (Kering 80%)	Kelembaban Relat. (Terdasar)
60	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
61	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
62	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
63	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
64	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
65	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
66	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
67	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
68	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
69	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
70	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
71	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
72	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
73	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
74	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
75	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
76	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
77	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
78	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
79	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
80	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
81	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
82	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
83	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
84	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
85	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
86	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
87	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
88	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
89	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
90	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
91	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
92	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
93	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
94	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
95	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
96	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
97	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
98	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
99	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----
100	SIKALAN	DE PANCA KUNDA	18:00-18:00	----	----

No	NAMA JEMBATAN	LOKASI	TAHUN	Kondisi Jalur Bering AAD	Jumlah Jalur Beringmeter
120	BRANG	TERMINAL LARANG	07.00-11.00	ada	
121	WIDAYATI	DEPAK PURWAKA	08.00-12.00	ada	
122	ANANDA KUNIR	DEPAK PAKAR LUMBI	08.00-11.00	ada	
TERMINAL					
123	BRANG	DEP. PAKAR DEPAK DEPAK	08.00-11.00	ada	
124	BRANG BRANG	DEP. PAKAR PAKAR	08.00-11.00	ada	1
125	BRANG WIDAYATI	TERMINAL PAKAR	11.00-01.00	ada	
126	BRANG WIDAYATI	UTARA SURABAI PAKAR	08.00-11.00	ada	
127	BRANG	TERMINAL PAKAR	08.00-11.00	ada	
128	BRANG	TERMINAL PAKAR	08.00-11.00	ada	
129	BRANG	DEP. PAKAR PAKAR	08.00-11.00	ada	
130	BRANG	DEP. PAKAR PAKAR	11.00-01.00	ada	
131	BRANG	DEP. PAKAR PAKAR	08.00-11.00	ada	
132	BRANG	DEP. PAKAR PAKAR	08.00-11.00	ada	
BRANG					
133	BRANG	DEP. PAKAR DEPAK PAKAR		ada	
134	BRANG	DEP. PAKAR LUMBI		ada	1
BRANG					
135	BRANG	DEP. PAKAR DEPAK		ada	
136	BRANG	DEP. PAKAR DEPAK PAKAR		ada	1
BRANG					
137	BRANG	DEP. PAKAR DEPAK PAKAR		ada	1
TOTAL					
					117

• Terminal

Terminal yang tersedia di Kabupaten Bering memiliki 88 Depot Bus (di 4/2008/2018) terdiri dari tujuh terminal kelas C yang membutuhkan upaya perbaikan dengan wilayah perbatasan di Kabupaten Bering, yaitu Bering, Larang, Bering, Gunung, Bering, Pematang, dan Bering. Dua puluh terminal tersebut ada dan terminal yang potensial dikembangkan statusnya menjadi terminal tipe II maupun terminal tipe A sesuai dengan lokasinya yang berada di jalur arteri sehingga fungsinya dapat melampaui kebutuhan perantara untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADEP).

Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Bering juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkembang terhadap ketersediaan jalan dan jembatan, serta ketersediaan jasa bus. Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Bering Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kategori	Lapang Tahun					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
		1.000	4.000				
13	Perbaikan kemampuan akses yang mudah dalam akses ke jalinan	0	0	0	0	0	

Sumber: Dinas, 2022

• Fasilitas Kelestarian Jalan

Sebagai pelaksanaan perubahan teknologi dengan fasilitas alat uji yang sudah menggunakan sistem analog. Maka tahun 2018 sudah mulai dilakukan modifikasi alat uji dari sistem analog menjadi sistem digital sehingga mengurangi tingkat error pada proses pengujian. Ke depan terus meningkatkan akurasi tingkat uji serta ditambahkan penggunaan teknologi digital sesuai dengan masalah yang diperlukan. Termasuk dalam upaya pemantauan lalu lintas sehingga kelengkapan lalu lintas yang sudah tinggi, ke depan akan dikembangkan sistem uji traffic control system. Perkembangan Fasilitas Perbaikan di Kabupaten Bireng Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.45
Perkembangan Fasilitas Perbaikan di Kabupaten Bireng
Tahun 2018-2022

No	Fasilitas Perbaikan	2018	2019	2020	2021	2022	Keterangan
1	Spindel uji otomatis	0	0	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
2	Spindel uji manual	0	0	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
3	Spindel model B	1	1	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
4	MPV jenis 1 roda	44	44	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
5	MPV jenis 2 roda	4	4	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
6	MPV jenis 3 roda	1	1	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
7	Warning Light Pjor	0	0	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
8	Warning Light L20	0	0	0	0	0	
9	Traffic Light Pjor	0	1	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
10	Traffic Light L20	11	11	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
11	Kelembaban uji	144	0	0	144	0	2021 tidak ada pengujian
12	L20 L20	0	0	0	0	0	
13	L20 Non test	12	12	0	0	0	2021 tidak ada pengujian
14	Mobil uji	1.000	0	0	0	1.000	
15	Mobil/Traktor uji	0	0	0	0	0	tidak ada pengujian
17	Pemeriksaan	0	0	0	0	0	tidak pernah pengujian

Sumber: Dinas, 2022

• **Perkerentanapan**

Berdasarkan tanggapan Dapet Bontang terhadap Rencana SID dan Rencana Dasar Jalan Kota sehingga muncul beberapa alternatif realisasi kota apa yaitu:

- a. Semarang - Lasem - Jember
- b. Semarang - Bontang - Lasem - Blora - Tuban
- c. Semarang - Lasem - Jember - Tuban

Melihat ketiga alternatif tersebut dengan mempertimbangkan potensi kegiatan angkutan barang maupun penumpang yang kedepan membandingkan jalur kota apa maka Kabupaten Bontang memilih apa maka yaitu Semarang - Bontang - Lasem - Blora - Tuban. Hal tersebut dibuktikan pada:

1. Peningkatan beban lalu lintas yang diperkirakan mencapai 34.404 unit kendaraan pada tahun 2023 (dari Analisa Tra Kersudatan P207 Jawa Tengah pada programan ODD Jalan Lingkar Bontang - Lasem, 2020 dan akan semakin meningkat dengan adanya rencana di Kabupaten Bontang. Kendaraan tersebut didominasi oleh:

- Sepeda motor, motor dan kendaraan roda 3 sebanyak 14.733
- Truk 2 aksis 4 roda sebanyak 3.052
- Truk 3 aksis sebanyak 4.520
- Ojol, Pick Up, Candi dan Mobil sebanyak 3.499 unit

Melihat dari hasil analisa tersebut terlihat bahwa sebagian besar kendaraan yang melintasi jalur arteri primer/jalur pertama terutama di Kabupaten Bontang adalah angkutan barang. Oleh karena itu kehadiran Kota Apa diharapkan dapat memvitali beban lalu lintas angkutan barang di jalur pertama.

2. Potensi lingkitnya angkutan barang maupun penumpang pada jalur Semarang - Bontang - Lasem - Blora - Tuban memiliki potensi antara lain:

- Perusahaan yang melakukan ekspor dan impor di Kabupaten Bontang meliputi:

- a. Perusahaan pengolahan ikan dengan tujuan ekspor Cina, Hongkong, Taiwan, Singapura, Jepang, Thailand, Malaysia, USA, Eropa
- b. Perusahaan kayu dengan tujuan ekspor Jerman, Belgia, Inggris, Singapura, Korea, Cina
- c. Perusahaan Manufaktur dengan tujuan ekspor Amerika, Belgia, Korea, Taiwan, Belanda, Jerman, Swedia.

Sebagian besar perusahaan tersebut terletak di sepanjang jalur Pantura terutama perusahaan pengolahan ikan.

- Hasil pengembangan di Kabupaten Bontang sering diangkut menuju kehar daerah salah satunya Kabupaten Tuban yang menyebabkan kerusakan jalan provinsi maupun jalan nasional dikarenakan tonase yang berlebihan. Lokasi tambang banyak terdapat di Kecamatan Blora, Ergas, Selan dan Iri, adanya jalur kota apa menuju ke Kabupaten Tuban diharapkan akan meminimalisir kerusakan jalan Kabupaten Bontang dengan berjalannya hasil tambang dari angkutan truk menjadi kota apa.

- Kondisi existing jalur bus rute Jombang di Dominasi Kawasan hutan produksi, sehingga perantara angkutan terutama penumpang di daerah tersebut lebih rendah daripada jalur pantura. Hasil survey angkutan perbatasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan didampingi Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang, minat penumpang jalur Lasem - Jombang sangat rendah.
- Kecamatan Serang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban mempunyai potensi penumpang yang sangat tinggi mengingat adanya buspak peranak pesantren di kecamatan tersebut salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Azhar yang merupakan pondok Akm. KH Mawani Zuhair. Para santri yang berangkat dari Pondok Pesantren di Kecamatan Serang tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

4. **Perikanan**

Ikhtisar dari jasanya, Kabupaten memiliki dua jenis Perikanan yaitu Perikanan perikanan pantai dan Perikanan airman dan perikanan. Untuk aktifitas Perikanan airman saat ini belum bisa karena belum mempunyai perijinan yang ada dalam Undang-undang No. 61 Tahun 2009 Tentang Kapal-kapal untuk bisa dikelola oleh Kabupaten.

4. **Komunikasi dan Informatika**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu nilai atau untuk meningkatkan good governance terutama dari sisi transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat lebih banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik tersebut dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejak tahun 2011 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. PPID di Kabupaten Rejang adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan PPID pelaksana meliputi Kepala OPD dan Kecamatan Kecamatan hingga Pemerintah Desa. Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rejang Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.68

Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rejang Tahun 2018-2021

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2021
1	Jumlah layanan komunikasi	100	100	100	100	100
2	Jumlah pelayanan info	11	11	11	0	0
3	Kecepatan layanan SIP	100%	100	-	-	-
4	Jumlah aplikasi penggunaan di tingkat pemerintah desa	11	11	11	11	11
5	% PPID yang memiliki website (%)	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Capaian pencapaian up perencanaan up rencana kerja 2022	27	21	21	21	21
5	Ind. Pelaksanaan, Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Kinerja					
	Maka masa berakhir, yaitu 2022	2	2	2	2	2
	Maka masa up rencana kerja 2022	1	1	1	1	1
	Maka rencana kerja perencanaan 2022	1	1	1	1	1
	Maka pemantauan up pelaksanaan rencana & evaluasi	1	1	1	1	1
	Maka up masa up rencana kerja	2	2	2	2	2
	Maka Maka masa berakhir & akhir					
6	Perencanaan indikator kinerja up revisi untuk pencapaian up 2022	22	22	22	22	22
7	Indikator Kinerja Utama Kinerja	100	100	100	100	100
10	Indikator pencapaian pencapaian	74	74	74	86	81

Sumber: Dinaswasta, 2022

a. Kinerja dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Pelayanan Kinerja dan UMKM di Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.89

Perkembangan Pelayanan Kinerja dan UMKM di Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jml UMKM yang di bantu	69.932	69.932	69.932	69.932	100.142
2	Jml UMKM Koperasi dan UMKM yang di bantu	200	200	200	200	200
3	% Koperasi aktif (%)	66,41	71,00	66,34	72,7%	73,00%
4	% UMKM yang Koperasi aktif (%)	66,41	71,00	66,34	72,71%	73,00%
5	Capaian jml pelayanan UMKM	1.000	100	1.000	1.000	1.000
6	Jml Monev/ada Monev	100	100	100	100	100

Sumber: Dinaswasta, 2022

Pada tabel diatas, sangat berpengaruh perkembangan pelayanan Kinerja dan UMKM di Kabupaten Bandung pada Tahun 2022 meningkat. Hanya indikator pemetaan koperasi aktif dan pemetaan RSP/USP koperasi aktif yang nilainya masih di bawah, namun hal ini menunjukkan bahwa pelayanan urusan Kinerja dan UMKM sudah cukup baik dan perlu terus ditingkatkan.

L. Penanaman Modal Daerah

Jumlah nilai realisasi investasi proyek PMA/PMDN yang tercatat di Kabupaten Bengkang pada tahun 2022 sebesar 1,87, mengalami peningkatan sebesar 3,61 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 17 di Tahun 2021. Meningkatnya jumlah investasi dan investor yang ada di Kabupaten Bengkang, memberikan kontribusi efek kepada pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil atas dasar nilai investasi pada Tahun 2021 sebesar 100 orang, mengalami peningkatan sebesar 24,243 orang menjadi sebesar 25,043 orang pada Tahun 2022. Secara rinci Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.70
Perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penanaman modal asing langsung, yaitu modal langsung	1 profil investasi	1 profil investasi	2 profil investasi	1 profil investasi	1 profil investasi
2	Perkembangan penanaman modal asing langsung	1	1	2	1	1
3	Perkembangan investasi langsung penanaman modal asing yang tidak resmi	0	0	0	0	0
4	Nilai investasi langsung tercatat PMA/PMDN dalam rupiah/USD	70	81	111	171	188
5	Investasi langsung	171,9	4.224,7	4.224,7	17	12,7
6	Perkembangan penanaman modal di kabupaten/kota yang penanaman modal dan PMA/MDN sesuai dengan Peta Induk Kawasan Industri	100	100	100	100	100
7	Perkembangan kontribusi penanaman langsung Penanaman Modal kepada industri/daerah lain	100	100	100	100	100
8	Area Penanaman Langsung di kawasan zona Industri	100	100	100	100	0
9	5 PMA, PMDN dalam Bengkang yang ada sesuai PDI	81,75	0	84,33	80,88	80
10	Tenaga kerja lokal yang terampil pada penanaman modal asing	10.000	18.880	20.000	100	25.043
11	5 perusahaan perikanan nasional & provinsi yang berkembang	100	100	100	100	100

Sumber: DIBENTAN 2022

m. Kependudukan dan Keluarga

Selama tahun 2017-2021 jumlah organisasi kependudukan di Kabupaten Bengkang terdiri atas yaitu ANPI, Bengkang Bangkit Peralihan, dan Gerakan Pemuda Nusantara. Namun ada peningkatan pada Kelompok Masyarakat Pemuda (KMP) dari 22 kelompok pada tahun 2018 meningkat menjadi 36 kelompok pada tahun 2022. Perkembangan Data Organisasi Kependudukan di Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.71
Perkembangan Data Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2023

No	Jenis Organisasi Pemerintahan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	DAI	1	1	1	1	1
2	DAK	1	1	1	1	1
3	Perwakilan Bupati	1	1	1	1	1
4	Perwakilan Kecamatan	1	1	1	1	1
5	Perwakilan	1	1	1	1	1
6	KORPRI, KOPRI dan Perencanaan Perilaku	22	25	25	25	26
7	Kontribusi Anggaran Pemerintahan	1	1	1	1	1
8	Badan Perencana Pembangunan	1	1	1	1	1
9	Pusat Pelayanan Masyarakat	1	1	1	1	1
10	Perwakilan RT	1	1	1	1	1
11	RSK/RSK Desa	1	1	1	1	1
12	Perwakilan Kelurahan	1	1	1	1	1
13	Perwakilan Kecamatan Rembang	1	1	1	1	1
14	Perwakilan Desa	1	1	1	1	1
15	Perwakilan Perencanaan Pembangunan	1	1	1	1	1
16	Pusat Pelayanan Masyarakat	1	1	1	1	1
17	Badan War. War. Rembang	1	1	1	1	1
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	1
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	1
	Jumlah	41	43	43	43	44

Sumber: Disdikpora, 2023

Kemudi pandemi covid-19 mempengaruhi pelaksanaan event olahraga baik di tahun 2020 maupun 2021. Di bidang kesekolah, pelaksanaan kegiatan Kabupaten Rembang dalam even tingkat provinsi dan tingkat nasional pada tahun 2021 tingkat Provinsi dan Nasional mendapatkan 0 medali.

Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terdapat sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat utamanya untuk berbagai aktifitas olah raga, seperti Bola, Basket, Volley, Bola Tangkis dan Senang, sehingga DOK dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Adapun perkembangan jumlah sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.72
Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022

No	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah unit				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Lapangan Sepak Bola	22	22	22	22	22
2	Lapangan Basket	41	41	41	41	41
3	Lapangan Volley	224	224	224	224	224
4	Lapangan Bola Tangkis	18	18	18	18	18
5	Salang Senang	2	2	2	2	2
6	Lapangan/Tempat Bermain Olahraga	19	19	19	19	19

Sumber: Disdikpora dan Rembang, 2023

Adapun Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perwada dan Olah Raga Kabupaten Serang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perwada dan Olah Raga di Kabupaten Serang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Salah satu produk perikanan (perikanan)	75	75	0	0	75
2	Salah satu produk PDR (PDR umum)	20	20	-	-	-
3	Salah satu produk industri (industri)	11	11	-	-	0
4	Salah satu produk (produk hasil perikanan)	24	24	-	-	-
5	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat perikanan (TPI)	1	1	-	-	-
6	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat perikanan (TPI)	10	10	10	10	10
7	Salah satu produk (produk) perikanan	20	20	20	20	20
8	Salah satu produk (produk) di Kabupaten Serang	100%	100%	100%	100%	100%
9	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat perikanan (TPI)	14	14	14	14	0
10	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	14	20	20	20	0
11	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	10	10	10	10	0
12	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	100	100	0	0	100
13	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	100	0	0	100
14	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	10	0	0	0
15	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0
16	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0
17	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0
18	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0
19	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0
20	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0
21	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0
22	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0
23	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0
24	Salah satu produk (produk) yg terpasang di Tempat Perikanan (TPI)	0	0	0	0	0

Sumber: Buletin Data Serang, 2022

a. Statistik

Portal Open Data Serang adalah media bagi publik data di daerah yang dapat diakses oleh pengguna data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Banyaknya jenis data yang dipublikasikan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.74
Data Statistik Tahun 2018-2022

No	Isi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelembagaan Kelembagaan Desa (KMD)	11	11	10	10	11

Sumber: <http://data.balokab.go.id>, 2022

o. Perencanaan

Perencanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Bandar Lingsing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah untuk Penyelenggaraan pemerintahan untuk pengamatan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan pada Kabupaten Kecamatan sesuai untuk Perangka Daerah Kabupaten/Kota. Sampai saat ini penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bontolung lingsing telah melalui pada pelayanan masyarakat secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bontolung dapat dilihat dari prosedur kerja/satel yang dikelola, dimana pemerintah daerah berdasarkan Indeks KAMI (Kualitas Informasi). Indeks KAMI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat layanan pelayanan dan ketepatan pelayanan informasi di sebuah organisasi berdasarkan kerangka dengan kriteria pada ISO/IEC. Berdasarkan data kuantitatif realisasi urusan pemerintahan Kabupaten Bontolung selama kurun waktu 2017 hingga 2022 pemerintah pusat atau satelit yang dibantu sebesar 100%.

p. Kebudayaan

Kabupaten Bontolung berada pada daerah perbatasan dengan panjang pantai sekitar 80 km, dan dipengaruhi juga oleh sejarah sehingga berwujud dan kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Bontolung banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur sejarah dan budaya, seperti pengaruh budaya Jawa, Islam, Cina/Tionghoa, dan budaya daerah perbatasan. Kelompok kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Bontolung antara lain Kesenian Musik Tradisional dan Kesenian/ Tarian Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari Kesenian, Marumati, Gaden, Colaklan, Trung Trung Lek, Kerencing, Belangkan Kerencing, Tarian Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Kuda, Kethoprak, Kopyak, Gondawa, Ande - Ande Lumat, Lisan, Daki Daki, Padiol-Sarang, Bannagan, Hong. Kesenian tersebut merupakan Aneka Budaya dan Kekayaan Kabupaten Bontolung. Kelompok kesenian di Kabupaten Bontolung pada Tahun 2022 sebanyak 271 kelompok. Data kelompok kesenian di Kabupaten Bontolung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75
Data Kelompok Kesenian Kabupaten Bontolung Tahun 2017-2022

No	KELOMPOK Kesenian	Jumlah (kelompok)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelembagaan Kesenian (KMD)	11	11	11	11	11	11
2	Kelembagaan Kesenian	11	11	11	11	11	11
3	Kelembagaan Kesenian	11	11	11	11	11	11

No	KELOMPOK KRESIAN	JUMLAH (KELOMPOK)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanah Tradisional	20	14	10	14	24	11
2	Tanah Tradisional, Tanah	4	0	0	0	0	0
3	Musa Kreman	20	21	0	21	21	21
4	Kerapan	12	14	14	14	18	21
5	Kerapan Baru	10	11	20	21	24	27

Sumber: Ditmasbud, 2022

Pada tahun 2022 Kelompok Kreman Tradisional yang paling banyak adalah musa kreman sebanyak 91 kelompok. Banyaknya Kreman yang ada di Kabupaten Rengas memang merupakan salah satu potensi daerah, namun demikian perhatian terhadap kelompok-kelompok seni tersebut secara keseluruhan masih belum maksimal dan keterbatasan gedung kreman untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kreman seperti pameran, festival, paguyuban, festival dan lainnya masih terbatas.

Tabel 3.76
Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Rengas
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kegiatan penyelenggaraan seni budaya di berbagai tingkat	10	12	9	10	20
2	Jumlah kegiatan tradisional seni	121	127	104	104	111
3	Jumlah kegiatan seni dan kebudayaan tingkat kabupaten	0	20	20	20	20
4	Jumlah kegiatan tingkat	101	107	84	84	91
5	Jumlah kegiatan tingkat	121	107	84	84	91
6	Jumlah guru seni budaya tingkat (pendidikan menengah)	11	11	9	9	11
7	Jumlah museum	1	1	1	1	1
8	Jumlah gedung budaya	1	1	1	1	1
9	Jumlah organisasi penyelenggara kegiatan seni budaya yang telah terdaftar	10	11	1	1	1

Sumber: Ditmasbud, 2022

Daftarinya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rengas dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.77
Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rengas
Tahun 2018-2022

Tahun	Tarian Modern	Tarian Klasik	Tarian Rakyat		
			Reng	Tapuban	Lain-lain
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0

Sumber: Ditmasbud, 2022

g. Perputakaan

Jumlah perputakaan di Kabupaten Rengas tergolong pringkat dan hanya 5 judul traktat terdapat dalam pada perputakaan desa. Pada tahun

2018 jumlah perpustakaan desa sebesar 99 meningkat menjadi 120 pada tahun 2022. Cakupan rumah baca yg dibentangkan (sudah) mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 274 rumah menjadi 281 rumah di Tahun 2022. Jumlah buku baca yang tersedia di perpustakaan desa di pada tahun 2018 sebesar 41.004 eksemplar terus meningkat menjadi sebesar 48.102 eksemplar pada tahun 2022. Perkembangan pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.78

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perpustakaan:					
	Desa (sudah)	99	100	100	100	120
	Perencanaan (sudah)	12	14	14	14	14
	Desa (sudah)	274	274	274	274	281
	Perencanaan (sudah)	41	41	41	41	41
	Rembang (sudah)	1	1	1	1	1
2	% rumah perpustakaan dg rumah baca (%)	81,00	80	80	80	81
3	Angka kunjungan:					
	perpustakaan di desa	24.000	24.000	2700	2800	3000
4	Perpustakaan rumah baca	200	200	200	200	200
5	Jumlah buku baca yg tersedia di perpustakaan	41.000	41.000	41.000	41.000	48.100

Sumber: Urusan Perpustakaan dan Arap Tahun, 2022.

e. Kearifan

Di Kabupaten Rembang, pelaksanaan urusan kearifan masih sangat kurang. Arap yang ada, harus dibentangkan supaya memperoleh penguasa dan juga berfungsi sebagai back up data. Dalam pengribaan dan penanganan arap masyarakat harus arapnya yang memiliki kompetensi hanya memiliki 2 arapnya secara dan pratama kearifan cukup baik. Dari keseluruhan pelaksanaan kearifan pada tahun 2022 70% dalam kondisi baik, begitu pula kondisi gedung dan jumlah ruangan sudah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 71,42 % Gedung dengan kondisi baik, dan 88% ruangan dengan kondisi baik.

Dalam hal pengribaan, pengetahuan arap secara baik baru dilakukan 60 % pada tahun 2019 dan 2020. Namun menurun di Tahun 2022 menjadi 44,10 %. Pengetahuan arap juga dilakukan secara menyeluruh sampai pada tingkat desa/kecamatan. Terkait dengan pemetaan, arap pada tahun 2022, tercatat ada 42% desa/kecamatan yang telah menghibe arap secara baik. Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearifan Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.79

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearifan di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	% arap yang dibentangkan (%)	60	60	61,20	41,10	44,10

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase area yang dipertimbangkan (%)	98	98	98	98	98,98
2	Area program yang memiliki kompetensi	2	1	1	1	1
3	Jumlah program yang diteliti	40	40	40	44	44
4	Penggunaan area secara total (%)	93,4	90	90	90,93	90,93
5	Persentase area kebun yang ditanam pada komoditas (%)	98	98	98,93	98	98
6	Persentase luas lahan/area yg ditanam komoditas yang utama (%)	98	98	98	98	98
7	Persentase luas lahan/area yg ditanam komoditas lainnya (%)	98	98	98	98	98
8	Produksi (%)	90	90	90	97,10	97,10
9	Manajemen (%)	90	90	90	94,3	94
10	Pendapatan (%)	90	90	90	90	90

Sumber: DITP Provinsi Jambi

Revisi: Dinas Perikanan dan Air Bersih, 2022

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

• Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sembang, terus mengalami pertumbuhan selama kurun waktu 2017-2021, dimana produksi perikanan tangkap sebesar 78.858,218 kg pada tahun 2017 menjadi 97.994.136 kg pada tahun 2021. Mendukung produksi perikanan tangkap dipergunakan oleh berbagai hal mulai dari tingkat rumah yang tidak merata hingga adanya kebutuhan pelayanan nelayan-nelayan untuk nelayan, namun semuanya hal tersebut tidak berpengaruh besar pada hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sembang. TPA yang terdapat di Kabupaten Sembang terdiri terdapat di berbagai desa yaitu Tanggahan, Tanjunghari, Tangbagang I, Tangbagang II, Pagar Banggi, Perjalalan, Perlongan, Karangtambak, Karangrejo, dan Siring.

• Pengalihan dan Pemrosesan Produk Perikanan

Produksi hasil olahan ikan beberapa tahun terakhir (2018-2022) yang sangat besar yaitu pada tahun 2018 sebanyak 103.908.600 kg walaupun mengalami penurunan menjadi sebesar 131.444.133 kg pada tahun 2022. Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sembang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sembang Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi perikanan tangkap (kg)	6.204.700	6.432.000	6.500.000	6.721.400	6.204.700
2	Manajemen perikanan tangkap (Rp)	11.028.400	1.411.000	1.911.400	1.101.000	1.000.000
3	Produksi perikanan olahan (kg)	100	10	10	10	10.10

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	1a. Jumlah rumah yang pertumbuhannya lebih tinggi	0%	0%	2%	1%	0%
2	1b. Jumlah rumah yang pertumbuhannya rendah	0%	0%	0%	0%	1,4%
3	1c. Jumlah rumah yang pertumbuhannya lebih stabil	0%	0%	1%	0%	0%
4	2. Jumlah rumah yang dibangun	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	3. Jumlah rumah yang dibangun	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
6	4. Jumlah rumah yang dibangun	100.000.000	110.000.000	120.000.000	130.000.000	140.000.000
7	5. Jumlah rumah yang dibangun	1.000.000	0%	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	6. Jumlah rumah yang dibangun yang lebih tinggi (%)	0%	0%	0%	0%	0%
9	7. Jumlah rumah yang dibangun yang lebih rendah (%)	0%	0%	0%	0%	0%
10	8. Jumlah rumah yang dibangun yang lebih tinggi (%)	0%	0%	0%	0%	0%
11	9. Jumlah rumah yang dibangun yang lebih rendah (%)	0%	0%	0%	0%	0%
12	10. Jumlah rumah yang dibangun yang lebih tinggi (%)	0%	0%	0%	0%	0%
13	11. Jumlah rumah yang dibangun yang lebih rendah (%)	0%	0%	0%	0%	0%
14	12. Jumlah rumah yang dibangun yang lebih tinggi (%)	0%	0%	0%	0%	0%
15	13. Jumlah rumah yang dibangun yang lebih rendah (%)	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: BPS Kabupaten, 2022

• Usaha Garansi Rakyat

Pada Tahun 2018 Kabupaten Bontang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Masyarakat Garani. Kabupaten Bontang memiliki potensi untuk pengembangan usaha rakyat sebagai bentuk nyata di wilayah Kecamatan Kalbar, Kecamatan Bontang dan Kecamatan Larem. Adapun Perkembangan usaha garansi rakyat di Kabupaten Bontang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.81
Perkembangan Usaha Garansi Rakyat di Kabupaten Bontang
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Usaha Perseorangan (Ribu)	Jumlah Perseorangan (Ribu)		Persentase (%)	Nilai Perseorangan (Rup. Miliar)
			Perseorangan	Perseorangan		
1	2018	1.100	1.100	0.000	100.000	110.000.000.000
2	2019	1.000	1.000	0.000	100.0	100.000.000.000
3	2020	1.000,00	1.000	0.000	100.000,00	100.000.000.000
4	2021	1.000,00	1.000	0.000	100.000	100.000.000.000

No	Tahun	Jumlah Desa Perkotaan (Desa)	Jumlah Penduduk (Orang)		Produksi (Tons)	Nilai Produksi (Rp. Miliar)
			Peserta	Praktisi		
2	2022	1.044,07	1.000	1.100	10.000	10.000.000

Sumber: BPS, 2022

b. Pariwisata

Obyek wisata unggulan di Kabupaten Rembang memiliki sejumlah 8 buah yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum RA Kartini, Museum RA Kartini, Pantai Pasir Putih, Wana, Pantai Karanggebe, Pantai Derasagan, Pantai Bagan Bagan, dan Delt Teras Heritage. Kabupaten wisata yang ada di Kabupaten Rembang dalam tahun 2018 hingga 3 tahun terakhir tren pertumbuhannya. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisata sebanyak 1.410.000 orang ke 1.026.294 orang di Tahun 2019, tetapi di Tahun 2020 mengalami penurunan hanya menjadi sekitar 508.791 orang, adanya perubahan kunjungan wisata di obyek wisata karena adanya pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Rembang mengeluarkan Surat Edaran Bupati Rembang No. 800/1623/2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perjalanan di Kabupaten Rembang Pada masa kodaratatan Kesehatan Masyarakat Terhadap Covid-19, ini awal muncul tersebut diantaranya adalah penurunan jumlah pengunjung maupun pendataan waktu kunjungan. Meskipun begitu total kunjungan wisata dan wisata tahun 2021 dan 2022 sudah mulai meningkat yakni sebesar 1.046.183 dan 1.826.977 wisatawan.

Berkas kunjungan wisata pada tahun 2018 dikendalikan semakin banyaknya obyek wisata baru yang dikelola desa yang semakin berkembang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Rembang. Sedangkan volume kunjungan wisata tahun 2020 dan 2022 dikendalikan sudah mulai dilonggarkannya perubahan jumlah pengunjung maupun pendataan waktu kunjungan di tingkat wisata Kabupaten Rembang.

Pengembangan pariwisata semakin penting karena memperluas kesempatan kerja dan pertumbuhan pusat pertumbuhan. Secara rinci Perkembangan Urutan pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.83
Perkembangan Urutan Pariwisata Kabupaten Rembang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Total kunjungan wisata ke Wisata orang	1.410.000	1.026.294	508.791	1.046.183	1.826.977
2	Perubahan tingkat wisata ke perkotaan (%)	18,1	17,18	18,1	18,1	17,18
3	Kota yang baru kunjungan baru	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Indikator pariwisata Kabupaten Rembang	2	2	2	2	2
5	Perubahan wisata wisata orang	2	11	11	11	11
6	jumlah wisata baru	18	18	11	11	18

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah level keahlianan & keahlian tinggi	10	10	10	10	10
2	Keahlian profesional (sertifikasi/ studi P2)	4	10	10	10	10

Sumber: Developer, 2022

Perkembangan total kunjungan wisatawan dan wisata pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan secara drastis karena mulai bertumbuhnya obyek-obyek wisata dan sesuai proses yang diadahi dan berbagai dipilar wisata-wisata lainnya di obyek wisata sehingga membuat minat masyarakat untuk berkunjung. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya covid 19 yang mengakibatkan adanya pembatasan sosial sehingga berpengaruh pada operasional tempat wisata dan kunjungan wisata.

a. Pertanian

Kabupaten Brebes memiliki luas 101.408 hektar, yang terdiri atas lahan sawah sebesar 28,88% atau seluas 29.885 hektar, lahan bukan sawah sebesar 51,12% atau seluas 52.850 hektar dan lahan bukan pertanian sebesar 19,30% atau seluas 19.673 hektar. Lahan sawah masih terbagi menjadi 28,87% atau seluas 8.309 Ha terdiri lahan sawah irigasi dan 71,12% atau 20.876 Ha terdiri sawah tidak irigasi. Daya dukung pertanian di Kabupaten Brebes masih secara alami adanya aliran sungai. Sampai saat ini sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Brebes antara lain Sungai Brebesgantung, Delogan, Karanggeneng, Kuning, Telan, Kumpang, Sade dan Sungai Pempas. Wilayah yang masuk pada daerah irigasi pertanian terdapat 25 daerah irigasi.

Hasil produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Brebes meliputi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura, dan komoditas perkebunan utama. Tanaman sayur-sayuran yang dibudidayakan di Kabupaten Brebes sangat bervariasi pada tahun 2021. Beberapa tanaman sayur-sayuran yang menjadi unggulan adalah cabai, bawang merah, tomat, ketumbar dan terung. Luas panen cabai dan bawang merah pada tahun 2021 adalah 1.332 ha dan 140 ha. Sedangkan tanaman buah-buahan terutama yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Brebes meliputi semangka dan melon, dengan luas panen semangka 34 ha dan 115 ha dengan produksi masing-masing 5.565 ton dan 21.222 ton.

Sedangkan tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan pada tahun 2021 di Kabupaten Brebes meliputi kelapa, kopi, tebu, dan tembakau. Luas panen tanaman perkebunan kelapa 6.706 ha, kopi 212 ha, tebu 6.724 ha, dan tembakau 1.296 ha. Secara ringkas perkembangan produksi pertanian/perkebunan Tahun 2019-2022 di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Perubahan Komoditas Pertanian di Kabupaten Bontang
Tahun 2018-2022

No	Jenis Komoditas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A. Tanaman Pangan (Jari)						
1	Padi	202.444	194.261	211.764	222.770	228.767
2	Jagung	110.943	110.871	106.971	106.710	104.661
3	Kacang	2.464	2.871	400	430	344
4	Kacang tanah	100	400	400	400	170
5	Kacang hijau	1.000	400	400	1.700	1.000
6	Ubi jalar	61.000	58.770	58.000	70.000	69.000
7	Ubi kayu	1.000	471	400	770	500
B. Perikanan (kg)						
1	Kelapa Manis	10.770	10.000	10.000	9.171	9.000
2	Udang	70.000	77.000	100.000	44.000	104.000
3	Makris	612.770	760.000	760.000	770.000	100.000
C. Perkebunan (Jari)						
1	Kopi (Jari Perkebunan)	21.000	20.071	20.000,7	20.000	20.700
2	Tebu	41.000	40.071	40.000,3	40.000	40.000
3	Perkebunan	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Kopi	4.000	8.000	8.000	8.771	8.770
5	Wijen	17.00	21.07	20.77	20.00	20.00
6	Wortel	100,24	100.000	100.77	100.77	100.77
D. Perikanan						
1. Produk perikanan (produksi dalam negeri)						
	Perikanan	100.000	100.770	100.000	100.000	100.000
	Kelapa	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Udang	100.000	100.770	100.000	100.000	100.000
2. Produk impor (kg)						
	Perikanan	100.000	1.770.000,0	1.00.000,0	1.10.000	1.00.000
	Kelapa	100.000	1.00.000,0	1.00.000,0	100.000	100.000
	Udang	10.000	10.000,0	10.000,0	10.000	10.000
3. Jumlah produksi (kg)						
	Perikanan	1.10.000	1.00.000	1.10.000	100.000	1.10.000
	Perikanan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Sumber: BPS, 2022

Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Bontang yaitu padi, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi, jagung dan kedelai dalam kurun waktu empat tahun (2018-2022) menunjukkan angka yang berfluktuasi. Sedangkan produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami fluktuasi namun cenderung menurun selama kurun waktu 2018-2022. Terdapat kurang lebih 20 jenis komoditas perkebunan di Kabupaten Bontang. Dari 20 jenis tersebut terdapat beberapa komoditi yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam meningkatkan nilai perkebunan Kabupaten Bontang. Produk-produk perkebunan tersebut antara lain tebu, perkebunan, kelapa, wijen dan man. Produksi hasil perkebunan yang disebutkan tadi memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian.

Ditawi sisi peluang pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Bontang masih terbuka lebar apabila dukungan dengan perkumuhan peternakan

peningkatan ketahanan konsumsi hasil ternak seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi dan asal produk masyarakat. Jenis ternak di Kabupaten Bontang terdiri dari sapi potong, kambing dan domba. Produk Sediaan perikanan selama lima tahun terakhir (2018-2022) cenderung meningkat. Jenis ternak yang mengalami kenaikan dari tahun 2018-2022 yaitu sapi potong dan domba. Kabupaten Bontang merupakan salah satu sentra produksi sapi potong di Jawa Tengah dan sekaligus sebagai wilayah sumber bibit sapi PT, produksi sapi potong pada tahun 2021 mencapai 147.484 ekor.

Dalam rangka meningkatkan hasil jual pertanian dan perikanan, peningkatan pemasaran produk pertanian di Kabupaten Bontang dilakukan melalui promosi produk dan pembantuan kelompok tani dan penggunaan teknologi dan alat mesin pertanian. Perkembangan Upaya Pemasaran Hasil Produksi dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Perkembangan Promosi Produk dan Pembinaan Pertanian di Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Promosi hasil produksi pertanian perikanan	4	20	0	0	11
2	Timbulnya produk pertanian jenis budidaya (sapi, kambing)	1,31	1,34	1,34	1,33	1,30
3	Memperolehnya alat mesin pertanian, perikanan, perikanan (alat mesin)	644	50	50	-	300
4	Keanggotaan hasil tahun pertanian yang aktif (PBB, PT)	14.920	24.000	16.200	14.000	14.000
5	Memperolehnya alat mesin pertanian (alat mesin)	611	400	120	120	119
6	Memperolehnya alat pertanian (alat pertanian)	10.00	11.0	1.10	1.10	1.1

Sumber: Bontang, 2022

d. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bontang tahun 2019 adalah sebesar 14,34%, dan merupakan kontribusi terbesar ke-3, setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Walaupun nilai ekspor yang semakin naik dari tahun ke tahun tapi belum mampu menaikkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bontang.

Nilai ekspor Kabupaten Bontang selama kurun waktu lima tahun 2018-2022, yaitu sebesar Rp.12.400,00 (tahun 2018), meningkat menjadi Rp.10.000,00 (tahun 2022). Dengan itu ketertarikan pasar sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari beberapa indikator sektor perdagangan menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2018-2022. Adapun perkembangan sektor perdagangan tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Perkembangan Sektor Perdagangan di Kabupaten Bontang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Perdagangan barang yang dijual	50	50	50,49	50	50
2	Perdagangan internasional dan perdagangan yang dilakukan dalam negeri	50	50	50	50	50
3	Perdagangan barang yang dijual melalui pasar tradisional	1	1	1	1	1,11
4	Perdagangan barang yang dijual melalui pasar tradisional	500	500	500	500	500
5	Perdagangan barang yang dijual melalui pasar tradisional	1	1	1	Tidak ada	1
6	Perdagangan barang yang dijual melalui pasar tradisional	500.140.000	500.000.140	500.000.000	500.000.000	500.000.000.000
7	Perdagangan barang yang dijual melalui pasar tradisional	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	Perdagangan barang yang dijual melalui pasar tradisional	20	20	20	20	20
9	Perdagangan barang yang dijual melalui pasar tradisional	10	10	10	10	10
10	Perdagangan barang yang dijual melalui pasar tradisional	10	10	10	10	10
11	Perdagangan barang yang dijual melalui pasar tradisional	1	1	1	1	1

Sumber: Bontang, 2022

e. Perindustrian

Sektor Sektor industri merupakan kontributor terbesar ke dua terhadap PDRB Kabupaten Bontang sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Rendahnya ini menunjukkan semakin pentingnya sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Bontang. Semakin pentingnya sektor industri ini dapat ditunjukkan pula dari capaian kinerja industri, dimana indikator indikator yang ada cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian Kabupaten Bontang belum memiliki kawasan industri terpadu yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.

Kabupaten Bontang memiliki industri besar yang bergerak pada sektor real estate dan konstruksi, industri kimia bahan bangunan, industri tekstil dan kulit, industri kerajinan dan logam. Kabupaten Bontang juga memiliki potensi industri menengah dan kecil lainnya yang berbasis pada sumberdaya alam, antara lain garam rakyat, pengolahan ikan, metal smelt, kimia, kimia, makanan, kerajinan logam, tekstil, gamping, industri perikanan dan lain-lain, tekstil dan lain-lain. Secara keseluruhan perkembangan sektor industri di Kabupaten Bontang tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.86
Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bontang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Hal yang dijual	1,11	11,11	1,11	1,11	1,11

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Capaian uji coba uji konsep layanan PK	1,10	1,10	-	5,57	1,1
2	Kemampuan dalam layanan Paksi 40000 (kg)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Uji mandiri: hasil & tanggapan dari tim uji layanan (dalam tanggapan di media)	99,30	99,11	99,7	99,1	99,7
4	Jud. SAM yg di lakukan Pengujian	0	0	0	0	0
5	Jud. SAM yg di lengkapi prosedur proses produksi	0	0	0	0	0
6	Pembangunan dan uji	1,14	0,00	0,0	0,0	0,0
7	Jud. Fasilitas pengujian kelengkapan standar ukuran	1,14	0	0	0	0
8	Aspek dalam ukuran	0	0	0	0	0
9	Aspek dalam ukuran	0	0	0	0	0

Sumber: Ditjenbangun, 2022

3.1.3.2. Peningkatkan Urusan Pemerintahan

Urutan penunjang pemerintahan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

a. Kepegawaian

Berdasarkan pengelompokan golongan per 01 Maret 2022, 100% dari seluruh jumlah pegawai merupakan Golongan II dengan persentase 53,81%, Golongan IV sebanyak 18,50%, Golongan I sebesar 1,40% dan Golongan III sebesar 19,12%. Kualitas sumber daya aparatur dapat dilihat dari rata-rata pendidikan yang ditamatkan dimana 79,5% aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bengkang berpendidikan perguruan tinggi dengan pertambahan lulusan pegawai diploma II sebesar 10,30%, diploma IV 0,90%, pendidikan sarjana sebesar 87,60% dan sebanyak 0,50% telah menyelesaikan pendidikan magister (S-2) dan 0,00 % telah menyelesaikan pendidikan tingkat S3. Sementara itu, aparat pemerintah yang berpendidikan SLTA sebanyak 10,50% s.d. Sehubungan Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.87
Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Bengkang
Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Program Pendidikan Kelulusan						
1	Jud. Aparatur yg mengahai kelas IIIa II	-	1	-	1	1
2	Jud. Aparatur yg mengahai kelas IIIa III	1	1	-	-	1
3	Jud. Aparatur yg mengahai kelas IIIa IV	1	-	-	-	-
4	Jud. Pegawai yang mengahai kelas IV dan V dan Peningkatan	110	110	100	100	1.000
Program Pendidikan dan Pengembangan Aparatur						
1	Uji SAM yg dilakukan pengujian saat mulai	100%	99,50%	99,50%	97,00%	11.00%
2	Jud. Uji Fasilitas dalam ukuran	0	0	0	0	0
3	Pembinaan dalam Peningkatan Tingkat Pendidikan yang dilaksanakan di instansi	0	0	0	0	0

Sumber: Ditjenbangun, 2022

menggunakan Indeks Kualitas Pemerintahan (IKP). IKP diperoleh melalui penghitungan secara proporsional dan dokumentasi dengan menggunakan FGD dan kuesioner terhadap direktori proses, isi dan jaminan tidak terjadi dalam pemerintahan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Dari kajian penyusunan dokumen Indeks Kualitas Pemerintahan (IKP) Kabupaten Rembang Tahun 2022 bernilai 8,08 masuk dalam kategori Baik. Meskipun sudah masuk dalam kategori Baik, Nilai Indeks Kualitas Pemerintahan Kabupaten Rembang masih perlu ditingkatkan, sehingga tercipta pembangunan yang berkualitas dan memajukan bangsa masyarakat.

Selanjutnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lethang yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Perencanaan Kebijakan, Jurnal Penelitian, Fasilitas Jaringan Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Rembang, Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SID), Kabupaten Inovasi dan Daya Saing Daerah, serta Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Hal ini yang menunjang kehidupan ini perlu terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Kerja penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan pemantauan hasil Lethang dan inovasi dalam pemerintahan, kebijakan, pembangunan maupun peningkatan pemerintahan masyarakat.

c. Keuangan

Pembangunan sumber keuangan Kabupaten Rembang oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang dilaksanakan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan daerah berdasarkan persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Derasa persentase peningkatan PAD Kabupaten Rembang dari tahun 2018 sampai 2022 cenderung stabil yaitu setiap tahun. Persentase peningkatan PAD tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 22,70%, dan persentase peningkatan PAD terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,73%. Hal ini dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan masyarakat drastic. Namun di tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 persentase peningkatan PAD kembali sebesar 21,80%, menjadi 22,70 %. Realisasi kinerja kerja menunjang keuangan Kabupaten Rembang tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.89
Realisasi Kinerja Kerja Penunjang Keuangan Tahun 2018-2022

No	Kelas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	1,73	1,73	1,73	22,70	22,70
2	Indeks IPD atau persentase Laporan Keuangan Daerah	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08

Sumber: BPPKAD, 2022

d. Program

Sebagai pimpinan kerja Inspektori Kabupaten Rembang Perkembangan Pelaksanaan Programnya oleh Inspektori Kabupaten Rembang

Tabel 2.90-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Perkembangan Pelaksanaan Programatik oleh Inspektori di Kabupaten
Bengkang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyusunan dan Pelaksanaan LKIP Reguler	100	100	100	100	100
2.	Penyusunan LKIP Monev Kinerja	97	98	100	97	98
3.	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Kinerja dan Programatik (LKP) Tahunan	100	100	100	100	100
4.	Penyusunan dan Pelaksanaan LKP oleh instansi/ dinas/ lembaga	100	100	99	100	100
5.	Laporan Hasil Monev LKIP	1	1	1	1	1
6.	Laporan Hasil LKIP Kabupaten	1	1	1	1	1
7.	Laporan Hasil LKIP PNS	10	99	99	99	99
8.	Salah satu indikator yg terdapat dalam RKA & Rencana Strategis Kinerja Instansi Daerah Kabupaten Bengkang yaitu RKA & Program Pengembangan Kinerja Instansi Daerah (PKIID): a. RKA b. PKIID	0	0	10	99	100
9.	Total pelaksanaan Inspektori Kabupaten Bengkang	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektori, 2022

a. Referensi Kinerja

Pelaksanaan referensi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkang melibatkan beberapa area perubahan yaitu:

- 1) Peningkatan dan pengoptimalan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
- 2) Peningkatan tata laksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 3) Peningkatan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkang, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkang, dan peningkatan kualitas PNS melalui pelatihan tugas/area khusus;
- 4) Peningkatan programatik dilaksanakan melalui pengembangan internal pada PD;
- 5) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 7) Peningkatan perencanaan perundang-undangan, dan
- 8) Peningkatan koordinasi.

Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kabupaten Bengkang terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Nilai AKIP Kabupaten Bengkang Tahun 2018-2022

No	Kategori yang dinilai	Skor	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
1.	Manajemen	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.	Kualitas Pelayanan	10	10,11	10,00	10,00	10,00	10,00
3.	Program	22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

No	Kategori yang dinilai	Skala	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Uraian Kategori Kategori Kategori Kategori	10	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24
2	Uraian Kategori	10	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12
	Nilai RATA-RATA		82,44	82,72	82,36	82,36	82,36
			CC	CC	B	B	B

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan, 2022

Berdasarkan Tabel diatas diketahui jumlah skor SAKIP Kabupaten Bontang dari Tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dari CC menjadi B. Peningkatan tersebut terdapat pada komponen perencanaan kinerja, dimana pada komponen ini pemerintah daerah Kabupaten Bontang akan melakukan upaya perbaikan melalui perubahan dokumen perencanaan baik di tingkat daerah hingga tingkat UPD sehingga terdapat keseluruhan dokumen perencanaan. Berdasarkan Peraturan KSI no 04 Tahun 2021 untuk Komponen Capaian Kinerja telah ditetapkan sebagai komponen prioritas SAKIP.

Data lain Pemerintah Kabupaten Bontang juga melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang diwujudkan dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik (UPP) Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 3.92

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah UPP yang melakukan pengabdian IIR	Indeks
2018	14 UPP	Nilai Keseluruhan 77,34 Kabupaten Bontang
2019	14 UPP	Nilai Keseluruhan 78,54 Kabupaten Bontang
2020	13 UPP	Nilai Keseluruhan 81,14 Kabupaten Bontang
2021	17 UPP	Nilai Keseluruhan 81,34 Kabupaten Bontang
2022	18 UPP	Nilai Keseluruhan 82,04 Kabupaten Bontang

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan, 2022

E. Usah Pembinaan

Fungsi usaha pembina yang diorganisasi oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Bontang sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 partai politik, dengan persentase berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut : Fraksi PPP sebanyak 10 anggota; Fraksi Partai Demokrat sebanyak 8 anggota; Fraksi PKS sebanyak 6; Fraksi Nasdem sebanyak 6 anggota; Fraksi PKS sebanyak 5 anggota; dan Fraksi Surya Indonesia Sejahtera sebanyak 7. Dalam rangka menunjang tugas-tugas anggota DPRD Kabupaten Bontang maka Sekretariat DPRD memberikan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD, termasuk fasilitas penyediaan ruangan rapat dinas, kunjungan kerja, serta dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota dewan.

Pembinaan Pelaksanaan Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Bontang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bengkang Tahun 2018-2022

No	Program / Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Profil Hukum						
1	Profil yang diterbitkan	0	0	10	0	11
2	Jumlah laporan yang diterima	0	7	10	0	12
3	Kepuasan DPRD yang dikembangkan	0	0	10	0	11
4	5 Capaian Kinerja (%)	110	100	92	92	111
5	Terdapatnya target Anggaran DPRD Asli	110	97	110	98	100
6	Terdapatnya Target Anggaran DPRD	0	0	0	2	2
7	Terdapatnya laporan DPRD Asli perkembangan kerja asli	100	120	100	100	120
8	Terdapatnya perkembangan target anggaran asli perkembangan DPRD Asli	0	17	0	0	0

Sumber: Sekretariat DPRD, 2022

2.1.4. Aspek daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengalaman Perkapita merupakan daya yang dibutuhkan untuk mencapai semua anggota rumah tangga secara merata. dibagi dengan kemampuan anggota rumah tangga yang telah diwujudkan dengan partisipasi daya beli. Pada tahun 2020 terdapat perubahan pendapatan masyarakat akibat adanya Pandemi Covid-19 sehingga pengalihan perkapita juga ikut menurun. Meskipun begitu pada tahun 2022 pengalihan perkapita di Kabupaten sudah mengalami peningkatan yakni sebesar 12.937. Kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkang sudah kembali normal. Secara umum pengalihan perkapita di Kabupaten Bengkang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Pengalihan Perkapita Diwujudkan di Kabupaten Bengkang
Tahun 2018-2022

Indikator	Pengalihan per kapita (Rupiah Asli) (Ribu Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengalihan Perkapita Dewasa Kabupaten Bengkang	12.791	12.507	12.325	12.129	12.937

Sumber: BPS 2022

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

a. Aksesibilitas Daerah

Kabupaten Bengkang merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa Tengah setelah utara berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 7 terminal tipe C di wilayah Kabupaten Bengkang yang melayani transportasi bus dalam kota maupun ke luar kota.

b. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kabupaten Rembang memiliki fasilitas perdagangan dan jasa antara lain: rumah makan, penginapan/hotel/homestay, restoran, wisata dan jasa tradisional (Pasar Kaki 12 dan Pasar Dawa 24).

Jumlah rumah makan di Kabupaten Rembang dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2017 rumah makan di Kabupaten Rembang sebanyak 13 buah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 149 buah.

Jumlah hotel ada 18 hotel yang terdapat di Kecamatan Rembang, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Lawan, dan Kecamatan Blora. Dengan total kelas hotel bintang sebanyak 2 hotel dengan kapasitas kamar sebanyak 76.711 kamar dan kelas hotel bintang sebanyak 14 hotel dengan kapasitas kamar sebanyak 121.599 kamar tersedia. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara sebanyak 8 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu wisatawan sebanyak 1,14 hari.

c. Pemasaran Wilayah

Pemasaran wilayah Kabupaten Rembang berdasarkan pasal 21 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 terbagi menjadi kawasan permukiman padat penduduk, kawasan permukiman hutan rakyat, kawasan permukiman pertanian, kawasan permukiman perikanan, kawasan permukiman pertambangan, kawasan permukiman industri, kawasan permukiman pariwisata, kawasan permukiman perikanan, kawasan pasar dan pulau-pulau kecil, dan kawasan permukiman wilayah lainnya.

Dalam rangka pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa juga menetapkan Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Bangkir (Rembang Blora). Dimana arah pengembangan wilayah Bangkir dibuktikan sebagai PKW dengan Kawasan Cebu sebagai simpul utama. Sedangkan wilayah PKL Bangkir meliputi Kawasan perkotaan Rembang, Lawan dan Blora.

d. Keterediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

Selain dengan persiapan struktur ruang RTRW maka penyelenggaraan urusan bidang pelayanan umum Kabupaten Rembang terus melaksanakan revolusi digital peningkatan layanan air bersih dan limbah, program pembangunan waduk terpadu, pembangunan miring-miring, serta peningkatan program sarana drainase dan air limbah. Perkembangan Capaian Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98

Perkembangan Capaian Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022

No	Item	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terlayani %	63,66	66,1	66,4	66,24	100% (202)
2	Terlayani (orang)	100	100	100	100	100 (1000)
3	Perencanaan %	21,3	21	21,34	20,24	21,34

1) Capaian tertinggi dalam pembangunan kabupaten adalah UPR oleh RTW.

Sumber: DPM Kabupaten Rembang Tahun 2022

2.1.4.3. Fokus Klien Investasi Kemudahan Perijinan

Pelaksanaan perijinan di Kabupaten Kuninggal dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINASKOPUSKUMKEM) Kabupaten Kuninggal. Keberhasilan pelayanan perijinan kepada disampingkan akan lebih mempermudah pelaksanaan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi atau berusaha. Beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk mempermudah perijinan antara lain :

- OSS (Online Single Submission)
- Mail Pelayanan Perijinan Terpadu,
- Penedaftaran Birokrasi melalui penghapusan eselon III dan IV sebagai implementasi dari Surat Edaran Dirjen Cukai Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,
- Penedaftaran Regulasi yang mengatur perijinan sebagai implementasi dari Peraturan Law.

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan dengan syarat apabila persyaratan telah lengkap, mulai dari 5 s.d. 10 hari. Lebih rinci Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.96
Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya

No	Jenis Ijin	Lama Proses Ijin
1	PHD dan SHU	10 hari
2	Perizinan UKM	10 hari
3	izin usaha perdagangan	10 hari
4	izin usaha barang	7 hari
5	izin usaha	2 minggu
6	izin usaha	5 hari
7	izin perantara/agen wisata	5 hari
8	izin perantara/agen wisata perantara lain dan	5 hari
9	izin usaha tempat wisata (PAPW) berwujud spa dan pemandu	7 hari

Sumber: DINASKOPUSKUMKEM

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia Persentase Penduduk berpendidikan tertinggi

Grafik Persentase Penduduk Menamatkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber: Dinaskepegas Kabupaten Bandung Tahun 2022

Grafik 2.10

Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2022

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bandung berpendidikan tingkat SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk tidak tamat SD, berikutnya adalah kelompok penduduk tamat SLTP sederajat, kelompok penduduk tamat SLTA sederajat serta yang terkecil kelompok penduduk tamat Perguruan Tinggi mulai jenjang diploma hingga sarjana 3.

3.3. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

3.3.1 Hasil Evaluasi Indikator Makro Daerah Tahun 2018-2022

Program RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi Tahun 2018-2022. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:

- Tercapai untuk capaian nilai lebih dari atau sama dengan 100% (X >100%);
- Akan Tercapai untuk capaian nilai 100% dan kurang dari 75% (X 75-100%);
- Pada Syarat Keras untuk capaian nilai kurang dari atau sama dengan 75% (X <75%);
- Data Belum Tersedia

Hasil evaluasi capaian indikator Makro tahun 2018 - 2022 dirangkai pada tabel berikut.

Tabel 3.97
Capaian Indikator Makro Tahun 2018-2022

No	Indikator Makro Pembangunan		Nilai					Pertumbuhan / Penurunan (%)
	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	
(II)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
1	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	%	5,20	5,2	7,40	5,20	5,00	41,30
2	Angka Kemiskinan	%	12,41	14,00	13,0	13,0	14,00	7,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,07	3,00	4,00	3,07	1,70	100,00
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64,40	70,1	70,00	70,40	71,00	0,00

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa indikator Makro memiliki trend fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 44,10% pada tahun 2022 sebesar 5,00%, meskipun nilai pertumbuhan ekonomi meningkat akan tetapi nilai PDRB AGDR Marusan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes masih tergolong rendah dibanding dengan Kabupaten di-Jawa Tengah pada tahun 2022 nilai PDRB AGDR Kabupaten Brebes sebesar 14,00T. Maka hal ini Pemerintah melakukan upaya keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 7,00% pada tahun 2022 sebesar 14,00%. Hal ini didukung oleh meningkatnya pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, faktor demografi dan kebijakan publik. Ada 4 indikator kemiskinan lainnya di Kabupaten Brebes diantaranya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yakni rumah layak tidak bekerja, anak tidak sekolah, anak stunting, listrik maupun pipanis kromis. Dari 4 indikator itu, yang paling menonjol dilihat sesuai hasil nilai yakni rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga program bodas rumah tetap menjadi prioritas. Dilakukan dengan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 100,00% pada tahun 2022 sebesar 1,70%. Faktor pendukung yang mempengaruhi Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) yaitu Mengembangkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja baru, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, mendukung kewirausahaan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk usaha sosial terdapat juga kewirausahaan. Meskipun TPT Kabupaten Brebes menurun ada juga faktor penghambat di sektor ini yaitu adanya keterbatasan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,80% pada tahun 2022 sebesar 71%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes semakin meningkat. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes didukung dari adanya angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengetahuan per kapita. Dari capaian 4 indikator makro tersebut menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes sudah cukup baik.

3.3.3 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja terdapat dari beberapa kategori status, yaitu:

- a. Tercapai untuk capaian nilai lebih dari atau sama dengan 80% (X s20%);
- b. Alami Tercapai untuk capaian nilai 80% dan kurang dari 80%, (X 20-80%);
- c. Perlu Upaya Keras untuk capaian nilai kurang dari atau sama dengan 20% (X s20%);
- d. Data Belum Tersedia

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dirangkai dalam pada tabel berikut.

Tabel 3.98
Capaian Indikator Energi Utama Daerah Triandus II Tahun 2023

No	Indikator Energi Utama (UEU) Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PO
			Target Energi	Realisasi s.d TW II (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Efisiensi Rasio	angka	62	61,88	99,88	Terpenuhi	100%
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	71,35-71,51	0,00	0,00	Data belum tersedia	0%
3	Indeks Infrastruktur	angka	48,00	0,00	0,00	Data belum tersedia	0% TAMI
4	Pertumbuhan Ekonomi	angka	4,16-4,81	0,00	0,00	Data belum tersedia	0%
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	69,48	0,00	0,00	Data belum tersedia	0%
6	Angka Kemiskinan	angka	14,15- 13,38	0,00	0,00	Data belum tersedia	0%
7	Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	8,71	8,725	100,00	Terpenuhi	100% (100%)

Sumber: Laporan Triandus II tahun 2023 data riil.

Indikator Energi Utama Pemerintah Kabupaten Mandailing terdapat 7 indikator yaitu Indeks Efisiensi Rasio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Angka Kemiskinan dan Indeks Desa Membangun (IDM). Capaian di triandus II tahun 2023 terdapat 3 indikator Terpenuhi dan 5 indikator data belum tersedia.

a. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah.

Hasil evaluasi indikator kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:

- Sangat baik capaian nilai lebih dari atau sama dengan 90% (K >=90%);
- Baik. Tetapai untuk capaian nilai 80% dan kurang dari 90%, (K 75-80%);
- Perlu Upaya Selain untuk capaian nilai kurang dari atau sama dengan 70% (K <=70%);
- Data Belum Tersedia

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah sangat sesuai dengan Triwulan II tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.99

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian Tahun 2023 (%)	Status	PD
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tr II			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						A.
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	71,15-71,61		0,00	Data Belum Tersedia	IPM
2	Indeks Industrialisasi	angka	48,50		0,00	Data Belum Tersedia	IPM/CI18
3	Pertumbuhan Ekonomi	angka	4,16-4,37		0,00	Data Belum Tersedia	IPM
4	Angka Kemiskinan	angka	14,04-11,30		0,00	Data Belum Tersedia	IPM
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	69,48	6,00	0,00	Data Belum Tersedia	IKLH
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	0,71	0,70	100,00	Terpapai	DIK/IDM/IDM

No	Aspek/Temuan/Bidang Urusan / Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	Status	PD
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tr II			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	angka	7,34		0,00	Data Belum Tersedia	SPS
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	angka	13,16		0,00	Data Belum Tersedia	SPS
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	angka	74,7		0,00	Data Belum Tersedia	SPS
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	87,43		0,00	Data Belum Tersedia	SPS
11	Indeks Akumulatif Infrastruktur	angka	81,84		0,00	Data Belum Tersedia	SAPRODA
12	Indeks Kesehatan	angka	86,13		0,00	Data Belum Tersedia	SAPRODA
13	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,3		0,00	Data Belum Tersedia	SPS
14	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	1		0,00	Data Belum Tersedia	SPS
15	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Runcit, Restoran, Hotel dan Sewa Motor	%	-2		0,00	Data Belum Tersedia	SPS
16	Pertumbuhan PDRB Produksi Permukiman	%	-2		0,00	Data Belum Tersedia	SPS
17	Pertumbuhan realisasi programan modal	%	6,27		0,00	Data Belum Tersedia	DPM PDR

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Utama / Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	Status	PD
			TARGET Kinerja	Realisasi Kinerja Tr II			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Indeks Keterlambatan Berencana (PI)	Angka	2,1		0,14	Data Belum Tersedia	IPPN
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,00-0,50		0,00	Data Belum Tersedia	IPPN
20	Persebaran Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni	%	40,71		0,00	Data Belum Tersedia	UNGP
21	Indeks kualitas air	Angka	93	0	0,00	Data Belum Tersedia	CUJH
22	Indeks kualitas udara	Angka	90	0	0,00	Data Belum Tersedia	CUJH
23	Indeks ketepatan limbah	Angka	99,82	0	0,00	Data Belum Tersedia	CUJH
25	Persebaran dan berstatus seja dan mandiri	%	22,8		0,00	Data Belum Tersedia	COMPLEMATION
B.	Aspek Pelayanan Umum						0
1.	Utama: Waktu Pelayanan dan Produktivitas						INDUKTORA DAN/ATAU
1.01	Angka Partisipasi Sekolah pada Sekolah Kelompok Usia Sekolah	angka	97,25	98,00	100,00	Tercapai	INDUKTORA
	Nilai Capaian Standar Nasional Pendidikan	angka	71,88	80,11	119,00	Tercapai	INDUKTORA
1.02	Keselamatan						INDUKTORA
	Indeks Keluarga Sehat	angka	0,11	0,11	100,00	Tercapai	INDUKTORA

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Utama / Indikator Kinerja Peringkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian Tahun 2023 (%)	Status	PD
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja Per II			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Akreditasi	tingkat	Peringkat	Peringkat	100,00	Tercapai	Tercapai
	Capaian IKM	%	60	60	100,00	Tercapai	Tercapai
1.01	Pelayanan Umum Dan Pemukiman Ruang						CPU Tera
	Indeks akreditasi jalan	angka	8,00	8,00	8,00	Data Belum Tersedia	CPU Tera
	Indeks akreditasi Layanan Dasar	angka	73,50	8,00	8,00	Data Belum Tersedia	CPU Tera
	Persentase Interaksi Air Baku	%	40	8,00	8,00	Data Belum Tersedia	CPU Tera
	Persentase Capaian Penyelesaian Program Pemukiman Tata Ruang	%	0	8,00	8,00	Data Belum Tersedia	CPU Tera
	Pertumbuhan Rumah Toko dan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	%	47	8,00	8,00	Data Belum Tersedia	CPU Tera
1.04	Pelayanan Dan Kawasan Pemukiman						CPSP
	Pertumbuhan Rumah Tinggal yang Memiliki Akses Terhadap PLN yang layak	%	1,34		8,00	Data Belum Tersedia	CPSP
	Persentase Keterlaksanaan Prasarana dan sarana Utama (PSU) Pemukiman dan Kawasan Pemukiman	%	60		8,00	Data Belum Tersedia	CPSP

No	Aspek/Pada/Widang/Urusan / Indikator Kinerja / Pengungkit Daerah	Satuan	Tahun 2022		Target Capaian Tahun 2022 CH	Status	PD
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja Per II			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01	Keterbacaan Dan Keterbacaan Terasa Serta Partisipasi Masyarakat						DAFTAR PP/SPSD
	Indeks Baca Akut	angka	80	80	95,34	Tercapai	DAFTAR PP
	Indeks Keterbacaan Daerah	angka	0,99	0,99	99,92	Tercapai	DAFTAR
1.02	Resolusi						DAFTAR PP/SPSD
	Persentase penyelesaian PPK	%	3,33	4,35	140,00	Tercapai	DAFTAR PP/SPSD
	Persentase Penanganan Warga Melayu (smd 1 dan 2)	%	1,20	2,60	21,60	Masih Tercapai	DAFTAR PP/SPSD
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						0
2.01	Tenaga Kerja						DAFTAR/DAFTAR
	Persentase Penuhi/kekurangan Sarana Tenaga Kerja Lokal	%	7		0,00	Data Belum Tersedia	DAFTAR/DAFTAR
2.02	Pembudayaan Perungutan Dan Partisipasi Anak						DAFTAR PP/SPSD
	IKK	angka	65,5	66,06	101,61	Tercapai	DAFTAR PP/SPSD
	Capaian Kelengkapan Layak Anak	angka	800	787	98,25	Tercapai	DAFTAR PP/SPSD
2.03	Pangan						DAFTAR/DAFTAR
	Persentase (smd PPK (Pola Pangan Harapan)	%	0,5		0,00	Data Belum Tersedia	DAFTAR/DAFTAR
2.04	Perumahan						DAFTAR

No	Aspek/Pokok/Bidang Urusan / Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		Target Capaian Tahun 2023 (%)	Status	PD
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja To II			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pertumbuhan Perumahan Perumahan Fasilitas Perumahan Perumahan	%	4,74		0,00	Data Belum Tersedia	DPSP
1.00	Lingkungan Hidup						DLH
	Persentase Perumahan SKA	%	1,92	0,00	0,00	Data Belum Tersedia	DLH
	Persentase Perumahan BKU	%	0	0,00	0,00	Data Belum Tersedia	DLH
	Persentase Rumah Lahan	%	0,3	0,00	0,00	Data Belum Tersedia	DLH
	Indeks Pengelolaan Sampah	angka	48		0,00	Data Belum Tersedia	DLH
1.06	Administrasi Kependudukan Dan Pendaftaran Sipil						DATA KAPB
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi	angka	88	81,754	80,00	Tercapai	DATA KAPB
1.07	Pembinaan Masyarakat Dan Desa						DATA MAJALAH
	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Desa (PADA) Pendapatan Desa	%	1,8		0,00	Data Belum Tersedia	DATA MAJALAH
	Kata-Kata Slogan Kinerja Pemerintah Desa	angka	15		0,00	Data Belum Tersedia	DATA MAJALAH
1.08	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						DATA PDR

No	Aspek/Temuan/Sidang Organisasi / Indikator Kinerja Strategis	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian Tahun 2023 (%)	Status	PO
			Target Kinerja	Kendala Kinerja Tah II			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09	Perkembangan	angka	3,1	0,00	97,14	Tertutup	INDUKOMINFO
	Indeks Perkembangan Ketersediaan Prinsipal Jalan	angka	41,96	0,00	0,00	Data Belum Tersedia	INDUKOMINFO
	Indeks Perkembangan Peningkatan Anggaran	angka	33,84	0,17	11,22		INDUKOMINFO
	Indeks Perkembangan Evaluasi Kinerja	angka	20,00	1,16	22,00		INDUKOMINFO
2.10	Kemampuan Dan Informatika						INDUKOMINFO
	Indeks Kelengkapan	angka	1,00	0,00	0,00	Data Belum Tersedia	INDUKOMINFO
	Indeks Tata Kelola	angka	2,00	0,00	0,00	Data Belum Tersedia	INDUKOMINFO
	Indeks Persepsi Manajemen	angka	2,11	0	0,00	Data Belum Tersedia	INDUKOMINFO
	Indeks Layanan	angka	1,00	0	0,00	Data Belum Tersedia	INDUKOMINFO
	Skor ERP	angka	00	0	0,00	Data Belum Tersedia	INDUKOMINFO
							INDUKOMINFO
2.11	Personalia						INDUKOMINFO
	Indeks KAM	angka	000	0	0,00	Data Belum Tersedia	INDUKOMINFO
2.12	Keperawatan, Usaha Sosial, Dan Strategis						INDUKOMINFO URM

No	Aspek/Pokus/Bidang Utama / Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian Tahun 2023 (%)	Status	FD
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tr II			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pertemuan kepariwisataan	%	0,2		0,00	Data Belum Tersedia	DENKASOROP
	Pertumbuhan Wisatawan	%	0,1		0,00	Data Belum Tersedia	DENKASOROP
3.11	Kepercayaan Masyarakat						DPM PTPP
	Pertumbuhan Realisasi perencanaan Model / Inovasi	%	0,8		0,00	Data Belum Tersedia	DPM PTPP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perikanan dan non perikanan	angka	86		0,00	Data Belum Tersedia	DPM PTPP
3.14	Keperawatan Dan Monev						DENKASOROP
	Indeks Perencanaan Perilaku	angka	0,5	46,82	200,00	Tercapai	DENKASOROP
	Indeks Perencanaan Keluarga/ BDR	angka	0,2	0,046	23,00		DENKASOROP
3.15	Statistik						DENKASOROP
	Pertemuan Keterwakilan Data Statistik Regional	%	99	0	0,00	Data Belum Tersedia	DENKASOROP
3.16	Kelengkapan						DENKASOROP
	Pertumbuhan Sistem Infol yang diterbitkan	%	1	0	0,00	Data Belum Tersedia	DENKASOROP
3.17	Pengabdian						DENKASOROP
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengabdian	angka	71	0	0,00	Data Belum Tersedia	DENKASOROP
3.18	Kemampuan						DENKASOROP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan / Indikator Kinerja Peningkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian Tahun 2023 (%)	Status	FD
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tr II			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indeks Programasi Kompleks	angka	72	0	0,00	Data Belum Tersedia	DESAKIFUS
III	Utama Peningkatan Pelayanan Kelautan dan Perikanan						
3.01	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1		0,00	Data Belum Tersedia	DESAKIFUS
3.02	Kapalanda						DESAKIFUS
	Nilai Bekas Pemeliharaan dan Ekonomi Kreatif	Rp.	7,5 M	8.194.000.000,00	107,66	Tercapai	DESAKIFUS
3.03	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1		0,00	Data Belum Tersedia	DESAKIFUS
3.04	Perdagangan						DESAKIFUS LKM
	Kontribusi PADB ADBK Sektor Perdagangan	Rp. Juta	1,85		0,00	Data Belum Tersedia	DESAKIFUS LKM
3.05	Perindustrian						DESAKIFUS LKM
	Kontribusi PADB ADBK Sektor Industri	Rp. Juta	3,18		0,00	Data Belum Tersedia	DESAKIFUS LKM
IV	Utama Peningkatan Urusan Pemerintahan						
4.01	Sekretariat Daerah						DESAKIFUS
	Nilai Kompetensi Penguasaan Kinerja Dan SAPK Kabupaten	angka	11		0,00	Data Belum Tersedia	DESAKIFUS

No	Aspek/Tujuan/Bidang Usaha / Indikator Kinerja Perangkit Daerah	Satuan	Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	Status	PD
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tr II			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nilai Kompetensi Capaian Kinerja Utama (AKIP) Kabupaten	angka	11,5		0,00	Data Belum Tersedia	SETTIA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80		0,00	Data Belum Tersedia	SETTIA
	Persentase keluhan yang ditangani masyarakat oleh masyarakat	%	100		0,00	Data Belum Tersedia	SETTIA
4.02	Struktural DPRD						SETTIA
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	angka	70		0,00	Data Belum Tersedia	SETTIA
5	Usaha Peningkat Usaha Pemerintahan						Y
5.01	Perencanaan						SEPPADA
	Indeks Kualitas Perencanaan	angka	8		0,00	Data Belum Tersedia	SEPPADA
5.02	Kemangan						SEPPADA
	Persentase realisasi pembangunan kemangan daerah	%	92,5	0,00	0,00	Data Belum Tersedia	SEPPADA
	Indeks Pembangunan (IMU)	angka	72,5	0,00	0,00	Data Belum Tersedia	SEPPADA
	Program PAD terwujud Peningkatan Daerah	%	10,00	0,00	0,00	Data Belum Tersedia	SEPPADA
5.03	Kepegangan						SEK
	Indeks Pelaksanaan ASN	angka	8,1	0,00	0,00	Tertunda	SEK

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Utama / Indikator Kinerja Peringkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian Tahun 2023 (%)	Status	PD
			TARGET Kinerja	Realisasi Kinerja Tr II			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01	Praktik Dan Pengembangan Perencanaan Hasil Lintas yang Mendukung Perencanaan	%	18		0,00	Data Belum Tersedia	REPRESI INDONESIA
1	Utama Pengawasan Utama Pemerintahan						REPRESI INDONESIA
6.01	Inspektori Daerah						REPRESI INDONESIA
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	angka	45		0,00	Data Belum Tersedia	REPRESI INDONESIA
7	Utama Berkeadilan						REPRESI INDONESIA
7.01	Keamanan						REPRESI INDONESIA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	62,80	61,00	95,80	Data Tersedia	REPRESI INDONESIA
8	Utama Pemerintahan Utama						REPRESI INDONESIA
8.01	Kelembagaan Daerah Dan Politik						REPRESI INDONESIA
	Indeks Ketahanan Nasional Dengan Gaya Berkeadilan/Keberadilan	angka	2,68	2,50	96,73	Tercapai	REPRESI INDONESIA
9	Aspek Daya Saing						REPRESI INDONESIA
1	Indeks Efisiensi Birokrasi	angka	63	61,00	96,90	Tercapai	REPRESI INDONESIA
2	Nilai NABP	angka	72		0,00	Data Belum Tersedia	REPRESI INDONESIA
3	Opini IPK atau LKPD	angka	87,8		0,00	Data Belum Tersedia	REPRESI INDONESIA
4	Indeks Moral Sistem	angka	1,90	2,00	105,79	Tercapai	REPRESI INDONESIA
5	Indeks IPK	angka	3,23		0,00	Data Belum Tersedia	REPRESI INDONESIA

No	Aspek/Program/Isi yang Utama / Indikator Kinerja Peringkat Daerah	Saluran	Tahun 2023		Target Capaian Tahun 2023 (%)	Status	PS
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tr II			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Masyarakat Sehat	sehat	1,1		100%	Data belum Tersedia	SETDA

Pada triwulan II tahun 2023 Indikator Kinerja daerah memiliki 57 indikator dengan rata-rata ketercapaian 74,54% dengan status perlu upaya terus. Aspek kesejahteraan masyarakat sebanyak 24 indikator dengan status Tercapai 1 dan data belum tersedia 23 indikator. Sedangkan Aspek pelaksanaan urusan sebanyak 67 indikator dengan status Tercapai 16, Akan Tercapai 2, Perlu Upaya Terus 3 dan sementara data belum tersedia. Serta aspek daya saing daerah sebanyak 6 indikator dengan status Tercapai 2 dan 4 indikator data belum tersedia.

3.2.3 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Program tahun 2023

Hasil evaluasi indikator kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:

- Tercapai untuk capaian nilai lebih dari atau sama dengan 50% (K >50%);
- Akan Tercapai untuk capaian nilai 30% dan kurang dari 50%, (K 20-50%);
- Perlu Upaya Terus untuk capaian nilai kurang dari atau sama dengan 25% (K <25%);
- Data belum Tersedia

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Program sampai dengan triwulan II tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Kode	Nama Urusan, Suburutan dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (output)	Satuan	Tahun 2023						Status (R)	Target Dasar Penanggung Jawab
				Target Kinerja		Realisasi s.d TH II		Target Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
		% Lembaga SD yang terakreditasi A	%	29,97		29,99		30,74		Terwujud	URUSAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
		APBN (SDP/STK) terkumpul	%	11,63		11,67		12,48		Terwujud	URUSAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
		% Lembaga SD yang terakreditasi B	%	60,66		60,65		61,76		Terwujud	URUSAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
		% Guru yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi	%	63,76		63,74		63,61		Terwujud	URUSAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
		% Guru yang memenuhi kualifikasi B (S-P)	%	60,67		60,69		61,11		Terwujud	URUSAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
1.01.01	PROSES PERENCANAAN STRATEGIS	% Lembaga PAUD dan DIBKAS yang memperoleh sertifikasi minimal baik	%	17,47	13.000.000,00	-		-	-	Dasar Belum Terwujud	URUSAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
		% Lembaga SD yang memperoleh sertifikasi minimal baik	%	28,27		-		-	-	Dasar Belum Terwujud	URUSAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI

3.2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Kesehatan dibagi oleh Dinas Kesehatan. Pada tahun ini terdapat 26 indikator Kinerja Program, dengan realisasi antara lain terdapat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.101

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (tolok ukur)	Satuan	Tahun 2023						Status (R)	Pencapaian Sesuai Perencanaan Awal
				Target Kinerja		Realisasi s.d TH II		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01	PROGRAM PEMERINTAHAN ASLI URUSAN KESEHATAN PENGALIHAN TUGAS URUSAN KESEHATAN MANAJEMEN		Ratusan	11	145.158.007.000,00	8.000	14.127.400.000,00	9,72%	6,97%	Tertinggal	100% KURANG
		Rp	Ratusan	100		60,00		100,00		Tertinggal	100% KURANG
		Rp	Ratusan	254		70,00		100,00		Tertinggal	100% KURANG
		Capaian pelaksanaan kegiatan: 01.001	%	100		41,70		41,70		Rendah Tertinggal	100% KURANG
		Capaian pelaksanaan kegiatan: 01.002	%	100		41,70		41,70		Rendah Tertinggal	100% KURANG
		Capaian pelaksanaan kegiatan: 01.003	%	100		41,70		41,70		Rendah Tertinggal	100% KURANG
		Capaian pelaksanaan kegiatan: 01.004	%	100		27,64		27,64		Rendah Tertinggal	100% KURANG

Kode	Bidang Dinas Pemerintahan dan Program Prioritas Pengembangan	Indikator Kinerja Program (subsektor)	Sasaran	Tahun 2023						Status (%)	Peringkat Dinas Pengembang Jumlah
				Target Kinerja		Realisasi - 4 (PW II)		Target Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
		Colongan pelayanan masyarakat umum	%	100		47,04		47,04		Agak Terpenuhi	LNAD BERKURANG
		Perawatan layanan gas rumah	%	8,000		0,000		0,000		Belum Tercapai	LNAD BERKURANG
		Perawatan saluran	%	21		12,000		12,000		Terpenuhi	LNAD BERKURANG
		Colongan pelayanan masyarakat umum sistem TV	%	100		61,071		61,071		Terpenuhi	LNAD BERKURANG
		Colongan pelayanan masyarakat umum sistem radio sistem ISD	%	100		61,071		61,071		Terpenuhi	LNAD BERKURANG
		Perawatan pengembangan jaringan Lini Nelaya (LNAD) & sistem produksi (M)	%	100		00,000		00,000		Belum Tercapai	LNAD BERKURANG
		Colongan pelayanan masyarakat produksi Spermas	%	100		43,000		43,000		Agak Terpenuhi	LNAD BERKURANG
		Colongan pelayanan masyarakat produksi Sulawesi Utara	%	100		40,000		40,000		Belum Tercapai	LNAD BERKURANG
		Colongan pelayanan masyarakat Ulu Pondoh	%	100		67,000		67,000		Belum Tercapai	LNAD BERKURANG

Kode	Bidang Urusan Fungsional dan Program Fungsional Pengembangan	Indikator Kinerja Program (integrated)	Satuan	Tahun 2021				Target Capaian	Status (%)	Realisasi Dampak Peningkatan Jumlah
				Target Kinerja		Realisasi s.d TH B				
				B	Bp	B	Bp			
		Kategori program pendidikan dan pengembangan sumber manusia	%	100		67,36		67,36	Tercapai	100%
		Kategori Pendidikan pendidikan dasar	jumlah	71		41,36		58,36	Tercapai	100%
		Kategori pendidikan dasar	%	100		71,36		71,36	Tercapai	100%
		Kategori Pendidikan sumber tenaga pendidikan	%	30		100,00		200,00	Tercapai	100%
		Kategori layanan kelembagaan yang menyeluruh	%	99		-		-	Data belum tersedia	100%
		Kategori program RKH masyarakat	%	92		97,36		100,36	Tercapai	100%
		Kategori dari RTM	%	14		66,44		66,44	Tercapai	100%
		Program program kelembagaan pengembangan	%	63		-		-	Data belum tersedia	100%
		Program kelembagaan dan peningkatan kelembagaan	%	60		-		-	Data belum tersedia	100%
		Program kelembagaan dan peningkatan	%	100		-		-	Data belum tersedia	100%

Kode	Bidang/Urutan Pemerintahan dan Program/Profil Pelayanan	Indikator Kinerja Program (ukuran)	Satuan	Tahun 2011						Status KI	Pengaruh Dampak Pelayanan Jawab		
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II		Target Capaian					
				R	Rp	R	Rp	R	Rp				
		1. Berencana akan terselesaikan seluruh KIP dan	%	100							100%	AKHIR KORUPSI	
		Program/kegiatan berencana dengan nilai 0	persentase	0							100%	AKHIR KORUPSI	
		1. Capaian layanan pelayanan sesuai standar ditetapkan di DPA	%	100							100%	AKHIR KORUPSI	
		1. Penyerahan kegiatan layanan pelayanan sesuai standar di dan di luar wilayah layanan pelayanan	%	100							100%	AKHIR KORUPSI	
		1. Berencana kegiatan pelayanan pelayanan di	%	100							100%	AKHIR KORUPSI	
100102	PROSEDUR PENGALIHAN KAPASITAS SURABAYA DAYA MANUFAKTUR KORUPSI	1. Penyerahan kegiatan pelayanan pelayanan	%	100	100 (100.000.000)	100,00			100,00		Tercapai	100%	AKHIR KORUPSI
100104	PROSEDUR SURABAYA PENGALIHAN ALAT	1. Penyerahan kegiatan pelayanan	%	100	100 (100.000.000)	100,00			100,00		100%	AKHIR KORUPSI	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Subsistem)	Satuan	Tahun 2020						Status (K)	Penyakit Dasar Penanggung Jawab
				Target Kinerja		Realisasi s.d. 70 %		Target Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
	KESEHATAN DAN MASYARAKAT	Kelembagaan dan proses yang terencana									
		% Keterwakilan dan peranan di Pemerintahan	%	100						100% (Tercapai)	100% KECERDASAN
1.02.01	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT BERKUALITAS	Calon-calon Penerimaan Seleksi pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100.000.000.000	10,02		10,02			100% KECERDASAN
		Calon-calon yang lulus seleksi	%	10		10,02		100,00		100% (Tercapai)	100% KECERDASAN

Sumber: Data Kelengkapan Bidang, Tahunan 2 Tahun 2021 dan tahun

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD dari 36 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan terdapat 18 indikator dalam status tercapai, 6 indikator akan tercapai, Perla Upaya Kelas I yaitu Calon-calon Penerimaan Seleksi pada Usia Pendidikan Dasar dan selangnya 11 indikator data belum tersedia.

2.2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Peningkatan Ruang

Urusan ini dibagi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pada rencana ini terdapat 05 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.100

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Peningkatan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (utama)	Satuan	Tahun 2023				Status (%)	Penanggung Jawab Penyelenggara		
				Target Kinerja		Realisasi di TWD				Tingkat Capaian	
				K	Rp	K	Rp			K	Rp
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PERUBAHAN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG									
1.01.01	PROGRAM PERUBAHAN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan lingkungan dan ruang penyelenggaraan Kabupaten dalam bentuk baik	%	99	24.724.972.993,00	100	24.724.972.993,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.01.02	PROGRAM PERUBAHAN DAN PENINGKATAN SISTEM PERYAIRAN AIR BUMIH	Perencanaan dan Target Yang Mengacu ke Standar Lokal	%	97	11.896.290.000,00	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.01.03	PROGRAM PERUBAHAN DAN PENINGKATAN PERANGKAP PERALIHAN	Perencanaan dan Target Yang Mengacu ke Standar Nasional Penyelenggaraan	%	100	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.01.04	PROGRAM PERUBAHAN DAN PENINGKATAN SISTEM AIR LIMBAH	Perencanaan dan Target Yang Mengacu ke Standar Lokal	%	91	2.296.114.000,00	-	99.999.999,99	21,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.01.05	PROGRAM PERUBAHAN DAN PENINGKATAN SISTEM DAMPAK	Perencanaan panjang dan lebar dan bentuk bendung	%	100	500.000.000,00	-	99.999.999,99	19,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.01.06	PROGRAM PENATAAN DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN	% Jumlah Permohonan Tindakan Penyelenggaraan	%	100	25.711.841.993,00	-	999.999.999,99	2,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

2.2.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diuraikan oleh DPKP. Pada uraian ini terdapat 3 Indikator Kinerja Program, dengan rincian realisasi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.103

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (selonint)	Satuan	Tahun	Target Kinerja		Tahun 2022		Tingkat Capaian		Status (R)	Pencapaian Kinerja Penyelenggara
					Rp	Rp	Realisasi s.d TH 22		R	Rp		
							R	Rp				
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.04.01	PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Perawatan Rumah Tersebut	%	10	10.000.000,00	10,00	8.375.184,00	83,00	83,18	Manajemen	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perawatan Perumahan Kawasan Perumahan Rumah	%	10	-	10,00	-	10,00	0	Manajemen	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Perawatan rumah yang sudah selesai sesuai kebutuhan rumah yang layak di kawasan rumah	%	10	-	10,00	-	100,00	-	Manajemen	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BUNTA	Perawatan Rumah Tangga yang sudah selesai sesuai kebutuhan rumah yang layak di luar kawasan rumah	%	11	4.500.000.000,00	14,51	18.767.000,00	16,31	1,24	Manajemen	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05	PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Perawatan perumahan	%	10	15.000.000,00	-	8.800.000,00	-	100,00	Data Belum Tersedia	URUSAN PERUMAHAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (cakupan)	Satuan	Tahun 2022						Pencapaian dan Penanggung Jawab	
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Target Capaian			Status (SI)
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
	KEKAWA DAN LAYANAN DASAR (KAW)	PKP dan Perumahan									Terdapat dan Penanggung Jawab

Sumber: RPJMD Kabupaten Karangasem, Struktur 3 Tahun 2022 dan Revisi

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dan 5 indikator kinerja dengan status 3 indikator tercapai dan 2 indikator data belum tersedia.

3.2.3.1.8 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat diemban oleh Satpol PP dan BPPD. Pada urusan ini terdapat 1 indikator kinerja program. Selengkapnya kinerja penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.104

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (cakupan)	Satuan	Tahun 2022						Pencapaian dan Penanggung Jawab	
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Target Capaian			Status (SI)
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
1.04 1.04.02	WILAYAH PEMERINTAHAN SEBAGAI KETENTERAMAN DAN KETERTIBATAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	PROSEDUR PERENCANAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBATAN UMUM	% Perencanaan Pelaksanaan Perintah Walikota	%	100	3.267.000.000,00	65,00	176.170.000,00	62,50	20,00	Terdapat	SAFARI WILAYAH KARANGASEM
		% Ketersediaan yang memadai	%	100		25,00		40,70		Belum Tercapai	SAFARI WILAYAH KARANGASEM
		Tingkat penyelesaian	%	100		40,00		80,00		Terdapat	SAFARI WILAYAH KARANGASEM

Kategori	Bidang Usaha Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Instrumen)	Metode	Target Kinerja		Tahun 2023 Realisasi s.d. TB II		Target Capaian		Status (R)	Pencapaian Kinerja Peningkatan Jumlah
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
		penyusunan di lingkungan Kantor Kecamatan, Kecamatan									
100001	PROGRAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN BUDIDAYA	1. penyusunan laporan tahunan	%	100	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Data Belum Tersedia	Belum Tersedia
		2. data terapan kinerja di lingkungan Kantor Kecamatan	%	100						Data Belum Tersedia	Belum Tersedia
100002	PROGRAM PENYUSUNAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	1. penyusunan laporan tahunan di lingkungan Kantor Kecamatan	%	100	1.000.000.000,00		0,00		0,00	Data Belum Tersedia	Belum Tersedia
		2. penyusunan laporan tahunan yang disampaikan	%	100						Data Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber: Laporan RP dan RPKM Kabupaten Malang, Tahunan II Tahun 2023 dan 2022

Perencanaan Hasil realisasi RPKM dari 7 indikator program pada Sistem Pemerintahan, Administrasi Daerah dan Perhubungan Masyarakat terdapat 2 indikator dalam status tercapai, 1 indikator akan tercapai dan selisahnya data belum tersedia.

3.2.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Sosial meliputi 5 Sub Urusan PPKB. Pada urusan ini terdapat 5 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.105
Capaian Kinerja Preplangganan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (pokok)	Satuan	Tahun 2022						Status (R)	Peringkat Hasil Penganggaran
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.02	PROGRAM PEMERINTAHAN SOSIAL	Peningkatan PPH yang dapat dilaksanakan	%	58	1.342.000.000,00	24,0%	54.202.000,00	45,0%	1,0%	Tercepat	URUSAN SOSIAL, PEMERINTAHAN PERANGKAP DAN BELANJA PERANGKAP
1.06.04	PROGRAM KESEHATAN SOSIAL	Peningkatan Kecelakaan PPKB	%	15,0%	601.000.000,00	11,0%	16.042.000,00	26,2%	1,0%	Tercepat	URUSAN SOSIAL, PEMERINTAHAN PERANGKAP DAN BELANJA PERANGKAP
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JERAM SOSIAL	Peningkatan Keselamatan PM	%	1,7	6.181.100.000,00	83,0%	-	100	-	Tercepat	URUSAN SOSIAL, PEMERINTAHAN PERANGKAP DAN BELANJA PERANGKAP
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Peningkatan Kesiapan Bencana yang Mencegah Kerugian Sosial	%	100	100.000.000,00	100,0%	-	100,0%	-	Tercepat	URUSAN SOSIAL, PEMERINTAHAN PERANGKAP DAN BELANJA PERANGKAP
1.06.07	PROGRAM PENGOKUPAN	Peningkatan Tindakan Medis	%	100	20.000.000,00	100,0%	-	100,0%	-	Tercepat	URUSAN SOSIAL, PEMERINTAHAN PERANGKAP DAN BELANJA PERANGKAP

Kode	Bidang/Unitas Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (subskema)	Satuan	Tahun 2022						Status (R)	Peningkat Daerah Penyelenggara
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
	KEHUTANAN DAN PERUMAHAN	Salah satu indikator									KEKAWANAN

Sumber: Dinas PPKB Kabupaten Gunung Kidul, Periode II Tahun 2022 data aktual

Berdasarkan Hasil evaluasi RKPD dari 3 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdapat 4 indikator dengan status tercapai dan 1 indikator akan tercapai pada Pemerintahan PPKB yang dapat melaksanakan UCR.

3.3.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berbantuan Dengan Pelayanan Dasar

3.3.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja dengan 4 indikator program dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel.

Tabel 3.106

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kode	Bidang/Unitas Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (subskema)	Satuan	Tahun 2022						Status (R)	Peningkat Daerah Penyelenggara
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TIDAK BERBANTUAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.00	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TENAGA KERJA										
1.01.01	PELAYANAN PERENCANAAN TENAGA KERJA	Pelaksanaan kegiatan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik	%	100	4.000.000,00	-	1.000.000,00	-	25,00	Data Belum Tersedia	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TENAGA KERJA
1.01.02	PROGRAM PELAYANAN DAERAH	Pengembangan program kerja yang	%	100	170.000.000,00	-	2.500.000,00	-	1,48	Data Belum Tersedia	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TENAGA KERJA

Kode	Bidang Urusan Pencapaian dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Misi/Target)	Belasan	Tahun 2013						Status (%)	Peningkat Tingkat Pencapaian/Target
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TMT II		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
	DAK PENGALIHAN TEKNIK BUKAN	penyediaan peralatan									
001 04	PROGRAM PENGALIHAN TEKNIK BUKAN	4. Pemasangan Sewa yang diperlukan	10	40	1.638.000.000,00	1.638.000.000,00		100,00	Data Belum Tersedia	DAKAS PANGALIHAN SAR TEKNIK BUKAN	
001 05	PROGRAM KURANGAN INDUSTRIAL	4. pemeliharaan yang terdampak	10	50	1.124.200.000,00	1.124.200.000,00		100,00	Data Belum Tersedia	DAKAS PEMERINTAHAN SAR TEKNIK BUKAN	

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Gunung Kidul tahun 2013

Menunjukkan hasil realisasi RPOD dari 4 indikator kinerja program pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dengan status data belum tersedia.

3.2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan ini diampu oleh Dinas PPSB dengan 5 indikator dengan realisasi secara kumulatif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.107

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pokok Kegiatan Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (satuan)	Salinan	Tahun 2022						Status SK	Peringkat Daerah Penyelenggara Daerah
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Target Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
3.2.3.2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
3.2.3.2.2.1	PROGRAM PENJAJARAN/TAJARAN GURU DAN PEMBERDAYAAN PESERTA DIDIK	Promosi Kualitas Pembelajaran Guru dan PAUD yang baik dan berkualitas	%	100	100.000.000,00	87,14	-	87,14	-	Terpenuhi	URUSAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Promosi akses program PAUD yang berkualitas peningkatan akses PAUD	%	75	-	24,44	-	24,44	-	Agak Terpenuhi	URUSAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.3.2.2.2	PROGRAM PENYALUTAN PERALIHAN	Promosi akses program kerja pelayanan publik	%	100	-	0	-	0	-	Daun Belum Terealisasi	URUSAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.3.2.2.3	PROGRAM PENJAJARAN SISTEM DATA GURU DAN PAUD	Promosi Efektivitas Data Guru dan PAUD	%	100	1.000.000,00	0	-	-	-	Daun Belum Terealisasi	URUSAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.3.2.2.4	PROGRAM PENYALUTAN KAS KAS PAUD	Promosi Ksp. Perlindungan Anak Desa Kelurahan	%	87	87.000.000,00	84,87	-	84,87	-	Terpenuhi	URUSAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang/Program Pembangunan dan Program Pencapaian Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Instrumen)	Satuan	Tahun 2022						Status KPI	Pencapaian Sesuai Peningkatan Jumlah	
				Target Kinerja		Realisasi s.d YTD II		Target Capaian				
				U	Rp	U	Rp	U	Rp			
	LEMBAGA KESEHATAN DAN KEMAMPUAN MUSAK											
		Nilai Ketercapaian Kinerja (Pembangunan)	1000/1000/1000	100%						Data Belum Tersedia	100% PENCAPAIAN DAN PANGKAT	
1.06.02	PROGRAM PROMOSI DAN EDUKASI DAS KETAHANAN PANGAN MUTABAHATI	Nilai Ketercapaian Kinerja (Pembangunan) Pencapaian Pangan Sehat dan Bebas dari Risiko yang Merugikan	%	1	100.000.000.000					Data Belum Tersedia	100% PENCAPAIAN DAN PANGKAT	
		Nilai Ketercapaian Kinerja (Pembangunan)	1000/1000/1000	100%						Data Belum Tersedia	100% PENCAPAIAN DAN PANGKAT	
1.06.03	PROGRAM PROMOSI DAN EDUKASI PANGAN	Nilai Ketercapaian Kinerja (Pembangunan) Pencapaian Ketercapaian Kinerja	%	1.000						Data Belum Tersedia	100% PENCAPAIAN DAN PANGKAT	
		Nilai Ketercapaian Kinerja (Pembangunan)	1000/1000/1000	100%						Data Belum Tersedia	100% PENCAPAIAN DAN PANGKAT	
1.06.04	PROGRAM PROMOSI DAN EDUKASI MUSAK	Pencapaian Ketersediaan Pangan Sehat dan Bebas dari Risiko Merugikan	%	10	10.000.000.000					Data Belum Tersedia	100% PENCAPAIAN DAN PANGKAT	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Sasaran	Tahun 2022						Status (K)	Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja		Realisasi s.d TB II		Target Capaian			
				K	Kp	K	Kp	K	Kp		
		penelitian dan penelitian									
		Wali Kota/Kabupaten Pemerintah Kabupaten	SK/Reg/Perm	ST						Dalam Pelaksanaan	LEMBAGA PERTANAKAN DAN PERUMAHAN

Sumber: Data Realisasi dan Target Kabupaten Bontolung, Triwulan II Tahun 2022 data tidak.

berdasarkan Hasil evaluasi RKPJ dari 8 indikator kinerja program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangea selanjutnya data belum tersedia.

3.3.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan ini diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan 8 indikator program dengan realisasi secara keseluruhan selanjutnya tabel berikut.

Tabel 3.108
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Sasaran	Tahun 2022						Status (K)	Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja		Realisasi s.d TB II		Target Capaian			
				K	Kp	K	Kp	K	Kp		
3.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
3.10.01	PROGRAM PENYELAJARAN BUDIDAYA TANAH DAN AIR	Penyediaan penyediaan penyediaan yang terencana	1	0						Dalam Pelaksanaan	LEMBAGA PERTANAKAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
3.10.02	PROGRAM PENYELAJARAN GABUNG BUDIDAYA DAN BUDIDAYA TANAH	Penyediaan Bidang Tanah yang terencana pembangunan lahan	1	0						Dalam Pelaksanaan	LEMBAGA PERTANAKAN DAN KAWASAN PERUMAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Instrumet)	Kursus	Tahun 2023						Status (R)	Peringkat Daerah Pemeringkat
				Target Kinerja		Realisasi s.d TH R		Target Laporan			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
2.02.01	KEPENDAHULUAN PERENCANAAN	Keperluan Umum Yang Tersebut	%	28,58	-	-	-	-	-	100	100
2.02.01	PERENCANAAN PENATAAN TANAH	Perencanaan Perencanaan Perencanaan Mula Perencanaan Kelengkapan	%	28,72	1.181.000.000,00	100.400.000,00	8,47	-	-	100	100

Sumber: RKP Kabupaten Bengkulu, Tahunan 2 Tahun 2023 dan 2024

Deskripsikan Hasil realisasi RKP pada Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan meliputi 4 indikator kinerja program sebagaimana data berikut ini:

3.2.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan ini diorganisir oleh Dinas Lingkungan Hidup menggunakan 03 indikator program dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.110
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Subsidi Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021						Status (S)	Pencapaian/Target
				Target Kinerja		Realisasi s.d. 30/09/21		Target Capaian			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.1	PROGRAM PENYELAYAN LINGKUNGAN HIDUP	% ketercapaian budget (RAB)	%	120	461.200.000,00	-	-	-	-	Data Belum Tersedia	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.2	PROGRAM PENYELAYAN PEMERINTAHAN DESKALAS BERKUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil Pemantauan Lingkungan Toksik Minatoksik Limbah Ringan	%	60	1.15.000.000,00	-	11.000.000,00	-	20,00	Data Belum Tersedia	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.3	PROGRAM PENYELAYAN KEMANGKOTANAN PABRIK RUMAH	Persentase Luas PTA (Rumah/Perumahan)	%	1	318.000.000,00	-	-	-	-	Data Belum Tersedia	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.4	PROGRAM PENYELAYAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACIDUS DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACIDUS LUNTAH DAN	% penyelesaian yg sesuai TPA sesuai SK	%	20	21.000.000,00	-	5.000.000,00	-	20,00	Data Belum Tersedia	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.5	PROGRAM PENYELAYAN DAN PENGELOMPOK TERBUKA DAN LINGKUNGAN DAN DAN PENYELAYAN DAN PENYELAYAN LINGKUNGAN HIDUP PTA	Persentase dan lingkungan yg terkelola	%	100	27.000.000,00	-	-	-	-	Data Belum Tersedia	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Fungsi Pelaksanaan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2021						Sumber Dana	Pencapaian Kinerja
				Target Kinerja		Realisasi s.d. 30 09 21		Pegawai Capaian			
				Q	Rp	Q	Rp	Q	Rp		
1.1.1	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAYANAN DAN POKY LAYANAN LINGKUNGAN BERHUBUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan rencana yang mendukung pelaksanaan, perbaikan dan pengembangan LP N. Penganggaran LP s.d. s.d. s.d.	%	70	10.000.000,00	-	-	-	-	Dana Belanja Terpadu	100% LINDUNGAN BERHUBUNGAN MASYARAKAT
1.1.1	PROGRAM PENINGKATAN LINGKUNGAN BERHUBUNGAN MASYARAKAT	N. Penganggaran LP s.d. s.d.	%	8	71.000.000,00	-	-	-	-	Dana Belanja Terpadu	100% LINDUNGAN BERHUBUNGAN MASYARAKAT
		N. Penganggaran LP s.d. s.d.	%	87	-	-	-	-	-	Dana Belanja Terpadu	100% LINDUNGAN BERHUBUNGAN MASYARAKAT
1.1.1	PROGRAM PENINGKATAN PENYALURAN LINGKUNGAN BERHUBUNGAN MASYARAKAT	N. Penyusunan anggaran yang mendukung pelaksanaan program	%	85	26.000.000,00	-	-	-	-	Dana Belanja Terpadu	100% LINDUNGAN BERHUBUNGAN MASYARAKAT
1.1.1	PROGRAM PENINGKATAN PENYALURAN LINGKUNGAN BERHUBUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan anggaran yang mendukung pelaksanaan program	%	88	1.428.000.000,00	-	411.422.000,00	-	41,88	Dana Belanja Terpadu	100% LINDUNGAN BERHUBUNGAN MASYARAKAT

Keterangan: Nilai capaian yang terdapat di bawah 100% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai.

Endorsement Hasil evaluasi RKPD dari 10 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup data tahun 2021.

2.2.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun indikator kinerja sebanyak 9 indikator program dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.111
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2023						Status	Fungsi Dasar Penyelenggara
				Target Kinerja		Realisasi s.d TH D		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKULAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01	PROGRAM PENGANTARAN PENDAFTARAN PERUMAH	% Kependudukan SIP - 01	%	100	2.167.000.000,00	98,84	2.182.000.000,00	98,84	24,04	Tercapai	URUSAN KEPENDUKULAN DAN PENCATATAN SIPIL
		% Kependudukan RR	%	100		100,00		100,00		Tercapai	URUSAN KEPENDUKULAN DAN PENCATATAN SIPIL
		% Kependudukan RIA	%	83		84,00		100,76		Tercapai	URUSAN KEPENDUKULAN DAN PENCATATAN SIPIL
		% Kependudukan Dokumen Perakib-1 orang	%	100		100,00		100,00		Tercapai	URUSAN KEPENDUKULAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	% pencatatan sipil kelahiran	%	100	64.000.000,00	93,86	7.044.400,00	88,88	11,48	Tercapai	URUSAN KEPENDUKULAN DAN PENCATATAN SIPIL
		% pencatatan sipil kematian	%	88		88,00		88,00		Tercapai	URUSAN KEPENDUKULAN

3.3.3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan ini diuraikan oleh Dinas Desa dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 6 indikator program dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.113
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2023						Status (R)	Tanggung Jawab Penanggung Jawab	
				Target Kinerja		Realisasi s.d TH R		Ragkat Capaian				
				R	Rp	R	Rp	R	Rp			
3.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA											
3.13.01	PROGRAM PELAYANAN DESA	% Desa yang telah menyediakan jasa layanan desa	%	1	100.000.000,00	-	-	-	-	100	Desa Desain Terencana	URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
3.13.02	PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DESA DESA	Pembinaan dan pemantauan hubungan dan komunikasi antara desa yang terdampak banjir dengan PMDN	%	10	1.200.000.000,00	10,00	141.200.000,00	11,67	6,42	Terselesa	Desa Desain Terencana	URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
3.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI DAN KEMISKINAN DESA	% Pemukiman Desa dengan pengalihan anggaran desa yang terdampak bencana BCB Desa	%	10	1.500.000.000,00	10,00	1.500.000.000,00	10,00	10,00	Terselesa	Desa Desain Terencana	URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
			Angka	10	-	-	-	-	-	100	Desa Desain Terencana	URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2012						Status (K)	Pencapaian Sesuai Perencanaan Jangka Panjang
				Target Kinerja		Realisasi di TWH II		Target Capaian			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Terwujudnya dan meningkatnya kemampuan dan daya saing sumberdaya manusia dalam meningkatkan dan mempertahankan daya	%	100	100.000.000.000	100,00	100.000.000.000	100,00	100,00	100%	RENCANA STRATEGIS KABUPATEN MAMBALELE 2012-2017
2.11.01	INOVASI PERSEKUTUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT ISLAM SEKTOR	Peningkatan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan	%	100	100.000.000.000	100,00	100.000.000.000	100,00	100,00	100%	RENCANA STRATEGIS KABUPATEN MAMBALELE 2012-2017

Sumber: Departemen Kelengkapan Kebijakan, Februari 2012 dan 2013

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD dan 6 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Masyarakat dan Desa terdapat 3 indikator tercapai tercapai, 1 indikator akan tercapai dan indikator selisihnya data belum tersedia.

2.2.3.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Terdapat 10 indikator kinerja program pada urusan ini, dengan nilai-nilai secara kumulatif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.113

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021						Status (S)	Pesaftar BSMK Penyelenggara Jarak
				Target Kinerja		Realisasi s.d TB II		Tingkat Capaian			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.01	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Berencana dan tidak Berencana Reproduksi dan KB	%	100	171.900.000,00	-	161.000.000,00	-	14,21	Tidak Terwujud	SDSS BSMK, PERSANGKAPAN PENGANTAR DAN KEMAJUAN BERENCANA
		Persentase Berencana yang meningkatkan Produktifitas Reproduksi	%	100		-		-		Tidak Terwujud	SDSS BSMK, PERSANGKAPAN PENGANTAR DAN KEMAJUAN BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pengawasan KB (KAP)	%	100,00	1.490.000.000.000.000	4,83	219.201.420,00	79,38	18,42	Terwujud	SDSS BSMK, PERSANGKAPAN PENGANTAR DAN KEMAJUAN BERENCANA
		Persentase Tidak Berenc. KB	%	10,71		7,18		66,78		Terwujud	SDSS BSMK, PERSANGKAPAN PENGANTAR DAN KEMAJUAN BERENCANA
		SDSS 15-20 Tahun	10000 miliar	21		-		-		Tidak Terwujud	SDSS BSMK, PERSANGKAPAN

Kode	Bidang Urusan Kompetensi dan Program Prioritas Peningkatan	Indikator Kinerja Program (subsektor)	Sasaran	Tahun 2023						Sektor (K)	Peningkat dan/atau Peninggang (K)
				Target Kinerja		Realisasi s.d. 30/09/23		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
3.14.04	PROTEKSI DAN PENGAWASAN PADA PENGUNTAHAN SILIKONIA, SILIKONIA DAN	Capaian anggaran PDB per KB	%	46,27	5.777.000.000,00	7,34	114.420.000,00	8,20	9,28		PROTEKSI DAN PENGAWASAN PADA PENGUNTAHAN SILIKONIA, SILIKONIA DAN
		Capaian anggaran PDB per KB	%	44,26		9,20		10,20			PROTEKSI DAN PENGAWASAN PADA PENGUNTAHAN SILIKONIA, SILIKONIA DAN
		Capaian anggaran PDB yang terbayar	%	36,71		1,43		2,40			PROTEKSI DAN PENGAWASAN PADA PENGUNTAHAN SILIKONIA, SILIKONIA DAN
		Capaian PDB anggaran LPPN yang terbayar	%	14,91		1,23		1,93			PROTEKSI DAN PENGAWASAN PADA PENGUNTAHAN SILIKONIA, SILIKONIA DAN
		Capaian PDB yang dibayarkan	%	22,24		44,34		100,00		100,00	PROTEKSI DAN PENGAWASAN PADA PENGUNTAHAN SILIKONIA, SILIKONIA DAN

Sumber: Data dari PDB Kabupaten Bontolungga, Triwulan II Tahun 2023 yang dibayar

Berdasarkan hasil evaluasi RPPD dan 10 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Perilaku Dan Kebiasaan Buruknya terdapat 2 indikator dalam status tercapai, 4 indikator dalam status perlu upaya keras dan 3 indikator dalam status terlewat.

2.2.3.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Terdapat 7 indikator program pada urusan ini, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.114

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Instrumet)	Satuan	Tahun 2022						Sumber (R)	Struktur Organisasi Penyelenggara
				Target Kinerja		Realisasi 2022 (P)		Pengaruh Kegiatan			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.18.01	PROGRAM PENYELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ELAK	Pemeriksaan keselamatan Penyelenggaraan Jalan di jalan Kabupaten	%	42,84	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	11,48	100	Dana Bantuan Transaksi	UMKAL PERHUBUNGAN
		Pemeriksaan keselamatan jalan	%	23,84		1,71		6,81	100		UMKAL PERHUBUNGAN
		Pemeriksaan keselamatan yang meliputi wilayah yang berbatasan dengan jalan	%	50		18,00		22,00	100		UMKAL PERHUBUNGAN
		Pemeriksaan keselamatan	%	62		21,67		40,00	100	Akasi Transaksi	UMKAL PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (ukuran)	Satuan	Tahun 2011						Status (K)	Panggung Jawab Pemanggang Jawab
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Anggaran			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
		Persentase tercapainya program, proyek/kegiatan yang direncanakan	%	100		8,21		11,21		Belum Terealisasi	SKPD
		Kejumlahan tercapainya indikator yang direncanakan	%	100		1		11		Belum Terealisasi	SKPD
		Kejumlahan tercapainya indikator yang direncanakan (K&L)	%	100		1		11		Belum Terealisasi	SKPD

Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan II Tahun 2011 dan data

Berdasarkan Hasil evaluasi RKPD dari 7 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan terdapat 1 indikator dalam status akan tercapai, 1 indikator perlu upaya keras dan 2 indikator data belum tersedia.

Kode	Bidang Urusan Fungsionalitas dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Indikator)	Satuan	Target Kinerja		Tahun 2012 Realisasi s.d. TW II		Target Capaian		Sumber (%)	Pencapaian Berkas Pembangunan Jumlah
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
		Indeks pemangku manajemen	Angka	2		-		-		Data Berkas Tersebut	100% KUMHUMAS DAN PENGUSAHA
		Indeks pelayanan publik TMS	Angka	3		-		-		Data Berkas Tersebut	100% KUMHUMAS DAN PENGUSAHA
		Indeks layanan kependidikan masyarakat terhadap kegiatan kegiatan	Angka	4		-		-		Data Berkas Tersebut	100% KUMHUMAS DAN PENGUSAHA
		Indeks layanan publik terhadap masyarakat	Angka	5		-		-		Data Berkas Tersebut	100% KUMHUMAS DAN PENGUSAHA

Sumber: Ditjenbangun Kabupaten Bandung, Tahunan 2 Tahun 2012 dan 2013.

Deskripsikan hasil evaluasi RKPD dan 5 indikator program pada Urusan Fungsionalitas Bidang Komunikasi dan Informatika selanjutnya data tahun tersebut.

3.2.3.2.12 Urusan Perantaraan Bidang Perencanaan Model

Terdapat 6 indikator kinerja pada urusan ini, dengan dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.117
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perantaraan Bidang Perencanaan Model

Kode	Bidang Urusan Perantaraan dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (aspeknya)	Satuan	Tahun 2023				Status (R)	Pencapaian Kinerja Penyelenggara (Jumlah)		
				Target Kinerja		Realisasi 1-3 Triwulan					
				R	Rp	R	Rp				
1.18	URUSAN PERANTARAAN BIDANG PERENCANAAN MODEL										
1.18.01	PELAYANAN PERENCANAAN MODEL PERENCANAAN MODEL	Jumlah perencana yang mendapat layanan konsultansi awal	Persentase	50	90.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1,18	Data Belum Tersedia	DINAS PERENCANAAN MODEL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.18.02	PELAYANAN PERENCANAAN PERENCANAAN MODEL	Persentase perencana	%	5	80.000.000,00	-	-	-	-	Data Belum Tersedia	DINAS PERENCANAAN MODEL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.18.04	PELAYANAN PELAYANAN PERENCANAAN MODEL	% perencana perencana perencana dan perencana awal	%	70	500.000.000,00	-	14.000.000,00	-	1,40	Data Belum Tersedia	DINAS PERENCANAAN MODEL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		% perencana perencana perencana perencana dan perencana	%	100		-		-		Data Belum Tersedia	DINAS PERENCANAAN MODEL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.2.3.3.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dan Olahraga

Terdapat 3 indikator kinerja pada urusan ini, dengan nilai-nilai secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.118
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program Indikator	Satuan	Tahun 2023						Status (S)	Pencapaian Kinerja Penyelenggara Jember
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II		Target Capaian			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DAN OLAHRAGA										
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH BERSAMA SAMA	% jumlah penyelenggaraan	%	50	1.175.000.000,00	-	23.474.000,00	-	2.000	Data Belum Tersedia	URUSAN PEMERINTAHAN PENGUSAHA DAN USAHA BERSAMA
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH BERSAMA SAMA	% Perbaikan kondisi olahraga	%	20,14	4.900.000.000,00	-	400.000.000,00	-	20,10	Data Belum Tersedia	URUSAN PEMERINTAHAN PENGUSAHA DAN USAHA BERSAMA
2.18.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS BERSAMA SAMA	% jumlah penyelenggaraan	%	50	1.175.000.000,00	-	-	-	-	Data Belum Tersedia	URUSAN PEMERINTAHAN PENGUSAHA DAN USAHA BERSAMA

Sumber : Ditkangin Kabupaten Jember, Periode 1 Tahun 2023 dan 2024

Deskripsikan Hasil realisasi RKPD dan 3 Indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dan Olahraga selanjutnya data belum tersedia.

2.2.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.119

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Proyek/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Proyek/Program Kegiatan	Satuan	Tahun 2023						Status (K)	Pencapaian Secara Persentase/ Jumlah
				Target Kinerja		Realisasi s.d 17 Mei		Target Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
1.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIKA										
1.20.01	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA STATISTIKA	penyusunan publikasi data statistik internal	tu	tu	71.000.000,00	---	12.800.000,00	---	12,00	100% (dalam proses)	100% (dalam proses)

Sumber: Seksi Pengukuran Kinerja, Puncak, 8 Februari 2024 data aktual

Deskripsi Hasil analisis BKPD dari 1 indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik data berikut ini.

3.3.3.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi secara kumulatif selengkapnya tabel berikut:

Tabel 3.130

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022						Status (SI)	Peringkat Kinerja Pemangku Jabat
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
3.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN										
3.21.01	PERUMAHAN PERENCANAAN PERENCANAAN SPT/S PERENCANAAN PERUMAHAN	Perencanaan program/kegiatan pelayanan	kegiatan	26	73.000.000,00		6.000.000,00		13,27	Siapa Belum Terselesa	URUSAN KEPERUMAHAN DAN PERUMAHAN

Sumber: Ditjen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Triwulan II Tahun 2022 dan 2021

Berikutnya hasil realisasi RKPD dari 1 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan data tahun berjalan.

3.3.3.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Terdapat 4 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.121
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Instrumen)	Satuan	Tahun 2023						Status (R)	Pencapaian Kinerja Program (Jumlah)
				Target Kinerja		Realisasi s.d TR II		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
3.31.1	PROSESI PENYERAJAAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS	% dari total yang dilaksanakan sesuai daya tarik wisata	%	20	5.100.000.000,00	44,15	27.449.250,00	131,96	8,11	Tercapai	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.31.2	PROSESI PERHIMPATAN BUDAYA yang dilaksanakan	%	10	200.000.000,00	-	-	-	-	-	Data Belum Tercapai	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.31.3	PROSESI PELANTIKAN DAN PENYERAJAAN CAGAR BUDAYA	% dari total yang dilaksanakan	%	25	100.000.000,00	-	-	-	-	Data Belum Tercapai	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.31.4	PROSESI PENYERAJAAN PERKOTAAN	% dari total yang dilaksanakan	%	5	864.000.000,00	-	27.000.000,00	-	1,00	Data Belum Tercapai	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Sumber : Berbagai Kabupaten/Kota, Provinsi B Tahun 2023 dan data.

Berdasarkan hasil evaluasi REPE-dari 4 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan terdapat 1 indikator kinerja program tercapai dan sisanya data belum tercapai.

2.1.1.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perputakaan

Urusan Pemerintahan diampu oleh Dinas Kearsifan dan Perpustakaan. Adapun indikator kinerja sebanyak 2 indikator kinerja pada urusan ini, dengan indikator utama keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.122

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perputakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Fungsi Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (Instruksi)	Satuan	Tahun 2021						Status RI	Penyakit Dampak Penyelenggaraan
				Target Kinerja		Realisasi 1-4 Triwulan		Tingkat Capaian			
				B	Rp	B	Rp	B	Rp		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.11.00	PROGRAM PERUSAHAAN PERPUSTAKAAN	% Penyelamatan Perpustakaan yang akan ditutup pemerintah untuk pemertahanan	%	100	294.000.000,00	100	12.249.000,00	5,38	4,37		URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERUSAHAAN
2.11.00	PROGRAM PERUSAHAAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASIONAL (LAIN LAIN) (L100)	% Risiko minimal dan tingkat dana yang ditransfer	%	100	70.000.000,00	-	-	-	-	Dana Belum Tersedia	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERUSAHAAN

Sumber: Dinas Kearsifan dan Perpustakaan Kabupaten Biringen, Triwulan 1 Tahun 2021 data riil

Berdasarkan Hasil evaluasi KPIPI dari 2 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perputakaan terdapat 1 indikator perlu upaya terus dari 1 indikator data belum tersedia.

3.3.3.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Selengkapnya indikator kinerja pada urusan ini, dengan analisis secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.133

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (kelompok)	Sasaran	Tahun 2023						Status (%)	Pencapaian Sesuai Penanggung Jawab
				Target Kinerja		Realisasi s.d TH B		Target Capaian			
				B	Rp	B	Rp	B	Rp		
3.34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
3.34.01	PROGRAM PENGELOLAAN AIR	% UPTD yang telah melaksanakan kegiatan	%	100	100.713.000,00	-	100.000.000,00	-	100,00	Tercapai	URUSAN KESEHATAN DAN PERHUTANAN
3.34.01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMERAWATAN AIR	% Area yang dikelola dan dicatatkan	%	100	11.000.000,00	-	1.074.000,00	-	1,00	Tercapai	URUSAN KESEHATAN DAN PERHUTANAN
3.34.01	PROGRAM PERIKLAMAN PERUMAHAN AIR	% Program yang telah dilaksanakan dan	%	75	-	-	-	-	-	Tercapai	URUSAN KESEHATAN DAN PERHUTANAN

Sumber: Data Kinerja dan Capaian Kabupaten Sukorejo, Periode 3 Tahun 2021 dan data.

Berdasarkan hasil analisis RKPD dari 3 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan terdapat data sebagai berikut:

2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.2.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Terdapat 4 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.124

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (satuan)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi s.d. TW II		Target Capaian		Status (R)	Pencapaian Berdasarkan Jumlah
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1.05.01	PROGRAM PENGUJIAN PERIKANAN TANGKAP	Pemrosesan produk perikanan tangkap	%	100	6.765.813.000,00	100	163.076,00	100		Tercapai	100% KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.05.04	PROGRAM PENGUJIAN PERIKANAN MELAKUKAN	Pemrosesan produk perikanan budidaya	%	100	1.290.000.000,00	100	773.200,00	100		Tercapai	100% KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.05.05	PROGRAM PENGUJIAN SIKLUS LATA BELAKANG DAN PERIKANAN	% - tidak Pemrosesan yang terdapat	%	100	-	-	-	-		Data Belum Tersedia	100% KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.05.06	PROGRAM PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS PERIKANAN	Pemrosesan Produk Hasil Olahan Perikanan	%	100	1.613.000.000,00	100	344.000,00	100		Tercapai	100% KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Provinsi B Tangga Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan Hasil realisasi dari 4 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan terdapat 3 indikator tercapai dan 1 indikator data belum tersedia.

3.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Terdapat 5 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi secara kumulatif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.135

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (subsektor)	Satuan	Tahun	Tahun 2022				Status (K)	Pencapaian (persen)		
					Target Kinerja		Realisasi s.d TH II				Rasio Capaian	
					K	Rp	K	Rp			K	Rp
1.34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN											
1.34.01	PROGRAM PENGAWASAN DAN TATA LAKSANA PERIKANAN	Pemantauan daya tarik perairan yang berkembang	%	1	10.500.000.000,00	0,00	24.421.000,00	27,14	0,23	Tercapai	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERIKANAN	
		Pemantauan kualitas air perairan	%	2						Tidak Terpenuhi	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERIKANAN	
1.34.02	PROGRAM PENYERAPAN AIRBUDAS	Pembinaan lingkungan perairan	%	3	1.000.000.000,00		1.000.000,00		0,10	Tidak Terpenuhi	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERIKANAN	
1.34.04	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDHAJA PERIKANAN MELALUI PEMANFAATAN DAN PELINDUNG LAKE BERANAK EKOSISTEM	Pembinaan usaha budidaya perikanan yang berkelanjutan (KAB)	%	5	5.000.000,00	1,00		21,00		Tercapai	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERIKANAN	
1.34.05	PROGRAM PENYERAPAN AIRBUDAS BIDANG PERIKANAN	Pembinaan usaha budidaya perikanan	%	5	800.000.000,00	80,00	12.110.000,00	1.501,00	1,24	Tercapai	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERIKANAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2021						Status (R)	Pengaruh Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II		Target Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
	PERKOTAAN DAN PERUMAHAN KEBANTEN										
		Pertumbuhan SMD Tahunan Smpai Fasilitas yang terdistribusi	%	1		-		-		Tidak Belum Terwujud	DAERAH OMBUDSMAN DAN PERKOTAAN

Sumber: Lembar Kerja Anggaran Berimbang, Triwulan II Tahun 2021 dan detail.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD dari 4 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan terdapat 3 indikator dalam artikel terapan dan selengkapnya data berikut tertera.

3.2.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

Terdapat 12 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.136

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2021						Status (R)	Pengaruh Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II		Target Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
3.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN										
3.2.1.11	PROBLEMA PENYUSUNAN DAN PENGURANGAN BIAYA PERUMAHAN	Pertumbuhan produk perumahan terjangkau	%	11,5	18.893.000.000,00	-	6.948.000,00		100	Tidak Belum Terwujud	DAERAH OMBUDSMAN DAN PERUMAHAN
		Pertumbuhan produk perumahan terjangkau	%	1		-		-		Tidak Belum Terwujud	DAERAH OMBUDSMAN DAN PERUMAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2022				Status (R)	Penyakit Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II				Target Capaian	
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
		% dari total pelaksanaan yang dilaksanakan dari anggaran DDT	%	R, L, S						Dinas Dalam Negeri	DPD DARTASDA DAS DASDA
2.17.01	PROGRAM PENYALAMAN PERTANJAN	Penanganan krisis ketunggalan	%	R	0.000.000.000,00	-	0.000.000.000,00	-	1.00	Dinas Dalam Negeri	DPD DARTASDA DAS DASDA

Sumber : Ditjenjen Kelengkapan Bidang, Provinsi S.Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan Hasil evaluasi MSPT dari 12 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian terdapat 1 indikator tercapai nilainya data tahun tersebut.

2.2.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Terdapat 8 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi semua indikator selagunnya tabel berikut:

Tabel 2.12T

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2022				Status (R)	Penyakit Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II				Target Capaian	
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
2.20.01	PROGRAM PENYALAM DAN PENYALAMAN PERDAGANGAN	% usaha bidang yang telah selesai	%	L, S	000.000.000,00	-	0.000.000.000,00	-	1.00	Dinas Dalam Negeri	DPD DARTASDA DAS DASDA DASDA DASDA

Kode	Nama Program dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Nilai)	Kategori	Tahun 2023						Status (K)	Pencapaian Kinerja Penyelenggara
				Target Kinerja		Realisasi s.d. 30/09		Tingkat Capaian			
				Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp		
1.0101	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	% realisasi program sesuai pelaksanaan program/kegiatan	%	13	4.175.000.000,00	—	174.000.000,00	—	2,00	Tidak Sesuai Target	INDIK PERENCANAAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.0102	PROGRAM STANDARISASI MANAJEMEN KEPTUKAN PERUSAHAAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	% realisasi target target program/kegiatan	%	13	264.000.000,00	—	66.100.000,00	—	12,50	Tidak Sesuai Target	INDIK PERENCANAAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.0103	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN	Perkembangan output	%	8	425.000.000,00	—	105.340.000,00	—	24,80	Tidak Sesuai Target	INDIK PERENCANAAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.0104	PROGRAM STANDARISASI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	% nilai L1/FP sesuai standar	%	40	190.000.000,00	—	38.210.100,00	—	19,90	Tidak Sesuai Target	INDIK PERENCANAAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.0105	PROGRAM PENINGKATAN DAN PERKEMBANGAN MANAJEMEN PERUSAHAAN MANAJEMEN	% growth dalam target yang direalisasikan di pasar target dan nilai output	%	17	440.000.000,00	13,00	60.903.324,00	17,40	18,61	Tertinggal	INDIK PERENCANAAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sumber: Penjelasan R. LKPD Kabupaten Bandung, Triwulan II Tahun 2023 data aktual

Dibawah ini Hasil realisasi RKPD dari 5 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan terdapat 3 indikator tercapai dan 2 indikator data belum tersedia.

3.2.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan

Terdapat 3 indikator kinerja pada uraian ini, dengan realisasi secara kuantitatif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.128

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pokoknya Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (satuan)	Satuan	Tahun 2023						Status (P)	Penyakit Dampak Penanggung Jawab
				Target Kinerja		Realisasi s.d TH		Angka Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
3.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN										
3.11.01	PROGRAM PENGANTARAN DAN PERBAIKAN JALAN	Pembangunan jalan (kilometer)	%	11	424.000.000,00		1.462.000,00		0,00	Data Belum Tersedia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN
3.11.02	PROGRAM PENDEKATAN DAN JALAN KECIL DAN JALAN LINTAS	% volume indikator yang tersedia per meter	%	15	10.000.000,00		1.000.000,00		0,00	Data Belum Tersedia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN
3.11.04	PROGRAM PENYELAYAN JALAN DAN JALAN KECIL	% volume indikator yang sudah dibangun	%	00	10.000.000,00					Data Belum Tersedia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN

Sumber: Laporan Kinerja Bidang, Tahunan 2 Tahun 2023 data aktual

Dibawah ini Hasil realisasi RKPD dari 3 indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan sebanyak data belum tersedia.

3.2.3.4 Dasar Pendukung Urusan Pemerintahan

3.2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Terdapat 13 indikator kinerja pada instansi ini, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.120
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2022				Status (R)	Pencapaian Daerah Penyelenggara		
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II				Target Capaian	
				R	Rp	R	Rp			R	Rp
4	URUSAN PENCERMINAN URUSAN PEMERINTAHAN										
4.1	SEKRETARIAT DAERAH										
4.1.01	PROSEDUR ADMINISTRASI URUSAN	Non Penyelenggaraan Penyelenggaraan	Angka	100		-		-	-	Dalam Rencanan Tersedia	SEKRETARIAT DAERAH
		1. Pelayanan Program Daerah	%	100		100,00		100,00		Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
		Ketercapaian nilai akreditasi RPS	Angka	10		11,60		90,40		Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
		Terdapat Dokumen Standar Pelayanan yang sesuai kebutuhan Bidang Penyelenggaraan	Angka	4		2,00		50,00		Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
		Non Penyelenggaraan	Angka	100						Dalam Rencanan Tersedia	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Nama Proyek/Program/Instansi	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2011						Status (R)	Peringkat Kinerja Pelaksanaan	
				Target Kinerja		Realisasi s.d. 30/09/11		Target Capaian				
				R	Rp	R	Rp	R	Rp			
		Program Pengembangan SDM										
		Program Pengembangan SDM dan Pengembangan SDM	R	100		100	100	100	100	100	100	100
100100	PEKERJAAN KONSTRUKSI PONDASI DAN TUMBUH LINDI	1. Pekerjaan Konstruksi Pondasi dan Tumbuh Lindi Program Pengembangan SDM	R	100	24.210.000.000,00	22,000	24.210.000.000,00	24,200	41,000	100	100	100
		1. Pekerjaan Konstruksi Pondasi dan Tumbuh Lindi Program Pengembangan SDM	R	100		47,000		47,000	100	100	100	100
		Program Pengembangan SDM Lainnya	R	100		10,000		10,000	100	100	100	100

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2023						Status (R)	Pencapaian Sesuai Perancangan Awal
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Target Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
		menyediakan Peta Perencanaan Kota									
		di at leastnya 100% yang menyediakan Peta Angkutan dan Pergerakan	100%	100	40,00		40,00		100%	100,00	100%

Sumber : 2023 Kabupaten Semarang, Prioritas 2 Tahun 2023 dan detail

Berdasarkan hasil evaluasi KCPD dari 7 indikator program pada Sekretariat DPRD terdapat 3 indikator tercapai, 4 indikator akan tercapai dan 1 indikator kinerja program data belum tersedia.

2.2.3.5. Sektor Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.3.5.1. Perencanaan

Terdapat 8 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi semua ketercapaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.13)

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perencanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2023						Status (R)	Pencapaian Sesuai Perancangan Awal
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Target Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
8	URUSAN PERENCANAAN KEBANGSAAN	PERENCANAAN KEBANGSAAN									
8.01	PERENCANAAN KEBANGSAAN	PERENCANAAN KEBANGSAAN									
8.01.01	PERENCANAAN KEBANGSAAN	Perencanaan regional terdistribusi sesuai RPJMD	R	100	100,000,000,000	100	100,000,000,000	100%	100	100,000,000,000	100%

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2007						Status SK	Fungsi Dasar Penyelenggara Kerja
				Target Kinerja		Realisasi s.d TR II		Fungsi Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
		Target Program Pembangunan dan SK									

Sumber: RUPKAD Kabupaten Karangasem, Tahunan 2 Tahun 2007 dan hasil

Berdasarkan hasil realisasi RKPD saat II indikator program pada Pemerintahan terdapat II indikator tercapai dan II indikator data belum tersedia

3.3.3.3 Keuangan

Terdapat II indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.133
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keuangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Tahun 2007						Status SK	Fungsi Dasar Penyelenggara Kerja
				Target Kinerja		Realisasi s.d TR II		Fungsi Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
3.03	KESEKUTUPAN										
3.03.02	PERENCANAAN KESEKUTUPAN (ARISAN)	% Kompleksi Rasio Percepatan Perka-SPDR	%	100	100.000.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100%	Data Belum Tersedia	SKAD PERENCANAAN, PERENCANAAN EKSPANSI DAN ADPT (ARISAN)
		% Realisasi Rencana terhadap Target Kinerja yang	%	100		-		-		Data Belum Tersedia	SKAD PERENCANAAN, PERENCANAAN EKSPANSI

Kategori	Bidang/Unit Pembangunan dan Program Peningkatan KUALIFIKASI MANUSIA	Indikator Keberhasilan Program Indikator	Satuan	Tahun 2023						Status (R)	Peningkat Tingkat Penanggung Jawab	
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II		Target Fisikal				
				R	Rp	R	Rp	R	Rp			
		Waktu Kerja Normal										REVISI TAKUT DAN GAKUT
		% Realisasi Pembangunan Man	%	100						Data Belum Terwujud		REVISI PENCAPAIAN PENCAPAIAN KUALIFIKASI DAN AKTIF MANSIA
		% Pembangunan Pembangunan peningkatan manusia	%	100						Data Belum Terwujud		REVISI PENCAPAIAN PENCAPAIAN KUALIFIKASI DAN AKTIF MANSIA

Sumber: (2023.02) Kabupaten Limbung, Triwulan I Tahun 2023 dan 2022

Menyampaikan hasil evaluasi RKPD dari 9 indikator program pada Anggaran terdapat 3 realisasi pada upaya kerja dan indikatornya data belum terwujud.

3.2.3.5.3) Kepegawaian

Terdapat 5 indikator kinerja pada uraian ini, hingga realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.133
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kepegawaian

Kode	Bidang Urusan Penyelenggaraan dan Program Fungsi Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (subunit)	Satuan	Tahun 2023						Status (R)	Pencapaian Sesuai Sasaran
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Raghuat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
0.00	KEPELOWAAN										
0.01.00	PROGRAM KEPELOWAAN DASAR	% Pemenuhan kebutuhan ASN	%	100	1.188.000.000,00	100.000.000,00		(10,0)	Tidak Sesuai Sasaran	100% KEPELOWAAN DASAR	
		% Raghuat pemenuhan data dan informasi kepegawaian	%	100					Tidak Sesuai Sasaran	100% KEPELOWAAN DASAR	
		% Raghuat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	%	100					Tidak Sesuai Sasaran	100% KEPELOWAAN DASAR	
		% ASN yang sudah dilatih dan tersertifikasi	%	100					Tidak Sesuai Sasaran	100% KEPELOWAAN DASAR	
		% Raghuat analisis biaya ASN	%	100					Tidak Sesuai Sasaran	100% KEPELOWAAN DASAR	
		% Raghuat pemenuhan keterampilan jabatan ASN secara komprehensif	%	100					Tidak Sesuai Sasaran	100% KEPELOWAAN DASAR	

Sumber: BPPD Kabupaten Bontolungga, Triwulan II Tahun 2023 data riil

Berdasarkan Hasil evaluasi KSPD dari 6 indikator program pada Penyelenggaraan Dasar, terdapat sebanyak tiga data belum tercapai.

3.2.3.4 Pendidikan Dan Pelatihan

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi secara kuantitatif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.134

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

Kode	Bidang Kerja Penyelenggaraan dan Program Pokoknya Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (kelompok)	Satuan	Tahun 2023						Status (K)	Pencapaian Sesuai Perundang-Undang
				Target Kinerja		Realisasi s.d. 19 11		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
3.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
3.04.01	PROGRAM PENYALAMANAN KEMUDI LATA BERKUALITAS	1. MS yang melaksanakan atau akan melaksanakan	%	99	1.172.966.400,00	19.461.421,00	1,64	Deta Belum Terwujud	Belum Dilaksanakan (00000)		

Sumber: Ditjenkopas Berbang, Tahun 3 Tahun 2023 data aktual

Berdasarkan Hasil realisasi RKPD dan 1 indikator program pada Pendidikan Dan Pelatihan data belum terwujud.

3.2.3.5 Penelitian Dan Pengembangan

Terdapat 2 indikator kinerja pada urusan ini, dengan realisasi secara kuantitatif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.135
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (submendak)	Satuan	Tahun 2023				Status (K)	Penyakit Daerah Penyelenggara Aspek		
				Target Kinerja		Realisasi s.d TW II				Tingkat Capaian	
				K	Rp	K	Rp			K	Rp
3.01	PERLITAN DAN PENGEMBANGAN										
3.01.01	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEMAMPUAN SARANA	Pencapaian implementasi Skema dan Pengembangan yang mendukung penelitian	%	76	012.000.000,00	-	21.120.000,00	1,67	Dura Belum Terwujud	SKALA PENCERAIAN PENGEMBANGAN LUBER	
		Pencapaian Skema dan Skema yang Efektif	%	76		-			Dura Belum Terwujud	SKALA PENCERAIAN PENGEMBANGAN LUBER	

Sumber : BAPPENAS Kabupaten Kutubung, Periode II Tahun 2023 dan data

Perencanaan Hasil realisasi RPD dari 3 indikator program pada Penelitian Dan Pengembangan data belum terwujud.

2.2.3.6 **Daerah Pengembangan Urusan Pemerintah**
2.2.3.6.1 **Inspektariat Daerah**

Terdapat 2 indikator kinerja pada sasaran ini, dengan realisasi secara kumulatif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.136

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program

Kode	Nama Program dan Program Kegiatan Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (skor/nilai)	Rata-rata	Tahun 2022						Status (K)	Pengaruh Secara Penyelenggara-Jarak
				Target Kinerja		Realisasi s.d. TW II		Tingkat Capaian			
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
g. UNGGULAN PELAKSIAN UNGGULAN PERSENTAJIAN											
g.01 IMPERFORMAN DAN/ATAU											
g.01.01	PROGRAM PENYULUHAN/EDUKASI/INFORMASIONAL	1. Tidak tercapai hasil sasaran penyelenggaraan yang telah sesuai perencanaan	0	0,0	1.626.300.000,00	0,00	432.614.000,00	100,00	10,00	Tercapai	DAFTAR/DAKAT
g.01.02	PROGRAM PENYULUHAN/EDUKASI/INFORMASIONAL DAN KEMASAN	1. Terwujudnya layanan layanan hasil penyelenggaraan	0	10	1.182.400.000,00	-	2.492.000,00	-	10,23	Belum Tercapai	DAFTAR/DAKAT

Sumber: Laporan Kegiatan Kegiatan Berjangka Tahunan 2022 dan 2023

Realisasi/Target Hasil realisasi RKPD dari 2 indikator program pada Program ini terdapat 1 indikator Tercapai dan 1 indikator data belum terdapat.

2.1.7. Unit Kegiatan

2.1.7.1. Kecamatan

Terdapat 6 indikator kinerja pada uraian ini, dengan realisasi secara kumulatif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.137
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kesehatan

Kode	Bidang/ Urusan Penyelenggaraan dan Program/ Substansi Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Program (urusan)	Satuan	Tahun 2017						Status (%)	Pencapaian Kinerja Penyelenggara Daerah
				Target Kinerja		Realisasi s.d. 12/12		Target Capaian			
Ud1				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Ud1.01	PROGRAM PENYELIDINGAN DAN PENYERAPAN PUSAK	Capaian proses penertarikan yang dipikirkan ke pusat	%	87,5	200.000.000,00	87,50	200.000.000,00	88,21	2,73	Tercapai	100,000000
Ud1.02	PROGRAM PENYERAPAN BAWAHAN DAUD (SAR BILANGAN)	Realisasi anggaran dana Sar' bilangan untuk penyelenggaraan kegiatan	%	88,71	1.000.000.000,00	88,71	1.100.000.000,00	90,81	10,81	Non Tercapai	100,000000
		Jumlah dana yang ditransfer/pendat P Rp. 20.000.000,-	Non	1,00		1,00		10,21			100,000000
Ud1.04	PROGRAM KEMERDEKAAN KETERTAPAN DAN KEMERDEKAAN LAIN	Capaian penyelenggaraan urusan ketertapan dan kemerdekaan	%	88,29	440.000.000,00	88,29	4.400.000,00	88,75	0,47	Non Tercapai	100,000000
Ud1.05	PROGRAM PENYELIDINGAN LAIN/ PENYERAPAN LAIN/ PROGRAM PERUBAHAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN DAUD	Capaian penyelenggaraan urusan penertarikan umum	%	89,62	240.000.000,00	89,62	-	89,26	-		100,000000
Ud1.06	PROGRAM PERUBAHAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN DAUD	Realisasi dana dengan cara tidak penertarikan yang ada	%	88,81	1.000.000.000,00	88,81	10.000.000,00	87,44	0,50	Non Tercapai	100,000000

Sumber : Kementerian Kesehatan Kabupaten Kutubung, Periode 3 Tahun (2017-2019) (data)

Kode	Bidang Kerja Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kategori	Tahun 2011						Pengaruh Indeks Pembangunan Sosial	
				Target Kinerja		Realisasi 1-12/11 (%)		Target Capaian			Ketercapaian (%)
				R	Rp	R	Rp	R	Rp		
	PERENCANAAN STRATEGIS										

Sumber: Kementerian Kelautanian dan Perikanan, Tahunan II Tahun 2011 data dasar

Perencanaan Hasil evaluasi RKPD dari 1 indikator program pada Struktur Anggaran Dan Pokok Kegiatan 2 indikator kegiatan dari 2 Data berikut tertera.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

- Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus;
- Perluanya pengoptisan tenaga di dalam pemerataan pendidikan dan pengoptisan nilai-nilai kebangsaan dan sportivitas;
- Data dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya;
- Perluasi jaringan masih kurang terutama untuk provinsi di tingkat regional baik kesekretan, provinsi maupun nasional;
- Masih perlunya Peningkatan Lembaga pendidikan;

b. Kesehatan

- Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk;
- Perluanya upaya peningkatan kesadaran untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;
- Perluanya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;
- Perluanya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui dengan lebih proaktif atau dengan metode "jangkit bola";

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Keterbatasan personal dan sarana mobilitas perencanaan program ke-PU-ian terutama pada jumlah inspeksi, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan;
- Sebagian besar jalan belum memenuhi standar kebijakan jalan baik dari segi lebar maupun strukturnya;
- Saluran optimalisasi fungsi pergeseran jalan;
- Masih terdapatnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;
- Kurang terpedanya pengalihan sumber daya air dari hulu hingga hilir sehingga ketika musim pengalihan terjadi banjir di daerah hilir sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan;
- Keterbatasan lahan yang dapat dipertukarkan sempadan air di wilayah tengah hingga hilir di Kabupaten Nongko;
- Keterbatasan air baku sebagai bahan baku air minum;
- Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan SPAL di wilayahnya;
- Capaian sanitasi masih merupakan akses dasar belum memenuhi standar kebijakan;
- Keterbatasan lahan yang tersedia untuk pengembangan Sistem Pengalihan Air Limbah (SPAL) baik utangan di desa/ kabupaten maupun terpasang di kecamatan / kabupaten;

d. Perumahan Rakyat dan Nelayan Perikanan

- Masih terdapat selisih antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah

- J. Kekurangan rumah (sukling);
- Masih banyak rumah yang tidak layak huni;
- Ruang optimalnya pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di pertanahan;
- Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai provokasi aset lahan hasil pertanahan kepada Pemerintah Daerah;
- Pemangkas kawasan masalah belum optimal;
- Belum adanya regulasi mengenai pemangkas masalah;

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya pembekalan politik di masyarakat, terutama terkait pemerintahan lokal; politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
- Belum adanya kajian pemetaan risiko bencana yang merupakan dasar perancangan bencana di Kabupaten;
- Perluanya upaya pebibitan masyarakat sebagai agen utama dalam penyelenggaraan bencana;

f. Sosial

- Perluanya peningkatan pelayanan sosial dasar PMS dan keterpaduan penanganan PMS antar pemerintahan dan antar sektor;
- Perluanya pengelompokan data dan pemanfaatan Base Data Terpadu (BDT) oleh seluruh perangkat keperguruan sebagai dasar penanganan kerentanan dan PMS lainnya;
- Perluanya penguatan kapasitas Petrusi Standar Kesejahteraan Sosial (PKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung model kesejahteraan sosial;

2.2.1.3 Daerah Pemerintahan Wajah Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

- Belum optimalnya keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diminta;
- Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpadam karena kurangnya;

b. Pambekayaan Pemukiman dan Perlindungan Anak

- Pemaksimalan yang masih perlu perhatian pada belum optimalnya kerentanan gendit di berbagai bidang;
- Masih adanya Kurangnya pada pemukiman dan anak;
- Penguatan Kelompok Perlindungan anak Desa masih rendah sebesar 64,57%;

c. Pangan

- Eksistensi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (EBGSA);
- Rendahnya luas lahan TPT yang dimanfaatkan dari anggaran Organisasi penggaraga nasional;

d. Pertanian

- Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung

program, strategi pemasaran baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Salah satunya pembangunan sekolah, pembangunan sarana prasarana pemerintahan, pasar bebas dan masalah lainnya.

- Belum semua lahan bertanah subur termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

e. Lingkungan Hidup

- Meningkatnya jumlah limbah rumah yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan;
- Kurang optimalnya pengelolaan/pemulahan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar;
- Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas industri pengolahan hasil pertanian dan industri hulu;
- Pemungutan keseragaman lahan kritis belum optimal sehingga kualitas sumber daya air semakin menurun karena berkurangnya area resapan air;
- Ketersediaan ketersediaan lahan pemerintah untuk HTI Petak.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Rendahnya konsistensi pengisian data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai aspek pembangunan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat sari nilai negara, pengetahuan, teknologi, sari produk, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber sumber daya keuangan;
- Belum optimalnya perencanaan dan pemberdayaan melalui ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/orang tua dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan;
- Belum adanya prototipe lumbung pangan Desa.

h. Pengendalian Produk dan Keluarga Berencana

- Pemantauan yang masih perlu perhatian adalah pengetahuan masyarakat untuk sadar ber-GB dan perilaku peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

i. Perhubungan

- Belum optimalnya fungsi terminal dikawatirkan ketunggalannya antara pemenuhan pendukung terminal;
- Belum adanya pertemuan lalu lintas antar moda untuk memfasilitasi perjalanan lalu lintas yang terpadu;
- Belum terpadainya sarana keselamatan jalan baik berupa pemenuhan jalan, pagar pengaman jalan maupun sarana keselamatan lalu lintas lainnya;
- Belum optimalnya ketersediaan informasi perjalanan.

- Dalam maksimalnya penyediaan transportasi bagi masyarakat.
- Kebijakan Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perdagangan.

g. Perdagangan

- Pengembangan fasilitas perdagangan berdasarkan jalur lintas (LRT), TL, WA pada jalan provinsi/Nasional terlewatla kewenangan pemerintah pusat dan Provinsi;
- Mendukung tumbuh galian C dan budidaya pabrik pengolahan hasil tambang yang bernilai besar, sehingga pendapatan lokal makin tinggi.

h. Komunikasi dan Informatika

- Meningkatkan penggunaan sistem informasi pemerintahan e-Government secara terpadu, aman, terintegrasi, dan terlewatla dengan baik serta akurat.

i. Operasi dan URM

- Tingkat produktivitas operasi dan URM belum maksimal;
- Belum optimalnya pemertoran profilik operasi dan URM.

2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Priban

a. Kelautan Dan Perikanan

- Mendukung produksi perikanan tangkap dan budidaya;
- Mendukung produksi hasil sabbat perikanan.

b. Pertanian

- Mendukung tumbuh gapan di kabupaten Pantang meningkatkan kemitrahan air untuk usaha pertanian terpadu;
- Meningkatkan minat dan jumlah usaha kerja yang bekerja di sabbat pertanian;
- Mendukung Lusa lahan TPI yang dikelola dan sabbat DPP;
- Dalam optimalnya nilai tambah produk pertanian.

c. Perdagangan

- Mendukung daya tarik pusat, serta sabbat pemertoran pusat perdagangan;
- Kebijakan sabbat usaha perdagangan;

d. Industri

- Meningkatkan produk industri kecil dan menengah yang sabbat sabbat;
- Dalam optimalnya sabbat teknologi sabbat;

2.3.1.4 Fungsi Pemasang Urusan Pemerintahan

a. Keuangan

- Dalam optimalnya dalam sabbat sabbat aset daerah dan pemertoran aset dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- Mendukung pemertoran PAD dan Wajit Pajak Daerah.

2.3.1.5 Fungsi Jasa

- Meningkatkan nilai pada kompetensi pengolahan tenaga dan sabbat sabbat;
- Meningkatkan nilai sabbat SAKIP;
- Priban pemertoran fasilitas pelayanan publik sabbat sabbat.

3.3.3 **Tata Strategi Pembangunan Daerah**

Berikut akan gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi kinerja tahun 2022, maka permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Rombeng adalah "Tetap optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rombeng". Adapun rencana permasalahan sebagaimana berikut:

1. Tetap Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan memegang peranan penting dalam menentukan performa dan keberhasilan pemerintahan daerah. Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan dapat berdampak luas sehingga kapasitas pemerintahan daerah yang juga luas. Dengan pentingnya hal ini sehingga mulai dari tingkat nasional sudah mengamanatkan untuk melakukan perbaikan atas tata kelola pemerintahan di daerah.

Amendemen Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik pusat dan daerah. Hal tersebut kemudian diwujudkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Kebijakan tersebut diwujudkan sebagai upaya melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, reformasi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi nilai acuan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Adapun hasil penilaian dari Reformasi BI pada tahun 2022 sebesar 61,09 dari angka maksimal 100. Capaian ini masih tergolong belum optimal dikarenakan masih berada pada kategori B prestasi <60-70. Selanjutnya berkaitan dengan Nilai SAKIP, kondisi hasil yang didapatkan Kabupaten Rombeng tahun 2022 memperoleh nilai 64,15 dengan Predikat "B" namun hasil yang didapat masih dibawah target Daerah sebesar 70.

Selain Nilai SAKIP, untuk melihat sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan juga digunakan indikator lain berupa Opsi SPK, Indeks Merit Sistem, dan Indeks SPBE. Opsi SPK untuk Kabupaten Rombeng di tahun 2022 mendapatkan Opsi MTP. Adapun untuk Indeks Merit Sistem tahun 2022 sebesar 201,3. Indeks SPBE Kabupaten Rombeng di tahun 2022 berada di angka 1,19 dari skala 5, apabila dilihat dari predikat Indeks SPBE maka Kabupaten Rombeng termasuk dalam predikat Baik. Hal ini tentu dapat meningkatkan lagi, harapannya Kabupaten Rombeng ke depannya bisa meraih predikat Sangat Baik atau bahkan Memuaskan.

Dari beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rombeng tersebut, terlihat bahwa nilai capaian yang masih dibawah target Daerah. Dengan demikian, menjadi perhatian sangat bagi Pemerintah Daerah Rombeng untuk dapat meningkatkan penilaian yang sudah ada sekaligus memperbaiki nilai tersebut menuju target yang lebih tinggi dalam mencapai tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

2. **Measur Lemahnya Kualitas Pendidikan;**

Kata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Beraung tahun 2022 sebesar 7,41 dan Harapan Lama Sekolah sebesar 12,13. Kondisi tersebut masih dibawah Provinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan kualitas Pendidikan melalui strategi:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
- b) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik serta ketertarikan serta lembaga pendidikan negeri dan swasta;
- c) Peningkatan kualitas dan distribusi prosesnya dan sarana pendidik;
- d) Peningkatan kualitas pengelolaan, perencanaan, nilai, ketepatan dan keragaman budaya; dan
- e) Peningkatan pelayanan pemerintahan dan pengembangan budaya baru masyarakat.

Untuk memajukan peningkatan kualitas pendidikan dengan melaksanakan Program Unggulan Dumasiana dan Darmasana. Dumasiana merupakan salah satu program di bidang pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu. Darmasana merupakan salah satu program di bidang pendidikan yang dilaksanakan kepada tenaga kependidikan, adapun metode yang dilakukan adalah dengan menggalang guru-guru berprestasi sebagai bahan dan pendamping sebagai pola tenaga pendidik lainnya.

Dalam pelaksanaan anak putus sekolah Pemerintah Kabupaten Beraung memiliki "Program Gaspol 12" (Gerakan Anak Sekolah 12 Tahun). Cara ini merupakan bentuk pelayanan publik di bidang Pendidikan yang mana pemerintah dilakukan atas dasar "jangan sampai ada anak di luar sekolah hingga usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah". Upaya yang dilakukan mulai dari membentuk jaringan masyarakat yang peduli pendidikan, melibatkan pendataan anak putus sekolah, anak tidak lulus lanjut dan anak putus sekolah sampai dengan pemantauan secara agar anak-anak tidak bersekolah tersebut dapat kembali mengenyam pendidikan dasar baik dari sekolah formal maupun nonformal.

Dengan banyaknya persiapan hingga di Beraung diharapkan akan meningkatkan indeks kualitas manusia (IPM) di Kabupaten Beraung.

Berikutnya upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas PBM. Dilaksanakan melalui:

- a) Meningkatkan risiko peningkatan pendidikan baik formal dan non formal kepada masyarakat;
- b) Meningkatkan perhatian manajemen pendidikan pendidikan non formal;
- c) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana di proses di PBM;

3. **Measur Lemahnya Kualitas Kesehatan;**

Angka Harapan Hidup Kabupaten Beraung tahun 2022 sebesar 74,88, kondisi tersebut sudah diatas Provinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan kualitas kesehatan melalui strategi:

- a) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui cakupan kesehatan universal; dan
- b) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk meningkatkan pengetahuan kualitas kesehatan dengan melaksanakan Program Unggulan Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan menyediakan pelayanan kesehatan secara online dan pelayanan berbasis warga atau home care.

Pelayanan kesehatan secara online dilakukan melalui penerapan Aplikasi AKUUNO (Aplikasi Rujukan Online RSUD dr. R. Soetomo), Aplikasi KRESNO atau Aplikasi Amtes RSUD dr. R. Soetomo sebagai alat untuk memudahkan akses secara online bagi calon pasien yang ingin berobat ke RSUD dr. R. Soetomo Rembang. Selain berbasis teknologi informasi (TI) RSUD dr. R. Soetomo Rembang juga melakukan transformasi proses dalam bidang transportasi yakni melalui inovasi *On-Job* atau *On-Call* atau *On-Call* *On-Call* *On-Call* merupakan layanan penghantaran pulang pasien pasca perawatan dari RSUD dr. R. Soetomo Rembang tanpa dipangai biaya apapun.

Salahsatu pelayanan berbasis warga atau *Homecare* dilakukan melalui penerapan *Telepon* (*Telepon* - *LaPOne* - *opne*) dengan tujuan untuk memonitoring *AKI* dan *AKB*. Kegiatan *TELEPON* bukan hanya sebagai sistem pemantauan *AKI*-*AKB* tetapi dikembangkan lebih luas untuk pelayanan kesehatan, antara lain pemantauan gas darah, *stunting*, penanganan kasus penyakit kronis dan peningkatan kesehatan lingkungan, dll. Selain *Telepon* juga terdapat beberapa program lainnya yakni program *Supervising* *Gerakan Keluarga Cegah Stunting* yang merupakan upaya peningkatan pengetahuan *stunting* berbasis pendidikan dan pendampingan keluarga, yang dipaparkan oleh *PKM* (*Peluang Keluarga Berencana Indonesia*) bekerjasama dengan *TP-PKB* (*Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga*). Program *KEMAS GUYEND* adalah kegiatan yang dipaparkan oleh *emaga* yang terlatih dari dua kelas *stunting* khususnya untuk melakukan pencegahan *stunting* melalui edukasi kepada warga dan kepada keluarganya. Mereka akan mendapat *emaga* lainnya agar ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan *stunting*. Selanjutnya juga ada program *GEMARUKAN* (*Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan*) yang merupakan upaya *stunting* dan terintegrasi di Kabupaten Rembang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Rembang. Dalam rangka mendukung pemantauan *stunting* di Kabupaten Rembang.

Selain program dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, program kesehatan lingkungan juga penting dilaksanakan, salah satu kegiatannya adalah "Caring air" (gerakan *ngguyend* *ngguyend* *ngguyend* *ngguyend* *ngguyend* *ngguyend*), kegiatan ini dilaksanakan sampai tingkat desa yakni di dua yang bekerjasama dengan kader jemaah *guru* *pemantau* *prati*. Upaya ini dilaksanakan untuk memelihara kebersihan lingkungan serta mencegah penyakit demam berdarah. Selain itu, untuk mengatasi sampah, Pemerintah juga menginisiasi kegiatan "GEMAR" (*gerakan* *memilih* *dari* *menyumbang* *sampah*), program ini sangat diharapkan dapat menjadi kegiatan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat untuk peduli dari memilih sampah. Kegiatan ini sejalan dengan target *percepatan* *SDGs* pada pilar lingkungan, yang memiliki tujuan terbesar daripada pilar lain pembangunan sosial 4 tujuan, pembangunan ekonomi 5 tujuan dan pembangunan inklusif dan tata kelola 3 tujuan, artinya ini tentang lingkungan harus menjadi prioritas pembangunan sebagai upaya keberlanjutan kehidupan manusia.

4. Belanja Optimalisasi Perencanaan dengan Mendukung Pemulihan Daya Dupa;

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bontang mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2018-2022 sebesar 3,8%. Pertumbuhan Ekonomi meningkat dari tahun 2020 sebesar 3,80% menjadi 5,50% di tahun 2022, mencapai nilai pertumbuhan ekonomi meningkat akan tetapi nilai PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Bontang masih tergolong rendah dibanding dengan Kabupaten Se-Jawa Tengah pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK Kabupaten Bontang sebesar 14,907. Maka hal ini Pemerintah melakukan upaya terus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang berkontribusi terhadap pilar 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, kemampuan kerja yang produktif dan berkelanjutan, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Terkait dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditargetkan pada tahun 2030 laju pertumbuhan PDRB riil per kapita sebesar 5,4%. Peran UMKM juga perlu diperkuat dengan target pada tahun 2030 sebesar 41,00% UMKM dapat memberikan layanan keuangan. Oleh karena itu, selain komitmen kuat perlu dibarengi berbagai program-program khusus di bidang perencanaan, paling tidak pada jangka pendek dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi agar tidak terus menurun dan perlahan dapat kembali positif dan mengalami peningkatan.

5. Belanja Optimalisasi Kualitas Infrastruktur Daerah;

Infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini dibutuhkan karena pemeliharaan infrastruktur berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan keadilan yang berkelanjutan, "Mendukung Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendukung Inklusif" dan berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan keadilan yang berkelanjutan "Menjadikan Kota dan Perencanaan Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan"

Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial daerah. Berbagai komponen yang termasuk dalam infrastruktur meliputi infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih, dan infrastruktur sistem drainase. Keberadaan infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Bontang mengalami peningkatan dalam upaya memenuh kebutuhan air baku untuk rumah, ritel, dan industri. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2022 mencapai 8.983,52 ha dari luas area irigasi 21.193,45 ha cakupan ketersediaan air baku masih sangat kurang sebagai prasarana penyangga pembangunan industri, pertanian, dan kawasan area kebutuhan sehari-hari.

Kondisi berkaitan dengan jaringan jalan. Pada tahun 2022 Kabupaten Bontang mempunyai panjang jalan 178,58 km dengan kondisi jalan baik 57,81%. Kondisi jalan baik mengaharai prasarana sebagai jalur jalan arteri primer antara Jakarta-Burabaya yang merupakan jalur perekonomian yang terus baik ngkatkan bidang maupun penunjang

sebagian memiliki area lahan kritis yang cukup padat. Persegi jalan yang ada di Kabupaten Bontang terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 576,95 km, Jalan Provinsi sepanjang 71,44 km, dan Jalan Nasional sepanjang 88,04 km. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Bontang sebanyak 126 unit dengan panjang 1.274,9 m.

Terdapat beberapa program yang masih harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah diantaranya program perbaikan kerwa api jalan Semarang-Demak-Rudus-Pati-Bontang. Program ini sudah mulai dilaksanakan dan diharapkan memberikan dampak yang cukup signifikan terutama dalam Terapan Transportasi Lokal (Tetraloka). Program pengembangan jembatan juga dilaksanakan melalui pengembangan Pelabuhan Bontang Terminal Suka di Desa Bontangtaya di Kecamatan Suka diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Kondisi ini mengakibatkan bagaimana infrastruktur yang ada sudah perlu terus diperbaiki dan dikembangkan guna mendukung perkembangan Kabupaten Bontang.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur antara lain: 1) Kondisi infrastruktur sumber daya air perlu ditingkatkan melalui Pembangunan Embungjati, Program Pengaliran Sungai Terpadu (PPT), dan Program Konservasi Sumber Daya Air; 2) Kondisi infrastruktur jalan perantara dan pengaliran penyulingan perlu peningkatan, pemeliharaan perantara swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa pelayanan, dan pengembangan infrastruktur perhubungan di kawasan perantara; dan 3) Kondisi persiapan perhubungan terintegrasi dengan fasilitas alat uji yang masih menggunakan sistem analog. Beberapa permasalahan ini harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bontang untuk segera ditangani. Sehingga masalah, kesulitan, serta permasalahan, dan permasalahan yang layak bisa dapat semakin ditingkatkan kualitasnya.

6. Sistem Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperlukan sebagai pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur. IKLH memiliki banyak keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

- a) Tujuan 11: Mengedukasi Ecos dan Pemukiman Industri, Atmos, Tanggah, dan Berkelanjutan;
- b) Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan;
- c) Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya;
- d) Tujuan 14: Memelihara dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan;
- e) Tujuan 15: Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemertanian Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Meningkatkan Pengurusan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kebilangan Restorasi Ekosistem Hayati

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bontang belum optimal dilihat dari empat indikator pengukuran lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), pengaliran sampah, dan tutupan lahan. Dalam pengukuran IKA menggunakan tujuh parameter dengan pengujian sampel diambil di tiga lokasi yaitu Sungai Kalpaty (Bontang), Sungai Sabagan (Lawe), dan Sungai Karanggeneng (Bontang). Pada tahun 2022, capaian standar IKA telah diragukan sebesar 22 realisasi

sebesar 12,53 perbagi dengan capaian sasaran 100,00% (tercapai). Kemudahan berkaitan dengan IKU, pengujian sampai menggunakan sampel limbah yang mewakili aktivitas tertentu di Kabupaten Bontang yakni: 1) Transportasi (perangkatan Jerng), 2) Industri (PLTU Bontang), 3) Perumahan (Desa Sukamaya), 4) Komersial (Perumahan LA, Pemuda Km. 2). Pengukuran IKU menggunakan parameter pengukuran standar/umum di perindustri, bahan bakar, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). NO₂ merupakan nilai kebisingan kebisingan yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ merupakan nilai industri yang menggunakan bahan bakar solar sebagai bahan yang mengandung sulfur lainnya, capaian sasaran IKU telah dirangkikan sebesar 88 realisasi sebesar 88,22% (baik) dengan capaian sasaran 100,14% (jika tercapai).

Selanjutnya, permasalahan sampah perlu menjadi perhatian penting. Hal ini didasarkan atas data yang mengungkapkan bahwa limbah sampah di Kabupaten Bontang pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 13,70%. Wilayah penyumbang limbah sampah terbesar berada di kawasan peternakan dan terkonsentrasi di wilayah perior dan pada peternakan. Beberapa kawasan yang menjadi penyumbang sampah terbanyak antara lain Kecamatan Bontang (109,65 m³/hari), Kecamatan Sangas (77,82 m³/hari), dan Kecamatan Semping dari total limbah sampah 74,30 m³/hari (2022). Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menunjang pemeliharaan lingkungan hidup sebagai berikut: 1) Memperbaiki sistem operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), 2) Meningkatkan kualitas kelap air pada area pemukiman di TPA, 3) Menurunkan pengendalian gas, 4) Memperbaiki instalasi pengolahan lumpur, 5) Meningkatkan kapasitas pengolahan sampah melalui gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), 6) Peningkatan jumlah sarana pengumpulan sampah karena belum mampu menyerap pertambahan total limbah sampah.

Salah satu aspek yang digunakan dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup adalah tutupan lahan. Tutupan lahan merupakan kemampuan material baik permukaan bumi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian meliputi tutupan lahan di Kabupaten Bontang antara lain lahan kritis bekas tambang yang banyak bermunculan dan belum optimalnya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

7. Masih Tinggi Angka Kemiskinan

Realita angka kemiskinan dari tahun 2018-2022 mengalami banyak perubahan. Angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Bontang terus mengalami penurunan secara bertahap-tahap sebagai berikut 15,81%, 14,50%, 15,60%, 15,80% dan 14,63%.

Secara lebih rinci, data kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis data, yaitu data kemiskinan mikro dan data kemiskinan makro. Data mikro dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui perhitungan jumlah penduduk miskin. Sedangkan data makro didapatkan melalui upaya yang mengutamakan lebih mendetail dapat dirangkikan sebagai berikut tambahan yakni data kearsifan, Kemudahan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bontang tahun 2022 dapat dilihat menggunakan Indeks Ketahanan Kemiskinan (F1) dan Indeks Eksperimen Kemiskinan (F2). Indeks Ketahanan Kemiskinan (F1) merupakan ukuran rata-rata kemampuan penghasilan masing-masing penduduk semakin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata penghasilan penduduk

dan garis kemiskinan. Berdasarkan Indeks Kepuasan Kemiskinan (IK) memberikan gambaran mengenai perubahan pengalihan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengalihan di antara penduduk miskin. Kedua data tersebut didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sosenas). Dalam hal ini, Indeks Keadilan Kemiskinan (IK) maupun Indeks Kepuasan Kemiskinan (IK) tahun 2022 mengalami penurunan. Indeks Keadilan Kemiskinan (IK), menunjukkan ukuran rata-rata ketimpangan pengalihan masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. IK tahun 2022 sebesar 3,41 atau turun sebesar 0,36 poin dibanding IK tahun 2021 sebesar 3,77. Penurunan Indeks IK menggambarkan rata-rata pengalihan penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Di samping kedua indeks yang digunakan, garis kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam menilai tingkat kemiskinan suatu wilayah. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memenuhi standar hidup yang minimum di suatu wilayah. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai representasi jumlah spot minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum nasional yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kemiskinan penduduk yang memiliki rata-rata pengalihan nasional per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan ditanggulangi dalam penduduk miskin. Garis Kemiskinan di Kabupaten Bontang pada Maret 2022 sebesar Rp. 441.402,00 per kapita per bulan, bertumbuh sebesar Rp. 24.509,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,79 persen, jika dibandingkan kondisi bulan Maret 2021 yang sebesar Rp. 414.877,00.

B. Sektor Optimalnya dalam Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka;

Sementara di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi fokus yang perlu diperhatikan. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah terbit tahun 2022 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka nasional menjadi 1,76 persen. Lebih lanjut angka pengangguran sebanyak 11.293 jiwa. Dari capaian ketenagakerjaan tahun 2022 dengan jumlah penduduk usia kerja 516.834 jiwa. Penurunan tingkat pengangguran ini butuh waktu 3 tahun dari 2020 sampai dengan 2022. Tahun 2020 menunjukkan sebesar 4,83 persen, di 2021 menurun 1,65 persen menjadi sebesar 3,67 persen dan untuk 2022 turun lagi 1,91 persen menjadi 1,76 persen. Sedangkan angkatan kerja untuk bekerja terdapat 282.317 jiwa dan bukan angkatan kerja untuk angkatan rumah tangga, dan sekolah sebanyak 134.467 jiwa. Pengangguran Kabupaten Bontang tingkat 1,87 persen dan 516.834 jiwa. Hanya 11.293 jiwa. Nilai ini termasuk rendah di Jawa Tengah.

TPT menjadi salah satu indikator capaian yang digunakan terhadap tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang meliputi, "Meningkatkan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan berkualitas, serta pekerjaan yang layak untuk semua". Hal ini berkaitan dengan target ketiga, "Meningkatkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi, dan mendukung kualitas dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk

melalui akses terhadap jasa keuangan,” serta target kelima yang menyebutkan, “Pada tahun 2020, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan lapangan yang lebih lagi untuk perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.” Atas hal tersebut, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 diharapkan mencapai 1,8% dengan upaya yang dilakukan melalui intervensi dalam hal peningkatan keahlian tenaga kerja untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pelaksana masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Bontang di sektor ini adalah adanya keterbatasan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja.

B. **Masa Lampaunya Kemandirian Desa**

Pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengubah paradigma dan konsep lama ketetapan tata laksana desa secara nasional, Desa-desa yang ada tidak lagi dipertimbangkan sebagai latar belakang Indonesia, tapi haluanan depan Indonesia. Usulannya undang-undang tentang desa juga turut mengembangkan prinsip keberagaman, mengintegrasikan masa religiusitas dan keberlanjutan desa. Lebih jauh lagi undang-undang ini juga menggarisbawahi hak dan kebutuhan desa yang mana itu terintegrasi karena dibuktikan pada pasal sub nasional.

Adanya landasan hukum di tingkat nasional tersebut tentu harus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bontang untuk dapat meningkatkan kemandirian desa-desa di wilayah Bontang. UU Desa yang selanjutnya juga disertai dengan penyaluran dana desa menjadi modal untuk meningkatkan kemandirian desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian desa, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan kondisi desa di Kabupaten Bontang saat ini. Untuk keperluan tersebut dapat digunakan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan terdapat komposit yang dibentuk berdasarkan tiga terdapat yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan.

Berdasarkan data terakhir di tahun 2022, menunjukkan IDM di Kabupaten Bontang berada pada angka 0,7057. Angka IDM tersebut apabila dilihat dari Status IDM yang dibuktikan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi masih berada pada status Berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari angka IDM yang ada kemandirian desa di Kabupaten Bontang masih tergolong rendah.

Selain IDM, terdapat indikator lain yang juga dapat digunakan untuk melihat kondisi kemandirian desa yakni Perentase Desa Maju dan Mandiri. Dari data yang ada di tahun 2022 Perentase Desa Maju dan Mandiri di Kabupaten Bontang adalah 28,17%. Perentase yang masih kecil ini sejalan dengan IDM di atas menunjukkan bahwa saat ini kemandirian desa di Kabupaten Bontang memang masih rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang sesuai dari Pemerintah Kabupaten Bontang untuk dapat meningkatkan kemandirian desa-desa yang ada di wilayahnya. Pemaksimalan untuk kemandirian desa ini sudah sebelumnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Bontang di tahun-tahun mendatang.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBANGSAAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Daerah mendukung pemulihan kondisi ekonomi makro ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan kawasan Kabupaten Bontang untuk menampung pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan di tahun 2023, sehingga perlu diselaraskan dengan rencana dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Pada bab ini juga terdapat kerangka pemulihan pendapatan dan kemampuan kerangka untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2023.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi dalam Kabupaten Bontang memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan global dan nasional yang pada tahun 2023 masih dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 dan dampak dari perang Rusia - Ukraina. Dampak tersebut pada perekonomian daerah meningkatkan inflasi daerah, melambatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbesar belanja dalam rangka penanganan dampak inflasi dan penanganan Covid-19 sehingga mengurangi belanja pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2023 diarahkan pada upaya penanganan dampak inflasi dan pemulihan dampak pasca penanganan Covid-19.

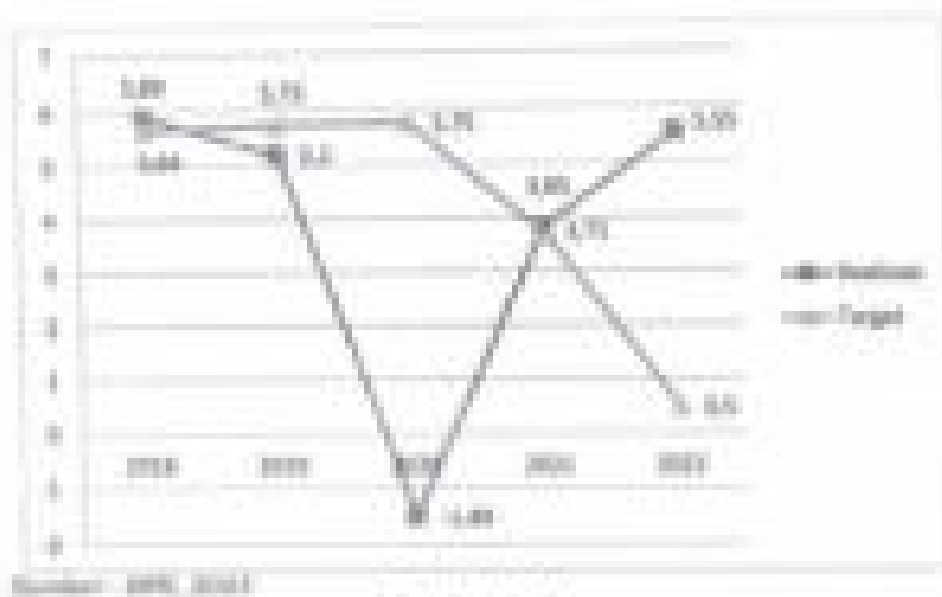
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bontang pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 3,88% menjadi 5,33%. Selama kurun waktu lima tahun 2018-2022 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bontang sebesar 3,88%. Struktur perekonomian Kabupaten Bontang berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha antara lain: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,85%, Industri Pengolahan sebesar 23,44% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor sebesar 11,04%.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bontang pada tahun 2023 diharapkan kembali meningkat perekonomian daerah dari dampak inflasi dan pasca pandemi Covid-19 pada angka 4,50-5,33% didukung dengan penanganan risiko berbagai upaya pada program dan kegiatan yang mendukung pemulihan perekonomian masyarakat.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi diharapkan menjadi pendorong pembangunan lokal yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bontang 2018-2022 dapat digambarkan pada grafik berikut.



Grafik 3.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang
Tahun 2018 - 2022

Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang mengalami kenaikan sebesar 1,84% menjadi 5,55%

3.1.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang menunjukkan berkembang nilai tambah sektor-sektor yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Rembang selama kurun waktu tertentu. Untuk melihat secara riil perkembangan PDRB, maka digunakan pertumbuhan tahun dasar atas atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan PDRB ADHK 2018, perkembangan PDRB tahun 2022 mengalami perkembangan tertinggi diperkirakan masih terjadi pada sektor dominan yaitu Pertanian Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Ditinjau lain, apabila dilihat dari kontribusi sektoral terhadap perkembangan Rembang, dapat ditark berwujudan bahwa tujuh belas sektor produktif PDRB terdapat 3 Lapangan usaha tumbuh positif antara lain Transportasi dan Pergudangan, Perputaan Akumulasi dan Makin Mulus dan Jasa Lainnya.

Struktur perkembangan di Kabupaten Rembang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten Rembang. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang dengan kontribusi sektoral 23,34 %. Sektor industri pengolahan menempati posisi kedua dengan kontribusi sektoral 21,75 %. Perkembangan kontribusi sektoral dari tahun ke tahun dapat menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Rembang yang mengalami transformasi ke arah sektoral.

Tabel 5.2
PNB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rembang Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	PNB Kab. Rembang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.405.252,32	12.547.763,11	12.611.527,38	14.005.762,88	11.405.111,87
2	Pengeluaran Konsumsi LPRT	348.848,74	307.871,79	375.038,44	307.526,33	348.144,35
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.008.760,33	1.042.438,76	1.040.807,68	1.027.338,35	1.008.126,48
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.082.181,11	4.442.801,13	4.144.974,41	4.322.983,35	5.047.174,85
5	Perubahan Inventori	424.524,87	345.284,34	702.128,32	348.128,31	348.271,92
6	Net Saving	1.748.140,18	1.742.522,88	1.478.428,42	1.408.874,31	1.748.082,48
PNB PENDAHLAAN		17.997.607,55	18.669.282,18	18.653.866,63	19.822.613,71	18.867.824,95

Sumber: BPS, 2023

Tabel 5.3
PNB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rembang Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	PNB Kab. Rembang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.232.889,47	8.222.288,88	7.925.874,83	8.475.267,38	8.944.144,32
2	Pengeluaran Konsumsi LPRT	174.888,48	194.888,33	198.288,25	192.288,25	188.288,25
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.004.144,88	1.004.144,71	1.003.844,71	1.003.844,71	1.003.844,88
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.003.428,88	3.003.428,71	3.003.428,41	3.003.428,24	3.003.428,25
5	Perubahan Inventori	398.744,18	408.444,71	702.128,25	402.288,25	402.271,92
6	Net Saving	502.888,38	512.144,88	475.128,25	502.244,88	497.888,38
PNB PENDAHLAAN		13.316.984,99	13.254.335,44	12.608.614,85	13.387.104,71	14.038.824,95

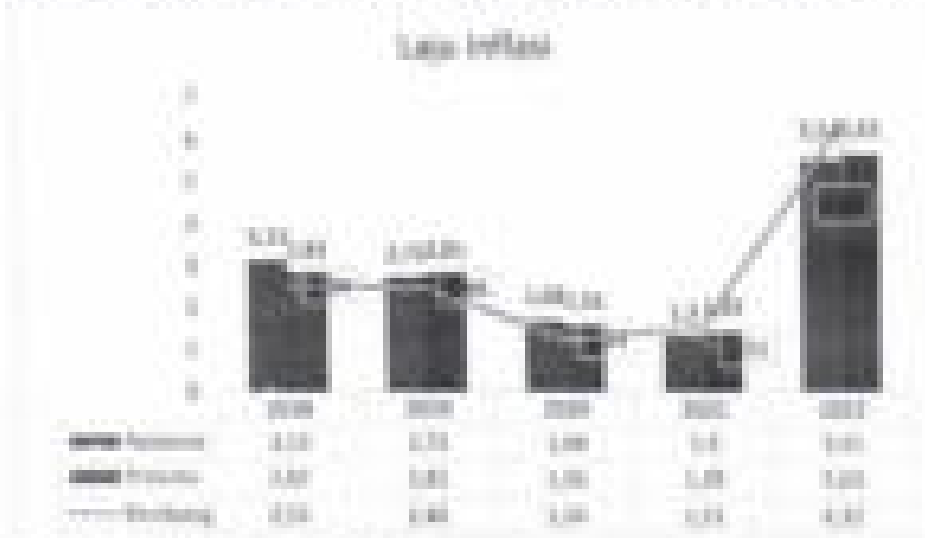
Sumber: BPS, 2023

Nilai PNB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2018 - 2022 tetap didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PNB Kabupaten Rembang. Seperti pada Tahun 2022 nilai PNB Atas dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Rembang sebesar 71,95 %. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PNB Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 23,01%, serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,07 %.

3.1.3.3 Reflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Rembang mengalami pada laporan inflasi pada Kabupaten Kudus. Pada tahun 2022 sebesar 6,52% mengalami kenaikan sebesar 4,81 % dari tahun 2021 yang sebesar 1,71%. Kondisi inflasi Kabupaten Rembang tahun 2022 juga lebih tinggi dari kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,63 % dan Nasional sebesar 5,51 %. Adapun

grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS, 2022 data diolah

Grafik 3.2
Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perencanaan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun mengalami stagnasi di tengah sejumlah tantangan yang berpengaruh pada sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan nasional yang berpengaruh positif pada perekonomian daerah, yaitu kebijakan fiskal terkait pemotongan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, yang akan mendorong pertumbuhan komposisi pertumbuhan kawasan Perbatasan dan PNTB. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Rembang yaitu:

- Isu pengisian kebutuhan pangan, energi, dan air di zona ketergantungan Kabupaten Rembang masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
- Tingginya ketergantungan akan barang impor berupa bahan baku industri UMKM hasil dari bahan produksi lainnya yang seringkali menyulitkan produsen.
- Pada sektor industri, maritim, dan pariwisata pengembangan masih belum maksimal, pengembangan industri baik industri pengolahan maupun industri maritim serta pengembangan destinasi wisata masih harus terus ditingkatkan dengan menggunakan inovasi.
- Perlu upaya meningkatkan ekonomi lokal dengan pengisian UKM di Kabupaten Rembang dengan pengembangan infrastruktur perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya lokal.
- Meskipun telah Kabupaten Rembang strategi Peroda pada pertengahan jalar distribusi Jakarta – Surabaya, namun hal ini belum diakomodasi terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- Pada sektor konsumsi, tantangan perekonomian daerah berkaitan

langsung dengan daya beli masyarakat, kerajinan hardskill, inovasi, harga komoditas pangan serta kenaikan indeks pengiraan masyarakat kelas menengah TDM, ekgp dan kelangkaan rumah tangga menengah. Sementara daya yang sektor produksi juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal yang terutama disebabkan oleh tingkat efisiensi faktor produksi dan rendahnya produktivitas.

Namun dalam dua prospek perkembangan di Kabupaten Rembang masih berkontribusi optimisme dengan meningkatnya sektor swasta ekonomi baru yang mengalami pertumbuhan juga pertumbuhan ekonomi. Maraknya industri pengalihan yang didukung tumbuhnya UMKM menjadi motor pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan sektor pertanian yang semakin melambat. Istirahat pada sektor UMKM terlihat semakin mampu berdaya yang telah menjadi salah satu dalam tataran perkembangan lokal dan regional. Demikian juga kemajuan teknologi informasi mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Kabupaten Rembang yang terutama didukung oleh maraknya kegiatan perdagangan elektronik. Menggelaknya sektor pariwisata di Kabupaten Rembang semakin dirasakan berkembang pesat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan maraknya wisata-wisata pariwisata di tingkat lokal. Sementara pemerintah pusat terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan moneter yang semakin ekspansif. Selain itu, maraknya industri besar berkelas nasional pada Sektor hulu-mula menjadi pemacu pertumbuhan perkembangan di Kabupaten Rembang.

Meskipun sejumlah tantangan dan prospek perkembangan di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2023 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perkembangan Kabupaten Rembang tahun 2023 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta taban terhadap gejala ekonomi. Kebijakan perkembangan daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mengoptimalkan sumberdaya lokal meliputi potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta kewirausahaan pada pemertanian pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023, maka model perkembangan Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2023 secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh sejumlah situasi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional masih mengalami tekanan pemertanian nilai tukar rupiah dan inflasi. Terjadinya pelambatan juga pertumbuhan sektor pertanian akibat faktor struktural seperti banjir, papak, secara produksi pertanian, perubahan pola iklim serta ruang serta regulasi sub sektor perikanan yang menjadi kendala produksi perikanan tangkap. Namun demikian, melalui kebijakan revitalisasi sektor pertanian, serta inovasi dan ketega pemerintah yang berkeadilan, perikanan dan pemertanian subsektoral, pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya yang dan terintegrasi dengan antara-selera produksi, kemudahan ipa usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah fasilitasi lingkungan serta

perbaikan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna maka diharapkan perekonomian Kabupaten Rembang akan tumbuh positif. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 sebesar 5,55 %. Dengan laju tingkat inflasi sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan masyarakat, akan terkendali pada kisaran 4% - 5 % melalui upaya optimalisasi peran DPD dalam menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga.

- b. Peningkatan angka kemiskinan -1,15 % di Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar 14,63%, dari tahun 2021 sebesar 15,80%. Peningkatan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang dapat tercapai apabila didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu mampu meningkatkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Kebijakan pengurangan kemiskinan diprioritaskan melalui upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan pendidikan, intervensi sosial, kesehatan, pendampingan dan regulasi keberdayaan program rumah sederhana layak huni sebagai upaya mengurangi beban pengangguran dengan bantuan stimulus perbaikan rumah layak huni baru, perbaikan kawasan anak berprestasi keluarga miskin dan sekolah dasar sebagai program tinggi, pemenuhan BUMDes sesuai potensi lokal baik untuk penghilangan wisata Desa maupun ekonomi Desa.
- c. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka 1,91 % pada Tahun 2022 sebesar 1,70% dan tahun 2021 sebesar 3,67%, melalui : Peningkatan produksi kemampuan kerja dan usaha, melalui metode training unit, kerja terapan kerja, pengembangan wirausaha muda, dan Peningkatan kompetensi keahlian terapan kerja melalui pelatihan terapan kerja berbasis kompetensi. Fasilitas terapan kerja ke perusahaan - perusahaan, Peningkatan, pendampingan, kemandirian dan pengembangan terapan kerja.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menjawab tantangan serta propesi perekonomian daerah tahun 2023, maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Selain penyusunan terhadap arah kebijakan ekonomi daerah akibat pengaruh risiko-ukuran yang mengakibatkan inflasi di banyak negara dan pasca wabah Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023 juga didasarkan pada upaya penanganan dampak inflasi dan dampak Covid-19 sebagai upaya menekan nilai inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan pasca penanganan Covid-19. Arah kebijakan yang akan dicapai pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

3.3.1. Propesi Keuangan Daerah dan Keuangan Produsian

Revisi akan hasil usaha terhadap anggaran dan propesi perekonomian, maka diperlukan usaha intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan diversifikasi PAD dilakukan melalui pengurangan pelayanan pajak daerah,

pendayagunaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD pengelola Retribusi Daerah dan pengelolaan aset Pemerintah daerah.

Pada struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik. Komponen kontribusi penerimaan PAD pembangunan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan yang bersumber dana dari PAD. Dalam prosesnya RKPD Kabupaten Beraung Tahun 2023, pemerintah pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD ditinjau dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 3 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jika pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Analisis Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana berdasarkan pada tingkat selengkapnya tercantum dalam RKPD Kabupaten Beraung Tahun 2023-2026.

Perimbangan angka 1 dan 2 diatas dengan memperhatikan peningkatan dampak inflasi dan dampak pandemi Covid-19.

Keputusan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengumpulan kasus dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna optimalisasi dana perimbangan;
4. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak (Dahar Pajak).

Adapun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan:

1. Pengelolaan Sumber Penerimaan Baru baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah;
2. Penajatan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memastikannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengumpulan Pendapatan yang ada (SIMPATIA, SIMBOP-1-PBB);
3. Pembuktian Kewajiban Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang denda tidak/kurang wajar;
4. Optimalisasi Penerimaan Platang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui terlinkasi Platang kepada seluruh Objek Pajak Daerah untuk memastikan kebenaran data platang yang dapat ditagih dengan melakukan pemanggilan secara rutin;
5. Peningkatan Kapasitas SDM Penghasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Pelatihan, Bina, Workshop, FGD dan forum-forum lainnya;
6. Modernisasi Administrasi, pengembangan dan perbaikan aplikasi pengumpulan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui perubahan teknologi informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan

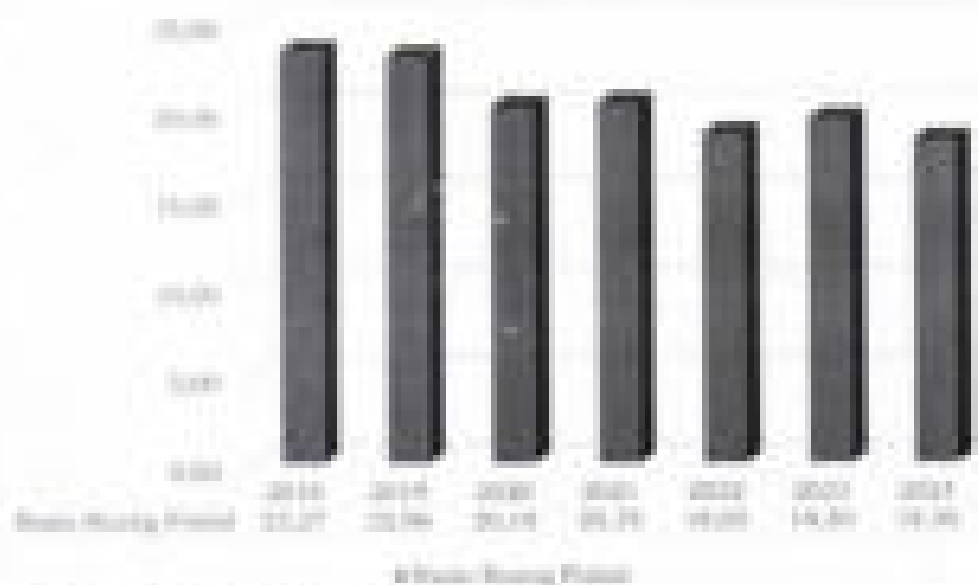
7. **Keperluan Proses Rasio Pengelolaan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam memperolehi Waqaf Pajak dan Waqaf Syariah dalam melaksanakan dan pengalangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

3.2.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal (fiscal space) merujuk kepada suatu konsep untuk mengukur kelikatan yang dimiliki pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD untuk mewujudkan kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula kelikatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perkembangan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked), dan belanja yang lainnya seperti belanja pegawai dan belanja bunga, semakin tinggi dengan total pendapatannya.

Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau kelikatan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dana-dana secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan dilaksanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bernilai *uncommitted* (ditentukan penggunaannya). Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang lainnya seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin besar data yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah dibandingkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar. Grafik Perkembangan Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022 dan Proyeksi pada Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.3
Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022 dan
Proyeksi Tahun 2023-2024 (%)



Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran, 2023

Mendasarkan Grafik diatas terlihat bahwa ruang lokal di Kabupaten Bantul cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 ruang lokal yang tersedia sebesar 23,27 % dari total Pendapatan, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 18,68 %. Sampai saat ini kembali pada Tahun 2023 menjadi 19,53 dan tahun lagi pada Tahun 2023 menjadi 18,93.

Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2018-2022, Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang semula sebesar Rp.1.431.328.505.019,46 pada tahun 2021, menjadi sebesar Rp.1.041.484.139.332,53 pada tahun 2022. Sedangkan dari Belanja daerah meningkat dari yang semula sebesar Rp.1.838.443.011.929,00 pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.991.793.018.142,71 pada tahun 2022. Untuk menunjang Pemertanian Pendapatan dan Peningkatan Kinerja Pendapatan Belanja tersebut pada Tahun 2022 dilakukan Kebijakan Pemertanian Pajak-pajak Daerah sebesar Rp. 48.366.793.200,00.

Secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2018-2022, dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

NO URUT	URAIAN	REVISI 2014 (Rp)	REVISI 2015 (Rp)	REVISI 2016 (Rp)	REVISI 2017 (Rp)	REVISI 2018 (Rp)	REVISI 2019 (Rp)
1.1.1	Perencanaan Risiko Strategis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Perencanaan Program Kerja Tahunan Kantor Kantor Perwakilan/ Kantor Kecamatan/ Kelurahan	4.400.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	0,00
	REVISI 2014 BERSAMA	4.400.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	0,00
1.2	REVISI 2015 REVISI 2016 REVISI 2017 REVISI 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPPD Kabupaten Gorontalo, data primer

NO	URAIAN	PERBUDAYAAN KEHUTAN		
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
A	KEBUDAYAAN KEHUTAN	284.522.000.000	282.040.000.000	(2.482.000.000)
A.1.01	Kelembagaan Kehutanan	0.000.000.000	-	-
A.1.02	Kelembagaan Kehutanan Lainnya	207.722.000.000	207.000.000.000	(722.000.000)
A.1.03	Kelembagaan Kehutanan Lainnya (Kategori: Kehutanan)	1.000.000.000	1.000.000.000	0.000.000.000
A.1.04	Kelembagaan Kehutanan Lainnya (Kategori: Kehutanan)	1.000.000.000	1.000.000.000	0.000.000.000
A.1.05	Kelembagaan Kehutanan Lainnya (Kategori: Kehutanan)	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
A.1.06	Kelembagaan Kehutanan Lainnya (Kategori: Kehutanan)	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
B	KEBUDAYAAN PERBURUHAN	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
B.1.01	Kelembagaan Perburuan	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
C	KEBUDAYAAN PERIKANAN	284.522.000.000	282.040.000.000	(2.482.000.000)
C.1.01	Kelembagaan Perikanan	284.522.000.000	282.040.000.000	(2.482.000.000)
C.1.02	Kelembagaan Perikanan Lainnya	-	-	-
D	KEBUDAYAAN PERHUTANAN	70.000.000.000	70.000.000.000	0.000.000.000
D.1.01	Kelembagaan Perhutanan	70.000.000.000	70.000.000.000	0.000.000.000
D.1.02	Kelembagaan Perhutanan Lainnya	-	-	-
D.1.03	Kelembagaan Perhutanan Lainnya (Kategori: Perhutanan)	-	-	-
D.1.04	Kelembagaan Perhutanan Lainnya (Kategori: Perhutanan)	-	-	-
	PERUBAHAN BERSIH	(2.482.000.000)	(2.482.000.000)	0.000.000.000
	PERUBAHAN BERSIH AKHIR TAHUN	-	-	-

Selanjutnya Raporitas Hal Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 selanjutnya tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Raporitas Hal Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2022

NO	URAIAN	PERUBAHAN HAL TAHUN 2022
1	2	3
1	Kelembagaan Perikanan	284.522.000.000,00
2	Kelembagaan Perikanan Lainnya (Kategori: Perikanan)	0,000.000.000,00
3	Kelembagaan Perikanan Lainnya (Kategori: Perikanan)	0,000.000.000,00
4	Kelembagaan Perikanan Lainnya (Kategori: Perikanan)	0,000.000.000,00
5	TOTAL PERUBAHAN	(2.482.000.000,00)
	REKONSTRUKSI	
6	TOTAL BELANJA KAPITAL DAN PENGHIMPUNAN DANA KAPITAL	1.000.000.000.000,00
	REKONSTRUKSI BERSIH PERUBAHAN HAL	
	Kelembagaan Perikanan Lainnya (Kategori: Perikanan)	0,000.000.000,00
	Kelembagaan Perikanan Lainnya (Kategori: Perikanan)	0,000.000.000,00

BAB IV SARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bontang tahun 2021-2026. Dalam penyusunan Dokumen RPJPD Periode tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPJMD 2021-2026, juga mengacu pada RPJ tahun 2023 demi terwujudnya ketertarikan dengan prioritas pembangunan Nasional. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bontang tahun 2021, sebagaimana tertera pada prioritas pembangunan nasional tahun 2023 tersebut adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia".

Penyusunan prioritas pembangunan RPJPD Kabupaten Bontang dilaksanakan berdasarkan prinsip keserasian dengan dokumen perencanaan baik nasional maupun provinsi Jawa Tengah, serta penguatan lei strategi, prioritas program-program pembangunan, serta Visi dan Misi Pembangunan Daerah tahun 2021-2026.

Visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bontang Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan **"Bontang Gemilang 2026"**. Visi Kabupaten Bontang Tahun 2021-2026 memiliki kesesuaian dengan Visi RPJPD Kabupaten Bontang Tahun 2021-2026 yaitu **"BEMBAH MAJU, MANDIRI dan BERKATERA"**.

Adapun matriks Visi RPJMD tahun 2021-2026 dijelaskan sebagaimana berikut - **Bontang Gemilang** menggambarkan suatu semangat pembanguan masyarakat Kabupaten Bontang yang sejahtera dan seja ekonomis, melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 4-2 Tahun 2021-2026 Kabupaten Bontang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dengan perilaku jaman awal yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, produktif dan kredibel yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tanggung rasa yang diliputi dengan profesionalitas masyarakat desa yang lebih mandiri.

DEMOKRASI dapat diartikan sebagai **DEMOKRASI**, **gempIL** dan **gemILANG**.

Demokrasi adalah terwujudnya Bontang yang agribisnis dan agribisnis masyarakat untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sejahtera, beradab, memiliki kemampuan ekonomi mandiri sehingga dapat meningkatkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gempil adalah pembangunan lapangan masyarakat manusia dan penguatan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gempil nilai adalah diarahkan masyarakat.

Gemilang adalah terwujudnya lapangan birokrasi yang mampu melakukan peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang diliputi oleh prinsip yang transparan, kredibel dan akuntabel.

Sebagai landasan implementasi RPJPD tahun 2023 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang akan dirumuskan sebagaimana tertera pada RPJPD Kabupaten Bontang 2021-2026 serta penyelarasan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang telah diangkat pada 28 Februari 2021. Dimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Bontang adalah **"Bontang Gemilang 2026"** Visi tersebut akan dirumuskan melalui pasal 16 visi pembangunan daerah Kabupaten Bontang Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata laksana birokrasi

2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan terpelajar dalam jaminan sosial
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkeadilan dan berkeadilan
4. Mengembangkan kemampuan daya kreatifitas pribadi lokal

Upaya untuk pencapaian prasyarat via dan misi pembangunan Kabupaten Bontang, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dilihat dalam tabel di bawah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bontang
Tahun 2023

No.	Misi	No.	Spesifikasi	Indikator Kinerja	Sasaran	Target 2023	
						2023	2024
1	Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Masyarakat Kabupaten Bontang	1.1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejahtera	Kualitas Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
		1.2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kualitas Pendidikan	100%	100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
2	Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Masyarakat Kabupaten Bontang	2.1	Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Masyarakat Kabupaten Bontang	Kualitas Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
		2.2	Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Masyarakat Kabupaten Bontang	Kualitas Pendidikan	100%	100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Masyarakat Kabupaten Bontang	3.1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejahtera	Kualitas Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
		3.2	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejahtera	Kualitas Pendidikan	100%	100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
		3.3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejahtera	Kualitas Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
						100%	100%
4	Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Masyarakat Kabupaten Bontang	4.1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejahtera	Kualitas Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%
						100%	100%

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Agar kegiatan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk memandu prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan melalui pendekatan politik, administratif, partisipatif, bottom up dan top down, inklusif, transaksional, integratif, dan special. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJPD dan dilaksanakan secara riya oleh semua pemangkas kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Ditinjau dalam prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut tentunya juga memperhatikan keberadaan wilayah mandiri yang memberikan nilai agilitas dalam proses pembangunan maupun pelayanan daerah. Secara umum prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan 5 (lima) Arah Prioritas dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Arah Prioritas
 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, fokus pada membangun SDM jelajah kerja yang dinamis, produktif, mandiri, menggerakkan lima program dan strategi berbasis digital dengan kerjasama swasta dan talenta global.
 2. pembangunan Infrastruktur, fokus pada selanjutnya pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, meningkatkan daya kerja baru, dan memperbaiki peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 3. Peningkatan regulasi dengan pendekatan berbasis law.
 4. perpendaftaran Birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, mengurangi prosedur dan birokrasi yang panjang, serta menyederhanakan sistem.
 5. Transformasi Ekonomi, fokus pada melakukan transformasi ekonomi dan keberagaman SDK menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.
- b. Arah Prioritas tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional meliputi:
 1. Mempertahankan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
 2. Mengembangkan wilayah untuk menggerakkan lapangan dan pemulihan Pemukiman.
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
 4. Revitalisasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pelayanan publik.
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan iklim.

7. Memperkuat kualitas Pelaksanaan dan transformasi pelayanan Publik.

Berikut adalah presiden dan agenda pembangunan nasional, pemerintah pusat juga menetapkan pembangunan strategis nasional dimana Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu wilayah pengembangannya. Secara khusus untuk wilayah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Peraturan Pembangunan Kawasan Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purwokerto - Wonorejo - Magelang Tembung, dan Kawasan Irbeta Tegay - Pematang, Pemerintah Pusat memusatkan pengembangannya pada skala-stara yang diharapkan untuk menjadi produser ekonomi dan pengembangannya pada skala-stara yang dilaksanakan untuk menunjang ketimpangan ekonomi kawasan. Dengan keter unggulan yaitu Pemukiman, Industri, Perikanan, Migas dan Gas Bumi, Perikanan dan Pertambangan.

Usulan Program/Regulasi Lintas Kawasan yang dilaksanakan terdapat Kabupaten Bembung :

1. Pembangunan Jalan Tol Bumi Tol Demak-Kudus-Pati-Bembung (13.000 M)
2. Realisasi rel kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Bembung (8.000 M)
3. Pengembangan kawasan berbasis industri dan UMKM serta bantuan alat tangkap ikan rumah lingkungan (Pantura) (1.000,5 M)
4. Pengembangan kawasan berbasis pariwisata (200 M)
5. Pengumpulan dan pengujian starting dan gel bumi (100 M) dan
6. Pembangunan dan Pengembangan prosessa BMK unggulan (200 M).

Alasan untuk wilayah Bembung Elora (Bembung) terdapat 18 Proyek pengembangan dengan estimasi membutuhkan biaya sebesar Rp 3,74 Triliun. Di Wilayah Kabupaten Bembung akan dilaksanakan proyek :

1. Optimalisasi pemeliharaan waduk waduk Sela untuk air waduk (112 M)
2. Pembangunan Long Storage Sungai Pong (50 M)
3. Pembangunan Ketinggian Perairan, Trevogoban, & Kalurahan (200 M)
4. Pembangunan Jalan Lingkar Bembung - Loran (500 M)
5. Pengalihan Jalan Kab. Bembung - Jalan Kab. Elora (200 M)
6. Pengembangan TPA Landoh (50 M)
7. Pengalihan air laut menjadi air tawar (dibutuhkan karena untuk kawasan lahan layak) (100 M)
8. Pengembangan Kluster Industri Batik Loran (50 M)
9. Pembangunan Pasar Kota Bembung (100 M)
10. Revitalisasi Situs Pura Kuno dan Pengembangan Wisata Kota Purala Loran (95 M)
11. Revitalisasi dan/atau restorasi BLE (40 M)
12. Pembangunan STA (50 M)
13. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung (100 M) dan
14. Pengembangan industri perikanan rakyat (50 M)

Tabel 4.3

Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonorejo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang

No. Urut No. Sampel Rencana	Jenis	Sub-Jenis	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Rp. M)	Kawasan Kota	Periode Mulai	Periode Akhir	Kawasan Rupa Kawasan Perencanaan		Kawasan Lahan				
								RTM	RTM	Lahan Lahan	Waktu Lahan	Waktu Lahan	Waktu Lahan	
1		Administrasi	Administrasi	111	1/2000	2001	2001	2000	2000					
2		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
3		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
4		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
5		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
6		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
7		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
8		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
9		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
10		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
11		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
12		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					
13		Administrasi	Administrasi	80	1/2000	2000	2001	2000	2000					

4.3.2. **Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003**

Strategi pembangunan Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Penguatan pertumbuhan dan kehidupan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana, dengan fokus pada:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain teknologi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan asuransi tenaga kerja;
 - 2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani usaha perikanan melalui penguatan kelembagaan perikanan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi;
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hutan;
 - 4) Peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sistem logistik daerah, pemeliharaan lahan perikanan dan marinal sebagai sumber perikanan, pangan berbasis perikanan, serta pemberdayaan petani, serta pengalihan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah, serta korporasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan merek produk;
 - 6) Peningkatan *eye care system* berbasis masyarakat tingkat desa (*community*) dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana usaha distrik pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
 - 7) Peningkatan nilai pemanfaatan modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, terpadu, dan akuntabel, pemeliharaan fasilitas kelembagaan perijinan berbasis, serta pengoptimalisasi fungsi pengembangan investasi Pemerintah dan swasta usaha;
 - 8) Peningkatan akreditasi dan keberlanjutan distrik industri barang, jasa dan peramping, serta keberlanjutan antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah perantara, tingkat dan provinsi;
 - 9) Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi IMA, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai daerah, wilayah, peningkatan lapangan air baku, rehabilitasi kawasan perikanan dan laut, pengalihan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), penerapan *Good Mining Practice*, konservasi sungai, serta penguatan keaktifan masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup; dan
 - 10) Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dibarengi dengan upaya keberlanjutan, penguatan tingkat ketahanan, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta peningkatan kesadaran antar daerah dan antar lembaga dalam penanganan risiko bencana.

- b. Peningkatan kapasitas pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga dilakukan untuk mendukung kebijakan penganggulangan kemiskinan (PKS), dengan fokus pada:
- 1) Penyediaan dasar awal secara langsung (jika diperlukan dasar) untuk penduduk miskin perkotaan dan perkotaan termasuk kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan kelompok rumah lainnya baik melalui langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin secara luas penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah, Kesehatan Lansia (RHL), listrik, akses air bersih, dan akses pasar);
 - 2) Penguatan mekanisme livelihood (keberhasilan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya yang usaha mikro dan kecil yang keberlanjutan, pengembangan kewirausahaan pribadi yang keberlanjutan dan pengembangan ekonomi digital;
 - 3) Penguatan tata kelola keberlanjutan penganggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemantauan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskemas dalam keterkaitan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan energi kebijakan dan program baik secara horizontal maupun vertikal; dan
 - 4) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kewirausahaan pekerja, pemogohan dan pengembangan subsektor industri, serta membangun ketahanan sistem demand dan supply side tenaga kerja.
- c. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia tenaga DCM berdaya tanggap, dengan fokus pada:
- 1) Peningkatan Wajah Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pemogohan dan pemogohan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemogohan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, serta integrasi layanan masyarakat melalui apas, budaya, dan kearifan lokal;
 - 2) Penguatan pembangunan kesehatan, terutama melalui peningkatan gizi, bayi dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemenuhan tenaga kesehatan, pemogohan kompetensi tenaga kesehatan, pemogohan perlindungan kesehatan Masyarakat bagi masyarakat dan tingkat kewaspadaan nasional, serta penyelenggaraan kerja keluarga;
 - 3) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemenuhan pemogohan, pemenuhan hak anak, pemogohan tertolong ketahanan pemogohan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu, ketahanan ketahanan pemogohan dan anak; dan
 - 4) Pembangunan kewirausahaan berdaya tanggap 3 pilar pemogohan kesehatan produktif, pemogohan kualitas penduduk, pemogohan keluarga, pemenuhan pemogohan dan pemogohan melalui produktif, dan pemenuhan administrasi kewirausahaan.

2. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta penguatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, dengan fokus pada:
 - 1) Penguatan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan inovatif, antara pelayanan publik yang terkait, open government melalui perkotaan berkeadilan, inovasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) Penguatan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pemerintahan berbasis kinerja, penguatan proses pemerintahan, penganggaran, pemerintahan dan evaluasi secara terpadu berbasis akuntabel, penguatan internal secara bertahap melalui upaya target indikator kinerja organisasi dan individu dan anggaran sebagai dasar dalam perbaikan besaran target kinerja, serta mendukung implementasi kebijakan penguatan sistem anggaran internal internal;
 - 3) Perwujudan efisiensi keberdayaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis secara terintegrasi tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada penerapan literasi dan literasi, serta optimalisasi pola proses bisnis pemerintah daerah;
 - 4) Penguatan kondusifitas wilayah melalui reformasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualitas, dan keberagaman termasuk perlindungan publik kepada seluruh lapisan masyarakat usia dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminalitas;
 - 5) Penguatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistik, dan kondusif melalui optimalisasi perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengalokasian dana transfer, dan penguatan peran BUMD.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2020-2025 dan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 serta permasalahan dan isu strategis pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam Bab 3, maka pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2023 diarahkan pada Tema "Mewujudkan Kabupaten Bandung yang gemilang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintahan daerah, kualitas infrastruktur, dan pengurangan lingkungan hidup dengan dibukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien".

Selaras dengan tema pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Nasional tahun "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" maka diadopsi penyusunan tema pembangunan daerah yaitu "Penerapan Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia" dengan referensi pada program dan kegiatan yang terdapat di mitigasi dampak lingkungan, (ii) mitigasi dampak sosial dan ekonomi, serta (iii) langkah-langkah recovery ekonomi dan sosial sebagai respon pasca bencana Covid-19. Prioritas RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan;

4. Peningkatan Perencanaan dengan Membring Forward Dunia Usaha.
5. Pematapan Kualitas Infrastruktur Dasar.
6. Pematapan Kualitas Lingkungan Hidup.
7. Peningkatan Pergerakan Angka Kreditasi.
8. Pematapan Tingkat Pengawasan Terbuka, dan
9. Peningkatan Kemandirian Desa.

Penjelasan prioritas RPMD tahun 2023 dan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, RPMD Kabupaten Semarang Tahun 2023-2028 dan arah kebijakan RPMD Kabupaten Semarang 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pematapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;

Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai lini. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, baik dari segi sumber daya manusia, maupun keterbatasan anggaran. Program kualitas tatakelola pemerintahan sudah diperlukan guna mendukung Reformasi Birokrasi, pengantar untuk *smart city*, dan Inovasi Daerah.

Reformasi birokrasi sudah mencapai nilai nasional. Beberapa hal yang sudah dicapai dalam implementasi Reformasi Birokrasi melalui Nilai SAPF sudah di dapatkan 64,15 tahun 2022 dan Indeks Moral Mayor tahun 2022 sebesar 210,5. Upan BPR atau LAPU sudah mencapai NTP namun secara kualitas masih perlu mendapat perhatian.

Indeks Natas Pemerintahan, Berbasis Kinerja (Indeks BPRK) sudah mencapai 5,19 pada tahun 2022. Indeks Pelayanan publik tahun 2022 sebesar 1,27. Upan Pematapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui strategi:

- a) Peningkatan kualitas manajemen kinerja;
- b) Peningkatan kualitas pemerintahan, pelayanan, regulasi indikator kinerja dan evaluasi pembangunan daerah;
- c) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan memastikan setiap anggaran yang dilaksanakan tepat sasaran;
- d) Penguatan penguasaan penyelenggaraan pemerintah;
- e) Penguatan implementasi manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja;
- f) Penguatan integrasi aplikasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- g) Penguatan kebijakan pelayanan;
- h) Peningkatan profesionalisme ASN;
- i) Pemecahan sistem pelayanan pelayanan publik;
- j) Penyediaan layanan konsultasi dan peradilan;
- k) Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai pematapan kualitas tata kelola pemerintahan dengan melaksanakan Program Unggulan Digitalisasi Birokrasi dan Semarang Smart City (Peraturan Mayor 41 Tahun 2021 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Semarang tahun 2021-2026). Digitalisasi birokrasi merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan berbasis Informatika Technology (IT). Sedangkan Semarang smart city (Kota Pintar berbasis IT) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis IT.

Mendukungnya masterplan smart city Kabupaten Semarang, Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Semarang telah memulai aplikasi Semarang

smart city berbasis android, dalam aplikasi tersebut akan memfasilitasi pelayanan kesehatan di RS, Puskesmas, pelayanan PERS, informasi dan pelayanan penanaman modal, pelayanan PLN, PDAM, dll. Rencananya aplikasi tersebut akan diluncurkan pada Bulan Juli tahun 2022.

Dari sisi pelayanan publik juga terdapat upaya pemantapan tata kelola pemerintahan salah satunya melalui program MANTAN TERPADU (Mencatatkan Nilai Tertinggi dan Mudah) merupakan inovasi Program Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dimulai dari validasi data kependudukan, pendaftaran nikah, berbagai pernikahan, pelaksanaan pernikahan dan perubahan data kependudukan setelah menikah, serta pemantauan peningkatan kualitas keluarga sakinah.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 7,41 dan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,13. Rincian tersebut masih dibawah Provinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan kualitas Pendidikan melalui strategi:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
- b) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik serta kebermanan atau lembaga pendidikan negeri dan swasta;
- c) Peningkatan kualitas dan distribusi sarana dan sarana pendidikan;
- d) Peningkatan kualitas pengajaran, pelaksanaan nilai, kebijakan dan keteguhan budaya; dan
- e) Peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan budaya baru masyarakat.

Untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan dengan melaksanakan Program Unggulan Derasmanis dan Derasguru. Derasmanis merupakan salah satu program di bidang pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu. Derasguru merupakan salah satu program di bidang pendidikan yang dilaksanakan kepada tenaga kependidikan, sebagai metode yang dilakukan adalah dengan menjadikan guru-guru berprestasi sebagai tutor dan pendamping sebaya pada tenaga pendidik lainnya.

Dalam penanganan anak putus sekolah Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki "Program Cuspal 12" (Ratakan Anak Sekolah 12 Tahun). Dan pd merupakan inovasi pelayanan publik di bidang Pendidikan yang masih percontohan dilakukan atas dasar "jangan sampai ada anak di usia sekolah jenjang usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah". Upaya yang dilakukan mulai dari memberikan layanan masyarakat yang peduli pendidikan, melakukan pendataan anak putus sekolah, anak tidak naik kelas dan anak putus sekolah sampai dengan memberikan subsidi agar anak-anak tidak bersekolah tersebut dapat kembali mengenyam pendidikan dasar baik dan sekolah formal maupun kejuruan. Hingga Desember 2022 tercatat sudah ada 157 anak yang kembali bersekolah.

Selain program-program tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah berfokus akan memberikan subsidi kepada PCNU Bantul pada Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 4,3 M untuk mendirikan Sekolah Tinggi NU Bantul. Dengan besarnya anggaran tinggi di Bantul diharapkan akan meningkatkan Indeks Kualitas Manusia (IQM) di Kabupaten Bantul.

Salahsatu upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan

kuantitas dan kualitas PKBM. Diaksanakan melalui:

- a) Meningkatkan indeks pentingnya pendidikan baik formal dan non formal kepada masyarakat;
- b) Meningkatkan pendidikan masyarakat, pengkajian pendidikan non formal;
- c) Meningkatkan kualitas profil dan image kependidikan serta sarana dan prasarana di PKBM.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan:

Angka Harapan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2012 sebesar 74,48, kondisi tersebut sudah diatas Provinsi Jawa Tengah yang rata-ratanya sebesar 74,17. Upaya peningkatan kualitas kesehatan melalui strategi:

- a) Peningkatan pelayanan kesehatan berupa cakupan kesehatan umum; dan
- b) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk menunjang peningkatan kualitas kesehatan dengan melaksanakan Program Unggulan Proroganan Kesehatan Masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara online dan pelayanan berbasis warga atau home care.

Pelayanan kesehatan secara online dilakukan melalui penerapan Aplikasi ANJUNO Aplikasi Rujukan Online RSUD dr. B. Sutrisno, Aplikasi E-KEMH atau Aplikasi Antrian RSUD dr. B. Sutrisno sebagai akses untuk menyalurkan antrian secara online bagi calon pasien yang ingin berobat ke RSUD dr. B. Sutrisno Rembang. Selain berbasis teknologi informasi (TI) RSUD dr. B. Sutrisno Rembang juga melakukan transformasi layanan dalam bidang transportasi yaitu melalui nomor 08-081 atau 081-081 atau 081-081 merupakan layanan pengantaran pulang pasien pasca perawatan dari RSUD dr. B. Sutrisno Rembang tanpa dipangil biaya gratis.

Sedangkan pelayanan berbasis warga atau Homecare dilakukan melalui penerapan Telponi (Telepono LaPORA - open) dengan tujuan untuk memonitoring AKI dan AKB. Kegiatan TELPONI bukan hanya sebagai sistem pemantauan AKI-AKB tetapi dikembangkan lebih luas untuk pelayanan kesehatan, antara lain: pemantauan gas buang, standing, penanganan kasus penyakit kronis dan peningkatan kesehatan lingkungan, dll. Selain Telponi juga terdapat beberapa program lainnya yaitu program Raga-rintang Gerakan Keluarga Cegah Stunting yang merupakan upaya pencegahan penanganan stunting berbasis pedukuatan dan pendampingan keluarga, yang dipelopori oleh PKK (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) bekerjasama dengan TP-PKK (Tim Program Promosi Kesehatan Keluarga, Program REMAS GUNTING) adalah kegiatan yang dipelopori oleh remaja yang berasal dari desa dalam stunting khususnya untuk melakukan pencegahan stunting melalui edukasi kepada remaja dan kepada keluarganya. Remaja akan mengajak remaja lainnya agar ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan remaja. Selanjutnya juga ada program GEMARISAN Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang merupakan upaya sistematis dan terencana di Kabupaten Rembang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Perikanan Kabupaten Rembang Dalam rangka mendukung penanganan stunting di Kabupaten Rembang.

Selain program dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, program kesehatan lingkungan juga penting dilaksanakan, salah satu kegiatannya adalah "Tayang Air" (gerakan nggantung barang nggendak air

kemampuan sebagai (p3k2); pemberian
variasi bantuan selain tunai dan tabung.

4. Peningkatan Perencanaan dengan Mendukung Pemulihan Daya Usaha.

Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 sebesar 1,87%, Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sebesar 1,13%, Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,88 %, Pertumbuhan PDRB sektor Produksi Pertambangan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 18,31%, Pertumbuhan Bisnis Perikanan Melayu/kerasul sebesar 18,32%. Upaya peningkatan perencanaan melalui strategi:

- a) Peningkatan produktivitas pertanian serta produktivitas perikanan;
- b) Peningkatan, pengembangan dan peningkatan daya saing industri termasuk pengujian kelayakan usaha serta daya saing UMKM dan Export;
- c) Peningkatan proses dagang, berjalannya dengan lancar pemasok dan penyediaan sarana distribusi perdagangan sesuai RQ;
- d) Peningkatan daya saing dan nilai tambah pertanian, dan
- e) Peningkatan iklim usaha dan peningkatan investasi sebagai upaya optimalisasi produktivitas asli daerah.

Untuk memfasilitasi peningkatan perencanaan dengan melaksanakan Rencana, Program Unggulan Peningkatan Daya Saing Komoditi Unggulan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pertambangan, Peningkatan daya saing komoditi unggulan dilakukan melalui pencapaian branding yang baik pada produk komoditas lokal dan penyediaan produk komoditas dengan kualitas terbaik (proses serta dan checking).

Selain, Program Unggulan Peningkatan Tera Katalis dan Sarana Prasarana Pasar Tradisional melalui perubahan modernisasi Pasar Tradisional menjadi tempat belanja yang ramah pejalan kaki dan penyediaan Pasar Reruang Online yang memfasilitasi masyarakat melakukan pembelian online tanpa harus datang ke pasar dan berbantuan.

Salah satu bentuk program smart city dalam mendukung perkembangan Kabupaten Kuning adalah melalui Aplikasi SI PLMA (Sistem Informasi Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maju). Aplikasi SI PLMA merupakan salah satu bagian smart government khususnya dalam mendukung smart economy. Dimana dalam aplikasi SI PLMA tersedia tiga layanan utama yakni Pertama Layanan Regulasi Hilang yang memfasilitasikan pada layanan ipa secara mudah melalui online serta Nomor Induk Berusaha (NIB) Pengan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal hingga Hak Atas Kekayaan Intelektual). Kedua Layanan Pelatihan UMKM berupa berbagai pelatihan yang diberikan oleh dinas ataupun kebutuhan pelatihan yang disediakan oleh pelaku UMKM dan Briga Halal UMKM merupakan media berjualan dan arah dari pelaku UMKM dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Kuning tahun Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Kabupaten Kuning tahun 2022 sebesar 80,76 dan Indeks Kapasitas sebesar 40,63. Upaya pemertapan kualitas infrastruktur daerah melalui strategi:

- a) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
- b) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air

- mineral, nutrisi dan jaringan seluler,
- a) Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan pengolahan air;
- b) Peningkatan kualitas pemenuhan tata ruang, pemukiman ruang dan pengolahan pemukiman ruang;
- c) Peningkatan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta menerapkan prinsip-prinsip standar gedung hijau dan baik bagi pada bangunan;
- d) Peningkatan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan transportasi, dan
- e) Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung smart city.

Untuk mewujudkan pemenuhan kualitas infrastruktur daerah dengan melaksanakan Program Unggulan Pembangunan Gedung, Normalisasi Sungai, dan Program Ketertarikan Air, Pembangunan Gedung, Normalisasi Sungai, dan Program Ketertarikan Air dilakukan dengan pemenuhan volume dan sistem pemenuhan air dan dilakukan pemeliharaan dan penghapusan kawasan resapan air.

6. Pemenuhan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air Kabupaten Brenggong tahun 2022 sebesar 82,3%, Indeks Kualitas Udara tahun sebesar 99,23% dan Indeks Kualitas Tatanan Lahan Tahun 2022 sebesar 48,78%. Upaya pemenuhan kualitas lingkungan hidup melalui strategi:

- a) Peningkatan pemenuhan, pemeliharaan dan pengendalian pemenuhan lingkungan guna peningkatan kualitas air dan udara melalui pemeliharaan pemukiman dan masyarakat;
- b) Peningkatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi sumber daya alam melalui konservasi sungai, konservasi air dan peningkatan kualitas lahan;
- c) Peningkatan persiapan sampah melalui pengurangan sampah dari sumbernya, pemeliharaan bank sampah hingga RT serta pengalihan nilai sampah dengan sistem control sampah layak.

Untuk mewujudkan pemenuhan kualitas lingkungan hidup dengan melaksanakan Program Unggulan Peningkatan Infrastruktur dan Pemukiman RTN di Setiap Kecamatan, Pemukiman Ruang Terbuka Hijau (RTN) secara merata di setiap kecamatan sebagai sumber alam yang menjadi lingkungan.

7. Percepatan Pemenuhan Angka Kemiskinan

Pemenuhan Produkut Miskin Kabupaten Brenggong tahun 2022 sebesar 14,65%, Indeks Ketahanan Kemiskinan (PK) Kabupaten Brenggong tahun 2022 sebesar 1,41, Indeks Kapasitas Kemiskinan (PK) Kabupaten Brenggong tahun 2022 sebesar 0,598. Upaya percepatan pemenuhan angka kemiskinan melalui strategi:

- a) Peningkatan upaya peningkatan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penerima pelayanan kesejahteraan sosial (PKS) dan masyarakat miskin; dan
- b) Penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau.

Untuk mewujudkan percepatan pemenuhan angka kemiskinan dengan melaksanakan Program Rerampingan Gerakan Gerbang Gerakan Brenggong Cerdas, Sehat, dan Berkelanjutan merupakan inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Produk Brenggong dalam rangka percepatan pemenuhan kemiskinan. Konsep Gerakan Gerbang dilakukan dengan cara

menentukan kebijakan-kebijakan yang ada pada OPD untuk lebih mengarahkan sasaran kebijakannya pada penanggulangan kemiskinan. Tingkat I sama dalam SEMANDIRI GUSMANO GEMILANG

- a. Satu Data Kemiskinan (Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data penduduk miskin di Kab. Bantul, yang dilengkapinya terdapat informasi system kualitas seperti indikator-indikator terkait kelangkaan kemiskinan untuk masing-masing individu dan rumah tangga.)
- b. Bantuan (Basis informasi terkait program bantuan yang telah dilaksanakan oleh OPD dengan jumlah anggaran seperti system bantuan sasaran prioritas program tersebut, dimana akan terdapat apakah termasuk dalam data penduduk miskin atau tidak)
- c. Pantau Wang Mula (Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi internal OPD baik OPD Pendamping dan OPD Intervensi) dalam rangka memantau penduduk miskin terdapat berdasarkan 9 indikator penanganan kemiskinan ekstrem)

Evaluasi program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sampai pada tingkat, sebagai contoh : pemberian bantuan tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi bagi siswa tidak mampu, pemenuhan jatahan program pada Rumah Tangga yang belum memenuhi atau air minum layak, serta pengalokasian jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Perbaikan data dilakukan melalui inventarisasi secara desa terkait aspek ekonomi, lingkungan/infrastruktur dan sosial. Terkait karakteristik masyarakat miskin perlu dikemas/terdapat dalam masyarakat desa untuk mendapatkan verifikasi dan validasi atas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari berbagai pihak yang terdapat dalam forum musaba.

Semula indikator Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) pada level Pantau Wang Mula terdiri dari Pemenuhan Air Minum Layak, Pemenuhan Santan, Pangan Disabilitas, Penyakit Kronis, Pengembangan Anak Tidak Sekolah, Pemenuhan NTLH, Bantuan kepada Lansia, Lili Skil, dan Hunting. Dimana proses penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sudah diintegrasikan dengan berbagai level penanganan, diantaranya: TELPON KAMALIA MURKHAH, RADASANTINO, CASPOL 12, Pemenuhan NTLH, Pangan Disabilitas, ISTRI MANTAP hingga Pemenuhan Air Air Minum dan Santan bagi Masyarakat Penghasilan Rendah. Melalui kemitraan berbagai aspek termasuk baik dari Pendidikan, Kesehatan, pemukiman dan perumahan, kepemilikan hingga lingkungan diharapkan dapat mewujudkan percepatan kemiskinan. Kabupaten Bantul juga sudah melaksanakan pilot-projecting serta desa satu OPD di desa percontohan sejak tahun 2018 ditetapkan dengan SK Bupati Bantul (SK 658/1558/2017), SK 050/1471/2018 dan SK 050/1909/2022 (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem).

6. Peningkatan Tingkat Pengangguran:

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 1,76, kondisi tersebut dibawah Provinsi Jawa Tengah. Upaya penurunan tingkat pengangguran melalui strategi : perbaikan lapangan kerja, kemampuan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pembinaan kewirausahaan.

Untuk pencapaian penurunan tingkat pengangguran dengan melaksanakan Program Unggulan Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk Peningkatan Lapangan Kerja Mandiri, Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk peningkatan lapangan kerja mandiri merupakan upaya dalam

mampu mempersiapkan tenaga kerja tingkat teknis dan profesional yang berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dan peluang kerja baik di dalam maupun diluar negeri.

Kabupaten Rembang memiliki komitmen pelayanan kemudahan berinvestasi, sehingga dampaknya banyak perusahaan yang melakukan investasi di Rembang, masalahnya telah terdapat 2 (dua) pabrik sepatu dan pabrik tas telah menyerap sejumlah 4.400 orang tenaga kerja, dan masih membutuhkan sekitar 4.000 tenaga kerja. Ditargetkan kesempatan banyak pabrik di Rembang bisa menyerap dan pengangguran sehingga pemenuhan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang.

9. Percepatan Kemandirian Desa

Percepatan Desa bertaraf Maju dan Mandiri Kabupaten Rembang tahun 2022 sebesar 26,3%. Dengan pemenuhan Indeks Desa Membanguan Tahun 2022 sebesar 0,704 yang menunjukkan bahwa kondisi desa di Kabupaten Rembang cenderung pada tahap Desa Berkembang range 0,549 dan < 0,707). Upaya percepatan kemandirian desa melalui strategi :

- a) Peningkatan kualitas pelayanan oleh komunitas dengan memperbaiki pelayanan administrasi terpadu kecamatan,
- b) Peningkatan ketahanan bencana melalui peningkatan pengetahuan dan pengujian desa wisata berbasis kawasan sehingga mampu meningkatkan ketajirannya masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi serta ketahanan pangan.

Untuk mempercepat percepatan kemandirian desa dengan melaksanakan Program Unggulan Penguatan Desa Wisata (D/W) dan Pedesaan Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera. Penguatan Destinasi Wisata dan Pedesaan Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera dilakukan melalui Program Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik.

Salah satu upaya percepatan kemandirian desa di Kabupaten Rembang dilakukan melalui program DUBUCUMA di-KOOPAK - Strategi Pengembangan saat ini PPM Mandiri (PPM-MPC), yang merupakan perubahan baru pengujian saat ini PPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Rembang melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan berupaya jadi transparansi, kelengkapan pada orang miskin, peluang partisipasi masyarakat dan memperbaiki ketahanan pangan.

Selanjutnya kegiatan perencanaan prioritas Kabupaten Rembang dengan prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dengan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada. Berikut tabel perencanaan prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4
Perbandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang Tahun 2022

1 Prioritas Nasional	4 Prioritas Provinsi	8 Prioritas Kab.
1. Mempertahankan ketahanan nasional sosial, pertahanan yang berkelanjutan dan lingkungan, serta ketahanan pangan	1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan diversifikasi ketahanan lingkungan hidup dan pemenuhan ketahanan pangan	1. Peningkatan Perencanaan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kemiskinan dan pengapungan Pedesaan	2. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengapungan, yang juga melibatkan aspek lingkungan	7. Percepatan Pemenuhan Angka Kemiskinan 8. Pemenuhan Target Programatik Tertentu

1 Prioritas Nasional	4 Prioritas Provinsi	9 Prioritas Kota
	1. Kebijakan penganggulangan kemiskinan (PKK)	1. Percepatan Kemiskinan Ultra
2. Menurunkan tingkat Dana Manula yang berkeadilan dan berdaya guna	2. Peningkatan kualitas hidup dan kesehatan melalui daya kesehatan melalui PKK berdaya guna	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
4. Revitalisasi Rural dan Pembangunan Wilayah		3. Peningkatan Kualitas Kesehatan
3. Meningkatkan kesejahteraan anak mandul yang terdampak bencana dan Masyarakat desa	3. Menetapkan pemerintahan dan pelayanan khusus dengan memperhatikan keterbatasan lingkungan hidup dan pemenuhan kebutuhan khusus	5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
5. Meningkatkan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan kota		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan transformasi pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kota pemerintahan yang baik dan layak, berkualitas wilayah, serta pemenuhan kebutuhan dan kesehatan diri daerah	1. Peningkatan Kualitas Tata Kota Pemerintahan

Selain prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah, prioritas pembangunan Kabupaten Bontang juga memperhatikan potensi pengembangan wilayah. Dimana Kabupaten Bontang memiliki potensi pengembangan yang terbagi dalam tiga wilayah pengembangan, yakni wilayah utara/pesisir, wilayah tengah/dataran rendah, dan wilayah selatan/berbukit. Wilayah utara/pesisir terdiri dari desa (1) komunitas yang memiliki potensi pertanian lengkap, perikanan budidaya, pertambangan garam, mangrove, pengembangan perikanan perikanan, pengembangan perikanan umum, pariwisata dan daya budaya serta kesehatan. Wilayah tengah/dataran rendah terdiri dari desa (2) komunitas yang memiliki potensi pengembangan pertanian, kesehatan, perikanan, industri berbasis pertanian dan kesehatan. Sedangkan wilayah selatan/berbukit terdiri dari tiga (3) komunitas memiliki potensi pengembangan kehutanan, pertambangan, dan pariwisata.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bontang juga terbagi atas beberapa lokasi prioritas seperti pengembangan kawasan strategis yang utamanya dibina di Kecamatan Bontang, Kecamatan Lemo, dan Kecamatan Puaran. Pengembangan kawasan unggulan pertanian, perikanan, perikanan dan Pengembangan kawasan lokal berbasis kawasan perikanan melalui Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PTPAD) yang mana program ini telah berhasil mengembangkan Kawasan Wisata Bahis Lemo yang dikelola oleh Pertanian dan Perikanan. Dengan itu pemerintah Kabupaten Bontang memiliki tiga (3) pengembangan kawasan perikanan yaitu kawasan perikanan Air Tawar Molo, Kawasan Senturan dan Kawasan Karang Argoso.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bontang tahun 2023 merupakan upaya guna mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah. Prinsip-prinsip sasaran prioritas pembangunan dirumuskan dalam Indikator Makro, Target Indikator Indikator Kinerja Utama Daerah dan Target Indikator Kinerja Utama Daerah.

Target sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Bontang 2023 mendukung pencapaian sasaran RKP 2023 yang dibuktikan penguasaan terkait rencana GMD 18. Perwujudan Subsektor RPJPD Kabupaten Bontang

2022 dengan target makro pembangunan nasional dalam RPJ 2020, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perbandingan Target Makro Sektor Pembangunan Nasional 2022 dengan Target Makro RPJPD Kabupaten Kebang 2022

No	Sektor Makro RPJPD 2020-2024	Target	Sektor Makro RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2021-2025	Target	Sektor Makro Kabupaten Kebang	Target	
						Nilai	Perubahan
1	Infrastruktur	8,8%	Infrastruktur	8,00 - 8,80	Infrastruktur	4.124,43	4.124,43%
2	Manusia dan Sumber Daya	8,80%	Manusia dan Sumber Daya	8,00 - 8,80%	Manusia dan Sumber Daya	14,70	14,70(16,37)
3	Target Pembangunan Manusia dan Sumber Daya	8,8%	Target Pembangunan Manusia dan Sumber Daya	8,00 - 8,80%	Target Pembangunan Manusia dan Sumber Daya	4.067,430	4,067,430%
4	Indeks Pembangunan Manusia	74,77	Indeks Pembangunan Manusia	72,77	Indeks Pembangunan Manusia	71,20	71,20(71,20)

Berdasarkan hasil analisis pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Kebang selama Tahun 2022, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis internal dan eksternal yang akan dihadapi Kabupaten Kebang pada Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kebang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6
Target Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Nilai	Target Kinerja 2023	
			Nilai 2022	Perubahan 2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Target	52	52
2	Indeks Pembangunan Manusia	Target	71,20(71,20)	71,20(71,20)
3	Indeks Literasi	Target	60,00	60,00
4	Kelembutan Layanan	Target	4,20(4,20)	4,20(4,20)
5	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup (IKLH)	Target	60,00	60,00
6	Target Kesehatan	Target	14,20(14,20)	14,20(14,20)
7	Indeks Desa Membangun 2020	Target	0,71	0,71

Sebagainya untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Kebang sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No.	Aspek/Tujuan/Indikator Utama / Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Metode	Target Kinerja 2023	Jenis Indikator	Penyakit Daerah Sasar/Indikator
1	2	3	4	5	6
4	Aspek Penyelenggaraan Masyarakat				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,20 - 71,41	Indikator Tujuan Kabupaten	Kabupaten
2	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	69,00	Indikator Tujuan Kabupaten	Kabupaten
3	Persentase Rataan	Angka	4,30 - 4,40	Indikator Tujuan Kabupaten	Kabupaten
4	Angka Kemiskinan	Angka	14,10 - 13,90	Indikator Tujuan Kabupaten	Kabupaten
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69,40	Indikator Tujuan Kabupaten	Kabupaten
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	6,70	Indikator Tujuan Kabupaten	Kabupaten
7	Kelembagaan Desa Berkah (KDB)	Angka	7,20	Indikator Sasaran Kabupaten	Kabupaten
8	Kelembagaan Desa Berkah (KDB)	Angka	12,00	Indikator Sasaran Kabupaten	
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	74,7	Indikator Sasaran Kabupaten	Angka
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	81,41	Indikator Sasaran Kabupaten	Angka/IPG
11	Indeks Masyarakat Industri (IMI)	Angka	81,81	Indikator Sasaran Kabupaten	IPG/IMI
12	Indeks Kesehatan	Angka	26,10	Indikator Sasaran Kabupaten	Angka
13	Persentase PDRD atau PDRD Kabupaten dan Provinsi	%	1,1	Indikator Sasaran Kabupaten	Angka/Indikator
14	Persentase PDRD atau PDRD Kabupaten	%	1	Indikator Sasaran Kabupaten	Angka/Indikator
15	Persentase PDRD atau PDRD Kabupaten dan Provinsi, Daerah, MDA dan Daerah MDA	%	1	Indikator Sasaran Kabupaten	Angka/Indikator
16	Persentase PDRD Provinsi/Provinsi	%	1	Indikator Sasaran Kabupaten	Angka/Indikator

No.	Aspek/Tujuan/Indikator Utama / Indikator Kinerja Pengaruh Daerah	Indikator	Tujuan Kinerja	Area Indikator	Pengikat Budget Sasaran
			SKPD		
11	Perencanaan wilayah pemerintahan lokal	Ya	4,21	Indikator Kinerja Kelengkapan	1000000
12	Indeks ketahanan masyarakat (IK)	Angka	3,3	Indikator Kinerja Kelengkapan	10000000
13	Angka Pengangguran Terbuka	Ya	1,00 - 1,40	Indikator Kinerja Kelengkapan	100000000
14	Perencanaan, Promosi dan Kampanye Pemerintahan yang baik dan benar	Ya	90,11	Indikator Kinerja Kelengkapan	10000
15	Indeks kualitas air	Angka	50	Indikator Kinerja Kelengkapan	1000
16	Indeks kualitas udara	Angka	60	Indikator Kinerja Kelengkapan	
17	Indeks kualitas limbah	Angka	60,40	Indikator Kinerja Kelengkapan	
18	Perencanaan dan implementasi upaya dan prosedur	Ya	10,0	Indikator Kinerja Kelengkapan	100000000
B. Aspek Pelayanan Umum					
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1.01. Pendidikan					
	Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar, SMP/SLTP	Angka	97,00	Indikator Kinerja SKPD	10000000
	Rasio Capaian Standar Nasional Pendidikan	Angka	71,00	Indikator Kinerja SKPD	
1.02. Kesehatan					
	Indeks Kelangkaan Obat	Angka	0,01	Indikator Kinerja SKPD	10000
	Salinitas	Angka	Partisipasi	Indikator Kinerja SKPD	10000
	Capaian SKN	Ya	60	Indikator Kinerja SKPD	
1.03. Pelayanan Umum dan Pemukiman Ruang					
	Indeks aksesibilitas jalan	Angka	0,40	Indikator Kinerja SKPD	1000000
	Indeks aksesibilitas Layanan Dasar	Angka	10,00	Indikator Kinerja SKPD	
	Perencanaan pembangunan Air Bersih	Ya	60	Indikator Kinerja SKPD	
	Perencanaan Capaian Perwujudan Program Air Bersih Perumahan	Ya	0	Indikator Kinerja SKPD	

No.	Aspek/Tujuan/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Prasyarat Dasar	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Prasyarat Kinerja
			2023		
	Memperolehkan Bantuan Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100	Indikator Kinerja IKPI	
1.04	Pertumbuhan dan Kesehatan Perikanan				
	Memperolehkan Bantuan Tenaga yang Memiliki MIPA Terutama MIPA (yang layak)	%	100	Indikator Kinerja IKPI	IKPI
	Perbaikan Keterampilan Pemula dan remaja (PMK) Perikanan dan Kesehatan Perikanan	%	100	Indikator Kinerja IKPI	
1.05	Keterlaksanaan dan Keberhasilan Usaha Berke-Perdagangan Masyarakat				
	Salah satu aspek	angka	100	Indikator Kinerja IKPI	Salah satu
	Salah satu indikator lainnya	angka	100	Indikator Kinerja IKPI	Salah satu
1.06	Sosial				
	Pendidikan masyarakat (PK)	%	100	Indikator Kinerja IKPI	Salah satu
	Perawatan Perikanan Warga MUDA (MUDA 2)	%	100	Indikator Kinerja IKPI	
B	Usaha yang Bukan Pelayanan Dasar				
2.01	Tenaga Kerja				
	Perbaikan Perencanaan Anggaran Tenaga Kerja Lokal	%	1	Indikator Kinerja IKPI	Salah satu
2.02	Pembelajaran Peningkatan dan Penguasaan Skill				
	PK	angka	100	Indikator Kinerja IKPI	Salah satu
	Capaian Kompetensi Lokal Aspek	angka	100	Indikator Kinerja IKPI	
2.03	Pangan				
	Memperolehkan Dana HHT (Pola Pangan Harapan)	%	100	Indikator Kinerja IKPI	Salah satu
2.04	Pertanian				

No.	Aspek/Tujuan/Nilai-nilai Utama / Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Jenis Indikator	Penyakit Rantai Indikator
	Penyediaan Perumahan Perumahan Fasilitas Perumahan Perumahan	%	4,74	Indikator Kinerja SKPD	UPH
1.01	Lingkungan Hidup				
	Perawatan Perumahan PA	%	1,41	Indikator Kinerja SKPD	KCI
	Perawatan Perumahan PA	%	0	Indikator Kinerja SKPD	
	Perawatan Perumahan Lain	%	0,0	Indikator Kinerja SKPD	
	Indeks Perumahan Sehat	angka	40	Indikator Kinerja SKPD	
1.02	Kepedulian Reproduksi Dan Perawatan Bayi				
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	angka	80	Indikator Kinerja SKPD	Indikator
1.03	Pertumbuhan Masyarakat Dan Desa				
	Perentase Kebutuhan Perumahan All Area termasuk Perumahan Desa	%	1,3	Indikator Kinerja SKPD	Pengembangan
	Waktu Baru dan Lama Perumahan Desa	angka	10	Indikator Kinerja SKPD	
1.04	Pengendalian Produksi Dan Kelangkaan Berencana				
	TPA	angka	1,1	Indikator Kinerja SKPD	Indikator
1.05	Perencanaan				
	Indeks Perencanaan Ketertarikan Penganggaran Jalan	angka	11,00	Indikator Kinerja SKPD	Indikator
	Indeks Perencanaan Perawatan Angkutan	angka	11,44	Indikator Kinerja SKPD	
	Indeks Perencanaan Penyelenggaraan Lahan	angka	10,00	Indikator Kinerja SKPD	
1.10	Kepedulian Dan Informasinya				
	Indeks Kepedulian	angka	1,00	Indikator Kinerja SKPD	Indikator
	Indeks Tata Ruang	angka	1,00	Indikator Kinerja SKPD	
	Indeks Peringatan Masyarakat	angka	1,21	Indikator Kinerja SKPD	
	Indeks Layanan	angka	1,00	Indikator Kinerja SKPD	

No.	Aspek/Target/Indikator Utama / Indikator Kinerja Program/Devisi	Satuan	Target Kinerja 2019	Jenis Indikator	Pengukur Hasil Kinerja
1.11	Keuangan	rupia	10	Indikator Kinerja (IKP)	
	Indeks KEM	rupia	100	Indikator Kinerja (IKP)	Keuangan
1.12	Keperawatan, Keperawatan Anak, dan Manajerial				
1.13	Perencanaan Program Kerja	%	100	Indikator Kinerja (IKP)	Manajemen KM
	Perencanaan Keperawatan	%	100	Indikator Kinerja (IKP)	
1.14	Perencanaan Model				
	Perencanaan Model perawat (Model) Keperawatan	%	100	Indikator Kinerja (IKP)	Keperawatan
1.15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perawat dan non perawat	rupia	100	Indikator Kinerja (IKP)	
	Keperawatan dan Keluarga				
1.16	Indeks Perencanaan Perawatan	rupia	100	Indikator Kinerja (IKP)	Keperawatan
	Indeks Perencanaan Keluarga (IKK)	rupia	100	Indikator Kinerja (IKP)	
1.17	Kelembagaan				
1.18	Kelembagaan				
	Kelembagaan Kelembagaan Data Kelembagaan Kelembagaan	%	100	Indikator Kinerja (IKP)	Kelembagaan
1.19	Kelembagaan				
	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	%	1	Indikator Kinerja (IKP)	Kelembagaan
1.20	Kelembagaan				
1.21	Kelembagaan				
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keperawatan	rupia	100	Indikator Kinerja (IKP)	Keperawatan
1.22	Kelembagaan				
1.23	Kelembagaan				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	rupia	100	Indikator Kinerja (IKP)	Keperawatan
1.24	Kelembagaan				
1.25	Kelembagaan				
1.26	Kelembagaan				
1.27	Kelembagaan				
1.28	Kelembagaan				
1.29	Kelembagaan				
1.30	Kelembagaan				
1.31	Kelembagaan				
1.32	Kelembagaan				
1.33	Kelembagaan				
1.34	Kelembagaan				
1.35	Kelembagaan				
1.36	Kelembagaan				
1.37	Kelembagaan				
1.38	Kelembagaan				
1.39	Kelembagaan				
1.40	Kelembagaan				
1.41	Kelembagaan				
1.42	Kelembagaan				
1.43	Kelembagaan				
1.44	Kelembagaan				
1.45	Kelembagaan				
1.46	Kelembagaan				
1.47	Kelembagaan				
1.48	Kelembagaan				
1.49	Kelembagaan				
1.50	Kelembagaan				
1.51	Kelembagaan				
1.52	Kelembagaan				
1.53	Kelembagaan				
1.54	Kelembagaan				
1.55	Kelembagaan				
1.56	Kelembagaan				
1.57	Kelembagaan				
1.58	Kelembagaan				
1.59	Kelembagaan				
1.60	Kelembagaan				
1.61	Kelembagaan				
1.62	Kelembagaan				
1.63	Kelembagaan				
1.64	Kelembagaan				
1.65	Kelembagaan				
1.66	Kelembagaan				
1.67	Kelembagaan				
1.68	Kelembagaan				
1.69	Kelembagaan				
1.70	Kelembagaan				
1.71	Kelembagaan				
1.72	Kelembagaan				
1.73	Kelembagaan				
1.74	Kelembagaan				
1.75	Kelembagaan				
1.76	Kelembagaan				
1.77	Kelembagaan				
1.78	Kelembagaan				
1.79	Kelembagaan				
1.80	Kelembagaan				
1.81	Kelembagaan				
1.82	Kelembagaan				
1.83	Kelembagaan				
1.84	Kelembagaan				
1.85	Kelembagaan				
1.86	Kelembagaan				
1.87	Kelembagaan				
1.88	Kelembagaan				
1.89	Kelembagaan				
1.90	Kelembagaan				
1.91	Kelembagaan				
1.92	Kelembagaan				
1.93	Kelembagaan				
1.94	Kelembagaan				
1.95	Kelembagaan				
1.96	Kelembagaan				
1.97	Kelembagaan				
1.98	Kelembagaan				
1.99	Kelembagaan				
2.00	Kelembagaan				

No.	Aspek/Pada/Along (Garis / Indikator Kinerja Pemerintah Daerah)	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Panggung Jawab
			2023		
	Perencanaan Produk Inovasi	%	1	Indikator Kinerja IKPI	Struktur
3.03	Pemerolehan				
	Nilai Sahar Perolehan (per Laporan Tahun)	%	7,3 M	Indikator Kinerja IKPI	Struktur
3.04	Pertanian				
	Perencanaan Produk Inovasi	%	1	Indikator Kinerja IKPI	Struktur
3.04	Perdagangan				
	Kemudahan UMKM dalam Perdagangan	angka	1,00	Indikator Kinerja IKPI	Struktur/PM
3.05	Perindustrian				
	Survei UMKM dalam Industri	angka	5,10	Indikator Kinerja IKPI	Struktur
IV	Garis Pendukung Garis Kebijakan				
4.01	Sekretariat Daerah				
	Nilai Komitmen Pelayanan Kinerja dan IKPI Kabupaten	angka	11	Indikator Kinerja IKPI	Kebijakan
	Nilai Komitmen Capaian Kinerja dan IKPI Kabupaten	angka	11,3	Indikator Kinerja IKPI	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80	Indikator Kinerja IKPI	
	Persentase Indikator yang mendapat monitoring oleh pemerintah	%	100	Indikator Kinerja IKPI	
4.02	Sekretariat DPRD				
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	angka	80	Indikator Kinerja IKPI	Struktur
V	Garis Pendukung Garis Kebijakan				
5.01	Perencanaan				
	Indeks Kualitas Perencanaan	angka	4	Indikator Kinerja IKPI	Struktur
5.02	Kemampuan				
	Persentase Indeks pengabdian masyarakat	%	80,0	Indikator Kinerja IKPI	Struktur
	Indeks Pengabdian Masyarakat	angka	75,5	Indikator Kinerja IKPI	

No.	Aspek/Policy/Utang Strategis / Indikator Kinerja Peringkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Peringkat Daerah
			2019		
	Program P4D (Kebijakan Pembangunan Daerah)	%	100%	Indikator Anggaran APBD	
A.01	Keperencanaan				
	Indikator Pelaksanaan APN	Angka	92	Indikator Anggaran APBD	90%
A.02	Realisasi dan Pengendalian				
	Programas Hasil Utama yang Mendukung Prioritas	%	70	Indikator Anggaran APBD	Angka
B	Utang Program Utang Pemeliharaan				
B.01	Implementasi Daerah				
	Indikator Program Arah Strategis	Angka	91	Indikator Anggaran APBD	Angka
C	Utang Strategis				
C.01	Kemudahan				
	Indikator Representasi Masyarakat	Angka	81,8	Indikator Anggaran APBD	Kepercayaan or Kelengkapan Rancangan
D	Utang Pemeliharaan Utang				
D.01	Kontrol Biaya dan Politik				
	Indikator Ketahanan Nasional Dengan Mata Kebijakan/Strategis	Angka	2,00	Indikator Anggaran APBD	Manajemen
E.	Aspek Daya Saing				
1	Indikator Efisiensi Anggaran	Angka	93	Indikator Program Kelengkapan	Kelengkapan
2	Indikator APBD	Angka	73	Indikator Anggaran Kelengkapan	90%
3	Utang APBD dan APBD	Angka	97,9	Indikator Anggaran Kelengkapan	97,9%
4	Indikator Mutu Layanan	Angka	100	Indikator Anggaran Kelengkapan	98,1
5	Indikator APBD	Angka	9,10	Indikator Anggaran Kelengkapan	98,9%
6	Indikator Pelayanan Publik	Angka	2,1	Indikator Anggaran Kelengkapan	97,6%

Keterangan:

Aspek Keberhasilan Monev/audit

= 30 Indikator

Aspek Pelaksanaan Utama

= 67 Indikator

Aspek Daya Saing

= 6 Indikator

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2023, maka upaya penyebarluasan kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perencanaan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 yang memiliki strategi, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat diwujudkan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah yang sudah dilakukan sebelumnya, terkait bencana Covid-19. Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan pemetaan kerangka Misi RPJPD dengan Misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian dijabarkan menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bontang. Perencanaan kemudian dilakukan agar proses perencanaan memiliki sinergitas dengan dokumen perencanaan lainnya. Mengingat dalam perencanaan RPJPD Tahun 2023 ini merupakan tahun kedua dari RPJPD Kabupaten Bontang tahun 2021-2026.

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2023 diuraikan dalam 10 (sepuluh) fokus pembangunan/program Bupati Bontang, yaitu:

1. Digitalisasi Birokrasi & Bontang Smart City;
2. DamaDewa dan DamaDera (DamaDewa adalah Produktifitas yang berkualitas, terjangkau, dan berbasis standar mutu Pendidikan yang luas, Bontang DamaDera adalah peningkatan kualitas bagi pribadi; tutor kepala sekolah dan guru sebagai Terwujud di dalamnya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan Guru Tetap dan Guru Muda;
3. Penguatan Kesehatan Masyarakat;
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui Indeks Kesehatan Partisipasi;
5. Peningkatan Daya Saing Komunitas Unggulan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan;
6. Peningkatan Tata Kelola dan Supply Pasar Tradisional;
7. Pembangunan Lingkungan, Normalisasi Sungai dan Penguatan Ketahanan Air;
8. Peningkatan Infrastruktur Apresiasi RTM di setiap Kecamatan;
9. Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk Penguatan Lapangan Kerja Mandiri;
10. Penguatan Destinasi Wisata & Pelancongan sebagai Desa Mandiri dan Kabupaten.

Berikutnya rencana program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bontang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Revisi Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013

Basis/Program Pembangunan Daerah	Indikator Basis/Program	Target 2013	Tahun Pelaksanaan	Sumber Dana Pemanggang (Rend)
Basis 1: Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai NAKIP	75	Digitalisasi Sistem & Kelembagaaan Smart City	
	Capaian SPN	87%		
	Indeks Moral Pejabat	100		
	Indeks SPN	3,33		
Program Penguatan Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai NAKIP (Rend)	80,00		Rendus PD
RUM	81,00			
Program Penguatan, Pengembangan dan Reformasi Pembangunan Daerah	Peningkatan capaian indikator kinerja SPN-SPN	80		PD yang bertanggung jawab
	Peningkatan capaian indikator kinerja SPN dalam pelaksanaan pembangunan dan reformasi pembangunan daerah	81		
Program Sektoral dan Subsektor Penguatan Pembangunan Daerah	Rata-rata Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Infrastruktur dan Kelembagaan	74		PD yang bertanggung jawab
	Peningkatan capaian Penguatan Kelembagaan Infrastruktur dan Kelembagaan	75		
	Rata-rata Pelaksanaan Kelembagaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	74		
	Peningkatan capaian Penguatan Kelembagaan Kelembagaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	75		
	Rata-rata Nilai Penguatan Kelembagaan Kelembagaan dan RUM	76,70		
	Peningkatan capaian Kelembagaan Kelembagaan	75		

Rencana/Program Pembangunan Daerah	Indikator Rencana/ Program	Tingkat RTRW	Fokus Pembangunan	Pesaing Utama Pembangunan Daerah
Prestasi dan Pengembangan Daerah	Prestasi dan RTRW			PI yang membangun Bidang Prestasi dan Pengembangan
Program Pengembangan Daerah	Prestasi pembangunan dan dan Pengembangan	10		
Program Pengembangan Daerah	Prestasi pembangunan dan dan Pengembangan yang berkelanjutan	10		PI yang membangun Bidang Pengembangan
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW	10		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		
Program Pengembangan Daerah	N. Prestasi pembangunan RTRW dan Indikator Pengembangan	100		

Bidang/Program Pembangunan Daerah	Indikator Bidang/ Program	Tahun 2008	Nilai Pembangunan	Peserta/Beach Penanggung Jawab
Program Pembangunan dan Peningkatan Daya	% UPTD yang telah melaksanakan program	100		Beach
	% ARA yang Alami/berhasil dan Berhasil	100		PI yang bertanggung jawab
Program Bantuan Pengawasan Daya	% Pengawasan ARA yang Berhasil	100		
Program Peningkatan dan Keberhasilan Sektor	% Bantuan Sektor Kelautan yang sesuai indikator bidang Perikanan	100		PI yang bertanggung jawab Keberhasilan Daerah
	% Bantuan Sektor Kelautan yang sesuai indikator bidang Regenerasi Sektor	100		
	% Bantuan Sektor Kelautan yang sesuai indikator bidang Perikanan	100		
Program Peningkatan dan Peningkatan	% Bantuan Sektor Kelautan yang sesuai indikator bidang air	100		PI yang bertanggung jawab Keberhasilan Daerah
	% Bantuan Sektor Kelautan yang sesuai indikator bidang Perikanan	100		
	% Bantuan Sektor Kelautan yang sesuai indikator bidang Perikanan	100		
Program Peningkatan dan Peningkatan Sektor Kelautan / Air/Program Administrasi Limas				PI yang bertanggung jawab Keberhasilan Daerah
Program Peningkatan dan Peningkatan				PI yang bertanggung jawab

Nama/Program/Perencanaan Daerah	Indikator Sasaran/ Program	Target 2014	Fokus Penilaian	Ruang Lingkup Penanggung Jawab
Daerah Kabupaten / Kota /Program Kecamatan/ Desa Kelurahan (DPA) Sub/Unit	1. Program/Program Daerah Baku yang akan dilaksanakan (P) Jumlah Sarana/ Bahan/ Kegiatan yang sesuai indikator dalam Pelaksanaan Anggaran Real APBD (P) RM (P)	100 100 1		Kecamatan (P)
Program/ Subprogram/ Pelaksanaan/ Target dan Program (P)	1. Perencanaan program dan Subprogram Target dan Target (P) (Target Pelaksanaan/ P) 2. Perencanaan program/ Subprogram pelaksanaan Target dan Target (P) (Target Anggaran dan Pelaksanaan RPJ Lintas (P) yang melibatkan Target Pelaksanaan P) RPJ Lintas (P) yang melibatkan Target Anggaran dan Program	100 100 100 100		RP yang bertanggung jawab Kecamatan (P)
Program/ Kegiatan/ Kegiatan Daerah	1. Kegiatan/ Waktu/ Kegiatan/ P P 2. Kegiatan/ Waktu/ Kegiatan/ Target Rencana yang telah ditetapkan 3. Pelaksanaan (P) Anggaran sesuai RPJ dan Target Waktu 4. Pelaksanaan program/ Kegiatan pelaksanaan antara RP/ P, RP/ P, dan dan (P)	100 100 100 100		RP yang bertanggung jawab Kegiatan
Program/ Kegiatan/ Kegiatan/ RP/ P/ P	1. Program/ P/ P yang ditetapkan RP/ P, RP/ P, dan RP/ P	100		RP yang bertanggung jawab Kegiatan

Basis/Program Pembangunan Daerah	Indikator Basis/ Program	Target 2024	Sektor Pembangunan	Program Dasar Peninggalan Jarak
Program Pengembangan Program	% jumlah RT yang berkembang	10		RT yang terorganisir dalam lingkungan
	% rumah yang telah selesai pembangunan yang telah selesai pembangunan	80		
Program Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Fasilitas	% Peningkatan rumah yang telah selesai pembangunan	40		RT yang terorganisir dalam lingkungan
	Basis 2: Ketersediaan Fasilitas pelayanan publik	2,2	Digitalisasi Desa dan Rencana Smart City	
Program Peningkatan Fasilitas				RT yang terorganisir dalam lingkungan dan lingkungan RT
	% penyediaan STP - RT	100		
	% penyediaan ST	100		
	% penyediaan Akses Publik yang	100		
Program Peningkatan RT				RT yang terorganisir dalam lingkungan dan lingkungan RT
	% jumlah RT yang	100		
	% penyediaan Fasilitas Dasar yang	80		
Program Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemerintahan				RT yang terorganisir dalam lingkungan dan lingkungan RT
	% ketersediaan dan keterjangkauan yang	80		
Program Peningkatan Fasilitas Pemerintahan				RT yang terorganisir dalam lingkungan dan lingkungan RT

Sumber/Program Pembangunan Daerah	Indikator Sumber/ Program	Target 2023	Salah Pelaksanaan	Pesanggot Daerah Penanggung Jawab
Program Pengembangan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan akses publik data kependudukan	100		PD yang bertanggung jawab kependudukan
	Capaian akses pemerintahan yang digitalisasi ke umum	90,3		
Program Pendidikan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan literasi literasi desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	95,71		PD yang bertanggung jawab kependudukan
	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani > Rp. 20.000.000,	100		
Program Bantuan Kemitraan dan Kerjasama Usaha	Capaian pengembangan usaha kemitraan dan kerjasama usaha	99,26		PD yang bertanggung jawab kependudukan
	Capaian pengembangan usaha perikanan/akuakultur	99,82		
Program Bantuan dan Kegiatan Pemukiman Desa	Bantuan desa/kelurahan untuk pemukiman yang layak	99,37		PD yang bertanggung jawab kependudukan
	% Masyarakat yang pindah ke lokasi tinggal permanen dan terjangkau	99		
Program Pengabdian Desa Peran Pemilik dan Lembaga Pendidikan untuk Peningkatan Produktivitas Usaha dan Daya Saing Usaha				PD yang bertanggung jawab kependudukan
	Jumlah kunjungan bina desa	1,75		
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan				PD yang bertanggung jawab pemerintahan umum

Sumber/Program Pembangunan Daerah	Indikator Sumber/ Program	Tingkat 2023	Faktor Pembangunan	Pengaruh Terhadap Peningkatan Jumlah
Program Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan Siswa-Siswa Sekolah Dasar dan Menengah	Salah satu indikator IPMIS	2,75		PI yang bertanggung jawab
	Salah satu indikator Kemendiknas	2,75		
Program Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan Siswa-Siswa Sekolah Dasar dan Menengah	Salah satu indikator Kemendiknas	2,75		PI yang bertanggung jawab
	Salah satu indikator Kemendiknas	2,75		
Sumber & Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Program Pengembangan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,24	Keterampilan & Berprestasi	PI yang bertanggung jawab
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,34		
	Program Pengembangan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		13,34		
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		13,34		
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		13,34		

Bisnis/Program Pengembangan Daerah	Indikator Bisnis/ Program	Target 2020	Fakta Pengembangan	Pencapaian Sesuai Perundang-Undang
Program Kelangkaan dan Energi Eksplorasi	Indikator utama yaitu: % Sektor Pertambangan yang memiliki IPR tercapaian produksi	100%		100% yang tercapai dalam produksi
Program Pengembangan Kawasan Pertambangan	% pelaksanaan pemukiman dan Pabrikasi PABU dan LUBUK % pelaksanaan pemukiman dan produksi ST % pelaksanaan pemukiman dan produksi STP	100% 100% 100%		100% yang tercapai dalam produksi
Program Pemukiman Perumahan	% Pemukiman Perumahan yang telah dibangun program urban pemukiman	100%		100% yang tercapai dalam Perumahan
Program Pemukiman Sektor Komersial dan Rumah Kaca	% Sektor komersial dan rumah kaca yang dibangun	100%		100% yang tercapai dalam Perumahan
Program Pengembangan Sekolah	% unit kerja yang telah dibangun sesuai daya tampung	100%		100% yang tercapai dalam Sekolah
Program Pemukiman Sektor	Rekomendasi Sektor yang dilaksanakan	100%		100% yang tercapai dalam Sekolah
Program Pemukiman dan Fasilitas Cagar Budaya	% Cagar Budaya yang dibangun	100%		100% yang tercapai dalam Sekolah
Program Fasilitas Pemukiman				100% yang tercapai dalam Sekolah

Rencana/Program Pembangunan Daerah	Indikator Rencana/ Program	Rencana 2023	Fokus Pembangunan	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
Rencana 6: Meningkatkan tingkat Kualitas Masyarakat pelayanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH)	74,7	Peningkatan Kesehatan Masyarakat & Menajutkan Rumah Layak Hidup	
Program Promosi dan Upaya Kesehatan Masyarakat	AHH	74,7		P1 yang bertanggung jawab kesehatan
	AHH	74,7		
	AHH	74,7		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		

Rencana/Program Pembangunan Daerah	Indikator Rencana/Program	Target 2023	Peta Pembangunan	Peningkat Daerah Peninggang Jawab
	Kecepatan penyelesaian TIKAS	100		
	Kecepatan penyelesaian masalah layanan masyarakat	100		
	Kecepatan penyelesaian masalah pelayanan yang bermutu	100		
	Kecepatan penyelesaian RS kesehatan	100		
	Kecepatan penyelesaian STPA	100		
	% Capaian program kerja dan kegiatan	100		
	% Pemenuhan layanan informasi dan pengetahuan tentang informasi	100		
	% Peningkatan ketepatan dan kecermatan layanan	100		
	% Kepuasan publik terhadap pelayanan	100		
	Pengembangan kerjasama dengan mitra RS	1		
	% Capaian layanan pelayanan standar pelayanan & SPK	100		
	% Pemenuhan layanan layanan pelayanan standar pelayanan RS dan pelayanan layanan pelayanan	100		
	% Ketercapaian target kinerja pelayanan RS	100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				RS yang tercapai (tidak diketahui)
	% Pemenuhan standar minimal 10 jenis tenaga kesehatan	100		
Program Rehabilitasi Pasien, Alat Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan				RS yang tercapai (tidak diketahui)
	Pemenuhan Pemenuhan standar sarana dan prasarana yang memadai	100		
	% Ketercapaian alat minimal 10 Puskesmas	100		
Program Peningkatan Masyarakat				RS yang tercapai (tidak diketahui)

Bidang/Program Pembangunan Daerah	Indikator Bidang/ Program	Target 2008	Peta Pembangunan	Respon dan Penanggung Jawab
Bidang Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Dua Pradiklat Dasar	100		Kesehatan
	Cakupan pada tiga tingkat	100		
Program Pengembangan Kapasitas Desa Bidang Kesehatan	% jumlah masyarakat	100		PI yang bertanggung jawab Kapasitas dan Kinerja
	% Pradiklat tingkat desa	100		PI yang bertanggung jawab Kapasitas dan Kinerja
Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat	% jumlah masyarakat tingkat desa	100		PI yang bertanggung jawab Kapasitas dan Kinerja
	% jumlah masyarakat tingkat kecamatan	100		
Program Pengendalian Penyakit	Prevalensi Kematian tak terencana	100		PI yang bertanggung jawab Pengendalian Penyakit dan Kinerja Kesehatan
	Prevalensi Kejadian yang melibatkan Penyakit menular	100		
	Prevalensi Kejadian yang melibatkan Penyakit menular	100		
Program Promosi Kelangkaan Berencana	Prevalensi Program K1 KB, K2	100		PI yang bertanggung jawab Pengendalian Penyakit dan Kinerja Kesehatan
	Prevalensi Program K1 KB, K2	100		
	Prevalensi Program K1 KB, K2	100		
Program Promosi dan Pengendalian Kelangkaan (K1)	Cakupan program K1 KB dan K2	100		PI yang bertanggung jawab Pengendalian Penyakit dan Kinerja Kesehatan
	Cakupan program K1 KB dan K2	100		
	Cakupan program K1, yang dan K2	100		
	Cakupan K1 KB program K1 KB yang dan K2	100		
	Cakupan K1 KB program K1 KB yang dan K2	100		

Relevansi/Program Pembangunan Daerah	Indikator Relevansi/ Program	Target 2023	Polusi Pembangunan	Prinsip Dasar Pembangunan Daerah
Relevansi 5: Meningkatkan Kesejahteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Program Pemberdayaan Perempuan	Indikator PDR-R yang ada	100	Meningkatkan Kualitas & Saling Smart City	PI yang mendukung bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Sosial
	Indikator Pembangunan Gender (PDR)	100		
Program Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Layanan Program Pemberdayaan Perempuan dan PDR yang kuat dan berkelanjutan	100		PI yang mendukung bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Sosial
	Peningkatan indikator perempuan (PI) yang mendukung pemberdayaan perempuan sebagai pribadi mandiri	100		
Program Pengabdian Masyarakat Desa Gender dan Anak	Peningkatan layanan program pemberdayaan perempuan sebagai pribadi mandiri	100		PI yang mendukung bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Sosial
	Peningkatan Komunitas Desa Gender dan Anak	100		
Program Pemberdayaan Desa Anak (PDR)	Peningkatan layanan program pemberdayaan perempuan sebagai pribadi mandiri	100		PI yang mendukung bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Sosial
	Peningkatan Desa Pemberdayaan Anak Desa/ Kelurahan	100		
Program Pemberdayaan Pemuda Desa	Peningkatan layanan program pemberdayaan perempuan sebagai pribadi mandiri	100		PI yang mendukung bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Sosial
	Peningkatan Desa Pemberdayaan Pemuda	100		
Relevansi 6: Meningkatkan Kualitas pelayanan Infrastruktur	Indikator Aksesibilitas Infrastruktur	100	Peningkatan Tata Kelola & Sistem Pasar Tradisional Pembangunan Berkelanjutan	
	Indikator Keterjangkauan	100		

Nama/Program Pembangunan Daerah	Indikator Nama/ Program	Tahun 2023	Tahun Sebelumnya	Pencapaian Berdasarkan Target
Program Pengabdian Masyarakat Desa (PPM)	Pelayanan kesehatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	100	100% yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat desa telah terlaksana.
Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Perikanan di Monev	Pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas di Monev	100	100	100% yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas di Monev telah terlaksana.
Program Pengembangan Sistem dan Peningkatan Peningkatan Regenerasi	Pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Peningkatan	100	100	100% yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Peningkatan telah terlaksana.
Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem di Uluwatu	Pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Uluwatu	100	100	100% yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Uluwatu telah terlaksana.
Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem di Jember	Pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Jember	100	100	100% yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Jember telah terlaksana.
Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem di Jember	Pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Jember	100	100	100% yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Jember telah terlaksana.
Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem di Jember	Pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Jember	100	100	100% yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tenaga yang bertugas dalam kegiatan Jember telah terlaksana.

Nama/Program Pendidikan Dasar	Indikator Utama/ Program	Target 2023	Fokus Pendidikan	Pengaruh Terhadap Peningkatan Jarak
	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		Rising
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa
Program Pendidikan Dasar (Pendidikan Dasar)	K. Jumlah Peserta Didik (Siswa)	100		PDI yang meningkat melalui Peningkatan Jumlah dan Kualitas Siswa

Nama/Program Pendidikan Dasar	Indikator Nama/ Program	Tingkat RBT	Fokus Pembelajaran	Penyakit Dasar Penyakit Jarak
	A. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		
	B. Jumlah hasil dan analisis	III		
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	C. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan
Program Pendidikan Sesi Inggris dan Bahasa Inggris Untuk Pembelajaran	D. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	E. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	F. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	G. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	H. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	I. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	J. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	K. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	L. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	M. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	N. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	O. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	P. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Program Pendidikan Inggris Tanah Latahan	Q. Jumlah wawancara dilakukan oleh subjek yang terdapat	III		PI yang terdapat dalam Pendidikan dan Sistem Pendidikan

Bidang/Program Pembangunan Daerah	Indikator Bidang/Program	Target 2012	Fokus Pembangunan	Pemangku Utama Penanggung Jawab
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan literasi digital (PI) di Perumahan	100		PI yang bertanggung jawab Konsultasi dan Informatika
	Kejangkitan program informasi publik	100		
Program Kegiatan Sosial Masyarakat	Indikator Kegiatan Internal Tata Kelola	1		
	Indikator Peningkatan Strategi	1		
	Indikator Kelembagaan, Informasi dan Komunikasi	1		
	Indikator Penyelenggaraan	1		
	Indikator Manajemen Organisasi	1		
	Indikator Pelaksanaan Audit TA	1		
	Indikator Sistem Administrasi	1		
	penyelenggaraan layanan administrasi	1		
	Indikator layanan publik layanan administrasi	1		
Bidang F Menegembangkan pertumbuhan sektor unggulan dan pasar investasi tertarget ekonomi daerah	Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,4	Pengembangan Daya Saing Ekonomi Unggulan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan	
	Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	5,55		
	Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Ekspor, Reparat Mobil dan Sepeda Motor	5,85		
	Peningkatan pertumbuhan PDRB Pertambangan	5,25		
	Peningkatan realisasi penanaman modal	6,37		
Program Perencanaan dan Pembangunan Sektor	Pertumbuhan usaha mikro	1		PI yang bertanggung jawab Perencanaan
Program Pengabdian dan Nalika Industri				PI yang bertanggung jawab

Rencana/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja/ Program	Target 2020	Fokus Pembangunan	Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
Kelurahan/ Desa	% warga sukarela yang memiliki ke-4 nilai	10		Kecamatan
Program Pembangunan Sektor Informasi Subsektor Telekomunikasi	% warga sukarela yang memiliki ke-4 nilai	10		PD yang bertanggung jawab Kabupaten
Program Pembangunan dan Pengembangan Sektor Perikanan	Persebaran produksi ikan pascapanen dan sertifikasi Persebaran produksi ikan pascapanen Persebaran pascapanen ikan % sarana perikanan dalam kondisi baik	0,3 1 1 80		PD yang bertanggung jawab Kabupaten
Program Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Perikanan	Persebaran produksi ikan sertifikasi baik % sarana perikanan dalam kondisi baik tidak pascapanen Persebaran Perikanan Perikanan Dalam Kondisi Baik	1 80 1,0 81		PD yang bertanggung jawab Kabupaten
Program Pembangunan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Ternak	sangat produktif ternak	3,0		PD yang bertanggung jawab Kabupaten
Program Pembangunan dan Pengembangan Sektor Perikanan	% ikan berkualitas yang disertifikasi dan terapan GFT % ikan dalam pascapanen yang disertifikasi dan terapan GFT	0,3 0,1		PD yang bertanggung jawab Kabupaten
Program Perikanan Perikanan				PD yang bertanggung jawab Kabupaten

Bidang/Program Pengembangan Daerah	Indikator Bidang/ Program	Target 2020	Index Pembangunan	Penanggung Jawab
Program Pengabdian Masyarakat Tangguh	Promosikan kerja sukarela yang	1		PU yang bertanggung jawab, Relawan dan Pelembda
	Promosikan Praktek pelayanan	0,5		
Program Pengabdian Masyarakat Berdaya				PU yang bertanggung jawab, Relawan dan Pelembda
	Promosikan praktek pelayanan	1,25		
Program Pengabdian Masyarakat Tangguh Berbasis dan Berdaya				PU yang bertanggung jawab, Relawan dan Pelembda
	N Tumbuh Perilaku yang baik	20		
Program Pengabdian dan Pemasaran Hasil Penelitian				PU yang bertanggung jawab, Relawan dan Pelembda
	Promosikan Praktek Hasil Riset	1,25		
Program Swasembada dan Produktifitas Perikanan				PU yang bertanggung jawab, Perikanan
Program Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	N usaha agung yang aktif pada	0,5		
	N cadangan untuk semua pemetaan	20		PU yang bertanggung jawab, Perikanan
Program Swasembada Hasil Hasil Kelautan Perairan dan Hasil Perikanan				
	N Swasembada Hasil Hasil Kelautan Perairan	10		
Program Pengembangan Desa				PU yang bertanggung jawab, Perikanan
	PU Swasembada Desa	1		
Program Swasembada dan Pemberdayaan Masyarakat				PU yang bertanggung jawab, Perikanan
	N alat UPP untuk standar	20		
Program Pengembangan dan Pemasaran				PU yang bertanggung jawab

Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Program	Target 2023	Nilai Pelaksanaan	Peringkat Daerah Penyelenggara
Program Urban Regeneration	1. Jumlah lokasi regent yang dipasokkan di pasar rakyat dan pasar rakyat	11		Perencanaan
Program Pengembangan Daya Tarik Perikanan Perikanan	Perencanaan lokasi baru kolam	1		P1 yang terdapat dalam Perikanan
	Perencanaan unit pemeliharaan	1		
	Perencanaan kualitas air air Perikanan	1		
Program Perikanan Perikanan	Perencanaan kegiatan budidaya	1		P1 yang terdapat dalam Perikanan
	Perencanaan lokasi budidaya	1		
Program Pengembangan Kawasan Wisata Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Industri	Perencanaan lokasi budidaya Perikanan yang terdapat dalam	1		P1 yang terdapat dalam Perikanan
	Perencanaan lokasi budidaya Perikanan yang terdapat dalam	1		
Program Pengembangan Kawasan Daya Tarik Perikanan dan Kawasan Wisata	Perencanaan lokasi budidaya Perikanan	1		P1 yang terdapat dalam Perikanan
	Perencanaan lokasi budidaya Perikanan yang terdapat dalam	1		
	Perencanaan lokasi budidaya Perikanan yang terdapat dalam	1		
Program Pengembangan Daya Tarik Regent Regent	1. Jumlah lokasi budidaya	11		P1 yang terdapat dalam Regent, Uluhe Regent, dan Mangrove
	1. Jumlah lokasi budidaya	11		
Program Pengembangan dan Perikanan Regent	Perencanaan lokasi budidaya Perikanan	11		P1 yang terdapat dalam Regent, Uluhe Regent, dan Mangrove
	Perencanaan lokasi budidaya Perikanan	11		
Program Perikanan Kawasan (KAP) dan Regent	1. Jumlah lokasi budidaya	11		P1 yang terdapat dalam Regent, Uluhe Regent, dan Mangrove
	1. Jumlah lokasi budidaya	11		

Sumber/Program Pengembangan Sumber	Indikator Sumber/ Program	Tingkat 2019	Fokus Pengembangan	Penanggung Jawab
Program Studi/Departemen dan Jurusan Pengembangan				TU yang bertanggung jawab Departemen, Fakultas, dan Masyarakat
Program Studi/Departemen dan Fakultas Pengembangan	Ketersediaan sumber belajar/program	I		TU yang bertanggung jawab Departemen, Fakultas, dan Masyarakat
	Ketersediaan ahli/program Ketersediaan sumber belajar/program	I		
Program Studi/Departemen dan Fakultas Pengembangan (SMPK)				TU yang bertanggung jawab Departemen, Fakultas, dan Masyarakat
	Ketersediaan sumber belajar/program	II		
Program Pengembangan UMS				TU yang bertanggung jawab Departemen, Fakultas, dan Masyarakat
	Ketersediaan sumber belajar/program	II		
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Makro	Jumlah penelitian yang mendapat sumber penelitian/ sumber pendanaan	III		TU yang bertanggung jawab Perencanaan Makro
Program Sistem Perencanaan Makro				TU yang bertanggung jawab Perencanaan Makro
	Ketersediaan sumber	I		
Program Sistem Perencanaan Makro				TU yang bertanggung jawab Perencanaan Makro
	Ketersediaan penelitian/program dan sumber penelitian/program	II		
	Ketersediaan penelitian/program dan sumber penelitian/program	III		

Sumber/Program Pembangunan Daerah	Indikator Success/ Program	Target 2024	Tahun Pelaksanaan	Penyaji/ Daerah Penanggung Jawab
Program Pengembangan Perikanan Perikanan Mekar	% petani yang ikut produksi	10		PD yang bertanggung jawab Perikanan Mekar
Program Pengabdian Jasa dan Jasa Bakti Perikanan Mekar	% layanan pelayanan program dan non program yang dilakuk dengan baik	10		PD yang bertanggung jawab Perikanan Mekar
Program Pengabdian Perikanan Daerah	% Pengabdian Masyarakat Umum % Pengabdian Masyarakat Istimewa % Kemitraan pemerintah	10 10 10		PD yang bertanggung jawab Pengabdian
Sumber 8: Strategisnya Indeks Teknologi Selay	Indeks Kualitas air	10	Pembangunan Selay, Normalisasi Sungai & Penguatan Ketahanan Air	
	Indeks Kualitas udara	10		
Program Perencanaan Lingkungan Selay	Indeks Kelengkapan Selay	10,10		PD yang bertanggung jawab Lingkungan Selay
	% Kemitraan (sangat baik)	10		
Program Pengabdian Perikanan dan Jasa Bakti Ketahanan Lingkungan Selay	Kemitraan Selay Perencanaan Lingkungan Selay Membantu Selay Selay	10		PD yang bertanggung jawab Lingkungan Selay
Program Pengabdian Kemitraan Selay (KEMITRAAN)	Kemitraan (Selay Selay) Selay	1		PD yang bertanggung jawab Lingkungan Selay
Program Pengabdian Pakan Berkelanjutan & Selay (Selay dan Lahan Selay Berkelanjutan & Selay (Selay Selay)	% perikanan yg memiliki TTS Selay 10	10		PD yang bertanggung jawab Lingkungan Selay
Program Perikanan dan Pengabdian				PD yang bertanggung jawab

Nama/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja/ Program	Target 2022	Tingkat Peningkatan	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
Kecenderungan dan Lingkungan serta dan Pembangunan dan Peningkatan Lingkungan Hidup (PPLH)	Perencanaan dan lingkungan (p) Ketersediaan	100		Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan Kesehatan & Perilaku Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Ketersediaan peserta yang mempunyai pendidikan, pelatihan dan pengetahuan (K)	70		PI yang bertanggung jawab Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	% Peningkatan (K) yang efektif % Peningkatan (K) yang berkelanjutan	1		PI yang bertanggung jawab Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengujian Lingkungan Hidup	% Laporan tahunan atau profilisasi pengujian	10		PI yang bertanggung jawab lingkungan hidup
Program Peningkatan Pengujian	Perencanaan pengujian terpadu	10		PI yang bertanggung jawab lingkungan hidup
Program Peningkatan Ketersediaan dan Ketersediaan Urea	% Peningkatan Ketersediaan Produk Ketersediaan Urea % Ketersediaan yang efektif Tingkat penyelesaian pengujian K1 Ketersediaan, Ketersediaan, Ketersediaan	10 10 10		PI yang bertanggung jawab Ketersediaan dan Ketersediaan Urea serta Peningkatan Masyarakat
Program Peningkatan Ketersediaan	% penyelesaian kegiatan layanan % dana yang telah tersedia di pemerintah daerah layanan	100 100,75		
Program Peningkatan, Peningkatan, Peningkatan Ketersediaan dan Peningkatan dan Ketersediaan				PI yang bertanggung jawab Ketersediaan dan Ketersediaan Urea serta Peningkatan

Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Program	Target 2012	Pola Pembangunan	Pembayar Dasar Pembiayaan Jangka
	Salipin pelayanan layanan	100		Regional
	Salipin dan Salipin Salipin	100		
	% Salipin pelayanan prosedur	100		
	Salipin yang diproses	100		
Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas bidang pendidikan tingkat	Indeks Ketercapaian Kemiskinan (IK) Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase Pemukiman dan Kawasan Pemukiman yang layak huni	3,3 3,00-3,30 98,13	Pelaksanaan Pelaksanaan Strategi Kerja & Penetapan Keperluan Kerja Maksimal	
Program Pendidikan Dasar	Pembangunan PMS yang dapat	100		PI yang bertanggung jawab sosial
	melaksanakan USB			
Program Pendidikan Dasar	Kawasan Kemiskinan PMS	100		PI yang bertanggung jawab sosial
Program Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kawasan Kemiskinan PI	100		PI yang bertanggung jawab sosial
Program Pengawasan Kesehatan	Kawasan Kemiskinan yang	100		PI yang bertanggung jawab sosial
	berada di kawasan			
Program Pengawasan Tenaga Mekanik	Kawasan Tenaga Mekanik dalam	100		PI yang bertanggung jawab sosial
	Kawasan Kota			
Program Pemantauan Tenaga Kerja	Salipin Laporan data hasil terapan	100		PI yang bertanggung jawab
	hasil yang dilakukan dengan baik			
Program Melatih Kerja dan Pemukiman	Kawasan Kemiskinan yang	100		PI yang bertanggung jawab
	melakukan pelatihan			
Program Pemantauan Tenaga Kerja	% Lulusan Program Kerja yang	100		PI yang bertanggung jawab
	diterapkan			
Program Pemantauan Internal				PI yang bertanggung jawab

Keasatan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Keasatan/ Program	Target (2012)	Peta Pembangunan	Peringkat Daerah Peningkatan Jawab
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Warga yang terdampak perubahan PMU	100		100
				100 yang menunjukkan tingkat Peningkatan Masyarakat dan Desa
	% Pemukiman Desa dengan program pembangunan desa yang terlaksana	100		
	Kualitas SDM desa % jumlah dan jumlah terlatihnya desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa	100 100		
Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan, Lingkungan, Adm dan Masyarakat Dalam Desa	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan (Rata-rata)	100		100 yang menunjukkan tingkat Peningkatan Masyarakat dan Desa

4.2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang

Melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tingkat Perencanaan, Peringatan pokok-pokok hasil kerja komisi menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

Pemerintah daerah dituntut lebih berkemampuan dalam membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi harapan masyarakat. Diperlukan upaya terus dan konsisten untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah terutama dari hasil evaluasi Laporan Dana Insentif Daerah yang masih jelek dari berbagai nilai minimal. Dengan pandemi Covid-19, situasi instansi pemerintah daerah sangat di tingkat pemerintahan desa sebagai gerbang terendah pelayanan masyarakat perlu meningkatkan kompetensi serta berinovasi untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Seperti hal pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang menjadi hal masyarakat harus tetap dipantau oleh pemerintah dengan pelayanan yang prima.

2. Bidang Ekonomi dan Keuangan

Dampak pandemi Covid-19 selama ini sangat signifikan berpengaruh pada sisi nilai pertumbuhan Kabupaten Rembang terutama pada sektor perdagangan termasuk UMKD, sementara sektor pertanian sebagai kontributor dominan perekonomian petani mengalami perlambatan pertumbuhan. Pemerintah daerah harus berupaya bersama kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kembali pertumbuhan masyarakat dan masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu sangat potensial dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah ini harus dapat dimanfaatkan optimal sehingga untuk masyarakat melalui kreasi-kreasi regulasi pemerintah daerah serta dukungan sarana prasarana yang memadai.

3. Bidang Pembangunan

Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perumahan dan pertokoan, serta dan program pendidikan dan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus konsisten dilaksanakan secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dan layanan publik harus lebih memperhatikan aspek kualitas konstruksi serta aspek pemerataan wilayah, sehingga daerah perlebaran akses juga mendapat porsi infrastruktur memadai yang melibatkan peran kreatif bagi masyarakat termasuk didalamnya petani sektor pertanian dan perikanan.

4. Bidang Kesejahteraan

Memperhatikan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi, pemerintah daerah harus lebih berkemampuan untuk mengatasi hal-hal mendasar di sektor kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang merupakan hal dasar setiap manusia. Dengan pandemi Covid-19, sektor dan program kesehatan harus ditingkatkan dapat dapat melayani seluruh masyarakat Rembang baik di pedesaan maupun di perkotaan. Masih adanya ketimpangan pendidikan antara dan program pendidikan, pelayanan dan layanan kesehatan yang belum memadai, lapangan lapangan rumah sakit yang sangat terbatas perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk segera ditatahkan.

Salah satu berakar dari program aspirasi masyarakat antara lain rumah, perlu dengan pendaptan dan lapangan kerja DPRD Kabupaten Rembang tidak terlewatkan dalam permasalahan pembangunan daerah terutama melalui kegiatan dan rekomendasi yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran sebagai berikut:

- a. Meninjau kembali tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari level pemerintahan desa, pemberdayaan aparatur lembaga desa harus dapat meningkatkan melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa maupun lembaga masyarakat desa serta tidak kalah penting upaya memperbaiki kondisi sarana pelayanan umum termasuk gedung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah prasyarat yang terpenting dalam pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan aspek pendidikan masyarakat, keberdayaan masyarakat dilingkungan keragaman, meningkatkan kemandirian sosial kemasyarakatan, peningkatan sarana prasarana dan human kraftedness masyarakat hingga terciptanya iklim kerakyatan dengan memberikan pelatihan dan bantuan peralatan dan modal kepada kelompok usaha masyarakat. Peningkatan layanan pendidikan dasar harus tetap menjadi fokus perhatian kebijakan pembangunan Kabupaten Beraung Pematang serena dan prasarana pendidikan, khususnya di daerah pedesaan untuk menunjang pemenuhan pendidikan. Kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai memerlukan penanganan yang terus menerus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman untuk proses belajar mengajar termasuk di tingkat SD/MTs, TK dan PAUD maupun SMP. Disamping itu kelengkapan sarana prasarana belajar juga tidak boleh terlupakan terutama untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SD maupun SMP.
- c. Penguatan komunikasi perlu ditunjang dengan peningkatan pelayanan sosial dasar kepada PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS. Disamping perlu diperkuat dengan peningkatan kemandirian sosial masyarakat melalui pemberdayaan peran kelompok usaha terpadu dengan maupun kelompok usaha berwujud dalam penanganan PMKS serta peningkatan kapasitas SDM PMKS di Kabupaten Beraung.
- d. Untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang dibukung keberterimaan antar wilayah. Kondisi infrastruktur jalan beserta sarana prasarana kelengkapan jalan, jaringan irigasi maupun sumberdaya air di Kabupaten Beraung yang sangatlah terbatas perlu upaya mendapat penanganan agar tidak semakin parah dan menghambat aktivitas masyarakat masyarakat maupun badilaya pertanian. Oleh karenanya perlu segera dilakukan kegiatan rehabilitasi pada zona jalan desa, sarana prasarana kelengkapan jalan, maupun jaringan irigasi di sejumlah tempat yang sedang mengalami kerusakan. Disamping masalah kerusakan, konstruksi pemrosesan jalan juga perlu dibangun secara bertahap untuk tujuan meningkatkan akses teknis bangunan utamanya melalui pemertaan lebar jalan dan saluran drainase jalan. Dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di sejumlah tempat di Kabupaten Beraung, dipandang perlu untuk menegakkan penerbitan peraturan dasar terutama peraturan akta jalan lingkungan, guna meningkatkan kualitas pemukiman yang lebih layak. Sementara melihat kondisi sejumlah desa beberapa rumah yang masih tinggal di Rumah Tak Layak Huni (RTLH), maka penerangan pemukiman RTLH harus menjadi komitmen bersama baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Pada aspek badilaya pertanian, disamping diperlukan upaya perbaikan kondisi infrastruktur pertanian, upaya modernisasi alat dan mesin pertanian maupun

melalui pertemuan yang dibarengi penyiapan KWT serta kelompok lain juga telah mulai penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sedangkan dalam pengembangan pertanian diperlukan upaya peningkatan produksi ternak pada kelompok-kelompok usaha peternakan yang tersebar hampir merata di wilayah wilayah Kabupaten Bontang. Demikian pula untuk sektor perikanan diperlukan upaya peningkatan penyiapan kelompok usaha bersama (KUB) serta peningkatan hasil produksi serta peningkatan wilayah wilayah perikanan Bontang. Peningkatan daya tarik sektor perikanan telah dapat dilaksanakan dan faktor kelentaran budaya lokal dalam mendukung even-even partisipasi di Kabupaten Bontang. Dengan menitikberatkan penyiapan sarana prasarana seperti daya tarik wisata (DWT) dan peningkatan BIM perikanan maka kegiatan gilar budaya dan festival budaya perlu kembali diadakan untuk meningkatkan usaha lapangan wisata yang berkembang pada perkembangan masyarakat di wilayah Kabupaten Bontang. Demikian pula keberadaan kelompok seni budaya perlu didukung untuk turut memertahakan budaya daerah.

- a. Pembangunan berwawasan lingkungan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terkait dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Bontang yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan pengendalian sampah serta pemertahan ruang terbuka hijau. Lebih itu kebijakan peningkatan sarana prasarana pemertahan serta pemertahan ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan.
- b. Pengembangan sumber dan sumber lokal yang berdaya saing perlu diarahkan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa sehingga masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk untuk meningkatkan akses terhadap modal dari sektor negara, pengetahuan, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber sumber daya keuangan. Untuk itu kemampuan pengetahuan BIMDes perlu terus dikembangkan untuk memperkuat kemandirian keuangan desa.

4.3.5. Inovasi Kebijakan Daerah

Untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bontang, senantiasa dikembangkan inovasi dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tabel dibawah disampaikan tabel inovasi kebijakan pembangunan yang telah dan sedang terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bontang.

Tabel 4.9
Inovasi Kebijakan Pembangunan

No	Inovasi	Isu/tema Inovasi	Materikan dengan Pemas
1	Wabah Penyakit Diarektus Bontang Jarak Target Bontang	Mengadakan inovasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bontang dalam rangka pengembangan kesehatan. Dalam rangka mempromosikan kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut maka diorganisasikan oleh pemerintah untuk untuk mempromosikan melalui media massa dan portal media internet, sehingga kebijakan yang akan dapat	Upaya untuk dapat dalam mempromosikan pengetahuan, pengetahuan di Kabupaten Bontang yang masih tetap dapat mempromosikan oleh pemerintah melalui media massa dan portal media internet yang terorganisir dan terpadu secara, melalui berbagai alternatif pengembangan, keterkaitan 1. TELPOM (Terdapat Layanan Operasional) dan 2. Bontang Melalui dan dan

No.	Isu/tema	Isu/tema tersebut	Keterkaitan dengan Prioritas
		<p>Isu/tema tersebut Dengan ditentukannya sebagai 3 Tahun yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Data Kesehatan (Berita Tiga Tercepat Kesehatan Sehat/DTK3) sebagai tema data program penanggulangan kesehatan 2. Berita (Tiga Momen Kehidupan APED) sebagai inspirasi secara umum program penanggulangan kesehatan dan 3. Fakta yang Momen Momen 3 sebagai program kesehatan umum 	<p>Isu/tema tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Struktur Rancangan Kerja Rutin 2. Daftar 12 Struktur (dari Struktur 12 Tahun) 3. Rencana BTK3 4. Program Kesehatan 5. Rencana kerja di tahun dan tahun ke-3 (BTK3) (Program Pengembangan Rutin) 6. 300 Momen (Momen Momen Momen Tiga) <p>Isu/tema tersebut dengan prioritas Kesehatan Rutin yaitu: Peningkatan Kualitas Hidup Kesehatan, Peningkatan Kualitas Kesehatan, Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Rutin</p>
1	Isu/tema tersebut yaitu Tema Kesehatan	<p>Isu/tema tersebut berkaitan yang berkaitan dengan Peningkatan Kesehatan Rutin akan sangat penting untuk kesehatan yaitu tema kesehatan kesehatan rutin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup manusia dan pengembangan KEMERDEKAAN (KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN) 2. Peningkatan dan Kualitas secara rutin 3. Peningkatan secara rutin pada upaya kesehatan rutin 	<p>Isu/tema tersebut akan sangat penting untuk di Kesehatan Rutin yaitu tema kesehatan kesehatan rutin</p> <p>Isu/tema tersebut dengan prioritas Kesehatan Rutin yaitu: Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Rutin</p>
2	Isu/tema tersebut yaitu Tema Kesehatan	<p>Isu/tema tersebut berkaitan yang berkaitan dengan Peningkatan Kesehatan Rutin akan sangat penting untuk kesehatan yaitu tema kesehatan kesehatan rutin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan program untuk KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN dan KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN 2. Rencana Kerja KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN dan KEMERDEKAAN 3. Rencana Kerja Kesehatan 4. Peningkatan Kualitas dan KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN dan KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN 5. Rencana KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN 6. Meningkatkan program untuk tema kesehatan rutin kesehatan rutin 	<p>Isu/tema tersebut akan sangat penting untuk di Kesehatan Rutin yaitu tema kesehatan kesehatan rutin</p> <p>Isu/tema tersebut dengan prioritas Kesehatan Rutin yaitu: Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Rutin</p>

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam hal akan menyajikan indikator rencana program tahun 2013 dan page indikatornya berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun 2013, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2011-2015 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh.

5.1. Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional

Program dalam RPMD 2013 yang mendukung prioritas Nasional. Dandatan dibidang tersebut disajikan dalam matriks berikut ini.

Kategori Kegiatan	Kategori Subkegiatan	Program/Kelembagaan	Indikator Program	Rupiah (Miliar)	GMD (Miliar Rupiah)	Jumlah Program & Subprogram yang Mendukung Prioritas Nasional
			1. Jumlah ...			
		1. ...	1. ...	100.000	...	
		2. ...	2.	
		3. ...	3.	
		4. ...	4. ...	1.000.000	...	
		5. ...	5.	
		6. ...	6. ...	1.000	...	
		7. ...	7.	
		8. ...	8.	
		9. ...	9.	
		10. ...	10.	
		11. ...	11.	
		12. ...	12.	
		13. ...	13.	
		14. ...	14.	

Kategori Investasi	Pilihan Subkategori	Program Investasi	Detail Program	Risiko Investasi	Rendemen Potensial (Tahun)	Jenis Program & Anggaran yang termasuk dalam Program	
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar 2. Investasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 3. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri 				
10.2.2. Investasi Langsung 10.2.2.1. Investasi Langsung dalam Perusahaan	10.2.2.1.1. Investasi Langsung dalam Perusahaan	1	Investasi langsung dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 	100%	100%	1. Investasi Program Investasi yang termasuk dalam Program 10.2.2.1.1
		2	Investasi langsung dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri 	100%	100%	2. Investasi Program Investasi yang termasuk dalam Program 10.2.2.1.1
		3	Investasi langsung dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri 	100%	100%	3. Investasi Program Investasi yang termasuk dalam Program 10.2.2.1.1
		4	Investasi langsung dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri 	100%	100%	4. Investasi Program Investasi yang termasuk dalam Program 10.2.2.1.1
		5	Investasi langsung dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri 	100%	100%	5. Investasi Program Investasi yang termasuk dalam Program 10.2.2.1.1
		6	Investasi langsung dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri 	100%	100%	6. Investasi Program Investasi yang termasuk dalam Program 10.2.2.1.1
		7	Investasi langsung dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri 	100%	100%	7. Investasi Program Investasi yang termasuk dalam Program 10.2.2.1.1
		8	Investasi langsung dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri 	100%	100%	8. Investasi Program Investasi yang termasuk dalam Program 10.2.2.1.1
		9	Investasi langsung dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri 	100%	100%	9. Investasi Program Investasi yang termasuk dalam Program 10.2.2.1.1

Materi Pokok	Materi Subpokok	Program Pembelajaran	Indikator Program	Buku Teks/Referensi	Materi Kejurangan Kelas	Jenis Program & kegiatan yang mendukung Program tersebut
		1. Pengertian dan jenis-jenis...				
		2. Fungsi dan tujuan...				
		3. Struktur organisasi...				
		4. Tugas dan tanggung jawab...				
		5. Hubungan antara...				
		6. Peranan...				
		7. Mekanisme...				
		8. Prinsip...				
		9. Contoh...				
		10. Kesimpulan...				
11. Pengertian dan tujuan...	12. Fungsi dan tujuan...	13. Struktur organisasi...	14. Tugas dan tanggung jawab...	15. Hubungan antara...	16. Peranan...	17. Mekanisme...

Reporting Period	Priority Category	Program Description	Initiative Focus	Budget Estimate	2018 Budgeted Cost	Est. Budget to support any continuing priorities
		21. Provide financial and administrative support	• Provide program support	100,000		
		22. Provide administrative support	• Provide administrative support • Provide program support • Provide program support • Provide program support • Provide program support • Provide program support • Provide program support	1,700,000	Other Departmental Costs	
		23. Provide administrative support	• Provide program support	1,100,000		
		24. Provide administrative support	• Provide program support	1,100,000		
		25. Provide administrative support	• Provide program support	1,100,000		
		26. Provide administrative support	• Provide program support	1,100,000	Other Departmental Costs	
		27. Provide administrative support	• Provide program support	1,100,000		

Project Number	Project Name	Region/State	Activity/Program	Page Number	1975-1976 Budget	and Project to be completed (only for continuing projects)
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			
			1. General Administration 2. Personnel Administration 3. Financial Administration 4. Planning and Development 5. Public Relations 6. Technical Assistance 7. Training 8. Research and Statistics 9. Evaluation 10. Other			

Kategori Kegiatan	Sifat Kegiatan	Ruang Lingkup	Methode Program	Page Budget	Lokasi Pelaksanaan	Jenis Program dan kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut
		11. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	11.1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	11.1.1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		
		12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	12.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	12.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		
		13. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	13.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	13.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		
		14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	14.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	14.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		
		15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	15.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	15.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		
		16. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	16.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	16.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		
		17. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	17.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	17.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		
		18. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	18.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	18.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		
		19. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	19.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	19.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		
		20. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	20.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	20.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		

3.2. Program Berdasarkan Urutan Prioritas

3.2.1 Urutan Wajah Pelayanan Dasar

3.2.1.1 Urutan Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus kegiatan adalah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kejuruteraan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus kegiatan adalah Penetapan Kurikulum Murni Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Penetapan Kurikulum Murni Lokal Pendidikan Dasar.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus kegiatan adalah Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kejuruteraan.

d. Program Pengendalian Perilaku Pendidikan

Fokus kegiatan adalah Penertiban lain PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; Penertiban lain Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

3.2.1.2 Urutan Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus kegiatan adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Daerah Kabupaten Kota; Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus kegiatan adalah Pemberian Ilmu Praktis Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota, Peningkatan Kelembutan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kota/ Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga SDM Kes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Fokus kegiatan adalah Pemberian Sertifikat Produk untuk Rumah Produksi Aliran Kelas 1 Tertentu & Peningkatan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan IT; Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus kegiatan adalah Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Advokasi, Pemberdayaan, Konsultasi, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3.2.1.3 Urutan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus kegiatan adalah Pengelolaan SDA dan Anggaran Program Pemas pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengembangan dan Peningkatan Sistem Irigasi

Prasar dan Sarana) pada Daerah Istimewa yang Luasnya ditunjuk (DIP) No dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.

- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
Fokus kegiatan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pemukiman Regional**
Fokus kegiatan adalah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pemukiman di Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
Fokus kegiatan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**
Fokus kegiatan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.
- f. Program Penataan Bangunan Gedung**
Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**
Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Program Penyelenggaraan Jalan**
Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (UJKK) dan Kecil, Penguatan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemantauan Jasa Konstruksi.
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
Fokus kegiatan adalah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan sinkronisasi Penataan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

5.3.1.4 **Daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- a. Program Pengembangan Perumahan**
Fokus kegiatan adalah Produksi Perumahan dan Rehabilitasi Rumah Kertas Rumah atau Rehabilitasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Prinsip-prinsip Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kertas Rumah atau Rehabilitasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kertas Rumah atau Rehabilitasi Program Kabupaten/Kota, Redistribusi dan Serah Terima Rumah bagi Rumah Renda atau Rehabilitasi Program Kabupaten/Kota, Penelitian Pengelolaan Rumah Susun Lantai Atas/Rumah Khasa, Penelitian Iain Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- b. Program Kawasan Permukiman**
Fokus kegiatan adalah Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman rumah dengan luas ditunjuk 10 (sepuluh) ha.

Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan luas di Daerah III (sejarah) Ha.

- c. **Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh**
Fokus kegiatan adalah Peningkatan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.
- d. **Program Peningkatan Pasaran, Busana dan Utilitas Umum (PSU)**
Fokus kegiatan adalah Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

5.2.1.5 Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. **Program Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum**
Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan gangguan ketertiban dan ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten/kota; Pengabdian pelayanan daerah kabupaten/kota; Peminaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- b. **Program Penyelenggaraan Bencana**
Fokus kegiatan adalah Pelayanan Informasi Beres Bencana Kabupaten/Kota; Pelayanan Pengabdian dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Pemetaan Sistem Dasar Penyelenggaraan Bencana.
- c. **Program Pengabdian, Penyelenggaraan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**
Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan pengabdian, Penyelamatan, dan Penyelenggaraan layanan kebakaran beres kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; Pemeliharaan Masyarakat dalam Penyelamatan kebakaran; Inspeksi pelayanan Proteksi Kebakaran.

5.2.1.6 Urusan Sosial

- a. **Program Pemberdayaan Sosial**
Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Program Sederet Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- b. **Program Rehabilitasi Sosial**
Fokus kegiatan adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terhantar, Anak Terhantar, Lanjut Usia Terhantar, serta Pelaksanaan Program di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Saluran HI / ADB dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
- c. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Data Pokok Memon Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. **Program Penguatan Bencana**
Fokus kegiatan adalah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
- e. **Program Pemberdayaan Sosial**
Fokus kegiatan adalah Pemeliharaan Taman Mubas Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

5.2.2.1 Urusan Tenaga Kerja

- a. **Program Penguasaan Tenaga Kerja**
Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
- b. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**
Fokus kegiatan adalah Pelaksanaan pelatihan berdasarkan credit competency; Pemetaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Pengujian

dan peningkatan lembaga pelatihan kerja; Kualitas produktivitas pada perusahaan kecil; Peningkatan produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota.

a. Program Peningkatan Tenaga Kerja

Fokus kegiatan adalah Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota; Pemberitaan (jln Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu kabupaten/kota; Pengelolaan Informasi pasar Kerja; Pendidikan PME (Pia dan Poma Peningkatan di daerah kabupaten/kota; Pemberitaan perpanjangan IMTA yang lulus kerja dalam satu daerah kabupaten/kota.

d. Program Hubungan Industrial

Fokus kegiatan adalah Peningkatan peraturan perusahaan dan pendafaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mampu beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Peningkatan dan penyediaan perolehan hubungan industrial, tingkat kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

5.2.2.3 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus kegiatan adalah Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kecamatan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan Perempuan

Fokus kegiatan adalah Peningkatan Kelembaan terhadap Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Reguler Lanjutan bagi Perempuan Korban Kelembaan yang Memerlukan Koordinasi Kecamatan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Fokus kegiatan adalah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pencegahan Hal Anak (PHA)

Fokus kegiatan adalah Peningkatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kecamatan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kecamatan Kabupaten/Kota.

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus kegiatan adalah Pencegahan Kelembaan Terhadap Anak yang Memerlukan para Pihak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3.3.3.3 **Struan Pangan**

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Fokus kegiatan adalah Penyediaan Infrastruktur dan Sektorsal Peningkatan Kemandirian Pangan sesuai Kawasan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus kegiatan adalah Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan; Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Program Target Ekonomi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Ketahanan Gizi.

c. Program Penanganan Keamanan Pangan

Fokus kegiatan adalah Penyusunan Peta Keamanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan; Penanganan Keamanan Pangan Kawasan Kabupaten/Kota.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus kegiatan adalah Pelaksanaan Programisasi Keamanan Pangan Raga Daerah Kabupaten/Kota.

3.3.3.4 **Struan Pertanahan**

a. Program Penyediaan Sengketa Tanah Garapan

Fokus kegiatan adalah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Tanah Rongg

Fokus kegiatan adalah Inventarisasi dan Pemantauan Tanah Rongg.

c. Program Penatagunaan Tanah

Fokus kegiatan adalah Pengurusan Tanah yang Himpunannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

3.3.3.5 **Struan Lingkungan Hidup**

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan adalah Rencana Perencanaan dan Pengaturan Lingkungan Hidup (RPPH) Kabupaten/Kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan adalah Pengawasan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Kelembagamaan Masyarakat (Kohati)

Fokus kegiatan adalah Pengelolaan Kelembagamaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah BB)

Fokus kegiatan adalah Pengawasan Sementara Limbah BB.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Iain Lingkungan dan Iain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus kegiatan adalah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Iain Lingkungan dan Iain PPLH didefinisikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penguasaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penguasaan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Fokus kegiatan adalah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan adalah Promosi/Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Penguasaan Lingkungan Hidup (PLH) Kabupaten/Kota.

j. Program Pengelolaan Sampah

Fokus kegiatan adalah Pengelolaan Sampah.

5.2.2.6 Urutan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus kegiatan adalah Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk; Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Fokus kegiatan adalah Pelaksanaan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus kegiatan adalah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pencatatan dan Penyajian Database Kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan; Penyusunan Profil Kependudukan.

5.2.2.7 Urutan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Program Pemataan Desa

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Pemataan Desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus kegiatan adalah Fasilitas Kerja sama antar Desa.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus kegiatan adalah Pemeliharaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus kegiatan adalah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergasak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.8 Urutan Pengendalian Produksi dan Kelangkaan Breviceps

a. Program Pengendalian Produksi

Fokus kegiatan adalah Pemastian dan Sistemisasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Produksi; Pemastian Pemastian Pengendalian Produksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pembinaan Kelangka Breviceps (KB)

Fokus kegiatan adalah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Perilaku dan KB sesuai Rencana Madya Lokal Penyelenggaraan Tenaga Perilaku KB/Petugas Lapangan KB (PCLB/PLKB), Pengendalian dan Pemberdayaan Keluarga Aktif dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Program KB di Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Pendidikan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan Ber-KB.

- a. **Program Pemberdayaan dan Pendidikan Keluarga Sejahtera (PKS)**
Fokus kegiatan adalah Pelaksanaan Pengembangan Keluarga melalui Pembiayaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga.

5.2.2.9 **Daerah Perhubungan**

- a. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**
Fokus kegiatan adalah Perantapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Pengadaan Terminal Perantapan Tipe C; Penyelenggaraan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Pelaksanaan Manajemen dan Rencana Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota; Penanganan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ADALA) untuk Jalan Kabupaten/Kota; Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan; Penyelenggaraan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perantapan Kawasan Perbatasan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perantapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perantapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perbatasan yang Wilayah Operasinya Jalan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perantapan dan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perantapan dan Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perantapan Tarif Kena Ekstensi untuk Angkutan Orang yang Melampaui Trayek atau Angkutan Perkotaan dan Perbatasan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.10 **Daerah Komunikasi dan Informatika**

- a. **Program Informasi dan Komunikasi Publik**
Fokus kegiatan adalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**
Fokus kegiatan adalah Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.11 **Daerah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

- a. **Program Pelayanan Jasa Usaha Smpun Pijam**
Fokus kegiatan adalah Perantapan Jasa USP sesuai Koperasi dengan Wilayah Sasnggutan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Perantapan

dan Pendidikan Karir Cabang, Cabang Pemuda dan Kantor Kae Koperasi Simpan Pinjam, untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas

Fokus kegiatan adalah Peningkatan dan Penguasaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

c. Program pelatihan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Fokus kegiatan adalah Pelatihan Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Fokus kegiatan adalah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Fokus kegiatan adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Fokus kegiatan adalah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Komitmen, Koordinasi Perilaku, Penguatan Kemampuan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

g. Program Pengembangan UMKM

Fokus kegiatan adalah Pengembangan Usaha Mikro dengan Citra dan Promosi Usaha Kecil Menjadi Usaha Kecil.

5.2.3.12 **Strain Penanaman Modal**

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus kegiatan adalah Percepatan perbaikan investasi melalui dibidang penanaman modal yang menjadi kreangan daerah Kabupaten/ Kota.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus kegiatan adalah Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kreangan daerah kabupaten/kota.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus kegiatan adalah Peningkatan Perilaku dan Non Perilaku sesuai Terpadu Satu Peta dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kreangan Daerah Kabupaten/ Kota.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus kegiatan adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kreangan Daerah Kabupaten/ Kota.

5.2.3.13 **Strain Kemandirian dan Olahraga**

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kemandirian

Fokus kegiatan pada Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kemandirian Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemandirian Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus kegiatan pada Pendidikan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jaring Pendidikan yang menjadi Kreangan Daerah Kab/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat

dari Kabupaten, Kecamatan dan Pengembangan Organisasi Desa, dan Kecamatan dan Pengembangan Desa Kecamatan.

a. Program Pengembangan Kapasitas Keperencanaan

Fokus kegiatan pada Pemerintah dan Pengembangan Organisasi Keperencanaan.

5.2.2.14 Urusan Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Nasional** dengan fokus kegiatan pada Penyelenggaraan Statistik Nasional di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.15 Urusan Persebaran

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persebaran untuk Pengamanan Informasi** dengan fokus kegiatan pada Penyelenggaraan Persebaran untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.16 Urusan Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus kegiatan pada Penggiatan Kebudayaan yang Mempromosikan Pelaksana dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pelestarian Eksistensi Tradisional yang Mempromosikan Pelaksana dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pembinaan Sejarah

Fokus kegiatan pada Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus kegiatan pada Peretapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota; dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

d. Program Pengelolaan Pemusnahan

Fokus kegiatan pada Penggiatan Museum Kabupaten/Kota.

5.2.2.17 Urusan Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus kegiatan pada Penggiatan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten; Pembudayaan Dasar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pelestarian Kekristian Nasional dan Naskah Kuno

Fokus kegiatan pada Pelestarian Naskah Kuno Millik Daerah Kabupaten; Pengembangan Kekristian Budaya Desa Masyarakat yang ditetaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

5.2.2.18 Urusan Keairan

a. Program Pengelolaan Airip

Fokus kegiatan pada Pengelolaan Airip Daerah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Airip Statis Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Sempul Jaringan Informasi Keairan Nasional LKCN Tingkat Kabupaten.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Airip

Fokus kegiatan pada Pemusnahan Airip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Hewan di Bawah 10 (sepuluh) Tahun; Perlindungan dan Penyelamatan Airip Akibat Bencana yang Berakibat Kabupaten/Kota; Penyelamatan Airip

Perangai Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Perikanan Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

a. Program Pelatihan Pengawasan Asap

Polusi kegiatan pada Pengawasan Iala Pengawasan Asap yang Berada Tersebut di Kabupaten/Kota.

5.2.3 Urusan Pohon

5.2.3.1 Urusan Kelodian dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Polusi kegiatan pada Pengelolaan Perangkap Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Bawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disalurkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Polusi kegiatan pada Persebaran Iala Usaha Perikanan di Bidang Pembudayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pembudayaan Persebari Daya Ikan Kecil; Pengelolaan Pembudayaan Ikan, Persebaran Tanda Daftar bagi Persebari Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan dan Pemantauan Hasil Perikanan

Polusi kegiatan pada Persebaran Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan bagi Usaha Scaled Mikro dan Kecil; Penyediaan dan Penyehatan Dalam Rangka Industri Pengelolaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota; dan Pemantauan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengelolaan dan Pemantauan Scaled Mikro dan Kecil.

5.2.3.2 Urusan Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Polusi kegiatan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Persebaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pemantauan Pariwisata

Polusi kegiatan pada Pemantauan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Polusi kegiatan pada Pelaksanaan Peningkatan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada produk/ jasa/ jasa di bidang ekonomi kreatif pariwisata; Hak paten, merek, desain industri, hak cipta, rahasia geografis, dan rahasia dagang.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Polusi kegiatan pada Peningkatan Pertumbuhan Pelajar Ekonomi Kreatif Bidang Pariwisata dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Kompeten.

5.2.3.3 Urusan Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Pelaksanaan kegiatan adalah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kementerian Kabupaten/Kota; Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pusat; Pengendalian dan Pengawasan - Penyelidikan dan Peredaran Buah/Biji/Terbak dan Hutan Pakan Terbak dalam Daerah Kabupaten/Kota; pengawasan Mutu dan Peredaran Buah/Biji/Terbak dan Tanaman Pakan Terbak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pengawasan Sarana Pertanian.

- b. **Program Penyelidikan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
Pelaksanaan kegiatan adalah Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengabdian Wilayah Rural Riset Terbak dan Sampun/Galer Terbak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
Pelaksanaan kegiatan adalah Pengawasan Pemusukan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Penerimaan dan Pengawasan, Preparasi Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Pengabdian Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**
Pelaksanaan kegiatan adalah Pengendalian dan Penanggulangan Hewan Pertanian Kabupaten/Kota.
- e. **Program Penyelidikan Pertanian**
Pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksanaan Penyelidikan Pertanian.

3.3.3.4 **Daerah Perdagangan**

- a. **Program Pemetaan dan Pendaftaran Perusahaan**
Pelaksanaan kegiatan adalah Pemetaan Izin Perdagangan Pasar Rakyat, Pasar Perbatasan, dan Izin Usaha Toko Berekala; Pemetaan Tanda Daftar Usaha; Pemetaan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Pemetaan Waralaba Dan Waralaba Dalam Negeri; Pengendalian Fasilitas Penyelenggaraan Bahan Berbahaya dan Pengawasan, Distribusi, Pengawasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**
Pelaksanaan kegiatan adalah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Pemetaan Terhadap Praktek Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya.
- c. **Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**
Pelaksanaan kegiatan adalah Mengupai Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota; Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. **Program Pengembangan Ekspor**
Pelaksanaan kegiatan adalah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- e. **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**
Pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksanaan Monitoring Legal Berupa Tim, Tim Utang, dan Pengawasan.
- f. **Program Pengawasan dan Pemantauan Produk Dalam Negeri**

Fokus kegiatan adalah Pelaksanaan Proses, Pemantauan dan Peningkatan Program-program Pihak Dalam Negeri.

5.2.3.3 Urusan Perindustrian

a. Program Pemantauan dan Pembangunan Industri

Fokus kegiatan adalah Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

b. Program Pengabdian Jasa Usaha Industri

Fokus kegiatan adalah Persebaran Jasa Usaha Industri (JU), Jasa Perbaikan Usaha Industri (JPU), Jasa Usaha Kawasan Industri (JUKI), dan Jasa Perbaikan Kawasan Industri (JPKI) Kecamatan Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus kegiatan adalah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IJ, IPU, IUKI dan IPKI Kecamatan Kabupaten/Kota.

5.2.4 Penguat Peningkat Urusan Pemerintahan

5.2.4.1 Sekretariat Daerah

a. Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Program Administrasi Umum)

Fokus pada kegiatan Pelaksanaan Perilaku dan Kompetensi Pegawai Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitas Keselamatan Sekretariat Daerah, dan Pemetaan Organisasi.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan; Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Fasilitas dan Kompetensi Peluang; Fasilitas Kesehatan Daerah.

c. Program Perencanaan dan Penganggaran

Fokus pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan; Pelaksanaan Administrasi Penganggaran; Pengalokasian Pengalokasian Barang dan Jasa dan Pemantauan Kebijakan RII.

5.2.4.2 Kepegawaian Daerah

a. Program Kepegawaian Daerah

Fokus pada kegiatan Pengalokasian, Pelaksanaan dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

5.2.4.3 Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus pada kegiatan pelaksanaan Pelatihan/ Diklat bagi ASN sesuai dengan kebutuhan.

5.2.4.4 Sekretariat DPRD

a. Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab./Kota)

Fokus pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Fokus pada kegiatan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pelaksanaan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD;

Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat; Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; dan Festival Tahun DPRD.

5.2.4.3. Pengawasan

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal; Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Fokus kegiatan adalah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan; Pendampingan dan Asistensi.

5.2.4.6. Keuangan Daerah

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus kegiatan adalah Koordinasi dan Pengawasan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Daerah; dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus kegiatan adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus kegiatan adalah Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah.

5.2.4.7. Perencanaan Pembangunan

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus kegiatan adalah Perencanaan Perencanaan dan Pendanaan; Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus kegiatan adalah Perencanaan Perencanaan dan Pendanaan; Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.2.4.8. Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Fokus kegiatan pada peningkatan implementasi riset dan pengembangan yang mendukung pemerintahan. Serta, peningkatan kapasitas sumber dan teknologi.

5.2.4.9. Peningkat Pemerintahan Kecamatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan kepada warga.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Fokus kegiatan adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fokus kegiatan adalah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan pemerintahan dan ketertarikan umum, Koordinasi Penempatan dan Penugasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa sesuai Perundang-undangan Kepala Daerah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fokus kegiatan adalah Fasilitas, Akomodasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dari uraian di atas, terdapat perubahan jumlah program pemerintahan di dalam dokumen RKPD 2023 sebagai berikut perubahan diantaranya:

- a. Perubahan jumlah program dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang yang sebelumnya berjumlah 10 program pada RKPD Induk 2023, sedangkan di dalam Perubahan RKPD 2023 menjadi 9 program. Hal ini dikarenakan Program Pengembangan Sistem dan Fasilitas Perumahan Regional tidak ada anggaran dalam perubahan RKPD 2023;
- b. Perubahan jumlah program dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya berjumlah 4 program pada RKPD Induk 2023, sedangkan di dalam Perubahan RKPD 2023 menjadi 3 program;
- c. Perubahan jumlah program dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Dinas Pertanian dan Pangan yang sebelumnya berjumlah 1 program pada RKPD Induk 2023, sedangkan di dalam Perubahan RKPD 2023 menjadi 1 program;
- d. Perubahan jumlah program dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pangan di Dinas Pertanian dan Pangan yang sebelumnya berjumlah 4 program pada RKPD Induk 2023, sedangkan di dalam Perubahan RKPD 2023 menjadi 3 program;
- e. Perubahan jumlah program dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang sebelumnya berjumlah 5 program pada RKPD Induk 2023, sedangkan di dalam Perubahan RKPD 2023 menjadi 3 program;
- f. Perubahan jumlah program dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi di Dinas Koperasi dan Perindustrian yang sebelumnya berjumlah 3 program pada RKPD Induk 2023, sedangkan di dalam Perubahan RKPD 2023 menjadi 2 program;
- g. Perubahan jumlah program dalam Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang sebelumnya berjumlah 1 program pada RKPD Induk 2023, sedangkan di dalam Perubahan RKPD 2023 menjadi 2 program.

Program-program RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2018, sedangkan perubahan RKPD 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan program penatakelolaan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3706 Tahun 2020, sehingga terdapat beberapa perubahan program antara RKPD 2023 dengan perubahan RKPD 2023, dimana jumlah program pada RKPD 2023 Muti yang awalnya berjumlah 138 program,

SAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2023 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja Perangkat Daerah dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Perangkat Daerah dan pedoman untuk menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Fokus Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 guna menyusun perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Serang Tahun 2023. Selain hal tersebut, Perubahan RKPD juga menjadi acuan bagi seluruh perangkat kepentingan yang ada untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Keterhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya sangat di pengaruhi oleh sikap mental, ikhtid, semangat, ketekunan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2023, sehingga diharapkan mampu mendukung dan melanjutkan upaya menuju Visi Pembangunan Daerah yaitu "Serang Gemilang 2025".

BUPATI SERANG



ANRIL HAFID

LAMPIRAN B :
PERATURAN BUPATI BOMBANG
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BOMBANG NOMOR 24 TAHUN
2002 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOMBANG TAHUN 2002

**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2003**

ID	Name	Project/Activity		Status	Progress			Start Date	End Date	Priority	Assignee	Comments
		Task	Sub-Task		Start	End	Current					
1	Project A	Task 1.1	Sub-Task 1.1.1	Completed	2023-01-01	2023-01-05	2023-01-05	High	John Doe	Completed on time.		
2	Project A	Task 1.2	Sub-Task 1.2.1	In Progress	2023-01-06	2023-01-10	2023-01-08	Medium	Jane Smith	Minor delay.		
3	Project A	Task 1.2	Sub-Task 1.2.2	Not Started	2023-01-06	2023-01-10	2023-01-06	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		
4	Project B	Task 2.1	Sub-Task 2.1.1	Completed	2023-01-11	2023-01-15	2023-01-15	High	John Doe	Completed on time.		
5	Project B	Task 2.2	Sub-Task 2.2.1	In Progress	2023-01-16	2023-01-20	2023-01-18	Medium	Jane Smith	On track.		
6	Project B	Task 2.2	Sub-Task 2.2.2	Not Started	2023-01-16	2023-01-20	2023-01-16	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		
7	Project C	Task 3.1	Sub-Task 3.1.1	Completed	2023-01-21	2023-01-25	2023-01-25	High	John Doe	Completed on time.		
8	Project C	Task 3.2	Sub-Task 3.2.1	In Progress	2023-01-26	2023-02-01	2023-01-28	Medium	Jane Smith	Minor delay.		
9	Project C	Task 3.2	Sub-Task 3.2.2	Not Started	2023-01-26	2023-02-01	2023-01-26	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		
10	Project D	Task 4.1	Sub-Task 4.1.1	Completed	2023-02-02	2023-02-05	2023-02-05	High	John Doe	Completed on time.		
11	Project D	Task 4.2	Sub-Task 4.2.1	In Progress	2023-02-06	2023-02-10	2023-02-08	Medium	Jane Smith	On track.		
12	Project D	Task 4.2	Sub-Task 4.2.2	Not Started	2023-02-06	2023-02-10	2023-02-06	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		
13	Project E	Task 5.1	Sub-Task 5.1.1	Completed	2023-02-11	2023-02-15	2023-02-15	High	John Doe	Completed on time.		
14	Project E	Task 5.2	Sub-Task 5.2.1	In Progress	2023-02-16	2023-02-20	2023-02-18	Medium	Jane Smith	On track.		
15	Project E	Task 5.2	Sub-Task 5.2.2	Not Started	2023-02-16	2023-02-20	2023-02-16	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		
16	Project F	Task 6.1	Sub-Task 6.1.1	Completed	2023-02-21	2023-02-25	2023-02-25	High	John Doe	Completed on time.		
17	Project F	Task 6.2	Sub-Task 6.2.1	In Progress	2023-02-26	2023-03-01	2023-02-28	Medium	Jane Smith	On track.		
18	Project F	Task 6.2	Sub-Task 6.2.2	Not Started	2023-02-26	2023-03-01	2023-02-26	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		
19	Project G	Task 7.1	Sub-Task 7.1.1	Completed	2023-03-02	2023-03-05	2023-03-05	High	John Doe	Completed on time.		
20	Project G	Task 7.2	Sub-Task 7.2.1	In Progress	2023-03-06	2023-03-10	2023-03-08	Medium	Jane Smith	On track.		
21	Project G	Task 7.2	Sub-Task 7.2.2	Not Started	2023-03-06	2023-03-10	2023-03-06	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		
22	Project H	Task 8.1	Sub-Task 8.1.1	Completed	2023-03-11	2023-03-15	2023-03-15	High	John Doe	Completed on time.		
23	Project H	Task 8.2	Sub-Task 8.2.1	In Progress	2023-03-16	2023-03-20	2023-03-18	Medium	Jane Smith	On track.		
24	Project H	Task 8.2	Sub-Task 8.2.2	Not Started	2023-03-16	2023-03-20	2023-03-16	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		
25	Project I	Task 9.1	Sub-Task 9.1.1	Completed	2023-03-21	2023-03-25	2023-03-25	High	John Doe	Completed on time.		
26	Project I	Task 9.2	Sub-Task 9.2.1	In Progress	2023-03-26	2023-04-01	2023-03-28	Medium	Jane Smith	On track.		
27	Project I	Task 9.2	Sub-Task 9.2.2	Not Started	2023-03-26	2023-04-01	2023-03-26	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		
28	Project J	Task 10.1	Sub-Task 10.1.1	Completed	2023-04-02	2023-04-05	2023-04-05	High	John Doe	Completed on time.		
29	Project J	Task 10.2	Sub-Task 10.2.1	In Progress	2023-04-06	2023-04-10	2023-04-08	Medium	Jane Smith	On track.		
30	Project J	Task 10.2	Sub-Task 10.2.2	Not Started	2023-04-06	2023-04-10	2023-04-06	Medium	Jane Smith	Waiting for resources.		

Date	Time	Description of Activity		Location / Site	Weather			Wind		Sea State	Visibility	Remarks
		Temp	Wind		Pressure	Dir	Spd	Dir	Spd			
10/01/2023	08:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	09:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	10:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	11:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	12:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	13:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	14:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	15:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	16:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	17:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	18:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	19:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	20:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	21:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	22:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/01/2023	23:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	00:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	01:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	02:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	03:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	04:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	05:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	06:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	07:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	08:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	09:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	10:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	11:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	12:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	13:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	14:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	15:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	16:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	17:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	18:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	19:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	20:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	21:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	22:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	
10/02/2023	23:00	22.0	15	1013.5	090	15	090	15	1	10	Clear	

Date	Time	Investment/Trade Details		Account Name / Description	Market Data			Performance Metrics		Notes
		Symbol	Quantity		Price	Volume	Open	Close	High	
2023-10-26	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Initial purchase of S&P 500 ETF
2023-10-27	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Second purchase of S&P 500 ETF
2023-10-28	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Third purchase of S&P 500 ETF
2023-10-29	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fourth purchase of S&P 500 ETF
2023-10-30	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fifth purchase of S&P 500 ETF
2023-10-31	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Sixth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-01	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Seventh purchase of S&P 500 ETF
2023-11-02	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Eighth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-03	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Ninth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-04	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Tenth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-05	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Eleventh purchase of S&P 500 ETF
2023-11-06	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twelfth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-07	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirteenth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-08	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fourteenth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-09	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fifteenth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-10	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Sixteenth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-11	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Seventeenth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-12	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Eighteenth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-13	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Nineteenth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-14	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twentieth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-15	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twenty-first purchase of S&P 500 ETF
2023-11-16	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twenty-second purchase of S&P 500 ETF
2023-11-17	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twenty-third purchase of S&P 500 ETF
2023-11-18	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twenty-fourth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-19	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twenty-fifth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-20	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twenty-sixth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-21	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twenty-seventh purchase of S&P 500 ETF
2023-11-22	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twenty-eighth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-23	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Twenty-ninth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-24	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirtieth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-25	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirty-first purchase of S&P 500 ETF
2023-11-26	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirty-second purchase of S&P 500 ETF
2023-11-27	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirty-third purchase of S&P 500 ETF
2023-11-28	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirty-fourth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-29	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirty-fifth purchase of S&P 500 ETF
2023-11-30	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirty-sixth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-01	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirty-seventh purchase of S&P 500 ETF
2023-12-02	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirty-eighth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-03	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Thirty-ninth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-04	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fortieth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-05	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Forty-first purchase of S&P 500 ETF
2023-12-06	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Forty-second purchase of S&P 500 ETF
2023-12-07	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Forty-third purchase of S&P 500 ETF
2023-12-08	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Forty-fourth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-09	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Forty-fifth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-10	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Forty-sixth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-11	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Forty-seventh purchase of S&P 500 ETF
2023-12-12	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Forty-eighth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-13	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Forty-ninth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-14	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fiftieth purchase of S&P 500 ETF
2023-12-15	10:00	SPY	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Final purchase of S&P 500 ETF

Date	Time	Project Name / Location		Activity / Description	Mileage			Fuel		Total Cost	Remarks	
		From	To		Start	End	Start	End				
10/01/2023	08:00	01	02	Activity 1	01	02	08:00	09:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	09:00	02	03	Activity 2	02	03	09:00	10:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	10:00	03	04	Activity 3	03	04	10:00	11:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	11:00	04	05	Activity 4	04	05	11:00	12:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	12:00	05	06	Activity 5	05	06	12:00	13:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	13:00	06	07	Activity 6	06	07	13:00	14:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	14:00	07	08	Activity 7	07	08	14:00	15:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	15:00	08	09	Activity 8	08	09	15:00	16:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	16:00	09	10	Activity 9	09	10	16:00	17:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	17:00	10	11	Activity 10	10	11	17:00	18:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	18:00	11	12	Activity 11	11	12	18:00	19:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	19:00	12	13	Activity 12	12	13	19:00	20:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	20:00	13	14	Activity 13	13	14	20:00	21:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	21:00	14	15	Activity 14	14	15	21:00	22:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	22:00	15	16	Activity 15	15	16	22:00	23:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	23:00	16	17	Activity 16	16	17	23:00	00:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	00:00	17	18	Activity 17	17	18	00:00	01:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	01:00	18	19	Activity 18	18	19	01:00	02:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	02:00	19	20	Activity 19	19	20	02:00	03:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	03:00	20	21	Activity 20	20	21	03:00	04:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	04:00	21	22	Activity 21	21	22	04:00	05:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	05:00	22	23	Activity 22	22	23	05:00	06:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	06:00	23	24	Activity 23	23	24	06:00	07:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	07:00	24	25	Activity 24	24	25	07:00	08:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	08:00	25	26	Activity 25	25	26	08:00	09:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	09:00	26	27	Activity 26	26	27	09:00	10:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	10:00	27	28	Activity 27	27	28	10:00	11:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	11:00	28	29	Activity 28	28	29	11:00	12:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	12:00	29	30	Activity 29	29	30	12:00	13:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	13:00	30	31	Activity 30	30	31	13:00	14:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	14:00	31	32	Activity 31	31	32	14:00	15:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	15:00	32	33	Activity 32	32	33	15:00	16:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	16:00	33	34	Activity 33	33	34	16:00	17:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	17:00	34	35	Activity 34	34	35	17:00	18:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	18:00	35	36	Activity 35	35	36	18:00	19:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	19:00	36	37	Activity 36	36	37	19:00	20:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	20:00	37	38	Activity 37	37	38	20:00	21:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	21:00	38	39	Activity 38	38	39	21:00	22:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	22:00	39	40	Activity 39	39	40	22:00	23:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	23:00	40	41	Activity 40	40	41	23:00	00:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	00:00	41	42	Activity 41	41	42	00:00	01:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	01:00	42	43	Activity 42	42	43	01:00	02:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	02:00	43	44	Activity 43	43	44	02:00	03:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	03:00	44	45	Activity 44	44	45	03:00	04:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	04:00	45	46	Activity 45	45	46	04:00	05:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	05:00	46	47	Activity 46	46	47	05:00	06:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	06:00	47	48	Activity 47	47	48	06:00	07:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	07:00	48	49	Activity 48	48	49	07:00	08:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	08:00	49	50	Activity 49	49	50	08:00	09:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	09:00	50	51	Activity 50	50	51	09:00	10:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	10:00	51	52	Activity 51	51	52	10:00	11:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	11:00	52	53	Activity 52	52	53	11:00	12:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	12:00	53	54	Activity 53	53	54	12:00	13:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	13:00	54	55	Activity 54	54	55	13:00	14:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	14:00	55	56	Activity 55	55	56	14:00	15:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	15:00	56	57	Activity 56	56	57	15:00	16:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	16:00	57	58	Activity 57	57	58	16:00	17:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	17:00	58	59	Activity 58	58	59	17:00	18:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	18:00	59	60	Activity 59	59	60	18:00	19:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	19:00	60	61	Activity 60	60	61	19:00	20:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	20:00	61	62	Activity 61	61	62	20:00	21:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	21:00	62	63	Activity 62	62	63	21:00	22:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	22:00	63	64	Activity 63	63	64	22:00	23:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	23:00	64	65	Activity 64	64	65	23:00	00:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	00:00	65	66	Activity 65	65	66	00:00	01:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	01:00	66	67	Activity 66	66	67	01:00	02:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	02:00	67	68	Activity 67	67	68	02:00	03:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	03:00	68	69	Activity 68	68	69	03:00	04:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	04:00	69	70	Activity 69	69	70	04:00	05:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	05:00	70	71	Activity 70	70	71	05:00	06:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	06:00	71	72	Activity 71	71	72	06:00	07:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	07:00	72	73	Activity 72	72	73	07:00	08:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	08:00	73	74	Activity 73	73	74	08:00	09:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	09:00	74	75	Activity 74	74	75	09:00	10:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	10:00	75	76	Activity 75	75	76	10:00	11:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	11:00	76	77	Activity 76	76	77	11:00	12:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	12:00	77	78	Activity 77	77	78	12:00	13:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	13:00	78	79	Activity 78	78	79	13:00	14:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	14:00	79	80	Activity 79	79	80	14:00	15:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	15:00	80	81	Activity 80	80	81	15:00	16:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	16:00	81	82	Activity 81	81	82	16:00	17:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	17:00	82	83	Activity 82	82	83	17:00	18:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	18:00	83	84	Activity 83	83	84	18:00	19:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	19:00	84	85	Activity 84	84	85	19:00	20:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	20:00	85	86	Activity 85	85	86	20:00	21:00	10000	10000	10000	10000
10/01/2023	21:00	86	87	Activity 86	86	87	21:00	22:00	10000	10000	10000	10000</

Date	Time	Project Name / Activity		Location / Site	Weather Conditions		Wind Speed (km/h)	Wind Direction	Temperature (°C)	Humidity (%)	Pressure (hPa)	Notes
		Temp	Humidity		Temp	Humidity						
2023-10-26	08:00	18	65	Construction Site A	Clear	25	15	SE	22	75	1013	Start of day, good weather.
2023-10-26	09:00	19	68	Construction Site A	Clear	26	15	SE	23	75	1013	Continuing work.
2023-10-26	10:00	20	70	Construction Site A	Clear	27	15	SE	24	75	1013	Work progressing well.
2023-10-26	11:00	21	72	Construction Site A	Clear	28	15	SE	25	75	1013	Temperature rising.
2023-10-26	12:00	22	75	Construction Site A	Clear	29	15	SE	26	75	1013	Break time, clear sky.
2023-10-26	13:00	23	78	Construction Site A	Clear	30	15	SE	27	75	1013	Afternoon work.
2023-10-26	14:00	24	80	Construction Site A	Clear	31	15	SE	28	75	1013	Hot day, clear.
2023-10-26	15:00	25	82	Construction Site A	Clear	32	15	SE	29	75	1013	Peak temperature.
2023-10-26	16:00	24	80	Construction Site A	Clear	31	15	SE	28	75	1013	Temperature starting to drop.
2023-10-26	17:00	23	78	Construction Site A	Clear	30	15	SE	27	75	1013	End of day, clear.
2023-10-26	18:00	22	75	Construction Site A	Clear	29	15	SE	26	75	1013	Cooling down.
2023-10-26	19:00	21	72	Construction Site A	Clear	28	15	SE	25	75	1013	Evening work.
2023-10-26	20:00	20	70	Construction Site A	Clear	27	15	SE	24	75	1013	Clear night.
2023-10-26	21:00	19	68	Construction Site A	Clear	26	15	SE	23	75	1013	Temperature dropping.
2023-10-26	22:00	18	65	Construction Site A	Clear	25	15	SE	22	75	1013	Cool night.
2023-10-26	23:00	17	62	Construction Site A	Clear	24	15	SE	21	75	1013	End of day.
2023-10-27	08:00	16	60	Construction Site B	Clear	23	15	SE	20	75	1013	Start of day, clear.
2023-10-27	09:00	17	62	Construction Site B	Clear	24	15	SE	21	75	1013	Continuing work.
2023-10-27	10:00	18	65	Construction Site B	Clear	25	15	SE	22	75	1013	Work progressing.
2023-10-27	11:00	19	68	Construction Site B	Clear	26	15	SE	23	75	1013	Temperature rising.
2023-10-27	12:00	20	70	Construction Site B	Clear	27	15	SE	24	75	1013	Break time, clear.
2023-10-27	13:00	21	72	Construction Site B	Clear	28	15	SE	25	75	1013	Afternoon work.
2023-10-27	14:00	22	75	Construction Site B	Clear	29	15	SE	26	75	1013	Hot day, clear.
2023-10-27	15:00	23	78	Construction Site B	Clear	30	15	SE	27	75	1013	Peak temperature.
2023-10-27	16:00	22	75	Construction Site B	Clear	29	15	SE	26	75	1013	Temperature starting to drop.
2023-10-27	17:00	21	72	Construction Site B	Clear	28	15	SE	25	75	1013	End of day, clear.
2023-10-27	18:00	20	70	Construction Site B	Clear	27	15	SE	24	75	1013	Cooling down.
2023-10-27	19:00	19	68	Construction Site B	Clear	26	15	SE	23	75	1013	Evening work.
2023-10-27	20:00	18	65	Construction Site B	Clear	25	15	SE	22	75	1013	Clear night.
2023-10-27	21:00	17	62	Construction Site B	Clear	24	15	SE	21	75	1013	Temperature dropping.
2023-10-27	22:00	16	60	Construction Site B	Clear	23	15	SE	20	75	1013	Cool night.
2023-10-27	23:00	15	58	Construction Site B	Clear	22	15	SE	19	75	1013	End of day.

Date	Time	Description of Work		Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Notes
		Activity	Duration							
10/10/2023	08:00	Site inspection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Initial site assessment
10/10/2023	09:00	Equipment setup	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Setting up sensors
10/10/2023	10:00	Data collection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Recording temperature
10/10/2023	11:00	Site inspection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Checking sensor placement
10/10/2023	12:00	Lunch break	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Rest and equipment check
10/10/2023	13:00	Data collection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Recording temperature
10/10/2023	14:00	Site inspection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Monitoring weather changes
10/10/2023	15:00	Data collection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Recording temperature
10/10/2023	16:00	Equipment shutdown	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Turning off sensors
10/10/2023	17:00	Site cleanup	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Removing equipment
10/10/2023	18:00	Report writing	1.0	Office	Clear	10	25	65	1010	Summarizing data
10/10/2023	19:00	Equipment maintenance	1.0	Office	Clear	10	25	65	1010	Calibrating sensors
10/10/2023	20:00	Site inspection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Final site check
10/10/2023	21:00	Data collection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Recording temperature
10/10/2023	22:00	Site inspection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Monitoring weather
10/10/2023	23:00	Data collection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Recording temperature
10/10/2023	00:00	Site inspection	1.0	Site A	Clear	10	25	65	1010	Final site assessment

Date	Time	Location		Activity	Weather		Wind		Sea		Remarks
		Lat	Long		Temp	Wind	Dir	Force	Dir	Force	
1950	0800	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1951	0900	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1952	1000	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1953	1100	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1954	1200	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1955	1300	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1956	1400	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1957	1500	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1958	1600	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1959	1700	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1960	1800	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1961	1900	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1962	2000	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1963	2100	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1964	2200	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1965	2300	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1966	0000	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1967	0100	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1968	0200	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1969	0300	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1970	0400	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1971	0500	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1972	0600	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1973	0700	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1974	0800	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1975	0900	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1976	1000	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1977	1100	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1978	1200	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1979	1300	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1980	1400	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1981	1500	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1982	1600	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1983	1700	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1984	1800	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1985	1900	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1986	2000	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1987	2100	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1988	2200	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1989	2300	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1990	0000	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1991	0100	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1992	0200	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1993	0300	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1994	0400	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1995	0500	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1996	0600	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1997	0700	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1998	0800	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
1999	0900	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	
2000	1000	10° 00' N	173° 00' W	Under way	20	SE	10	SE	3	3	

Year	Month	Requirements for 2020		Number of students	Enrollment			Attendance			Total
		Elementary	Secondary		Elementary	Secondary	Elementary	Secondary	Elementary	Secondary	
2020	Jan	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Feb	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Mar	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Apr	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	May	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Jun	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Jul	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Aug	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Sep	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Oct	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Nov	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Dec	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2020	Total	1200	2400	3600	1140	2280	1140	2280	1140	2280	4560
2021	Jan	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Feb	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Mar	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Apr	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	May	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Jun	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Jul	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Aug	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Sep	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Oct	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Nov	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Dec	100	200	300	95	190	95	190	95	190	380
2021	Total	1200	2400	3600	1140	2280	1140	2280	1140	2280	4560

Year	Month	Project/Activity Name		Location/Address	Financial Data					Total Budget	Actual Spend	Variance
		Code	Description		Allocated	Actual	Remaining	Committed	Uncommitted			
2023	Jan	001	Office Supplies	123 Main St	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2023	Jan	002	Travel Expenses	456 Elm St	2000	2000	0	2000	0	0	0	
2023	Jan	003	IT Equipment	789 Oak St	5000	5000	0	5000	0	0	0	
2023	Jan	004	Marketing Campaign	101 Pine St	3000	3000	0	3000	0	0	0	
2023	Jan	005	Legal Fees	202 Birch St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	006	Consulting Services	303 Cedar St	2500	2500	0	2500	0	0	0	
2023	Jan	007	Software Licenses	404 Maple St	1800	1800	0	1800	0	0	0	
2023	Jan	008	Professional Services	505 Walnut St	2200	2200	0	2200	0	0	0	
2023	Jan	009	Printing Services	606 Spruce St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	010	Security Services	707 Fir St	1600	1600	0	1600	0	0	0	
2023	Jan	011	Insurance Premiums	808 Ash St	1400	1400	0	1400	0	0	0	
2023	Jan	012	Utilities	909 Hickory St	1100	1100	0	1100	0	0	0	
2023	Jan	013	Office Rent	1010 Sycamore St	3500	3500	0	3500	0	0	0	
2023	Jan	014	Employee Salaries	1111 Poplar St	10000	10000	0	10000	0	0	0	
2023	Jan	015	Benefits	1212 Willow St	2000	2000	0	2000	0	0	0	
2023	Jan	016	Depreciation	1313 Cherry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	017	Interest	1414 Peach St	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2023	Jan	018	Provision	1515 Plum St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	019	Other	1616 Apple St	800	800	0	800	0	0	0	
2023	Jan	020	Reserve	1717 Orange St	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2023	Jan	021	Income Tax	1818 Lemon St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	022	Corporate Tax	1919 Lime St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	023	Gift Tax	2020 Grape St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	024	Stamp Duty	2121 Strawberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	025	Other Taxes	2222 Blueberry St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	026	Income Tax	2323 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	027	Corporate Tax	2424 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	028	Gift Tax	2525 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	029	Stamp Duty	2626 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	030	Other Taxes	2727 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	031	Income Tax	2828 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	032	Corporate Tax	2929 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	033	Gift Tax	3030 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	034	Stamp Duty	3131 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	035	Other Taxes	3232 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	036	Income Tax	3333 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	037	Corporate Tax	3434 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	038	Gift Tax	3535 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	039	Stamp Duty	3636 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	040	Other Taxes	3737 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	041	Income Tax	3838 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	042	Corporate Tax	3939 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	043	Gift Tax	4040 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	044	Stamp Duty	4141 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	045	Other Taxes	4242 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	046	Income Tax	4343 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	047	Corporate Tax	4444 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	048	Gift Tax	4545 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	049	Stamp Duty	4646 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	050	Other Taxes	4747 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	051	Income Tax	4848 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	052	Corporate Tax	4949 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	053	Gift Tax	5050 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	054	Stamp Duty	5151 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	055	Other Taxes	5252 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	056	Income Tax	5353 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	057	Corporate Tax	5454 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	058	Gift Tax	5555 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	059	Stamp Duty	5656 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	060	Other Taxes	5757 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	061	Income Tax	5858 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	062	Corporate Tax	5959 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	063	Gift Tax	6060 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	064	Stamp Duty	6161 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	065	Other Taxes	6262 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	066	Income Tax	6363 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	067	Corporate Tax	6464 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	068	Gift Tax	6565 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	069	Stamp Duty	6666 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	070	Other Taxes	6767 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	071	Income Tax	6868 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	072	Corporate Tax	6969 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	073	Gift Tax	7070 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	074	Stamp Duty	7171 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	075	Other Taxes	7272 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	076	Income Tax	7373 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	077	Corporate Tax	7474 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	078	Gift Tax	7575 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	079	Stamp Duty	7676 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	080	Other Taxes	7777 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	081	Income Tax	7878 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	082	Corporate Tax	7979 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	083	Gift Tax	8080 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	084	Stamp Duty	8181 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	085	Other Taxes	8282 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	086	Income Tax	8383 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	087	Corporate Tax	8484 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	088	Gift Tax	8585 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	089	Stamp Duty	8686 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	090	Other Taxes	8787 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	091	Income Tax	8888 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	092	Corporate Tax	8989 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	093	Gift Tax	9090 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	094	Stamp Duty	9191 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	095	Other Taxes	9292 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	
2023	Jan	096	Income Tax	9393 Raspberry St	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jan	097	Corporate Tax	9494 Blackberry St	1200	1200	0	1200	0	0	0	
2023	Jan	098	Gift Tax	9595 Elderberry St	500	500	0	500	0	0	0	
2023	Jan	099	Stamp Duty	9696 Mulberry St	300	300	0	300	0	0	0	
2023	Jan	100	Other Taxes	9797 Currant St	200	200	0	200	0	0	0	

ID	Name	Project/Activity		Status	Progress			Financials				Date	
		Start	End		Actual	Planned	Remaining	Actual Cost	Planned Cost	Remaining Budget	Actual Revenue		
1	Project A	Task 1.1	Task 1.2	Completed	100%	100%	0%	10000	10000	0	10000	10000	2023-01-15
2	Project B	Task 2.1	Task 2.2	In Progress	75%	80%	5%	8000	7500	500	7500	8000	2023-02-01
3	Project C	Task 3.1	Task 3.2	On Hold	20%	0%	80%	2000	0	2000	0	2000	2023-03-10
4	Project D	Task 4.1	Task 4.2	Planned	0%	0%	100%	0	0	0	0	0	2023-04-01
5	Project E	Task 5.1	Task 5.2	Completed	100%	100%	0%	15000	15000	0	15000	15000	2023-01-20
6	Project F	Task 6.1	Task 6.2	In Progress	60%	70%	10%	6000	5500	500	5500	6000	2023-02-15
7	Project G	Task 7.1	Task 7.2	On Hold	30%	0%	70%	3000	0	3000	0	3000	2023-03-05
8	Project H	Task 8.1	Task 8.2	Planned	0%	0%	100%	0	0	0	0	0	2023-04-15
9	Project I	Task 9.1	Task 9.2	Completed	100%	100%	0%	12000	12000	0	12000	12000	2023-01-25
10	Project J	Task 10.1	Task 10.2	In Progress	85%	90%	5%	9000	8500	500	8500	9000	2023-02-20
11	Project K	Task 11.1	Task 11.2	On Hold	10%	0%	90%	1000	0	1000	0	1000	2023-03-15
12	Project L	Task 12.1	Task 12.2	Planned	0%	0%	100%	0	0	0	0	0	2023-04-20
13	Project M	Task 13.1	Task 13.2	Completed	100%	100%	0%	18000	18000	0	18000	18000	2023-01-30
14	Project N	Task 14.1	Task 14.2	In Progress	70%	75%	5%	7000	6500	500	6500	7000	2023-02-25
15	Project O	Task 15.1	Task 15.2	On Hold	40%	0%	60%	4000	0	4000	0	4000	2023-03-20
16	Project P	Task 16.1	Task 16.2	Planned	0%	0%	100%	0	0	0	0	0	2023-04-25
17	Project Q	Task 17.1	Task 17.2	Completed	100%	100%	0%	14000	14000	0	14000	14000	2023-02-05
18	Project R	Task 18.1	Task 18.2	In Progress	90%	95%	5%	9500	9000	500	9000	9500	2023-03-01
19	Project S	Task 19.1	Task 19.2	On Hold	15%	0%	85%	1500	0	1500	0	1500	2023-03-25
20	Project T	Task 20.1	Task 20.2	Planned	0%	0%	100%	0	0	0	0	0	2023-04-30

ID	Date	Description of Activity			Project Data			Financial Summary			
		Activity	Project	Phase	Start	End	Status	Cost	Revenue	Profit	Margin
001	2023-01-01	Project A	Phase 1	2023-01-01	2023-01-15	Completed	10000	15000	5000	50%	
002	2023-01-15	Project A	Phase 2	2023-01-15	2023-02-01	In Progress	12000	18000	6000	50%	
003	2023-02-01	Project A	Phase 3	2023-02-01	2023-02-15	Completed	15000	22000	7000	46.7%	
004	2023-02-15	Project B	Phase 1	2023-02-15	2023-03-01	In Progress	8000	12000	4000	50%	
005	2023-03-01	Project B	Phase 2	2023-03-01	2023-03-15	Completed	10000	15000	5000	50%	
006	2023-03-15	Project C	Phase 1	2023-03-15	2023-04-01	In Progress	12000	18000	6000	50%	
007	2023-04-01	Project C	Phase 2	2023-04-01	2023-04-15	Completed	15000	22000	7000	46.7%	
008	2023-04-15	Project D	Phase 1	2023-04-15	2023-05-01	In Progress	10000	15000	5000	50%	
009	2023-05-01	Project D	Phase 2	2023-05-01	2023-05-15	Completed	12000	18000	6000	50%	
010	2023-05-15	Project E	Phase 1	2023-05-15	2023-06-01	In Progress	8000	12000	4000	50%	
011	2023-06-01	Project E	Phase 2	2023-06-01	2023-06-15	Completed	10000	15000	5000	50%	
012	2023-06-15	Project F	Phase 1	2023-06-15	2023-07-01	In Progress	12000	18000	6000	50%	
013	2023-07-01	Project F	Phase 2	2023-07-01	2023-07-15	Completed	15000	22000	7000	46.7%	
014	2023-07-15	Project G	Phase 1	2023-07-15	2023-08-01	In Progress	10000	15000	5000	50%	
015	2023-08-01	Project G	Phase 2	2023-08-01	2023-08-15	Completed	12000	18000	6000	50%	
016	2023-08-15	Project H	Phase 1	2023-08-15	2023-09-01	In Progress	8000	12000	4000	50%	
017	2023-09-01	Project H	Phase 2	2023-09-01	2023-09-15	Completed	10000	15000	5000	50%	
018	2023-09-15	Project I	Phase 1	2023-09-15	2023-10-01	In Progress	12000	18000	6000	50%	
019	2023-10-01	Project I	Phase 2	2023-10-01	2023-10-15	Completed	15000	22000	7000	46.7%	
020	2023-10-15	Project J	Phase 1	2023-10-15	2023-11-01	In Progress	10000	15000	5000	50%	
021	2023-11-01	Project J	Phase 2	2023-11-01	2023-11-15	Completed	12000	18000	6000	50%	
022	2023-11-15	Project K	Phase 1	2023-11-15	2023-12-01	In Progress	8000	12000	4000	50%	
023	2023-12-01	Project K	Phase 2	2023-12-01	2023-12-15	Completed	10000	15000	5000	50%	
024	2023-12-15	Project L	Phase 1	2023-12-15	2024-01-01	In Progress	12000	18000	6000	50%	
025	2024-01-01	Project L	Phase 2	2024-01-01	2024-01-15	Completed	15000	22000	7000	46.7%	

Year	Month	Project Name / Activity		Project Description / Objectives	Financial Summary (USD)					Total Budget	Actual Spend	Variance
		Code	Category		Allocated	Actual	Remaining	Committed	Uncommitted			
2023	Jan	001	Infrastructure Upgrade	Upgrade server infrastructure to support increased traffic.	10000	10000	0	10000	0	0	0	
2023	Feb	002	Software Licenses	Procure licenses for new software tools.	5000	5000	0	5000	0	0	0	
2023	Mar	003	Marketing Campaign	Launch a targeted marketing campaign for Q1.	2000	2000	0	2000	0	0	0	
2023	Apr	004	Employee Training	Conduct training sessions for new hires.	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	May	005	Office Supplies	Restock office supplies and equipment.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2023	Jun	006	IT Support	Allocate budget for IT support services.	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Jul	007	Travel Expenses	Cover travel costs for business meetings.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2023	Aug	008	Utilities	Pay for office utilities and services.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2023	Sep	009	Security	Invest in cybersecurity measures.	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2023	Oct	010	Research & Dev	Allocate budget for R&D activities.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2023	Nov	011	Legal & Compliance	Cover legal fees and compliance costs.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2023	Dec	012	Contingency	Reserve budget for unforeseen expenses.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
Annual Total					100000	100000	0	100000	0	0	0	
2024	Jan	013	Infrastructure Upgrade	Continue infrastructure improvements.	10000	10000	0	10000	0	0	0	
2024	Feb	014	Software Licenses	Renew and add new software licenses.	5000	5000	0	5000	0	0	0	
2024	Mar	015	Marketing Campaign	Plan and execute Q1 marketing strategy.	2000	2000	0	2000	0	0	0	
2024	Apr	016	Employee Training	Organize training for skill development.	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2024	May	017	Office Supplies	Manage office supply inventory.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2024	Jun	018	IT Support	Ensure smooth IT operations.	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2024	Jul	019	Travel Expenses	Manage travel for business needs.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2024	Aug	020	Utilities	Pay for monthly utility bills.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2024	Sep	021	Security	Implement advanced security protocols.	1500	1500	0	1500	0	0	0	
2024	Oct	022	Research & Dev	Invest in new R&D projects.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2024	Nov	023	Legal & Compliance	Handle legal matters and audits.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
2024	Dec	024	Contingency	Reserve for unexpected costs.	1000	1000	0	1000	0	0	0	
Annual Total					100000	100000	0	100000	0	0	0	

Year	Month	Administrative Expenses		Total Administrative Expenses	Total Expenses			Total Income	Total Assets	Total Liabilities	Net Worth
		Salaries	Other		Salaries	Other	Interest				
1911	Jan										
1911	Feb										
1911	Mar										
1911	Apr										
1911	May										
1911	Jun										
1911	Jul										
1911	Aug										
1911	Sep										
1911	Oct										
1911	Nov										
1911	Dec										
1912	Jan										
1912	Feb										
1912	Mar										
1912	Apr										
1912	May										
1912	Jun										
1912	Jul										
1912	Aug										
1912	Sep										
1912	Oct										
1912	Nov										
1912	Dec										
1913	Jan										
1913	Feb										
1913	Mar										
1913	Apr										
1913	May										
1913	Jun										
1913	Jul										
1913	Aug										
1913	Sep										
1913	Oct										
1913	Nov										
1913	Dec										
1914	Jan										
1914	Feb										
1914	Mar										
1914	Apr										
1914	May										
1914	Jun										
1914	Jul										
1914	Aug										
1914	Sep										
1914	Oct										
1914	Nov										
1914	Dec										
1915	Jan										
1915	Feb										
1915	Mar										
1915	Apr										
1915	May										
1915	Jun										
1915	Jul										
1915	Aug										
1915	Sep										
1915	Oct										
1915	Nov										
1915	Dec										
1916	Jan										
1916	Feb										
1916	Mar										
1916	Apr										
1916	May										
1916	Jun										
1916	Jul										
1916	Aug										
1916	Sep										
1916	Oct										
1916	Nov										
1916	Dec										
1917	Jan										
1917	Feb										
1917	Mar										
1917	Apr										
1917	May										
1917	Jun										
1917	Jul										
1917	Aug										
1917	Sep										
1917	Oct										
1917	Nov										
1917	Dec										
1918	Jan										
1918	Feb										
1918	Mar										
1918	Apr										
1918	May										
1918	Jun										
1918	Jul										
1918	Aug										
1918	Sep										
1918	Oct										
1918	Nov										
1918	Dec										
1919	Jan										
1919	Feb										
1919	Mar										
1919	Apr										
1919	May										
1919	Jun										
1919	Jul										
1919	Aug										
1919	Sep										
1919	Oct										
1919	Nov										
1919	Dec										
1920	Jan										
1920	Feb										
1920	Mar										
1920	Apr										
1920	May										
1920	Jun										
1920	Jul										
1920	Aug										
1920	Sep										
1920	Oct										
1920	Nov										
1920	Dec										
1921	Jan										
1921	Feb										
1921	Mar										
1921	Apr										
1921	May										
1921	Jun										
1921	Jul										
1921	Aug										
1921	Sep										
1921	Oct										
1921	Nov										
1921	Dec										
1922	Jan										
1922	Feb										
1922	Mar										
1922	Apr										
1922	May										
1922	Jun										
1922	Jul										
1922	Aug										
1922	Sep										
1922	Oct										
1922	Nov										
1922	Dec										
1923	Jan										
1923	Feb										
1923	Mar										
1923	Apr										
1923	May										
1923	Jun										
1923	Jul										
1923	Aug										
1923	Sep										
1923	Oct										
1923	Nov										
1923	Dec										
1924	Jan										
1924	Feb										
1924	Mar										
1924	Apr										
1924	May										
1924	Jun										
1924	Jul										
1924	Aug										
1924	Sep										
1924	Oct										
1924	Nov										
1924	Dec										
1925	Jan										
1925	Feb										
1925	Mar										
1925	Apr										
1925	May										
1925	Jun										
1925	Jul										
1925	Aug										
1925	Sep										

Date	Time	Description of Work		Total Hours	Project Hours			Total Cost	Project Cost	Hourly Rate	Notes
		Task 1	Task 2		Task 1	Task 2	Task 3				
2023-01-01	08:00	Site Preparation	Excavation	8	4	4	1600	1600	200	Initial site clearing	
2023-01-02	08:00	Foundation Laying	Concrete Pouring	8	4	4	1600	1600	200	Foundation work completed	
2023-01-03	08:00	Structural Framework	Roof Truss Installation	8	4	4	1600	1600	200	Roof structure in place	
2023-01-04	08:00	Interior Wall Construction	Plumbing Installation	8	4	4	1600	1600	200	Plumbing rough-in	
2023-01-05	08:00	Electrical Wiring	Painting Walls	8	4	4	1600	1600	200	Electrical rough-in	
2023-01-06	08:00	Roofing	Interior Finishing	8	4	4	1600	1600	200	Roofing completed	
2023-01-07	08:00	Landscaping	Final Inspection	8	4	4	1600	1600	200	Final site cleanup	
2023-01-08	08:00	Site Handover	Documentation	8	4	4	1600	1600	200	Project completion	

Year	Month	Project Name / Activity		Project Manager / Lead	Budget (USD)			Actual Spend (USD)			Status
		Phase 1	Phase 2		Allocated	Spent	Variance	Allocated	Spent	Variance	
2023	Jan	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Feb	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Mar	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Apr	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	May	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Jun	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Jul	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Aug	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Sep	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Oct	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Nov	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2023	Dec	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Jan	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Feb	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Mar	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Apr	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	May	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Jun	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Jul	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Aug	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Sep	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Oct	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Nov	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track
2024	Dec	Project A	Project B	John Doe	10000	10000	10000	10000	10000	0	On Track

No	Date	Description of the Work		Particulars of the Work	Quantity			Value			Total
		Item	Unit		Area	Volume	Weight	Rate	Amount	Amount	
1	10/10/2023	Excavation	m ³	100	100	100	100	100	100	100	100
2	10/10/2023	Concrete	m ³	200	200	200	200	200	200	200	200
3	10/10/2023	Brickwork	m ²	500	500	500	500	500	500	500	500
4	10/10/2023	Plaster	m ²	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	10/10/2023	Painting	m ²	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
6	10/10/2023	Roofing	m ²	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	10/10/2023	Structural	m ³	500	500	500	500	500	500	500	500
8	10/10/2023	Electrical	m	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	10/10/2023	Plumbing	m	500	500	500	500	500	500	500	500
10	10/10/2023	Sanitary	m	200	200	200	200	200	200	200	200
11	10/10/2023	Painting	m ²	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12	10/10/2023	Roofing	m ²	500	500	500	500	500	500	500	500
13	10/10/2023	Structural	m ³	200	200	200	200	200	200	200	200
14	10/10/2023	Electrical	m	500	500	500	500	500	500	500	500
15	10/10/2023	Plumbing	m	200	200	200	200	200	200	200	200
16	10/10/2023	Sanitary	m	100	100	100	100	100	100	100	100
17	10/10/2023	Painting	m ²	500	500	500	500	500	500	500	500
18	10/10/2023	Roofing	m ²	200	200	200	200	200	200	200	200
19	10/10/2023	Structural	m ³	100	100	100	100	100	100	100	100
20	10/10/2023	Electrical	m	200	200	200	200	200	200	200	200
21	10/10/2023	Plumbing	m	100	100	100	100	100	100	100	100
22	10/10/2023	Sanitary	m	50	50	50	50	50	50	50	50
23	10/10/2023	Painting	m ²	200	200	200	200	200	200	200	200
24	10/10/2023	Roofing	m ²	100	100	100	100	100	100	100	100
25	10/10/2023	Structural	m ³	50	50	50	50	50	50	50	50
26	10/10/2023	Electrical	m	100	100	100	100	100	100	100	100
27	10/10/2023	Plumbing	m	50	50	50	50	50	50	50	50
28	10/10/2023	Sanitary	m	25	25	25	25	25	25	25	25
29	10/10/2023	Painting	m ²	100	100	100	100	100	100	100	100
30	10/10/2023	Roofing	m ²	50	50	50	50	50	50	50	50
31	10/10/2023	Structural	m ³	25	25	25	25	25	25	25	25
32	10/10/2023	Electrical	m	50	50	50	50	50	50	50	50
33	10/10/2023	Plumbing	m	25	25	25	25	25	25	25	25
34	10/10/2023	Sanitary	m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
35	10/10/2023	Painting	m ²	50	50	50	50	50	50	50	50
36	10/10/2023	Roofing	m ²	25	25	25	25	25	25	25	25
37	10/10/2023	Structural	m ³	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
38	10/10/2023	Electrical	m	25	25	25	25	25	25	25	25
39	10/10/2023	Plumbing	m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
40	10/10/2023	Sanitary	m	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
41	10/10/2023	Painting	m ²	25	25	25	25	25	25	25	25
42	10/10/2023	Roofing	m ²	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
43	10/10/2023	Structural	m ³	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
44	10/10/2023	Electrical	m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
45	10/10/2023	Plumbing	m	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
46	10/10/2023	Sanitary	m	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
47	10/10/2023	Painting	m ²	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
48	10/10/2023	Roofing	m ²	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
49	10/10/2023	Structural	m ³	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
50	10/10/2023	Electrical	m	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
51	10/10/2023	Plumbing	m	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
52	10/10/2023	Sanitary	m	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625
53	10/10/2023	Painting	m ²	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
54	10/10/2023	Roofing	m ²	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
55	10/10/2023	Structural	m ³	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625
56	10/10/2023	Electrical	m	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
57	10/10/2023	Plumbing	m	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625
58	10/10/2023	Sanitary	m	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125
59	10/10/2023	Painting	m ²	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
60	10/10/2023	Roofing	m ²	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625
61	10/10/2023	Structural	m ³	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125
62	10/10/2023	Electrical	m	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125
63	10/10/2023	Plumbing	m	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625
64	10/10/2023	Sanitary	m	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125
65	10/10/2023	Painting	m ²	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125	0.78125
66	10/10/2023	Roofing	m ²	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625	0.390625
67	10/10/2023	Structural	m ³	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125
68	10/10/2023	Electrical	m	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125
69	10/10/2023	Plumbing	m	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625
70	10/10/2023	Sanitary	m	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125
71	10/10/2023	Painting	m ²	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125	0.1953125
72	10/10/2023	Roofing	m ²	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625	0.09765625
73	10/10/2023	Structural	m ³	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125
74	10/10/2023	Electrical	m	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125
75	10/10/2023	Plumbing	m	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625
76	10/10/2023	Sanitary	m	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125
77	10/10/2023	Painting	m ²	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125	0.048828125
78	10/10/2023	Roofing	m ²	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625	0.0244140625
79	10/10/2023	Structural	m ³	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125
80	10/10/2023	Electrical	m	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125
81	10/10/2023	Plumbing	m	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625
82	10/10/2023	Sanitary	m	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125
83	10/10/2023	Painting	m ²	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125	0.01220703125
84	10/10/2023	Roofing	m ²	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625	0.006103515625
85	10/10/2023	Structural	m ³	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125
86	10/10/2023	Electrical	m	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125	0.0030517578125				

Year	Month	Project Name / Description		Status / Progress	Financial Summary			Operational Summary			Notes
		Phase 1	Phase 2		Actual	Budget	Variance	Units	Cost	Efficiency	
2023	Jan	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Feb	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Mar	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Apr	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	May	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Jun	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Jul	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Aug	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Sep	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Oct	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Nov	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2023	Dec	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Jan	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Feb	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Mar	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Apr	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	May	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Jun	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Jul	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Aug	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Sep	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Oct	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Nov	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	
2024	Dec	Phase 1	Phase 2	On Track	10000	10000	0	100	10000	100%	

Year	Month	Project Name and Budget		Status / Comments	Budget (USD)			Actual (USD)			Variance
		Code	Amount		Allocated	Spent	Remaining	Spent	Remaining	Spent	
2023	Jan	001	10000	Completed	10000	10000	0	10000	10000	0	
2023	Feb	002	15000	In Progress	15000	12000	3000	12000	3000	3000	
2023	Mar	003	20000	On Hold	20000	0	20000	0	20000	20000	
2023	Apr	004	25000	Completed	25000	25000	0	25000	25000	0	
2023	May	005	30000	In Progress	30000	20000	10000	20000	10000	10000	
2023	Jun	006	35000	On Hold	35000	0	35000	0	35000	35000	
2023	Jul	007	40000	Completed	40000	40000	0	40000	40000	0	
2023	Aug	008	45000	In Progress	45000	30000	15000	30000	15000	15000	
2023	Sep	009	50000	On Hold	50000	0	50000	0	50000	50000	
2023	Oct	010	55000	Completed	55000	55000	0	55000	55000	0	
2023	Nov	011	60000	In Progress	60000	40000	20000	40000	20000	20000	
2023	Dec	012	65000	On Hold	65000	0	65000	0	65000	65000	
2024	Jan	013	70000	Completed	70000	70000	0	70000	70000	0	
2024	Feb	014	75000	In Progress	75000	50000	25000	50000	25000	25000	
2024	Mar	015	80000	On Hold	80000	0	80000	0	80000	80000	
2024	Apr	016	85000	Completed	85000	85000	0	85000	85000	0	
2024	May	017	90000	In Progress	90000	60000	30000	60000	30000	30000	
2024	Jun	018	95000	On Hold	95000	0	95000	0	95000	95000	
2024	Jul	019	100000	Completed	100000	100000	0	100000	100000	0	
2024	Aug	020	105000	In Progress	105000	70000	35000	70000	35000	35000	
2024	Sep	021	110000	On Hold	110000	0	110000	0	110000	110000	
2024	Oct	022	115000	Completed	115000	115000	0	115000	115000	0	
2024	Nov	023	120000	In Progress	120000	80000	40000	80000	40000	40000	
2024	Dec	024	125000	On Hold	125000	0	125000	0	125000	125000	
2025	Jan	025	130000	Completed	130000	130000	0	130000	130000	0	
2025	Feb	026	135000	In Progress	135000	90000	45000	90000	45000	45000	
2025	Mar	027	140000	On Hold	140000	0	140000	0	140000	140000	
2025	Apr	028	145000	Completed	145000	145000	0	145000	145000	0	
2025	May	029	150000	In Progress	150000	100000	50000	100000	50000	50000	
2025	Jun	030	155000	On Hold	155000	0	155000	0	155000	155000	
2025	Jul	031	160000	Completed	160000	160000	0	160000	160000	0	
2025	Aug	032	165000	In Progress	165000	110000	55000	110000	55000	55000	
2025	Sep	033	170000	On Hold	170000	0	170000	0	170000	170000	
2025	Oct	034	175000	Completed	175000	175000	0	175000	175000	0	
2025	Nov	035	180000	In Progress	180000	120000	60000	120000	60000	60000	
2025	Dec	036	185000	On Hold	185000	0	185000	0	185000	185000	
2026	Jan	037	190000	Completed	190000	190000	0	190000	190000	0	
2026	Feb	038	195000	In Progress	195000	130000	65000	130000	65000	65000	
2026	Mar	039	200000	On Hold	200000	0	200000	0	200000	200000	
2026	Apr	040	205000	Completed	205000	205000	0	205000	205000	0	
2026	May	041	210000	In Progress	210000	140000	70000	140000	70000	70000	
2026	Jun	042	215000	On Hold	215000	0	215000	0	215000	215000	
2026	Jul	043	220000	Completed	220000	220000	0	220000	220000	0	
2026	Aug	044	225000	In Progress	225000	150000	75000	150000	75000	75000	
2026	Sep	045	230000	On Hold	230000	0	230000	0	230000	230000	
2026	Oct	046	235000	Completed	235000	235000	0	235000	235000	0	
2026	Nov	047	240000	In Progress	240000	160000	80000	160000	80000	80000	
2026	Dec	048	245000	On Hold	245000	0	245000	0	245000	245000	
2027	Jan	049	250000	Completed	250000	250000	0	250000	250000	0	
2027	Feb	050	255000	In Progress	255000	170000	85000	170000	85000	85000	
2027	Mar	051	260000	On Hold	260000	0	260000	0	260000	260000	
2027	Apr	052	265000	Completed	265000	265000	0	265000	265000	0	
2027	May	053	270000	In Progress	270000	180000	90000	180000	90000	90000	
2027	Jun	054	275000	On Hold	275000	0	275000	0	275000	275000	
2027	Jul	055	280000	Completed	280000	280000	0	280000	280000	0	
2027	Aug	056	285000	In Progress	285000	190000	95000	190000	95000	95000	
2027	Sep	057	290000	On Hold	290000	0	290000	0	290000	290000	
2027	Oct	058	295000	Completed	295000	295000	0	295000	295000	0	
2027	Nov	059	300000	In Progress	300000	200000	100000	200000	100000	100000	
2027	Dec	060	305000	On Hold	305000	0	305000	0	305000	305000	
2028	Jan	061	310000	Completed	310000	310000	0	310000	310000	0	
2028	Feb	062	315000	In Progress	315000	210000	105000	210000	105000	105000	
2028	Mar	063	320000	On Hold	320000	0	320000	0	320000	320000	
2028	Apr	064	325000	Completed	325000	325000	0	325000	325000	0	
2028	May	065	330000	In Progress	330000	220000	110000	220000	110000	110000	
2028	Jun	066	335000	On Hold	335000	0	335000	0	335000	335000	
2028	Jul	067	340000	Completed	340000	340000	0	340000	340000	0	
2028	Aug	068	345000	In Progress	345000	230000	115000	230000	115000	115000	
2028	Sep	069	350000	On Hold	350000	0	350000	0	350000	350000	
2028	Oct	070	355000	Completed	355000	355000	0	355000	355000	0	
2028	Nov	071	360000	In Progress	360000	240000	120000	240000	120000	120000	
2028	Dec	072	365000	On Hold	365000	0	365000	0	365000	365000	
2029	Jan	073	370000	Completed	370000	370000	0	370000	370000	0	
2029	Feb	074	375000	In Progress	375000	250000	125000	250000	125000	125000	
2029	Mar	075	380000	On Hold	380000	0	380000	0	380000	380000	
2029	Apr	076	385000	Completed	385000	385000	0	385000	385000	0	
2029	May	077	390000	In Progress	390000	260000	130000	260000	130000	130000	
2029	Jun	078	395000	On Hold	395000	0	395000	0	395000	395000	
2029	Jul	079	400000	Completed	400000	400000	0	400000	400000	0	
2029	Aug	080	405000	In Progress	405000	270000	135000	270000	135000	135000	
2029	Sep	081	410000	On Hold	410000	0	410000	0	410000	410000	
2029	Oct	082	415000	Completed	415000	415000	0	415000	415000	0	
2029	Nov	083	420000	In Progress	420000	280000	140000	280000	140000	140000	
2029	Dec	084	425000	On Hold	425000	0	425000	0	425000	425000	
2030	Jan	085	430000	Completed	430000	430000	0	430000	430000	0	
2030	Feb	086	435000	In Progress	435000	290000	145000	290000	145000	145000	
2030	Mar	087	440000	On Hold	440000	0	440000	0	440000	440000	
2030	Apr	088	445000	Completed	445000	445000	0	445000	445000	0	
2030	May	089	450000	In Progress	450000	300000	150000	300000	150000	150000	
2030	Jun	090	455000	On Hold	455000	0	455000	0	455000	455000	
2030	Jul	091	460000	Completed	460000	460000	0	460000	460000	0	
2030	Aug	092	465000	In Progress	465000	310000	155000	310000	155000	155000	
2030	Sep	093	470000	On Hold	470000	0	470000	0	470000	470000	
2030	Oct	094	475000	Completed	475000	475000	0	475000	475000	0	
2030	Nov	095	480000	In Progress	480000	320000	160000	320000	160000	160000	
2030	Dec	096	485000	On Hold	485000	0	485000	0	485000	485000	
2031	Jan	097	490000	Completed	490000	490000	0	490000	490000	0	
2031	Feb	098	495000	In Progress	495000	330000	165000	330000	165000	165000	
2031	Mar	099	500000	On Hold	500000	0	500000	0	500000	500000	
2031	Apr	100	505000	Completed	505000	505000	0	505000	505000	0	

Year	Month	Department / Division		Activity / Project Name	Financial Data					Total Budget	Actual Spend	Variance
		Code	Sub-Code		Allocated	Spent	Remaining	Committed	Uncommitted			
2023	Jan	001	001	Office Supplies	1000	500	500	1000	500	500	0	
2023	Jan	001	002	Travel Expenses	2000	1000	1000	2000	1000	1000	0	
2023	Jan	001	003	IT Support	1500	750	750	1500	750	750	0	
2023	Jan	001	004	Professional Fees	3000	1500	1500	3000	1500	1500	0	
2023	Jan	001	005	Utilities	800	400	400	800	400	400	0	
2023	Jan	001	006	Printing	600	300	300	600	300	300	0	
2023	Jan	001	007	Security	1200	600	600	1200	600	600	0	
2023	Jan	001	008	Insurance	2500	1250	1250	2500	1250	1250	0	
2023	Jan	001	009	Legal	1800	900	900	1800	900	900	0	
2023	Jan	001	010	Marketing	4000	2000	2000	4000	2000	2000	0	
2023	Jan	001	011	Research	3500	1750	1750	3500	1750	1750	0	
2023	Jan	001	012	Development	5000	2500	2500	5000	2500	2500	0	
2023	Jan	001	013	Testing	2800	1400	1400	2800	1400	1400	0	
2023	Jan	001	014	Deployment	1200	600	600	1200	600	600	0	
2023	Jan	001	015	Post-launch	900	450	450	900	450	450	0	
2023	Jan	001	016	Documentation	700	350	350	700	350	350	0	
2023	Jan	001	017	Training	1100	550	550	1100	550	550	0	
2023	Jan	001	018	Compliance	1600	800	800	1600	800	800	0	
2023	Jan	001	019	Audit	1300	650	650	1300	650	650	0	
2023	Jan	001	020	Reporting	1000	500	500	1000	500	500	0	
2023	Jan	001	021	Analysis	1400	700	700	1400	700	700	0	
2023	Jan	001	022	Consulting	1900	950	950	1900	950	950	0	
2023	Jan	001	023	Strategy	2200	1100	1100	2200	1100	1100	0	
2023	Jan	001	024	Implementation	2700	1350	1350	2700	1350	1350	0	
2023	Jan	001	025	Monitoring	2100	1050	1050	2100	1050	1050	0	
2023	Jan	001	026	Evaluation	1700	850	850	1700	850	850	0	
2023	Jan	001	027	Improvement	1500	750	750	1500	750	750	0	
2023	Jan	001	028	Optimization	1300	650	650	1300	650	650	0	
2023	Jan	001	029	Refinement	1100	550	550	1100	550	550	0	
2023	Jan	001	030	Final Review	900	450	450	900	450	450	0	
2023	Jan	001	031	Project Close	700	350	350	700	350	350	0	
2023	Jan	001	032	Post-project	500	250	250	500	250	250	0	
2023	Jan	001	033	Feedback	400	200	200	400	200	200	0	
2023	Jan	001	034	Lessons Learned	300	150	150	300	150	150	0	
2023	Jan	001	035	Documentation	200	100	100	200	100	100	0	
2023	Jan	001	036	Archive	100	50	50	100	50	50	0	
2023	Jan	001	037	Final Report	50	25	25	50	25	25	0	
2023	Jan	001	038	Project Summary	25	12.5	12.5	25	12.5	12.5	0	
2023	Jan	001	039	Final Review	12.5	6.25	6.25	12.5	6.25	6.25	0	
2023	Jan	001	040	Project Close	6.25	3.125	3.125	6.25	3.125	3.125	0	
2023	Jan	001	041	Post-project	3.125	1.5625	1.5625	3.125	1.5625	1.5625	0	
2023	Jan	001	042	Feedback	1.5625	0.78125	0.78125	1.5625	0.78125	0.78125	0	
2023	Jan	001	043	Lessons Learned	0.78125	0.390625	0.390625	0.78125	0.390625	0.390625	0	
2023	Jan	001	044	Documentation	0.390625	0.1953125	0.1953125	0.390625	0.1953125	0.1953125	0	
2023	Jan	001	045	Archive	0.1953125	0.09765625	0.09765625	0.1953125	0.09765625	0.09765625	0	
2023	Jan	001	046	Final Report	0.09765625	0.048828125	0.048828125	0.09765625	0.048828125	0.048828125	0	
2023	Jan	001	047	Project Summary	0.048828125	0.0244140625	0.0244140625	0.048828125	0.0244140625	0.0244140625	0	
2023	Jan	001	048	Final Review	0.0244140625	0.01220703125	0.01220703125	0.0244140625	0.01220703125	0.01220703125	0	
2023	Jan	001	049	Project Close	0.01220703125	0.006103515625	0.006103515625	0.01220703125	0.006103515625	0.006103515625	0	
2023	Jan	001	050	Post-project	0.006103515625	0.0030517578125	0.0030517578125	0.006103515625	0.0030517578125	0.0030517578125	0	
2023	Jan	001	051	Feedback	0.0030517578125	0.00152587890625	0.00152587890625	0.0030517578125	0.00152587890625	0.00152587890625	0	
2023	Jan	001	052	Lessons Learned	0.00152587890625	0.000762939453125	0.000762939453125	0.00152587890625	0.000762939453125	0.000762939453125	0	
2023	Jan	001	053	Documentation	0.000762939453125	0.0003814697265625	0.0003814697265625	0.000762939453125	0.0003814697265625	0.0003814697265625	0	
2023	Jan	001	054	Archive	0.0003814697265625	0.00019073486328125	0.00019073486328125	0.0003814697265625	0.00019073486328125	0.00019073486328125	0	
2023	Jan	001	055	Final Report	0.00019073486328125	0.000095367431640625	0.000095367431640625	0.00019073486328125	0.000095367431640625	0.000095367431640625	0	
2023	Jan	001	056	Project Summary	0.000095367431640625	0.0000476837158203125	0.0000476837158203125	0.000095367431640625	0.0000476837158203125	0.0000476837158203125	0	
2023	Jan	001	057	Final Review	0.0000476837158203125	0.00002384185791015625	0.00002384185791015625	0.0000476837158203125	0.00002384185791015625	0.00002384185791015625	0	
2023	Jan	001	058	Project Close	0.00002384185791015625	0.000011920928955078125	0.000011920928955078125	0.00002384185791015625	0.000011920928955078125	0.000011920928955078125	0	
2023	Jan	001	059	Post-project	0.000011920928955078125	0.0000059604644775390625	0.0000059604644775390625	0.000011920928955078125	0.0000059604644775390625	0.0000059604644775390625	0	
2023	Jan	001	060	Feedback	0.0000059604644775390625	0.00000298023223876953125	0.00000298023223876953125	0.0000059604644775390625	0.00000298023223876953125	0.00000298023223876953125	0	
2023	Jan	001	061	Lessons Learned	0.00000298023223876953125	0.000001490116119384765625	0.000001490116119384765625	0.00000298023223876953125	0.000001490116119384765625	0.000001490116119384765625	0	
2023	Jan	001	062	Documentation	0.000001490116119384765625	0.0000007450580596923828125	0.0000007450580596923828125	0.000001490116119384765625	0.0000007450580596923828125	0.0000007450580596923828125	0	
2023	Jan	001	063	Archive	0.0000007450580596923828125	0.00000037252902984619140625	0.00000037252902984619140625	0.0000007450580596923828125	0.00000037252902984619140625	0.00000037252902984619140625	0	
2023	Jan	001	064	Final Report	0.00000037252902984619140625	0.000000186264514923095703125	0.000000186264514923095703125	0.00000037252902984619140625	0.000000186264514923095703125	0.000000186264514923095703125	0	
2023	Jan	001	065	Project Summary	0.000000186264514923095703125	0.0000000931322574615478515625	0.0000000931322574615478515625	0.000000186264514923095703125	0.0000000931322574615478515625	0.0000000931322574615478515625	0	
2023	Jan	001	066	Final Review	0.0000000931322574615478515625	0.000000046566128730773928125	0.000000046566128730773928125	0.0000000931322574615478515625	0.000000046566128730773928125	0.000000046566128730773928125	0	
2023	Jan	001	067	Project Close	0.000000046566128730773928125	0.0000000232830643653869640625	0.0000000232830643653869640625	0.000000046566128730773928125	0.0000000232830643653869640625	0.0000000232830643653869640625	0	
2023	Jan	001	068	Post-project	0.0000000232830643653869640625	0.00000001164153218269348203125	0.00000001164153218269348203125	0.0000000232830643653869640625	0.00000001164153218269348203125	0.00000001164153218269348203125	0	
2023	Jan	001	069	Feedback	0.00000001164153218269348203125	0.000000005820766091346741015625	0.000000005820766091346741015625	0.00000001164153218269348203125	0.000000005820766091346741015625	0.000000005820766091346741015625	0	
2023	Jan	001	070	Lessons Learned	0.000000005820766091346741015625	0.0000000029103830456733705078125	0.0000000029103830456733705078125	0.000000005820766091346741015625	0.0000000029103830456733705078125	0.0000000029103830456733705078125	0	
2023	Jan	001	071	Documentation	0.0000000029103830456733705078125	0.00000000145519152283668525390625	0.00000000145519152283668525390625	0.0000000029103830456733705078125	0.00000000145519152283668525390625	0.00000000145519152283668525390625	0	
2023	Jan	001	072	Archive	0.00000000145519152283668525390625	0.000000000727595761418342626953125	0.000000000727595761418342626953125	0.00000000145519152283668525390625	0.000000000727595761418342626953125	0.000000000727595761418342626953125	0	
2023	Jan	001	073	Final Report	0.000000000727595761418342626953125	0.0000000003637978807091713134765625	0.0000000003637978807091713134765625	0.000000000727595761418342626953125	0.0000000003637978807091713134765625	0.0000000003637978807091713134765625	0	
2023	Jan	001	074	Project Summary	0.0000000003637978807091713134765625	0.00000000018189894035458565673828125	0.00000000018189894035458565673828125	0.0000000003637978807091713134765625	0.00000000018189894035458565673828125	0.00000000018189894035458565673828125	0	
2023	Jan	001	075	Final Review	0.00000000018189894035458565673828125	0						

Year	Month	Department Name		Activity Name	Budget			Actual		Variance	Comments
		Code	Description		Allocated	Spent	Remaining	Spent	Remaining		
2023	Jan	101	Salaries	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	102	Benefits	500	500	0	500	0			
2023	Jan	103	Travel	200	200	0	200	0			
2023	Jan	104	Supplies	100	100	0	100	0			
2023	Jan	105	Utilities	100	100	0	100	0			
2023	Jan	106	Repairs	100	100	0	100	0			
2023	Jan	107	Insurance	100	100	0	100	0			
2023	Jan	108	Depreciation	100	100	0	100	0			
2023	Jan	109	Interest	100	100	0	100	0			
2023	Jan	110	Other	100	100	0	100	0			
2023	Jan	111	Reserve	100	100	0	100	0			
2023	Jan	112	Income	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	113	Expenses	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	114	Net Income	0	0	0	0	0			
2023	Jan	115	Retained Earnings	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	116	Dividends	0	0	0	0	0			
2023	Jan	117	Other	0	0	0	0	0			
2023	Jan	118	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	119	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	120	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	121	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	122	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	123	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	124	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	125	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	126	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	127	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	128	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	129	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	130	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	131	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	132	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	133	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	134	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	135	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	136	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	137	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	138	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	139	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	140	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	141	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	142	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	143	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	144	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	145	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	146	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	147	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	148	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	149	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	150	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	151	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	152	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	153	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	154	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	155	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	156	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	157	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	158	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	159	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	160	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	161	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	162	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	163	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	164	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	165	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	166	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	167	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	168	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	169	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	170	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	171	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	172	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	173	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	174	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	175	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	176	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	177	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	178	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	179	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	180	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	181	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	182	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	183	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	184	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	185	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	186	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	187	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	188	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	189	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	190	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	191	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	192	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	193	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	194	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	195	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	196	Assets	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	197	Debt	0	0	0	0	0			
2023	Jan	198	Equity	1000	1000	0	1000	0			
2023	Jan	199	Liability	0	0	0	0	0			
2023	Jan	200	Assets	1000	1000	0	1000	0			

Date	Time	Location		Activity	Miles			Hours			Remarks
		Start	End		Actual	Planned	Remaining	Actual	Planned	Remaining	
10/1/2010	08:00	08:00	09:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	09:00	09:00	10:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	10:00	10:00	11:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	11:00	11:00	12:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	12:00	12:00	13:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	13:00	13:00	14:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	14:00	14:00	15:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	15:00	15:00	16:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	16:00	16:00	17:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	17:00	17:00	18:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	18:00	18:00	19:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	19:00	19:00	20:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	20:00	20:00	21:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	21:00	21:00	22:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	22:00	22:00	23:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/1/2010	23:00	23:00	00:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	00:00	00:00	01:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	01:00	01:00	02:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	02:00	02:00	03:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	03:00	03:00	04:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	04:00	04:00	05:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	05:00	05:00	06:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	06:00	06:00	07:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	07:00	07:00	08:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	08:00	08:00	09:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	09:00	09:00	10:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	10:00	10:00	11:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	11:00	11:00	12:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	12:00	12:00	13:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	13:00	13:00	14:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	14:00	14:00	15:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	15:00	15:00	16:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	16:00	16:00	17:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	17:00	17:00	18:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	18:00	18:00	19:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	19:00	19:00	20:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	20:00	20:00	21:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	21:00	21:00	22:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	22:00	22:00	23:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
10/2/2010	23:00	23:00	00:00	Work on...	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	

Item	Type	Project Name / Description			Status			Financials				Unit
		Code	Name	Location	Start	End	Phase	Cost	Revenue	Profit	Margin	
1	Construction	001	Highway A	City Center	2023-01-01	2023-12-31	Completed	1000000	1200000	200000	20%	m
2	Construction	002	Highway B	Suburb East	2023-02-15	2024-01-31	In Progress	800000	900000	100000	12.5%	m
3	Construction	003	Highway C	Rural West	2023-03-01	2024-03-31	Planning	600000	0	-600000	-100%	m
4	Construction	004	Highway D	City Center	2023-04-01	2023-09-30	Completed	400000	450000	50000	12.5%	m
5	Construction	005	Highway E	Suburb East	2023-05-01	2023-11-30	Completed	300000	350000	50000	16.7%	m
6	Construction	006	Highway F	Rural West	2023-06-01	2024-06-30	Planning	500000	0	-500000	-100%	m
7	Construction	007	Highway G	City Center	2023-07-01	2023-12-31	In Progress	200000	250000	50000	25%	m
8	Construction	008	Highway H	Suburb East	2023-08-01	2024-02-28	In Progress	150000	180000	30000	20%	m
9	Construction	009	Highway I	Rural West	2023-09-01	2024-09-30	Planning	100000	0	-100000	-100%	m
10	Construction	010	Highway J	City Center	2023-10-01	2023-12-31	In Progress	50000	60000	10000	20%	m
11	Construction	011	Highway K	Suburb East	2023-11-01	2024-04-30	In Progress	75000	90000	15000	20%	m
12	Construction	012	Highway L	Rural West	2023-12-01	2024-12-31	Planning	25000	0	-25000	-100%	m
13	Construction	013	Highway M	City Center	2024-01-01	2024-06-30	Planning	100000	0	-100000	-100%	m
14	Construction	014	Highway N	Suburb East	2024-02-01	2024-07-31	Planning	75000	0	-75000	-100%	m
15	Construction	015	Highway O	Rural West	2024-03-01	2025-03-31	Planning	50000	0	-50000	-100%	m
16	Construction	016	Highway P	City Center	2024-04-01	2024-09-30	Planning	25000	0	-25000	-100%	m
17	Construction	017	Highway Q	Suburb East	2024-05-01	2024-10-31	Planning	15000	0	-15000	-100%	m
18	Construction	018	Highway R	Rural West	2024-06-01	2025-06-30	Planning	7500	0	-7500	-100%	m
19	Construction	019	Highway S	City Center	2024-07-01	2024-12-31	Planning	3750	0	-3750	-100%	m
20	Construction	020	Highway T	Suburb East	2024-08-01	2025-01-31	Planning	1875	0	-1875	-100%	m
21	Construction	021	Highway U	Rural West	2024-09-01	2025-09-30	Planning	937.5	0	-937.5	-100%	m
22	Construction	022	Highway V	City Center	2024-10-01	2024-12-31	Planning	468.75	0	-468.75	-100%	m
23	Construction	023	Highway W	Suburb East	2024-11-01	2025-04-30	Planning	234.375	0	-234.375	-100%	m
24	Construction	024	Highway X	Rural West	2024-12-01	2025-12-31	Planning	117.1875	0	-117.1875	-100%	m
25	Construction	025	Highway Y	City Center	2025-01-01	2025-06-30	Planning	58.59375	0	-58.59375	-100%	m
26	Construction	026	Highway Z	Suburb East	2025-02-01	2025-07-31	Planning	29.296875	0	-29.296875	-100%	m
27	Construction	027	Highway AA	Rural West	2025-03-01	2026-03-31	Planning	14.6484375	0	-14.6484375	-100%	m
28	Construction	028	Highway AB	City Center	2025-04-01	2025-09-30	Planning	7.32421875	0	-7.32421875	-100%	m
29	Construction	029	Highway AC	Suburb East	2025-05-01	2025-10-31	Planning	3.662109375	0	-3.662109375	-100%	m
30	Construction	030	Highway AD	Rural West	2025-06-01	2026-06-30	Planning	1.8310546875	0	-1.8310546875	-100%	m
31	Construction	031	Highway AE	City Center	2025-07-01	2025-12-31	Planning	0.91552734375	0	-0.91552734375	-100%	m
32	Construction	032	Highway AF	Suburb East	2025-08-01	2026-01-31	Planning	0.457763671875	0	-0.457763671875	-100%	m
33	Construction	033	Highway AG	Rural West	2025-09-01	2026-09-30	Planning	0.2288818359375	0	-0.2288818359375	-100%	m
34	Construction	034	Highway AH	City Center	2025-10-01	2025-12-31	Planning	0.11444091796875	0	-0.11444091796875	-100%	m
35	Construction	035	Highway AI	Suburb East	2025-11-01	2026-04-30	Planning	0.057220458984375	0	-0.057220458984375	-100%	m
36	Construction	036	Highway AJ	Rural West	2025-12-01	2026-12-31	Planning	0.0286102294921875	0	-0.0286102294921875	-100%	m
37	Construction	037	Highway AK	City Center	2026-01-01	2026-06-30	Planning	0.01430511474609375	0	-0.01430511474609375	-100%	m
38	Construction	038	Highway AL	Suburb East	2026-02-01	2026-07-31	Planning	0.007152557373046875	0	-0.007152557373046875	-100%	m
39	Construction	039	Highway AM	Rural West	2026-03-01	2027-03-31	Planning	0.0035762786865234375	0	-0.0035762786865234375	-100%	m
40	Construction	040	Highway AN	City Center	2026-04-01	2026-09-30	Planning	0.00178813934326171875	0	-0.00178813934326171875	-100%	m
41	Construction	041	Highway AO	Suburb East	2026-05-01	2026-10-31	Planning	0.000894069671630859375	0	-0.000894069671630859375	-100%	m
42	Construction	042	Highway AP	Rural West	2026-06-01	2027-06-30	Planning	0.0004470348358154296875	0	-0.0004470348358154296875	-100%	m
43	Construction	043	Highway AQ	City Center	2026-07-01	2026-12-31	Planning	0.00022351741790771484375	0	-0.00022351741790771484375	-100%	m
44	Construction	044	Highway AR	Suburb East	2026-08-01	2027-01-31	Planning	0.000111758708953857421875	0	-0.000111758708953857421875	-100%	m
45	Construction	045	Highway AS	Rural West	2026-09-01	2027-09-30	Planning	5.587935447692871e-05	0	-5.587935447692871e-05	-100%	m
46	Construction	046	Highway AT	City Center	2026-10-01	2026-12-31	Planning	2.7939677238464356e-05	0	-2.7939677238464356e-05	-100%	m
47	Construction	047	Highway AU	Suburb East	2026-11-01	2027-04-30	Planning	1.3969838619232178e-05	0	-1.3969838619232178e-05	-100%	m
48	Construction	048	Highway AV	Rural West	2026-12-01	2027-12-31	Planning	6.984919309616089e-06	0	-6.984919309616089e-06	-100%	m
49	Construction	049	Highway AW	City Center	2027-01-01	2027-06-30	Planning	3.4924596548080445e-06	0	-3.4924596548080445e-06	-100%	m
50	Construction	050	Highway AX	Suburb East	2027-02-01	2027-07-31	Planning	1.7462298274040222e-06	0	-1.7462298274040222e-06	-100%	m
51	Construction	051	Highway AY	Rural West	2027-03-01	2028-03-31	Planning	8.731149137020111e-07	0	-8.731149137020111e-07	-100%	m
52	Construction	052	Highway AZ	City Center	2027-04-01	2027-09-30	Planning	4.3655745685100555e-07	0	-4.3655745685100555e-07	-100%	m
53	Construction	053	Highway BA	Suburb East	2027-05-01	2027-10-31	Planning	2.1827872842550277e-07	0	-2.1827872842550277e-07	-100%	m
54	Construction	054	Highway BB	Rural West	2027-06-01	2028-06-30	Planning	1.0913936421275138e-07	0	-1.0913936421275138e-07	-100%	m
55	Construction	055	Highway BC	City Center	2027-07-01	2027-12-31	Planning	5.456968210637569e-08	0	-5.456968210637569e-08	-100%	m
56	Construction	056	Highway BD	Suburb East	2027-08-01	2028-01-31	Planning	2.7284841053187845e-08	0	-2.7284841053187845e-08	-100%	m
57	Construction	057	Highway BE	Rural West	2027-09-01	2028-09-30	Planning	1.3642420526593922e-08	0	-1.3642420526593922e-08	-100%	m
58	Construction	058	Highway BF	City Center	2027-10-01	2027-12-31	Planning	6.821210263296961e-09	0	-6.821210263296961e-09	-100%	m
59	Construction	059	Highway BG	Suburb East	2027-11-01	2028-04-30	Planning	3.4106051316484805e-09	0	-3.4106051316484805e-09	-100%	m
60	Construction	060	Highway BH	Rural West	2027-12-01	2028-12-31	Planning	1.7053025658242402e-09	0	-1.7053025658242402e-09	-100%	m
61	Construction	061	Highway BI	City Center	2028-01-01	2028-06-30	Planning	8.526512829121201e-10	0	-8.526512829121201e-10	-100%	m
62	Construction	062	Highway BJ	Suburb East	2028-02-01	2028-07-31	Planning	4.2632564145606005e-10	0	-4.2632564145606005e-10	-100%	m
63	Construction	063	Highway BK	Rural West	2028-03-01	2029-03-31	Planning	2.1316282072803002e-10	0	-2.1316282072803002e-10	-100%	m
64	Construction	064	Highway BL	City Center	2028-04-01	2028-09-30	Planning	1.0658141036401501e-10	0	-1.0658141036401501e-10	-100%	m
65	Construction	065	Highway BM	Suburb East	2028-05-01	2028-10-31	Planning	5.3290705182007505e-11	0	-5.3290705182007505e-11	-100%	m
66	Construction	066	Highway BN	Rural West	2028-06-01	2029-06-30	Planning	2.6645352591003752e-11	0	-2.6645352591003752e-11	-100%	m
67	Construction	067	Highway BO	City Center	2028-07-01	2028-12-31	Planning	1.3322676295501876e-11	0	-1.3322676295501876e-11	-100%	m
68	Construction	068	Highway BP	Suburb East	2028-08-01	2029-01-31	Planning	6.661338147750938e-12	0	-6.661338147750938e-12	-100%	m
69	Construction	069	Highway BQ	Rural West	2028-09-01	2029-09-30	Planning	3.330669073875469e-12	0	-3.330669073875469e-12	-100%	m
70	Construction	070	Highway BR	City Center	2028-10-01	2028-12-31	Planning	1.6653345369377345e-12	0	-1.6653345369377345e-12	-100%	m
71	Construction	071	Highway BS	Suburb East	2028-11-01	2029-04-30	Planning	8.326672684688672e-13	0	-8.326672684688672e-13	-100%	m
72	Construction	072	Highway BT	Rural West	2028-12-01	2029-12-31	Planning	4.163336342344336e-13	0	-4.163336342344336e-13	-100%	m
73	Construction	073	Highway BU	City Center	2029-01-01	2029-06-30	Planning	2.081668171172168e-13	0	-2.081668171172168e-13	-100%	m
74	Construction	074	Highway BV	Suburb East	2029-02-01	2029-07-31	Planning	1.040834085586084e-13	0	-1.040834085586084e-13	-100%	m
75	Construction	075	Highway BW	Rural West	2029-03-01	2030-03-31	Planning	5.20417042793042e-14	0	-5.20417042793042e-14	-100%	m
76	Construction	076	Highway BX	City Center	2029-04-01	2029-09-30	Planning	2.60208521396521e-14	0	-2.60208521396521e-14	-100%	m
77	Construction	077	Highway BY	Suburb East	2029-05-01	2029-10-31	Planning	1.301042606982605e-14	0	-1.301042606982605e-14	-100%	m
78	Construction	078	Highway BZ	Rural West	2029-06-01	2030-06-30	Planning	6.505213034913025e-15	0	-6.505213034913025e-15	-100%	m
79	Construction	079	Highway CA	City Center	2029-07-01	2029-12-31	Planning	3.2526065174565125e-15	0	-3.2526065174565125e-15	-100%	m
80	Construction	080	Highway CB	Suburb East	2029-08-01	2030-01-31	Planning	1.6263032587282562e-15	0	-1.6263032587282562e-15</		

Year	Month	Department/Project Name		Location/Type of Activity	Budget (USD)			Actual Expenditure (USD)		Remarks
		Code	Description		Allocated	Spent	Balance	Actual	Variance	
2023	Jan	001	Office Supplies	City Office	1000	1000	1000	1000	Completed	
2023	Feb	002	Travel Expenses	Regional Office	2000	2000	2000	2000	Completed	
2023	Mar	003	Equipment Purchase	Headquarters	5000	5000	5000	5000	Completed	
2023	Apr	004	Software Licenses	IT Department	3000	3000	3000	3000	Completed	
2023	May	005	Professional Fees	Legal Department	1500	1500	1500	1500	Completed	
2023	Jun	006	Marketing Campaign	Marketing Dept	4000	4000	4000	4000	Completed	
2023	Jul	007	Research & Dev	R&D Dept	6000	6000	6000	6000	Completed	
2023	Aug	008	Consulting Services	Finance Dept	2500	2500	2500	2500	Completed	
2023	Sep	009	Training Programs	HR Dept	1800	1800	1800	1800	Completed	
2023	Oct	010	Infrastructure Upgrade	IT Dept	7000	7000	7000	7000	Completed	
2023	Nov	011	Security Measures	Security Dept	3500	3500	3500	3500	Completed	
2023	Dec	012	Year-end Audit	Finance Dept	2000	2000	2000	2000	Completed	
2024	Jan	013	Office Supplies	City Office	1000	1000	1000	1000	Completed	
2024	Feb	014	Travel Expenses	Regional Office	2000	2000	2000	2000	Completed	
2024	Mar	015	Equipment Purchase	Headquarters	5000	5000	5000	5000	Completed	
2024	Apr	016	Software Licenses	IT Department	3000	3000	3000	3000	Completed	
2024	May	017	Professional Fees	Legal Department	1500	1500	1500	1500	Completed	
2024	Jun	018	Marketing Campaign	Marketing Dept	4000	4000	4000	4000	Completed	
2024	Jul	019	Research & Dev	R&D Dept	6000	6000	6000	6000	Completed	
2024	Aug	020	Consulting Services	Finance Dept	2500	2500	2500	2500	Completed	
2024	Sep	021	Training Programs	HR Dept	1800	1800	1800	1800	Completed	
2024	Oct	022	Infrastructure Upgrade	IT Dept	7000	7000	7000	7000	Completed	
2024	Nov	023	Security Measures	Security Dept	3500	3500	3500	3500	Completed	
2024	Dec	024	Year-end Audit	Finance Dept	2000	2000	2000	2000	Completed	

Year	Month	Financial Summary (USD Millions)		Operational Summary (Key Metrics)	Sales Performance			Profitability		Market Share (%)	Growth Rate (%)
		Revenue	Expenses		Units Sold	Revenue	Profit				
2023	Jan	120	80	10000	120	20	10000	10000	15	5	
2023	Feb	110	75	9500	110	18	9500	9500	14	4	
2023	Mar	130	90	11000	130	22	11000	11000	16	6	
2023	Apr	140	95	12000	140	25	12000	12000	17	7	
2023	May	150	100	13000	150	28	13000	13000	18	8	
2023	Jun	160	105	14000	160	30	14000	14000	19	9	
2023	Jul	170	110	15000	170	32	15000	15000	20	10	
2023	Aug	180	115	16000	180	35	16000	16000	21	11	
2023	Sep	190	120	17000	190	38	17000	17000	22	12	
2023	Oct	200	125	18000	200	40	18000	18000	23	13	
2023	Nov	210	130	19000	210	42	19000	19000	24	14	
2023	Dec	220	135	20000	220	45	20000	20000	25	15	
2023 Total		2000	1350	180000	2000	350	180000	180000	20	10	
2022	Jan	110	75	9500	110	18	9500	9500	14	4	
2022	Feb	105	72	9000	105	17	9000	9000	13	3	
2022	Mar	120	80	10000	120	20	10000	10000	15	5	
2022	Apr	130	85	11000	130	22	11000	11000	16	6	
2022	May	140	90	12000	140	25	12000	12000	17	7	
2022	Jun	150	95	13000	150	28	13000	13000	18	8	
2022	Jul	160	100	14000	160	30	14000	14000	19	9	
2022	Aug	170	105	15000	170	32	15000	15000	20	10	
2022	Sep	180	110	16000	180	35	16000	16000	21	11	
2022	Oct	190	115	17000	190	38	17000	17000	22	12	
2022	Nov	200	120	18000	200	40	18000	18000	23	13	
2022	Dec	210	125	19000	210	42	19000	19000	24	14	
2022 Total		1900	1250	170000	1900	320	170000	170000	19	9	
2023 vs 2022 Total		+1000	+1000	+100000	+1000	+30	+100000	+100000	+1	+1	

Year	Month	Project Information			Budget (USD)			Actuals (USD)			Status
		Project Name	Phase	Location	Allocated	Spent	Remaining	Allocated	Spent	Remaining	
2023	Jan	Project A	Phase 1	Site 1	10000	5000	5000	10000	5000	5000	On Track
2023	Feb	Project A	Phase 1	Site 1	10000	10000	0	10000	10000	0	Completed
2023	Mar	Project B	Phase 1	Site 2	15000	7500	7500	15000	7500	7500	On Track
2023	Apr	Project B	Phase 1	Site 2	15000	15000	0	15000	15000	0	Completed
2023	May	Project C	Phase 1	Site 3	20000	10000	10000	20000	10000	10000	On Track
2023	Jun	Project C	Phase 1	Site 3	20000	20000	0	20000	20000	0	Completed
2023	Jul	Project D	Phase 1	Site 4	25000	12500	12500	25000	12500	12500	On Track
2023	Aug	Project D	Phase 1	Site 4	25000	25000	0	25000	25000	0	Completed
2023	Sep	Project E	Phase 1	Site 5	30000	15000	15000	30000	15000	15000	On Track
2023	Oct	Project E	Phase 1	Site 5	30000	30000	0	30000	30000	0	Completed
2023	Nov	Project F	Phase 1	Site 6	35000	17500	17500	35000	17500	17500	On Track
2023	Dec	Project F	Phase 1	Site 6	35000	35000	0	35000	35000	0	Completed
2024	Jan	Project G	Phase 1	Site 7	40000	20000	20000	40000	20000	20000	On Track
2024	Feb	Project G	Phase 1	Site 7	40000	40000	0	40000	40000	0	Completed
2024	Mar	Project H	Phase 1	Site 8	45000	22500	22500	45000	22500	22500	On Track
2024	Apr	Project H	Phase 1	Site 8	45000	45000	0	45000	45000	0	Completed
2024	May	Project I	Phase 1	Site 9	50000	25000	25000	50000	25000	25000	On Track
2024	Jun	Project I	Phase 1	Site 9	50000	50000	0	50000	50000	0	Completed
2024	Jul	Project J	Phase 1	Site 10	55000	27500	27500	55000	27500	27500	On Track
2024	Aug	Project J	Phase 1	Site 10	55000	55000	0	55000	55000	0	Completed
2024	Sep	Project K	Phase 1	Site 11	60000	30000	30000	60000	30000	30000	On Track
2024	Oct	Project K	Phase 1	Site 11	60000	60000	0	60000	60000	0	Completed
2024	Nov	Project L	Phase 1	Site 12	65000	32500	32500	65000	32500	32500	On Track
2024	Dec	Project L	Phase 1	Site 12	65000	65000	0	65000	65000	0	Completed

Date	Time	Description of Activity		Location	Miles			Total Miles	Average Speed (mph)	Notes
		Start	End		Start	End	Start			
10/1/2023	08:00	0.0	1.0	Highway 101	0.0	1.0	1.0	40	Normal driving	
10/1/2023	08:15	1.0	2.0	Highway 101	1.0	2.0	2.0	40	Normal driving	
10/1/2023	08:30	2.0	3.0	Highway 101	2.0	3.0	3.0	40	Normal driving	
10/1/2023	08:45	3.0	4.0	Highway 101	3.0	4.0	4.0	40	Normal driving	
10/1/2023	09:00	4.0	5.0	Highway 101	4.0	5.0	5.0	40	Normal driving	
10/1/2023	09:15	5.0	6.0	Highway 101	5.0	6.0	6.0	40	Normal driving	
10/1/2023	09:30	6.0	7.0	Highway 101	6.0	7.0	7.0	40	Normal driving	
10/1/2023	09:45	7.0	8.0	Highway 101	7.0	8.0	8.0	40	Normal driving	
10/1/2023	10:00	8.0	9.0	Highway 101	8.0	9.0	9.0	40	Normal driving	
10/1/2023	10:15	9.0	10.0	Highway 101	9.0	10.0	10.0	40	Normal driving	
10/1/2023	10:30	10.0	11.0	Highway 101	10.0	11.0	11.0	40	Normal driving	
10/1/2023	10:45	11.0	12.0	Highway 101	11.0	12.0	12.0	40	Normal driving	
10/1/2023	11:00	12.0	13.0	Highway 101	12.0	13.0	13.0	40	Normal driving	
10/1/2023	11:15	13.0	14.0	Highway 101	13.0	14.0	14.0	40	Normal driving	
10/1/2023	11:30	14.0	15.0	Highway 101	14.0	15.0	15.0	40	Normal driving	
10/1/2023	11:45	15.0	16.0	Highway 101	15.0	16.0	16.0	40	Normal driving	
10/1/2023	12:00	16.0	17.0	Highway 101	16.0	17.0	17.0	40	Normal driving	
10/1/2023	12:15	17.0	18.0	Highway 101	17.0	18.0	18.0	40	Normal driving	
10/1/2023	12:30	18.0	19.0	Highway 101	18.0	19.0	19.0	40	Normal driving	
10/1/2023	12:45	19.0	20.0	Highway 101	19.0	20.0	20.0	40	Normal driving	
10/1/2023	13:00	20.0	21.0	Highway 101	20.0	21.0	21.0	40	Normal driving	
10/1/2023	13:15	21.0	22.0	Highway 101	21.0	22.0	22.0	40	Normal driving	
10/1/2023	13:30	22.0	23.0	Highway 101	22.0	23.0	23.0	40	Normal driving	
10/1/2023	13:45	23.0	24.0	Highway 101	23.0	24.0	24.0	40	Normal driving	
10/1/2023	14:00	24.0	25.0	Highway 101	24.0	25.0	25.0	40	Normal driving	
10/1/2023	14:15	25.0	26.0	Highway 101	25.0	26.0	26.0	40	Normal driving	
10/1/2023	14:30	26.0	27.0	Highway 101	26.0	27.0	27.0	40	Normal driving	
10/1/2023	14:45	27.0	28.0	Highway 101	27.0	28.0	28.0	40	Normal driving	
10/1/2023	15:00	28.0	29.0	Highway 101	28.0	29.0	29.0	40	Normal driving	
10/1/2023	15:15	29.0	30.0	Highway 101	29.0	30.0	30.0	40	Normal driving	
10/1/2023	15:30	30.0	31.0	Highway 101	30.0	31.0	31.0	40	Normal driving	
10/1/2023	15:45	31.0	32.0	Highway 101	31.0	32.0	32.0	40	Normal driving	
10/1/2023	16:00	32.0	33.0	Highway 101	32.0	33.0	33.0	40	Normal driving	
10/1/2023	16:15	33.0	34.0	Highway 101	33.0	34.0	34.0	40	Normal driving	
10/1/2023	16:30	34.0	35.0	Highway 101	34.0	35.0	35.0	40	Normal driving	
10/1/2023	16:45	35.0	36.0	Highway 101	35.0	36.0	36.0	40	Normal driving	
10/1/2023	17:00	36.0	37.0	Highway 101	36.0	37.0	37.0	40	Normal driving	
10/1/2023	17:15	37.0	38.0	Highway 101	37.0	38.0	38.0	40	Normal driving	
10/1/2023	17:30	38.0	39.0	Highway 101	38.0	39.0	39.0	40	Normal driving	
10/1/2023	17:45	39.0	40.0	Highway 101	39.0	40.0	40.0	40	Normal driving	
10/1/2023	18:00	40.0	41.0	Highway 101	40.0	41.0	41.0	40	Normal driving	
10/1/2023	18:15	41.0	42.0	Highway 101	41.0	42.0	42.0	40	Normal driving	
10/1/2023	18:30	42.0	43.0	Highway 101	42.0	43.0	43.0	40	Normal driving	
10/1/2023	18:45	43.0	44.0	Highway 101	43.0	44.0	44.0	40	Normal driving	
10/1/2023	19:00	44.0	45.0	Highway 101	44.0	45.0	45.0	40	Normal driving	
10/1/2023	19:15	45.0	46.0	Highway 101	45.0	46.0	46.0	40	Normal driving	
10/1/2023	19:30	46.0	47.0	Highway 101	46.0	47.0	47.0	40	Normal driving	
10/1/2023	19:45	47.0	48.0	Highway 101	47.0	48.0	48.0	40	Normal driving	
10/1/2023	20:00	48.0	49.0	Highway 101	48.0	49.0	49.0	40	Normal driving	
10/1/2023	20:15	49.0	50.0	Highway 101	49.0	50.0	50.0	40	Normal driving	
10/1/2023	20:30	50.0	51.0	Highway 101	50.0	51.0	51.0	40	Normal driving	
10/1/2023	20:45	51.0	52.0	Highway 101	51.0	52.0	52.0	40	Normal driving	
10/1/2023	21:00	52.0	53.0	Highway 101	52.0	53.0	53.0	40	Normal driving	
10/1/2023	21:15	53.0	54.0	Highway 101	53.0	54.0	54.0	40	Normal driving	
10/1/2023	21:30	54.0	55.0	Highway 101	54.0	55.0	55.0	40	Normal driving	
10/1/2023	21:45	55.0	56.0	Highway 101	55.0	56.0	56.0	40	Normal driving	
10/1/2023	22:00	56.0	57.0	Highway 101	56.0	57.0	57.0	40	Normal driving	
10/1/2023	22:15	57.0	58.0	Highway 101	57.0	58.0	58.0	40	Normal driving	
10/1/2023	22:30	58.0	59.0	Highway 101	58.0	59.0	59.0	40	Normal driving	
10/1/2023	22:45	59.0	60.0	Highway 101	59.0	60.0	60.0	40	Normal driving	
10/1/2023	23:00	60.0	61.0	Highway 101	60.0	61.0	61.0	40	Normal driving	
10/1/2023	23:15	61.0	62.0	Highway 101	61.0	62.0	62.0	40	Normal driving	
10/1/2023	23:30	62.0	63.0	Highway 101	62.0	63.0	63.0	40	Normal driving	
10/1/2023	23:45	63.0	64.0	Highway 101	63.0	64.0	64.0	40	Normal driving	
10/1/2023	24:00	64.0	65.0	Highway 101	64.0	65.0	65.0	40	Normal driving	

ID	Name	Description of Project		Project Manager	Start Dates			End Date	Status	Priority	Risk
		Start	End		Actual Start	Actual End	Planned End				
1	Project A	Task A.1	Task A.2	John Doe	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	High	Low	
2	Project B	Task B.1	Task B.2	Jane Smith	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Medium	Medium	
3	Project C	Task C.1	Task C.2	Mike Johnson	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Low	High	
4	Project D	Task D.1	Task D.2	Sarah Lee	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Medium	Low	
5	Project E	Task E.1	Task E.2	David Kim	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	High	Medium	
6	Project F	Task F.1	Task F.2	Emily White	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Low	Low	
7	Project G	Task G.1	Task G.2	Chris Brown	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Medium	High	
8	Project H	Task H.1	Task H.2	Alex Green	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	High	Medium	
9	Project I	Task I.1	Task I.2	Mia Black	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Low	Low	
10	Project J	Task J.1	Task J.2	Noah Gray	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Medium	High	
11	Project K	Task K.1	Task K.2	Olivia Blue	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	High	Medium	
12	Project L	Task L.1	Task L.2	Liam Purple	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Low	Low	
13	Project M	Task M.1	Task M.2	Ava Yellow	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Medium	High	
14	Project N	Task N.1	Task N.2	Ethan Red	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	High	Medium	
15	Project O	Task O.1	Task O.2	Sophia Orange	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Low	Low	
16	Project P	Task P.1	Task P.2	Lucas Silver	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Medium	High	
17	Project Q	Task Q.1	Task Q.2	Isabella Gold	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	High	Medium	
18	Project R	Task R.1	Task R.2	Mason Bronze	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Low	Low	
19	Project S	Task S.1	Task S.2	Charlotte Platinum	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Medium	High	
20	Project T	Task T.1	Task T.2	Benjamin Diamond	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	High	Medium	

Year	Month	Project Name / Description		Location / Site	Project Status			Budget (USD)	Actual Cost (USD)	Variance (USD)	Remarks
		Phase	Progress (%)		Start Date	End Date	Completion Date				
2023	Jan	Project A	Phase 1	Site 1	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Feb	Project A	Phase 2	Site 1	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Mar	Project A	Phase 3	Site 1	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Apr	Project B	Phase 1	Site 2	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	May	Project B	Phase 2	Site 2	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Jun	Project B	Phase 3	Site 2	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Jul	Project C	Phase 1	Site 3	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Aug	Project C	Phase 2	Site 3	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Sep	Project C	Phase 3	Site 3	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Oct	Project D	Phase 1	Site 4	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Nov	Project D	Phase 2	Site 4	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2023	Dec	Project D	Phase 3	Site 4	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Jan	Project E	Phase 1	Site 5	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Feb	Project E	Phase 2	Site 5	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Mar	Project E	Phase 3	Site 5	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Apr	Project F	Phase 1	Site 6	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	May	Project F	Phase 2	Site 6	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Jun	Project F	Phase 3	Site 6	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Jul	Project G	Phase 1	Site 7	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Aug	Project G	Phase 2	Site 7	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Sep	Project G	Phase 3	Site 7	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Oct	Project H	Phase 1	Site 8	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Nov	Project H	Phase 2	Site 8	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2024	Dec	Project H	Phase 3	Site 8	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Jan	Project I	Phase 1	Site 9	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Feb	Project I	Phase 2	Site 9	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Mar	Project I	Phase 3	Site 9	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Apr	Project J	Phase 1	Site 10	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	May	Project J	Phase 2	Site 10	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Jun	Project J	Phase 3	Site 10	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Jul	Project K	Phase 1	Site 11	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Aug	Project K	Phase 2	Site 11	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Sep	Project K	Phase 3	Site 11	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Oct	Project L	Phase 1	Site 12	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Nov	Project L	Phase 2	Site 12	100%	100%	100000	100000	0	Completed	
2025	Dec	Project L	Phase 3	Site 12	100%	100%	100000	100000	0	Completed	

Date	Time	Project/Activity Name		Location	Project Details			Financial Summary				Remarks
		Code	Description		Start	End	Status	Budget	Actual	Variance	Balance	
2023-01-01	08:00	001	Construction of road	Site A	2023-01-01	2023-01-01	Completed	100000	100000	0	0	Completed
2023-01-02	08:00	002	Construction of road	Site B	2023-01-02	2023-01-02	In Progress	150000	120000	30000	150000	In Progress
2023-01-03	08:00	003	Construction of road	Site C	2023-01-03	2023-01-03	Not Started	200000	0	200000	200000	Not Started
2023-01-04	08:00	004	Construction of road	Site D	2023-01-04	2023-01-04	In Progress	180000	180000	0	0	In Progress
2023-01-05	08:00	005	Construction of road	Site E	2023-01-05	2023-01-05	Completed	120000	120000	0	0	Completed
2023-01-06	08:00	006	Construction of road	Site F	2023-01-06	2023-01-06	In Progress	160000	140000	20000	160000	In Progress
2023-01-07	08:00	007	Construction of road	Site G	2023-01-07	2023-01-07	Not Started	220000	0	220000	220000	Not Started
2023-01-08	08:00	008	Construction of road	Site H	2023-01-08	2023-01-08	In Progress	190000	190000	0	0	In Progress
2023-01-09	08:00	009	Construction of road	Site I	2023-01-09	2023-01-09	Completed	140000	140000	0	0	Completed
2023-01-10	08:00	010	Construction of road	Site J	2023-01-10	2023-01-10	In Progress	170000	150000	20000	170000	In Progress
2023-01-11	08:00	011	Construction of road	Site K	2023-01-11	2023-01-11	Not Started	210000	0	210000	210000	Not Started
2023-01-12	08:00	012	Construction of road	Site L	2023-01-12	2023-01-12	In Progress	180000	180000	0	0	In Progress
2023-01-13	08:00	013	Construction of road	Site M	2023-01-13	2023-01-13	Completed	130000	130000	0	0	Completed
2023-01-14	08:00	014	Construction of road	Site N	2023-01-14	2023-01-14	In Progress	160000	140000	20000	160000	In Progress
2023-01-15	08:00	015	Construction of road	Site O	2023-01-15	2023-01-15	Not Started	230000	0	230000	230000	Not Started
2023-01-16	08:00	016	Construction of road	Site P	2023-01-16	2023-01-16	In Progress	190000	190000	0	0	In Progress
2023-01-17	08:00	017	Construction of road	Site Q	2023-01-17	2023-01-17	Completed	150000	150000	0	0	Completed
2023-01-18	08:00	018	Construction of road	Site R	2023-01-18	2023-01-18	In Progress	170000	150000	20000	170000	In Progress
2023-01-19	08:00	019	Construction of road	Site S	2023-01-19	2023-01-19	Not Started	240000	0	240000	240000	Not Started
2023-01-20	08:00	020	Construction of road	Site T	2023-01-20	2023-01-20	In Progress	200000	200000	0	0	In Progress
2023-01-21	08:00	021	Construction of road	Site U	2023-01-21	2023-01-21	Completed	160000	160000	0	0	Completed
2023-01-22	08:00	022	Construction of road	Site V	2023-01-22	2023-01-22	In Progress	180000	160000	20000	180000	In Progress
2023-01-23	08:00	023	Construction of road	Site W	2023-01-23	2023-01-23	Not Started	250000	0	250000	250000	Not Started
2023-01-24	08:00	024	Construction of road	Site X	2023-01-24	2023-01-24	In Progress	210000	210000	0	0	In Progress
2023-01-25	08:00	025	Construction of road	Site Y	2023-01-25	2023-01-25	Completed	170000	170000	0	0	Completed
2023-01-26	08:00	026	Construction of road	Site Z	2023-01-26	2023-01-26	In Progress	190000	170000	20000	190000	In Progress
2023-01-27	08:00	027	Construction of road	Site AA	2023-01-27	2023-01-27	Not Started	260000	0	260000	260000	Not Started
2023-01-28	08:00	028	Construction of road	Site AB	2023-01-28	2023-01-28	In Progress	220000	220000	0	0	In Progress
2023-01-29	08:00	029	Construction of road	Site AC	2023-01-29	2023-01-29	Completed	180000	180000	0	0	Completed
2023-01-30	08:00	030	Construction of road	Site AD	2023-01-30	2023-01-30	In Progress	200000	180000	20000	200000	In Progress
2023-01-31	08:00	031	Construction of road	Site AE	2023-01-31	2023-01-31	Not Started	270000	0	270000	270000	Not Started

Year	Month	Transaction Description		Debit Amount	Credit Amount			Balance	Interest	Total	Date
		Account	Amount		Account	Amount	Account				
2018	1	Opening Balance									
2018	1	Salary	1000				1000				
2018	1	Wages	500				1500				
2018	1	Expenses	200				1300				
2018	1	Interest	100				1200				
2018	1	Dividends	100				1100				
2018	1	Transfer	100				1000				
2018	1	Transfer	100				900				
2018	1	Transfer	100				800				
2018	1	Transfer	100				700				
2018	1	Transfer	100				600				
2018	1	Transfer	100				500				
2018	1	Transfer	100				400				
2018	1	Transfer	100				300				
2018	1	Transfer	100				200				
2018	1	Transfer	100				100				
2018	1	Transfer	100				0				
2018	1	Transfer	100				100				
2018	1	Transfer	100				200				
2018	1	Transfer	100				300				
2018	1	Transfer	100				400				
2018	1	Transfer	100				500				
2018	1	Transfer	100				600				
2018	1	Transfer	100				700				
2018	1	Transfer	100				800				
2018	1	Transfer	100				900				
2018	1	Transfer	100				1000				
2018	1	Transfer	100				1100				
2018	1	Transfer	100				1200				
2018	1	Transfer	100				1300				
2018	1	Transfer	100				1400				
2018	1	Transfer	100				1500				
2018	1	Transfer	100				1600				
2018	1	Transfer	100				1700				
2018	1	Transfer	100				1800				
2018	1	Transfer	100				1900				
2018	1	Transfer	100				2000				
2018	1	Transfer	100				2100				
2018	1	Transfer	100				2200				
2018	1	Transfer	100				2300				
2018	1	Transfer	100				2400				
2018	1	Transfer	100				2500				
2018	1	Transfer	100				2600				
2018	1	Transfer	100				2700				
2018	1	Transfer	100				2800				
2018	1	Transfer	100				2900				
2018	1	Transfer	100				3000				
2018	1	Transfer	100				3100				
2018	1	Transfer	100				3200				
2018	1	Transfer	100				3300				
2018	1	Transfer	100				3400				
2018	1	Transfer	100				3500				
2018	1	Transfer	100				3600				
2018	1	Transfer	100				3700				
2018	1	Transfer	100				3800				
2018	1	Transfer	100				3900				
2018	1	Transfer	100				4000				
2018	1	Transfer	100				4100				
2018	1	Transfer	100				4200				
2018	1	Transfer	100				4300				
2018	1	Transfer	100				4400				
2018	1	Transfer	100				4500				
2018	1	Transfer	100				4600				
2018	1	Transfer	100				4700				
2018	1	Transfer	100				4800				
2018	1	Transfer	100				4900				
2018	1	Transfer	100				5000				
2018	1	Transfer	100				5100				
2018	1	Transfer	100				5200				
2018	1	Transfer	100				5300				
2018	1	Transfer	100				5400				
2018	1	Transfer	100				5500				
2018	1	Transfer	100				5600				
2018	1	Transfer	100				5700				
2018	1	Transfer	100				5800				
2018	1	Transfer	100				5900				
2018	1	Transfer	100				6000				
2018	1	Transfer	100				6100				
2018	1	Transfer	100				6200				
2018	1	Transfer	100				6300				
2018	1	Transfer	100				6400				
2018	1	Transfer	100				6500				
2018	1	Transfer	100				6600				
2018	1	Transfer	100				6700				
2018	1	Transfer	100				6800				
2018	1	Transfer	100				6900				
2018	1	Transfer	100				7000				
2018	1	Transfer	100				7100				
2018	1	Transfer	100				7200				
2018	1	Transfer	100				7300				
2018	1	Transfer	100				7400				
2018	1	Transfer	100				7500				
2018	1	Transfer	100				7600				
2018	1	Transfer	100				7700				
2018	1	Transfer	100				7800				
2018	1	Transfer	100				7900				
2018	1	Transfer	100				8000				
2018	1	Transfer	100				8100				
2018	1	Transfer	100				8200				
2018	1	Transfer	100				8300				
2018	1	Transfer	100				8400				
2018	1	Transfer	100				8500				
2018	1	Transfer	100				8600				
2018	1	Transfer	100				8700				
2018	1	Transfer	100				8800				
2018	1	Transfer	100				8900				
2018	1	Transfer	100				9000				
2018	1	Transfer	100				9100				
2018	1	Transfer	100				9200				
2018	1	Transfer	100				9300				
2018	1	Transfer	100				9400				
2018	1	Transfer	100				9500				
2018	1	Transfer	100				9600				
2018	1	Transfer	100				9700				
2018	1	Transfer	100				9800				
2018	1	Transfer	100				9900				
2018	1	Transfer	100				10000				

Year	Month	Description of the Project		Activity / Project Name	Budget (USD)			Actual (USD)			Status
		Item	Amount		Allocated	Spent	Remaining	Allocated	Spent	Remaining	
2023	Jan	Office Supplies	100	Office Supplies	100	100	0	0	0	Completed	
2023	Feb	Travel Expenses	500	Travel Expenses	500	500	0	0	0	Completed	
2023	Mar	Software Licenses	200	Software Licenses	200	200	0	0	0	Completed	
2023	Apr	Marketing Campaign	1500	Marketing Campaign	1500	1500	0	0	0	Completed	
2023	May	Equipment Purchase	3000	Equipment Purchase	3000	3000	0	0	0	Completed	
2023	Jun	Professional Fees	800	Professional Fees	800	800	0	0	0	Completed	
2023	Jul	Utilities	1200	Utilities	1200	1200	0	0	0	Completed	
2023	Aug	Insurance	600	Insurance	600	600	0	0	0	Completed	
2023	Sep	Salaries	10000	Salaries	10000	10000	0	0	0	Completed	
2023	Oct	Rent	2000	Rent	2000	2000	0	0	0	Completed	
2023	Nov	Depreciation	1000	Depreciation	1000	1000	0	0	0	Completed	
2023	Dec	Interest	500	Interest	500	500	0	0	0	Completed	
2023	Jan	Income Tax	1500	Income Tax	1500	1500	0	0	0	Completed	
2023	Feb	Retirement	800	Retirement	800	800	0	0	0	Completed	
2023	Mar	Charitable	300	Charitable	300	300	0	0	0	Completed	
2023	Apr	Dividends	1200	Dividends	1200	1200	0	0	0	Completed	
2023	May	Capital Gains	2000	Capital Gains	2000	2000	0	0	0	Completed	
2023	Jun	Losses	500	Losses	500	500	0	0	0	Completed	
2023	Jul	Gifts	200	Gifts	200	200	0	0	0	Completed	
2023	Aug	Other	100	Other	100	100	0	0	0	Completed	
2023	Sep	Total	25000	Total	25000	25000	0	0	0	Completed	

Date	Account	Description of Transaction		Amount Transferred (Debit/Credit)	Budget		Actual		Balance		Notes
		Account	Account		Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	
2023-01-01	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Opening Balance
2023-01-05	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Transfer to 2000
2023-01-10	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Transfer from 1000
2023-01-15	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Transfer to 3000
2023-01-20	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	Transfer from 1000
2023-01-25	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Transfer to 4000
2023-02-01	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	Transfer from 1000
2023-02-05	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Transfer to 5000
2023-02-10	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	Transfer from 1000
2023-02-15	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Transfer to 6000
2023-02-20	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	Transfer from 1000
2023-02-25	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Transfer to 7000
2023-03-01	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	Transfer from 1000
2023-03-05	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Transfer to 8000
2023-03-10	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	Transfer from 1000
2023-03-15	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Transfer to 9000
2023-03-20	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	Transfer from 1000
2023-03-25	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Transfer to 10000
2023-04-01	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	Transfer from 1000

Year	Month	Investment in Equity		Interest Income/Dividend Income/Other Income	Total Income			Total Expenditure		Net Income	Net Expenditure	Net Profit
		Share	Bond		Income	Share	Bond					
2010	Jan	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Feb	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Mar	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Apr	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	May	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Jun	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Jul	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Aug	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Sep	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Oct	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Nov	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2010	Dec	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Jan	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Feb	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Mar	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Apr	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	May	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Jun	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Jul	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Aug	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Sep	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Oct	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Nov	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2011	Dec	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Jan	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Feb	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Mar	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Apr	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	May	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Jun	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Jul	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Aug	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Sep	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Oct	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Nov	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	
2012	Dec	10000	5000	100	10000	5000	10000	5000	10000	5000	5000	

Year	Month	Departmental Expenditure		Actual Expenditure / Budgeted Expenditure (in Lakhs)	Percentage			Budgetary Control		Remarks
		Actual	Budget		Actual	Budget	Actual	Budget		
2011	Jan	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Feb	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Mar	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Apr	100	100	100	100	100	100	100		
2011	May	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Jun	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Jul	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Aug	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Sep	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Oct	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Nov	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Dec	100	100	100	100	100	100	100		
2011	Total	1200	1200	100	100	100	100	100		
2012	Jan	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Feb	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Mar	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Apr	100	100	100	100	100	100	100		
2012	May	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Jun	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Jul	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Aug	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Sep	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Oct	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Nov	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Dec	100	100	100	100	100	100	100		
2012	Total	1200	1200	100	100	100	100	100		
2013	Jan	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Feb	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Mar	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Apr	100	100	100	100	100	100	100		
2013	May	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Jun	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Jul	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Aug	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Sep	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Oct	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Nov	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Dec	100	100	100	100	100	100	100		
2013	Total	1200	1200	100	100	100	100	100		
2014	Jan	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Feb	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Mar	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Apr	100	100	100	100	100	100	100		
2014	May	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Jun	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Jul	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Aug	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Sep	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Oct	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Nov	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Dec	100	100	100	100	100	100	100		
2014	Total	1200	1200	100	100	100	100	100		
2015	Jan	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Feb	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Mar	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Apr	100	100	100	100	100	100	100		
2015	May	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Jun	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Jul	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Aug	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Sep	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Oct	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Nov	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Dec	100	100	100	100	100	100	100		
2015	Total	1200	1200	100	100	100	100	100		

Date	Time	Description of Work		Location	Weather			Wind	Temp	Humidity	Pressure	Notes
		Activity	Material		Temp	Wind	Clouds					
10/10/2023	08:00	Site Preparation	Excavation	Site A	20°C	15 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Start of excavation work.	
10/10/2023	09:00	Foundation Laying	Concrete	Site A	21°C	16 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Foundation work completed.	
10/10/2023	10:00	Structural Framework	Steel	Site A	22°C	17 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Structural framework in place.	
10/10/2023	11:00	Roofing	Roof Tiles	Site A	23°C	18 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Roofing work progressing.	
10/10/2023	12:00	Interior Finishing	Plaster	Site A	24°C	19 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Interior finishing work.	
10/10/2023	13:00	Electrical Installation	Wiring	Site A	25°C	20 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Electrical installation.	
10/10/2023	14:00	Plumbing	Pipes	Site A	26°C	21 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Plumbing work.	
10/10/2023	15:00	Painting	Paint	Site A	27°C	22 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Painting work.	
10/10/2023	16:00	Final Inspection	None	Site A	28°C	23 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Final inspection.	
10/10/2023	17:00	Site Cleanup	Debris	Site A	29°C	24 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Site cleanup.	
10/10/2023	18:00	Project Completion	None	Site A	30°C	25 km/h	10%	1010 hPa	Clear	Good	Project completed.	

Year	Month	Project Name / Activity			Project Status			Project Budget		Project Progress		Remarks
		Start Date	End Date	Duration	Phase	Progress %	Actual Cost	Planned Cost	Completion %	Remaining Budget		
2023	Jan	2023-01-01	2023-01-31	1 Month	Phase 1	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Feb	2023-02-01	2023-02-28	1 Month	Phase 2	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Mar	2023-03-01	2023-03-31	1 Month	Phase 3	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Apr	2023-04-01	2023-04-30	1 Month	Phase 4	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	May	2023-05-01	2023-05-31	1 Month	Phase 5	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Jun	2023-06-01	2023-06-30	1 Month	Phase 6	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Jul	2023-07-01	2023-07-31	1 Month	Phase 7	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Aug	2023-08-01	2023-08-31	1 Month	Phase 8	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Sep	2023-09-01	2023-09-30	1 Month	Phase 9	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Oct	2023-10-01	2023-10-31	1 Month	Phase 10	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Nov	2023-11-01	2023-11-30	1 Month	Phase 11	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2023	Dec	2023-12-01	2023-12-31	1 Month	Phase 12	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Jan	2024-01-01	2024-01-31	1 Month	Phase 13	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Feb	2024-02-01	2024-02-28	1 Month	Phase 14	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Mar	2024-03-01	2024-03-31	1 Month	Phase 15	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Apr	2024-04-01	2024-04-30	1 Month	Phase 16	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	May	2024-05-01	2024-05-31	1 Month	Phase 17	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Jun	2024-06-01	2024-06-30	1 Month	Phase 18	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Jul	2024-07-01	2024-07-31	1 Month	Phase 19	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Aug	2024-08-01	2024-08-31	1 Month	Phase 20	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Sep	2024-09-01	2024-09-30	1 Month	Phase 21	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Oct	2024-10-01	2024-10-31	1 Month	Phase 22	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Nov	2024-11-01	2024-11-30	1 Month	Phase 23	100%	100000	100000	100%	0	Completed	
2024	Dec	2024-12-01	2024-12-31	1 Month	Phase 24	100%	100000	100000	100%	0	Completed	

Year	Month	Project Name / Activity		Status / Remarks	Budget (USD)			Actual (USD)		Variance	Comments
		Code	Description		Allocated	Spent	Remaining	Spent	Remaining		
2023	Jan	001	Office Supplies	Completed	100	100	0	100	0	On budget	
2023	Feb	002	Travel Expenses	In Progress	200	150	50	150	50	Under budget	
2023	Mar	003	IT Equipment	Completed	500	500	0	500	0	On budget	
2023	Apr	004	Marketing Campaign	Completed	300	300	0	300	0	On budget	
2023	May	005	Employee Salaries	Completed	1000	1000	0	1000	0	On budget	
2023	Jun	006	Office Rent	Completed	200	200	0	200	0	On budget	
2023	Jul	007	Utilities	Completed	100	100	0	100	0	On budget	
2023	Aug	008	Insurance	Completed	150	150	0	150	0	On budget	
2023	Sep	009	Professional Fees	Completed	250	250	0	250	0	On budget	
2023	Oct	010	Depreciation	Completed	100	100	0	100	0	On budget	
2023	Nov	011	Interest	Completed	50	50	0	50	0	On budget	
2023	Dec	012	Income Tax	Completed	100	100	0	100	0	On budget	
2023	Total				3000	3000	0	3000	0	On budget	
2024	Jan	013	Office Supplies	Completed	100	100	0	100	0	On budget	
2024	Feb	014	Travel Expenses	In Progress	200	180	20	180	20	Under budget	
2024	Mar	015	IT Equipment	Completed	500	500	0	500	0	On budget	
2024	Apr	016	Marketing Campaign	Completed	300	300	0	300	0	On budget	
2024	May	017	Employee Salaries	Completed	1000	1000	0	1000	0	On budget	
2024	Jun	018	Office Rent	Completed	200	200	0	200	0	On budget	
2024	Jul	019	Utilities	Completed	100	100	0	100	0	On budget	
2024	Aug	020	Insurance	Completed	150	150	0	150	0	On budget	
2024	Sep	021	Professional Fees	Completed	250	250	0	250	0	On budget	
2024	Oct	022	Depreciation	Completed	100	100	0	100	0	On budget	
2024	Nov	023	Interest	Completed	50	50	0	50	0	On budget	
2024	Dec	024	Income Tax	Completed	100	100	0	100	0	On budget	
2024	Total				3000	3000	0	3000	0	On budget	

Year	Month	Revenue		Expenses	Profit			Total Revenue	Total Expenses	Total Profit	Notes
		Actual	Target		Actual	Target	Actual				
2023	Jan	1000	1000	500	500	500	1000	500	500		
2023	Feb	1200	1200	600	600	600	1200	600	600		
2023	Mar	1500	1500	750	750	750	1500	750	750		
2023	Apr	1800	1800	900	900	900	1800	900	900		
2023	May	2000	2000	1000	1000	1000	2000	1000	1000		
2023	Jun	2200	2200	1100	1100	1100	2200	1100	1100		
2023	Jul	2500	2500	1250	1250	1250	2500	1250	1250		
2023	Aug	2800	2800	1400	1400	1400	2800	1400	1400		
2023	Sep	3000	3000	1500	1500	1500	3000	1500	1500		
2023	Oct	3200	3200	1600	1600	1600	3200	1600	1600		
2023	Nov	3500	3500	1750	1750	1750	3500	1750	1750		
2023	Dec	4000	4000	2000	2000	2000	4000	2000	2000		
2023	Total	25000	25000	12500	12500	12500	25000	12500	12500		
2024	Jan	1100	1100	550	550	550	1100	550	550		
2024	Feb	1300	1300	650	650	650	1300	650	650		
2024	Mar	1600	1600	800	800	800	1600	800	800		
2024	Apr	1900	1900	950	950	950	1900	950	950		
2024	May	2100	2100	1050	1050	1050	2100	1050	1050		
2024	Jun	2300	2300	1150	1150	1150	2300	1150	1150		
2024	Jul	2600	2600	1300	1300	1300	2600	1300	1300		
2024	Aug	2900	2900	1450	1450	1450	2900	1450	1450		
2024	Sep	3100	3100	1550	1550	1550	3100	1550	1550		
2024	Oct	3300	3300	1650	1650	1650	3300	1650	1650		
2024	Nov	3600	3600	1800	1800	1800	3600	1800	1800		
2024	Dec	4100	4100	2050	2050	2050	4100	2050	2050		
2024	Total	26000	26000	13000	13000	13000	26000	13000	13000		

Date	Time	Description of Activity		Location	Weather			Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Remarks
		Start	End		Wind	Temp	Humidity						
10/10/2023	08:00	08:00	09:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	09:00	09:00	10:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	10:00	10:00	11:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	11:00	11:00	12:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	12:00	12:00	13:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	13:00	13:00	14:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	14:00	14:00	15:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	15:00	15:00	16:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	16:00	16:00	17:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	17:00	17:00	18:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	18:00	18:00	19:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	19:00	19:00	20:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	20:00	20:00	21:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	21:00	21:00	22:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	22:00	22:00	23:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	
10/10/2023	23:00	23:00	00:00	Field Station	10	15	10	20	60	1010	10	Clear	

Year	Month	Financial Summary (in Lakhs)		Operational Metrics			Resource Utilization			Notes
		Revenue	Expenses	Units Produced	Quality Score	Defect Rate	Personnel	Equipment	Material	
2023	Jan	120	80	1500	95	2%	10	5	100	Stable performance
2023	Feb	115	78	1450	94	2.5%	10	5	100	Minor fluctuations
2023	Mar	130	85	1600	96	1.8%	10	5	100	Growth in revenue
2023	Apr	125	82	1550	95	2.2%	10	5	100	Consistent output
2023	May	140	90	1700	97	1.5%	10	5	100	Peak performance
2023	Jun	135	88	1650	96	1.8%	10	5	100	High productivity
2023	Jul	150	95	1800	98	1.2%	10	5	100	Record revenue
2023	Aug	145	92	1750	97	1.5%	10	5	100	Sustained growth
2023	Sep	130	85	1600	96	1.8%	10	5	100	Steady progress
2023	Oct	120	80	1500	95	2.0%	10	5	100	End of year review
2023	Nov	110	75	1400	94	2.5%	10	5	100	Preparation for next year
2023	Dec	100	70	1300	93	3.0%	10	5	100	Year-end closure
2024	Jan	115	78	1450	94	2.5%	10	5	100	Start of new year
2024	Feb	125	85	1550	95	2.2%	10	5	100	Positive start
2024	Mar	135	90	1650	96	1.8%	10	5	100	Continued growth
2024	Apr	145	95	1750	97	1.5%	10	5	100	Strong performance
2024	May	155	100	1850	98	1.2%	10	5	100	Exceeding expectations
2024	Jun	160	105	1900	99	1.0%	10	5	100	Historic high
2024	Jul	165	110	1950	99	0.8%	10	5	100	Peak achievement
2024	Aug	160	105	1900	98	1.0%	10	5	100	Sustained excellence
2024	Sep	155	100	1850	97	1.2%	10	5	100	High productivity
2024	Oct	150	95	1800	96	1.5%	10	5	100	Consistent output
2024	Nov	145	90	1750	95	1.8%	10	5	100	Steady progress
2024	Dec	140	85	1700	94	2.0%	10	5	100	End of year review

ID	Type	Description / Details		Status / Priority	Financials			Operational			Notes
		Item 1	Item 2		Cost	Revenue	Profit	Units	Time	Efficiency	
1	Product	Item A	Item B	Active	100	200	100	1000	5000	10000	High
2	Product	Item C	Item D	Active	200	400	200	2000	10000	20000	Medium
3	Product	Item E	Item F	Active	150	300	150	1500	7500	15000	Low
4	Product	Item G	Item H	Active	300	600	300	3000	15000	30000	High
5	Product	Item I	Item J	Active	250	500	250	2500	12500	25000	Medium
6	Product	Item K	Item L	Active	180	360	180	1800	9000	18000	Low
7	Product	Item M	Item N	Active	400	800	400	4000	20000	40000	High
8	Product	Item O	Item P	Active	350	700	350	3500	17500	35000	Medium
9	Product	Item Q	Item R	Active	220	440	220	2200	11000	22000	Low
10	Product	Item S	Item T	Active	280	560	280	2800	14000	28000	Medium
11	Product	Item U	Item V	Active	120	240	120	1200	6000	12000	Low
12	Product	Item W	Item X	Active	320	640	320	3200	16000	32000	High
13	Product	Item Y	Item Z	Active	270	540	270	2700	13500	27000	Medium
14	Product	Item AA	Item AB	Active	190	380	190	1900	9500	19000	Low
15	Product	Item AC	Item AD	Active	380	760	380	3800	19000	38000	High
16	Product	Item AE	Item AF	Active	310	620	310	3100	15500	31000	Medium
17	Product	Item AG	Item AH	Active	240	480	240	2400	12000	24000	Low
18	Product	Item AI	Item AJ	Active	420	840	420	4200	21000	42000	High
19	Product	Item AK	Item AL	Active	360	720	360	3600	18000	36000	Medium
20	Product	Item AM	Item AN	Active	210	420	210	2100	10500	21000	Low
21	Product	Item AO	Item AP	Active	450	900	450	4500	22500	45000	High
22	Product	Item AQ	Item AR	Active	390	780	390	3900	19500	39000	Medium
23	Product	Item AS	Item AT	Active	260	520	260	2600	13000	26000	Low
24	Product	Item AU	Item AV	Active	480	960	480	4800	24000	48000	High
25	Product	Item AW	Item AX	Active	410	820	410	4100	20500	41000	Medium
26	Product	Item AY	Item AZ	Active	330	660	330	3300	16500	33000	Low
27	Product	Item BA	Item BB	Active	290	580	290	2900	14500	29000	High
28	Product	Item BC	Item BD	Active	170	340	170	1700	8500	17000	Medium
29	Product	Item BE	Item BF	Active	430	860	430	4300	21500	43000	Low
30	Product	Item BG	Item BH	Active	370	740	370	3700	18500	37000	High
31	Product	Item BI	Item BJ	Active	230	460	230	2300	11500	23000	Medium
32	Product	Item BK	Item BL	Active	500	1000	500	5000	25000	50000	Low
33	Product	Item BM	Item BN	Active	440	880	440	4400	22000	44000	High
34	Product	Item BO	Item BP	Active	300	600	300	3000	15000	30000	Medium
35	Product	Item BQ	Item BR	Active	160	320	160	1600	8000	16000	Low
36	Product	Item BS	Item BT	Active	460	920	460	4600	23000	46000	High
37	Product	Item BU	Item BV	Active	400	800	400	4000	20000	40000	Medium
38	Product	Item BW	Item BX	Active	280	560	280	2800	14000	28000	Low
39	Product	Item BY	Item BZ	Active	520	1040	520	5200	26000	52000	High
40	Product	Item CA	Item CB	Active	470	940	470	4700	23500	47000	Medium
41	Product	Item CC	Item CD	Active	310	620	310	3100	15500	31000	Low
42	Product	Item CE	Item CF	Active	150	300	150	1500	7500	15000	High
43	Product	Item CG	Item CH	Active	490	980	490	4900	24500	49000	Medium
44	Product	Item CI	Item CJ	Active	430	860	430	4300	21500	43000	Low
45	Product	Item CK	Item CL	Active	250	500	250	2500	12500	25000	High
46	Product	Item CM	Item CN	Active	510	1020	510	5100	25500	51000	Medium
47	Product	Item CO	Item CP	Active	350	700	350	3500	17500	35000	Low
48	Product	Item CQ	Item CR	Active	140	280	140	1400	7000	14000	High
49	Product	Item CS	Item CT	Active	530	1060	530	5300	26500	53000	Medium
50	Product	Item CU	Item CV	Active	410	820	410	4100	20500	41000	Low
51	Product	Item CW	Item CX	Active	290	580	290	2900	14500	29000	High
52	Product	Item CY	Item CZ	Active	540	1080	540	5400	27000	54000	Medium
53	Product	Item DA	Item DB	Active	380	760	380	3800	19000	38000	Low
54	Product	Item DC	Item DD	Active	130	260	130	1300	6500	13000	High
55	Product	Item DE	Item DF	Active	550	1100	550	5500	27500	55000	Medium
56	Product	Item DG	Item DH	Active	450	900	450	4500	22500	45000	Low
57	Product	Item DI	Item DJ	Active	270	540	270	2700	13500	27000	High
58	Product	Item DK	Item DL	Active	560	1120	560	5600	28000	56000	Medium
59	Product	Item DM	Item DN	Active	320	640	320	3200	16000	32000	Low
60	Product	Item DO	Item DP	Active	110	220	110	1100	5500	11000	High
61	Product	Item DQ	Item DR	Active	570	1140	570	5700	28500	57000	Medium
62	Product	Item DS	Item DT	Active	440	880	440	4400	22000	44000	Low
63	Product	Item DU	Item DV	Active	260	520	260	2600	13000	26000	High
64	Product	Item DW	Item DX	Active	580	1160	580	5800	29000	58000	Medium
65	Product	Item DY	Item DZ	Active	360	720	360	3600	18000	36000	Low
66	Product	Item EA	Item EB	Active	100	200	100	1000	5000	10000	High
67	Product	Item EC	Item ED	Active	600	1200	600	6000	30000	60000	Medium
68	Product	Item EE	Item EF	Active	480	960	480	4800	24000	48000	Low
69	Product	Item EG	Item EH	Active	300	600	300	3000	15000	30000	High
70	Product	Item EI	Item EJ	Active	620	1240	620	6200	31000	62000	Medium
71	Product	Item EK	Item EL	Active	340	680	340	3400	17000	34000	Low
72	Product	Item EM	Item EN	Active	120	240	120	1200	6000	12000	High
73	Product	Item EO	Item EP	Active	640	1280	640	6400	32000	64000	Medium
74	Product	Item EQ	Item ER	Active	520	1040	520	5200	26000	52000	Low
75	Product	Item ES	Item ET	Active	380	760	380	3800	19000	38000	High
76	Product	Item EU	Item EV	Active	660	1320	660	6600	33000	66000	Medium
77	Product	Item EW	Item EX	Active	460	920	460	4600	23000	46000	Low
78	Product	Item EY	Item EZ	Active	280	560	280	2800	14000	28000	High
79	Product	Item FA	Item FB	Active	680	1360	680	6800	34000	68000	Medium
80	Product	Item FC	Item FD	Active	560	1120	560	5600	28000	56000	Low
81	Product	Item FE	Item FF	Active	320	640	320	3200	16000	32000	High
82	Product	Item FG	Item FH	Active	140	280	140	1400	7000	14000	Medium
83	Product	Item FI	Item FJ	Active	700	1400	700	7000	35000	70000	Low
84	Product	Item FK	Item FL	Active	580	1160	580	5800	29000	58000	High
85	Product	Item FM	Item FN	Active	400	800	400	4000	20000	40000	Medium
86	Product	Item FO	Item FP	Active	160	320	160	1600	8000	16000	Low
87	Product	Item FQ	Item FR	Active	720	1440	720	7200	36000	72000	High
88	Product	Item FS	Item FT	Active	600	1200	600	6000	30000	60000	Medium
89	Product	Item FU	Item FV	Active	420	840	420	4200	21000	42000	Low
90	Product	Item FW	Item FX	Active	180	360	180	1800	9000	18000	High
91	Product	Item FY	Item FZ	Active	740	1480	740	7400	37000	74000	Medium
92	Product	Item GA	Item GB	Active	620	1240	620	6200	31000	62000	Low
93	Product	Item GC	Item GD	Active	440	880	440	4400	22000	44000	High
94	Product	Item GE	Item GF	Active	170	340	170	1700	8500	17000	Medium
95	Product	Item GG	Item GH	Active	760	1520	760	7600	38000	76000	Low
96	Product	Item GI	Item GJ	Active	640	1280	640	6400	32000	64000	High
97	Product	Item GK	Item GL	Active	460	920	460	4600	23000	46000	Medium
98	Product	Item GM	Item GN	Active	190	380	190	1900	9500	19000	Low
99	Product	Item GO	Item GP	Active	780	1560	780	7800	39000	78000	High
100	Product	Item GQ	Item GR	Active	660	1320	660	6600	33000	66000	Medium
101	Product	Item GS	Item GT	Active	480	960	480	4800	24000	48000	Low
102	Product	Item GU	Item GV	Active	200	400	200	2000	10000	20000	High
103	Product	Item GW	Item GX	Active	800	1600	800	8000	40000	80000	Medium
104	Product	Item GY	Item GZ	Active	680	1360	680	6800	34000	68000	Low
105	Product	Item HA	Item HB	Active	500	1000	500	5000	25000	50000	High
106	Product	Item HC	Item HD	Active	220	440	220	2200	11000	22000	Medium
107	Product	Item HE	Item HF	Active	820	1640	820	8200	41000	82000	Low
108	Product	Item HG	Item HH	Active	700	1400	700	7000	35000	70000	High
109	Product	Item HI	Item HJ	Active	520	1040	520	5200	26000	52000	Medium
110	Product	Item HK	Item HL	Active	240	480					

ID	Name	Address		City	State	Zip	Phone			Fax	E-mail	Web
		Street	City				Area	Home	Work			
1	John Doe	123 Main St	Springfield	MA	01101	555-123-4567	555-123-4567	555-123-4567	555-123-4567	555-123-4567	john.doe@example.com	http://www.johndoe.com
2	Jane Smith	456 Elm St	Springfield	MA	01102	555-234-5678	555-234-5678	555-234-5678	555-234-5678	555-234-5678	jane.smith@example.com	http://www.janesmith.com
3	Bob Johnson	789 Oak St	Springfield	MA	01103	555-345-6789	555-345-6789	555-345-6789	555-345-6789	555-345-6789	bob.johnson@example.com	http://www.bobjohnson.com
4	Alice Brown	101 Pine St	Springfield	MA	01104	555-456-7890	555-456-7890	555-456-7890	555-456-7890	555-456-7890	alice.brown@example.com	http://www.alicebrown.com
5	Charlie White	202 Birch St	Springfield	MA	01105	555-567-8901	555-567-8901	555-567-8901	555-567-8901	555-567-8901	charlie.white@example.com	http://www.charliewhite.com
6	Diana Green	303 Cedar St	Springfield	MA	01106	555-678-9012	555-678-9012	555-678-9012	555-678-9012	555-678-9012	diana.green@example.com	http://www.dianagreen.com
7	Frank Black	404 Maple St	Springfield	MA	01107	555-789-0123	555-789-0123	555-789-0123	555-789-0123	555-789-0123	frank.black@example.com	http://www.frankblack.com
8	Grace King	505 Walnut St	Springfield	MA	01108	555-890-1234	555-890-1234	555-890-1234	555-890-1234	555-890-1234	grace.king@example.com	http://www.graceking.com
9	Henry Lee	606 Cherry St	Springfield	MA	01109	555-901-2345	555-901-2345	555-901-2345	555-901-2345	555-901-2345	henry.lee@example.com	http://www.henrylee.com
10	Ivy Hill	707 Elm St	Springfield	MA	01110	555-012-3456	555-012-3456	555-012-3456	555-012-3456	555-012-3456	ivy.hill@example.com	http://www.ivyhill.com
11	Jack Adams	808 Oak St	Springfield	MA	01111	555-123-4567	555-123-4567	555-123-4567	555-123-4567	555-123-4567	jack.adams@example.com	http://www.jackadams.com
12	Karen Baker	909 Pine St	Springfield	MA	01112	555-234-5678	555-234-5678	555-234-5678	555-234-5678	555-234-5678	karen.baker@example.com	http://www.karenbaker.com
13	Leo Clark	1010 Birch St	Springfield	MA	01113	555-345-6789	555-345-6789	555-345-6789	555-345-6789	555-345-6789	leo.clark@example.com	http://www.leoclarke.com
14	Mia Evans	1111 Cedar St	Springfield	MA	01114	555-456-7890	555-456-7890	555-456-7890	555-456-7890	555-456-7890	mia.evans@example.com	http://www.miaevans.com
15	Noah Foster	1212 Maple St	Springfield	MA	01115	555-567-8901	555-567-8901	555-567-8901	555-567-8901	555-567-8901	noah.foster@example.com	http://www.noahfoster.com
16	Olivia Grant	1313 Walnut St	Springfield	MA	01116	555-678-9012	555-678-9012	555-678-9012	555-678-9012	555-678-9012	olivia.grant@example.com	http://www.oliviagrant.com
17	Peter Harris	1414 Cherry St	Springfield	MA	01117	555-789-0123	555-789-0123	555-789-0123	555-789-0123	555-789-0123	peter.harris@example.com	http://www.peterharris.com
18	Quinn King	1515 Elm St	Springfield	MA	01118	555-890-1234	555-890-1234	555-890-1234	555-890-1234	555-890-1234	quinn.king@example.com	http://www.quinnking.com
19	Rachel Lee	1616 Oak St	Springfield	MA	01119	555-901-2345	555-901-2345	555-901-2345	555-901-2345	555-901-2345	rachel.lee@example.com	http://www.rachellee.com
20	Samuel Hill	1717 Pine St	Springfield	MA	01120	555-012-3456	555-012-3456	555-012-3456	555-012-3456	555-012-3456	samuel.hill@example.com	http://www.samuelhill.com
21	Tina Adams	1818 Birch St	Springfield	MA	01121	555-123-4567	555-123-4567	555-123-4567	555-123-4567	555-123-4567	tina.adams@example.com	http://www.tinaadams.com
22	Uma Baker	1919 Cedar St	Springfield	MA	01122	555-234-5678	555-234-5678	555-234-5678	555-234-5678	555-234-5678	uma.baker@example.com	http://www.umbaker.com
23	Victor Clark	2020 Maple St	Springfield	MA	01123	555-345-6789	555-345-6789	555-345-6789	555-345-6789	555-345-6789	victor.clark@example.com	http://www.victorclark.com
24	Wendy Evans	2121 Walnut St	Springfield	MA	01124	555-456-7890	555-456-7890	555-456-7890	555-456-7890	555-456-7890	wendy.evans@example.com	http://www.wendyevans.com
25	Xavier Foster	2222 Cherry St	Springfield	MA	01125	555-567-8901	555-567-8901	555-567-8901	555-567-8901	555-567-8901	xavier.foster@example.com	http://www.xavierfoster.com
26	Yara Grant	2323 Elm St	Springfield	MA	01126	555-678-9012	555-678-9012	555-678-9012	555-678-9012	555-678-9012	yara.grant@example.com	http://www.yaragrant.com
27	Zoe Harris	2424 Oak St	Springfield	MA	01127	555-789-0123	555-789-0123	555-789-0123	555-789-0123	555-789-0123	zoe.harris@example.com	http://www.zoeharris.com
28	Adam King	2525 Pine St	Springfield	MA	01128	555-890-1234	555-890-1234	555-890-1234	555-890-1234	555-890-1234	adam.king@example.com	http://www.adamking.com
29	Bella Lee	2626 Birch St	Springfield	MA	01129	555-901-2345	555-901-2345	555-901-2345	555-901-2345	555-901-2345	bella.lee@example.com	http://www.bellalee.com
30	Chloe Hill	2727 Cedar St	Springfield	MA	01130	555-012-3456	555-012-3456	555-012-3456	555-012-3456	555-012-3456	chloe.hill@example.com	http://www.chloehill.com

Year	Month	Project Name		Project Manager	Project Status			Financials				Notes
		Phase 1	Phase 2		Start	End	Current	Budget	Actual	Variance	Forecast	
2023	Jan	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-01-01	2023-01-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Feb	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-02-01	2023-02-28	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Mar	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-03-01	2023-03-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Apr	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-04-01	2023-04-30	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	May	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-05-01	2023-05-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Jun	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-06-01	2023-06-30	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Jul	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-07-01	2023-07-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Aug	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-08-01	2023-08-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Sep	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-09-01	2023-09-30	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Oct	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-10-01	2023-10-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Nov	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-11-01	2023-11-30	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2023	Dec	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2023-12-01	2023-12-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Jan	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-01-01	2024-01-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Feb	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-02-01	2024-02-28	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Mar	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-03-01	2024-03-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Apr	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-04-01	2024-04-30	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	May	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-05-01	2024-05-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Jun	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-06-01	2024-06-30	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Jul	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-07-01	2024-07-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Aug	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-08-01	2024-08-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Sep	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-09-01	2024-09-30	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Oct	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-10-01	2024-10-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Nov	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-11-01	2024-11-30	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track
2024	Dec	Project A	Project B	John Doe	On Track	At Risk	2024-12-01	2024-12-31	\$100,000	\$100,000	\$0	On Track

Year	Month	Production (kg)		Quality (kg/ha)	Plant Height (cm)			Yield (kg/ha)		Total Yield (kg)	Harvested (%)	Loss (%)
		Actual	Target		Mean	Min	Max	Actual	Target			
2018	Jan	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Feb	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Mar	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Apr	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	May	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Jun	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Jul	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Aug	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Sep	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Oct	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Nov	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2018	Dec	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Jan	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Feb	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Mar	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Apr	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	May	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Jun	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Jul	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Aug	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Sep	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Oct	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Nov	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2019	Dec	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Jan	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Feb	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Mar	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Apr	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	May	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Jun	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Jul	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Aug	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Sep	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Oct	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Nov	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0
2020	Dec	1000	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	100	0

Year	Month	Project Details		Project Description	Project Status			Project Budget		Project Manager	Project Location	Project Type
		Name	ID		Start	End	Progress	Allocated	Spent			
2023	Jan	Project A	001	Project A Description	2023-01-01	2023-01-31	100%	100000	50000	John Doe	New York	Construction
2023	Feb	Project B	002	Project B Description	2023-02-01	2023-02-28	100%	120000	60000	Jane Smith	Los Angeles	Software
2023	Mar	Project C	003	Project C Description	2023-03-01	2023-03-31	100%	80000	40000	Mike Johnson	Chicago	Marketing
2023	Apr	Project D	004	Project D Description	2023-04-01	2023-04-30	100%	90000	45000	Sarah Brown	San Francisco	IT Support
2023	May	Project E	005	Project E Description	2023-05-01	2023-05-31	100%	110000	55000	David Green	Seattle	Research
2023	Jun	Project F	006	Project F Description	2023-06-01	2023-06-30	100%	70000	35000	Emily White	Portland	Operations
2023	Jul	Project G	007	Project G Description	2023-07-01	2023-07-31	100%	130000	65000	Chris Black	Denver	Development
2023	Aug	Project H	008	Project H Description	2023-08-01	2023-08-31	100%	60000	30000	Alex Grey	Phoenix	Design
2023	Sep	Project I	009	Project I Description	2023-09-01	2023-09-30	100%	100000	50000	Rachel Pink	San Diego	Quality Assurance
2023	Oct	Project J	010	Project J Description	2023-10-01	2023-10-31	100%	95000	47500	Kevin Blue	Austin	Project Management
2023	Nov	Project K	011	Project K Description	2023-11-01	2023-11-30	100%	85000	42500	Nancy Yellow	San Antonio	Business Development
2023	Dec	Project L	012	Project L Description	2023-12-01	2023-12-31	100%	115000	57500	Robert Purple	Dallas	Customer Support
2023	Jan	Project M	013	Project M Description	2024-01-01	2024-01-31	100%	105000	52500	Laura Cyan	San Jose	Product Development
2023	Feb	Project N	014	Project N Description	2024-02-01	2024-02-28	100%	98000	49000	James Magenta	San Jose	Product Development
2023	Mar	Project O	015	Project O Description	2024-03-01	2024-03-31	100%	112000	56000	Maria Olive	San Jose	Product Development
2023	Apr	Project P	016	Project P Description	2024-04-01	2024-04-30	100%	88000	44000	Michael Teal	San Jose	Product Development
2023	May	Project Q	017	Project Q Description	2024-05-01	2024-05-31	100%	102000	51000	Olivia Gold	San Jose	Product Development
2023	Jun	Project R	018	Project R Description	2024-06-01	2024-06-30	100%	93000	46500	Patrick Silver	San Jose	Product Development
2023	Jul	Project S	019	Project S Description	2024-07-01	2024-07-31	100%	118000	59000	Sophia Bronze	San Jose	Product Development
2023	Aug	Project T	020	Project T Description	2024-08-01	2024-08-31	100%	82000	41000	Thomas Copper	San Jose	Product Development
2023	Sep	Project U	021	Project U Description	2024-09-01	2024-09-30	100%	108000	54000	Victoria Tin	San Jose	Product Development
2023	Oct	Project V	022	Project V Description	2024-10-01	2024-10-31	100%	96000	48000	William Steel	San Jose	Product Development
2023	Nov	Project W	023	Project W Description	2024-11-01	2024-11-30	100%	114000	57000	Zoe Nickel	San Jose	Product Development
2023	Dec	Project X	024	Project X Description	2024-12-01	2024-12-31	100%	86000	43000	Adam Zinc	San Jose	Product Development
2023	Jan	Project Y	025	Project Y Description	2025-01-01	2025-01-31	100%	104000	52000	Bella Lead	San Jose	Product Development
2023	Feb	Project Z	026	Project Z Description	2025-02-01	2025-02-28	100%	99000	49500	Benjamin Silver	San Jose	Product Development

Year	Month	Production (in units)		Inventory (in units)	Sales (in units)			Production Cost (in \$)		Sales Revenue (in \$)		Profit (in \$)
		Actual	Target		Actual	Target	Actual	Actual	Actual	Actual		
2018	Jan	100	100	50	100	100	1000	1000	1000	1000	0	
2018	Feb	120	120	70	120	120	1200	1200	1200	1200	0	
2018	Mar	150	150	100	150	150	1500	1500	1500	1500	0	
2018	Apr	180	180	130	180	180	1800	1800	1800	1800	0	
2018	May	200	200	150	200	200	2000	2000	2000	2000	0	
2018	Jun	220	220	170	220	220	2200	2200	2200	2200	0	
2018	Jul	250	250	200	250	250	2500	2500	2500	2500	0	
2018	Aug	280	280	230	280	280	2800	2800	2800	2800	0	
2018	Sep	300	300	250	300	300	3000	3000	3000	3000	0	
2018	Oct	320	320	270	320	320	3200	3200	3200	3200	0	
2018	Nov	350	350	300	350	350	3500	3500	3500	3500	0	
2018	Dec	380	380	330	380	380	3800	3800	3800	3800	0	
2019	Jan	400	400	350	400	400	4000	4000	4000	4000	0	
2019	Feb	420	420	370	420	420	4200	4200	4200	4200	0	
2019	Mar	450	450	400	450	450	4500	4500	4500	4500	0	
2019	Apr	480	480	430	480	480	4800	4800	4800	4800	0	
2019	May	500	500	450	500	500	5000	5000	5000	5000	0	
2019	Jun	520	520	470	520	520	5200	5200	5200	5200	0	
2019	Jul	550	550	500	550	550	5500	5500	5500	5500	0	
2019	Aug	580	580	530	580	580	5800	5800	5800	5800	0	
2019	Sep	600	600	550	600	600	6000	6000	6000	6000	0	
2019	Oct	620	620	570	620	620	6200	6200	6200	6200	0	
2019	Nov	650	650	600	650	650	6500	6500	6500	6500	0	
2019	Dec	680	680	630	680	680	6800	6800	6800	6800	0	
2020	Jan	700	700	650	700	700	7000	7000	7000	7000	0	
2020	Feb	720	720	670	720	720	7200	7200	7200	7200	0	
2020	Mar	750	750	700	750	750	7500	7500	7500	7500	0	
2020	Apr	780	780	730	780	780	7800	7800	7800	7800	0	
2020	May	800	800	750	800	800	8000	8000	8000	8000	0	
2020	Jun	820	820	770	820	820	8200	8200	8200	8200	0	
2020	Jul	850	850	800	850	850	8500	8500	8500	8500	0	
2020	Aug	880	880	830	880	880	8800	8800	8800	8800	0	
2020	Sep	900	900	850	900	900	9000	9000	9000	9000	0	
2020	Oct	920	920	870	920	920	9200	9200	9200	9200	0	
2020	Nov	950	950	900	950	950	9500	9500	9500	9500	0	
2020	Dec	980	980	930	980	980	9800	9800	9800	9800	0	

Year	Month	Administrative Expenses			Total Expenses			Total Income			Net Income
		Salaries	Benefits	Other	Salaries	Benefits	Other	Salaries	Benefits	Other	
2010	1	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	2	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	3	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	4	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	5	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	6	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	7	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	8	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	9	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	10	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	11	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2010	12	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	1	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	2	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	3	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	4	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	5	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	6	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	7	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	8	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	9	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	10	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	11	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2011	12	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	1	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	2	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	3	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	4	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	5	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	6	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	7	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	8	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	9	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	10	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	11	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000
2012	12	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000

Year	Month	Project Name / Activity		Description / Details	Budget / Financials			Actuals / Performance			Status
		Code	Phase		Allocated	Spent	Variance	Actual	Target	Completion %	
2023	Jan	001	Phase 1	Initial planning and resource allocation.	10000	10000	0	10000	10000	0	On Track
2023	Feb	001	Phase 2	Design and development of core components.	20000	20000	0	20000	20000	0	On Track
2023	Mar	001	Phase 3	Testing and validation of the system.	15000	15000	0	15000	15000	0	On Track
2023	Apr	001	Phase 4	Deployment and initial user training.	10000	10000	0	10000	10000	0	On Track
2023	May	001	Phase 5	Post-launch monitoring and support.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Jun	001	Phase 6	Final review and project closure.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Jul	001	Phase 7	Documentation and knowledge transfer.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Aug	001	Phase 8	Final reporting and evaluation.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Sep	001	Phase 9	Project completion and handover.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Oct	001	Phase 10	Final project review and lessons learned.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Nov	001	Phase 11	Final project report and archive.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Dec	001	Phase 12	Final project closure and evaluation.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Jan	002	Phase 1	Initiation and planning for Project B.	12000	12000	0	12000	12000	0	On Track
2023	Feb	002	Phase 2	Analysis and design for Project B.	18000	18000	0	18000	18000	0	On Track
2023	Mar	002	Phase 3	Development and testing for Project B.	22000	22000	0	22000	22000	0	On Track
2023	Apr	002	Phase 4	Deployment and user training for Project B.	15000	15000	0	15000	15000	0	On Track
2023	May	002	Phase 5	Post-launch support for Project B.	8000	8000	0	8000	8000	0	On Track
2023	Jun	002	Phase 6	Final review and closure for Project B.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Jul	002	Phase 7	Documentation and knowledge transfer for Project B.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Aug	002	Phase 8	Final reporting and evaluation for Project B.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Sep	002	Phase 9	Project completion and handover for Project B.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Oct	002	Phase 10	Final project review and lessons learned for Project B.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Nov	002	Phase 11	Final project report and archive for Project B.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Dec	002	Phase 12	Final project closure and evaluation for Project B.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Jan	003	Phase 1	Initiation and planning for Project C.	10000	10000	0	10000	10000	0	On Track
2023	Feb	003	Phase 2	Analysis and design for Project C.	15000	15000	0	15000	15000	0	On Track
2023	Mar	003	Phase 3	Development and testing for Project C.	20000	20000	0	20000	20000	0	On Track
2023	Apr	003	Phase 4	Deployment and user training for Project C.	12000	12000	0	12000	12000	0	On Track
2023	May	003	Phase 5	Post-launch support for Project C.	7000	7000	0	7000	7000	0	On Track
2023	Jun	003	Phase 6	Final review and closure for Project C.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Jul	003	Phase 7	Documentation and knowledge transfer for Project C.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Aug	003	Phase 8	Final reporting and evaluation for Project C.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Sep	003	Phase 9	Project completion and handover for Project C.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Oct	003	Phase 10	Final project review and lessons learned for Project C.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Nov	003	Phase 11	Final project report and archive for Project C.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track
2023	Dec	003	Phase 12	Final project closure and evaluation for Project C.	5000	5000	0	5000	5000	0	On Track

Date	Time	Description of Work			Hours Worked			Rate			Total
		Start	Stop	Activity	Actual	Standard	Rate	Actual	Standard	Rate	
1/1/2020	08:00	08:00	09:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	09:00	09:00	10:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	10:00	10:00	11:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	11:00	11:00	12:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	12:00	12:00	13:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	13:00	13:00	14:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	14:00	14:00	15:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	15:00	15:00	16:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	16:00	16:00	17:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	17:00	17:00	18:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	18:00	18:00	19:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	19:00	19:00	20:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	20:00	20:00	21:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	21:00	21:00	22:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	22:00	22:00	23:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/1/2020	23:00	23:00	00:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	08:00	08:00	09:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	09:00	09:00	10:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	10:00	10:00	11:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	11:00	11:00	12:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	12:00	12:00	13:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	13:00	13:00	14:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	14:00	14:00	15:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	15:00	15:00	16:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	16:00	16:00	17:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	17:00	17:00	18:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	18:00	18:00	19:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	19:00	19:00	20:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	20:00	20:00	21:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	21:00	21:00	22:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	22:00	22:00	23:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
1/2/2020	23:00	23:00	00:00	Site Preparation	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00

Date	Time	Project Name / Job Details		Location / Site	Weather Conditions			Wind Speed	Wind Direction	Temperature	Humidity	Pressure	Notes
		Activity	Material		Temp	Humidity	Pressure						
2023-10-26	08:00	Site Preparation	Excavation	Site A	Clear	20	15	10	1010	60%	1010	Work started on site preparation.	
2023-10-26	09:00	Foundation Work	Concrete Pour	Site A	Clear	22	15	10	1010	60%	1010	Completed foundation concrete pour.	
2023-10-26	10:00	Structural Work	Steel Erection	Site A	Clear	24	15	10	1010	60%	1010	Completed steel erection for the main structure.	
2023-10-26	11:00	Roofing Work	Roof Truss Installation	Site A	Clear	26	15	10	1010	60%	1010	Completed roof truss installation.	
2023-10-26	12:00	Interior Work	Wall Framing	Site A	Clear	28	15	10	1010	60%	1010	Completed wall framing for the interior.	
2023-10-26	13:00	Exterior Work	Window Installation	Site A	Clear	30	15	10	1010	60%	1010	Completed window installation.	
2023-10-26	14:00	Site Cleanup	Debris Removal	Site A	Clear	32	15	10	1010	60%	1010	Completed site cleanup and debris removal.	
2023-10-26	15:00	Final Inspection	Quality Check	Site A	Clear	34	15	10	1010	60%	1010	Completed final inspection of the project.	
2023-10-26	16:00	Project Summary	Report Writing	Office	Clear	36	15	10	1010	60%	1010	Completed project summary report.	
2023-10-26	17:00	Site Visit	Client Meeting	Site A	Clear	38	15	10	1010	60%	1010	Completed site visit and client meeting.	
2023-10-26	18:00	Project Review	Team Meeting	Office	Clear	40	15	10	1010	60%	1010	Completed project review meeting.	
2023-10-26	19:00	Site Preparation	Excavation	Site B	Clear	20	15	10	1010	60%	1010	Work started on site preparation for Site B.	
2023-10-26	20:00	Foundation Work	Concrete Pour	Site B	Clear	22	15	10	1010	60%	1010	Completed foundation concrete pour for Site B.	
2023-10-26	21:00	Structural Work	Steel Erection	Site B	Clear	24	15	10	1010	60%	1010	Completed steel erection for the main structure of Site B.	
2023-10-26	22:00	Roofing Work	Roof Truss Installation	Site B	Clear	26	15	10	1010	60%	1010	Completed roof truss installation for Site B.	
2023-10-26	23:00	Interior Work	Wall Framing	Site B	Clear	28	15	10	1010	60%	1010	Completed wall framing for the interior of Site B.	
2023-10-26	00:00	Exterior Work	Window Installation	Site B	Clear	30	15	10	1010	60%	1010	Completed window installation for Site B.	
2023-10-26	01:00	Site Cleanup	Debris Removal	Site B	Clear	32	15	10	1010	60%	1010	Completed site cleanup and debris removal for Site B.	
2023-10-26	02:00	Final Inspection	Quality Check	Site B	Clear	34	15	10	1010	60%	1010	Completed final inspection of the project for Site B.	
2023-10-26	03:00	Project Summary	Report Writing	Office	Clear	36	15	10	1010	60%	1010	Completed project summary report for Site B.	
2023-10-26	04:00	Site Visit	Client Meeting	Site B	Clear	38	15	10	1010	60%	1010	Completed site visit and client meeting for Site B.	
2023-10-26	05:00	Project Review	Team Meeting	Office	Clear	40	15	10	1010	60%	1010	Completed project review meeting for Site B.	

Year	Month	Description of the Event		Location	Number of Participants			Total	Percentage	Total	Percentage
		Male	Female		Male	Female	Male				
1998	Jan	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Feb	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Mar	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Apr	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	May	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Jun	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Jul	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Aug	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Sep	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Oct	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Nov	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1998	Dec	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Jan	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Feb	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Mar	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Apr	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	May	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Jun	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Jul	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Aug	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Sep	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Oct	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Nov	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
1999	Dec	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Jan	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Feb	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Mar	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Apr	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	May	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Jun	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Jul	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Aug	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Sep	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Oct	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Nov	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	
2000	Dec	100	100	100	100	100	200	100%	100%	100%	

